

# MENUJU AKSI KEBERLANJUTAN YANG UNGGUL







# MENUJU AKSI KEBERLANJUTAN YANG UNGGUL

“  
Manusia diberi  
amanah sebagai  
khalifah di dunia  
ini sehingga wajib  
memakmurkan  
bumi.”

Tahun 2024 merupakan tahun yang istimewa untuk PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI). BSI telah mencanangkan untuk “*Level Up To The Next Journey*” setelah melewati 3 (tiga) tahun pertama dengan berbagai pencapaian yang patut disyukuri. *Level up* ini dilakukan dari berbagai sisi baik kompetensi dan kapabilitas pegawai serta kinerja keuangan BSI agar dapat bersaing di pasar global. Setelah berhasil memperkuat fondasi dengan bersinergi, kini BSI mulai melaju, berkembang, dan bergerak maju demi memberikan kontribusi bagi negeri. BSI telah menetapkan visi keberlanjutan, yaitu menjadi

“*The Best Global Islamic Bank Based on Implementation of Sustainable Finance.*” Dalam perjalanan menuju keberlanjutan, BSI terus melangkah melalui kolaborasi dan inovasi untuk menjadi sahabat finansial, sahabat sosial, dan sahabat spiritual bagi nasabah dan masyarakat. Bagi kami, keberlanjutan sesungguhnya merupakan aksi mulia yang ditujukan untuk mencapai kemaslahatan bersama.

BSI mengambil peran aktif dalam implementasi keuangan berkelanjutan yang sejalan dengan *Maqashid Syariah*. Dengan jaringan bisnis yang kuat serta kapabilitas dalam menyediakan berbagai produk dan jasa keuangan, BSI dapat berperan dalam penerapan keuangan berkelanjutan yang selaras dengan prinsip syariah dengan membantu nasabah menjalankan aktivitas bisnis yang berkelanjutan dan memberikan dampak positif terhadap lingkungan dan sosial.

Tahun 2024, BSI terus meningkatkan pertumbuhan bisnis keuangan berkelanjutan dan tata kelola Perusahaan terkait *Environmental, Social, & Governance (ESG)*, diantaranya dengan penetapan visi keberlanjutan, penguatan kerangka kerja, pembentukan unit ESG & Data Protection. Hal ini menjadi momentum bagi BSI untuk “Menuju Aksi Keberlanjutan yang Unggul.” Dengan langkah strategis ini, BSI berkomitmen untuk terus memperkuat integrasi prinsip keberlanjutan dalam setiap aspek bisnis operasionalnya, menciptakan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan, serta menjaga tata kelola perusahaan yang transparan dan bertanggung jawab, guna mewujudkan masa depan yang berkelanjutan dan berdaya saing tinggi.

# Pencapaian Penting

## Milestone ESG BSI

2021

- Langkah awal bersinergi bersama mempersembahkan beragam layanan dan produk perbankan syariah di bawah entitas PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI).

2022

- Penetapan Visi dan Misi Keberlanjutan.
- Implementasi *Sustainability KPI*.
- Melaksanakan *ESG Scoring* sebagai bagian dari pengajuan pembiayaan.
- Program *Green Campaign* dan *Eco-Lifestyle*.

2023

- Pembangunan *Green Building Landmark* BSI Aceh.
- Pelaporan data Taksonomi Hijau Indonesia untuk 450 debitur terbesar.

2024

- Peningkatan aktivitas *Green Campaign* (115 *Electric Vehicle*, 6 Unit *Charging Station* dan 1 (satu) *Green Building Landmark* Aceh Certification).
- Dibentuknya *ESG Group*.
- Pengembangan *Digital Carbon Tracking* untuk mendapatkan *baseline* emisi karbon.
- Penerbitan Sukuk Mudharabah Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I BSI Tahap I Tahun 2024.

### ESG RISK RATING BERDASARKAN SUSTAINALYTICS



SUSTAINALYTICS  
a Morningstar company

27,3

MEDIUM RISK

### ACGS



BSI telah menerapkan sebesar lebih dari 80% praktik tata kelola yang telah mengadopsi pada prinsip-prinsip yang diatur dalam ASEAN *Corporate Governance Scorecard* (ACGS).

### CGPI



Sangat Terpercaya

### BLOOMBERG

**Bloomberg**

3,9

PERINGKAT  
4 GLOBAL  
ISLAMIC  
BANK

### SUSTAINABLE BANKING ASSESSMENT (SUSBA)

"1 dari 39 Bank di ASEAN"

yang berpartisipasi dalam Sustainable Banking Assessment (SUSBA)

Dedikasi BSI terhadap keberlanjutan ditunjukkan dengan partisipasi BSI sebagai salah satu dari 39 bank di kawasan ASEAN dalam SUSBA.

Keterlibatan ini bukan hanya mengukuhkan komitmen BSI dalam mengembangkan praktik-praktik yang mendukung keberlanjutan finansial dan ekologis, tetapi juga memosisikan BSI sebagai pelopor inisiatif keuangan berkelanjutan di kawasan ASEAN.

Pada tahun 2024, terdapat 3 (tiga) indikator yang mengalami peningkatan yaitu pada indikator *Public Statements on Specific Sectors*, *Assessing E&S Risks in Client & Transaction Approvals* dan *Disclosure of E&S Risk Exposure and Targets*.

## Kinerja 3 (Tiga) Pilar Strategi



# Daftar Isi

## Menuju Aksi Keberlanjutan yang Unggul

### Pencapaian Penting

### Daftar Isi

### Tentang Laporan

Proses Penentuan Topik Material	09
Pengelolaan Topik Material	10

### Strategi Keberlanjutan

Penjelasan Strategi Keberlanjutan	14
<i>Policy Commitment</i>	25
Proses untuk Memulihkan Dampak Negatif	28

### Ikhtisar Kinerja Keberlanjutan

Kinerja Aspek Ekonomi	32
Kinerja Aspek Lingkungan Hidup	34
Kinerja Aspek Sosial	36



## Profil Perusahaan

Visi, Misi, dan Nilai Keberlanjutan	40
Identitas Perusahaan	44
Skala Perusahaan	46
Informasi Mengenai Pegawai Wilayah Operasional	46
Produk, Layanan dan Kegiatan Usaha yang Dijalankan	51
Rantai Pasok	52
Entitas Hilir dan dan Relasi Bisnis Lainnya	52
Keanggotaan Asosiasi	52
Perubahan Perusahaan yang Bersifat Signifikan pada Organisasi	53

## Penjelasan Direksi

Mewujudkan Visi Keberlanjutan BSI: <i>The Best Global Islamic Bank Based On Sustainable Finance</i>	55
Penerapan Keuangan Berkelanjutan BSI	56
Tanggung Jawab Laporan Keberlanjutan	60



## Tata Kelola

Struktur dan Komposisi Tata Kelola	64
<i>Conflict of Interest</i>	65
Nominasi dan Seleksi Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi	66
Penilaian Kinerja Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi	66
Kebijakan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi	67
Aktivitas Lobi dan Kontribusi Politik	68
Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU), Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPSPM)	68
Tata Kelola Keberlanjutan	68
Penanggung Jawab Penerapan Keuangan Berkelanjutan	68
Pengembangan Kompetensi Terkait Keuangan Berkelanjutan	71
Manajemen Risiko atas Penerapan Keuangan Berkelanjutan	77
Hubungan dengan Pemangku Kepentingan	80
Permasalahan Terhadap Penerapan Keuangan Berkelanjutan	81



## Kinerja Keberlanjutan

Kegiatan Membangun Budaya Keberlanjutan	84
Kinerja Ekonomi	85
Perbandingan Target dan Kinerja Produksi, Portofolio, Target Pembiayaan, atau Investasi, Pendapatan dan Laba Rugi	85
Perbandingan Target dan Kinerja Portofolio, Target Pembiayaan, atau Investasi Pada Instrumen Keuangan atau Proyek yang Sejalan dengan Keuangan Berkelanjutan	87
Meningkatkan Ekosistem Islam	95
Nilai Ekonomi Langsung yang Dihasilkan dan Didistribusikan	95
Kewajiban Program Pensiun Manfaat Pasti dan Program Pensiun Lainnya	96
Bantuan Finansial dari Pemerintah	96
Praktik Pengadaan Barang dan Jasa	97
Anti Korupsi	98
Kinerja Lingkungan Hidup	103
Aspek Umum	103
Aspek Material	103
Aspek Energi	103
Aspek Air	106



Aspek Keanekaragaman Hayati	108
Aspek Emisi	108
Aspek Limbah dan Efluen	112
Aspek Pengaduan Terkait Lingkungan Hidup	114
Kinerja Sosial	114
Komitmen untuk Memberikan Layanan atas Produk dan/ atau Jasa yang Setara Kepada Konsumen	114
Aspek Ketenagakerjaan	118
Aspek Masyarakat	132
Privasi dan Keamanan Data Nasabah	139
Tanggung Jawab Pengembangan Produk dan/atau Jasa Keberlanjutan	141
Inovasi dan Pengembangan Produk/Jasa Keuangan Berkelanjutan	141
Produk/Jasa yang Sudah Dievaluasi Keamanannya Bagi Pelanggan	141
Dampak Produk/Jasa	141
Jumlah Produk yang Ditarik Kembali	142
Survei Kepuasan Pelanggan Terhadap Produk dan/atau Jasa	142



Verifikasi Tertulis dari Pihak Independen	142
Lembar Umpan Balik	143
Tanggapan Terhadap Umpan Balik Laporan Keberlanjutan Tahun 2023	144
Daftar Pengungkapan Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017	144
Indeks Isi Consolidated Set of GRI Standard	146
Indeks Sustainability Accounting Standard Board (SASB) Standards Commercial Bank	152
Tautan Standar GRI dengan TPB	153





# TENTANG LAPORAN

[GRI 2-2, 2-3, 2-4]

# 01»



Laporan Keberlanjutan yang diterbitkan oleh BSI tahun 2024 mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/SEOJK.04/2021 Tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik. Laporan ini juga disusun sesuai dengan (*"in accordance to"*) Consolidated GRI Standards 2021 serta berpedoman pada GRI G4 Sector Disclosures Financial Services, International Financial Reporting Standards (IFRS) S1 dan S2, ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) dan Sustainability Accounting Standards Board (SASB) Standards.

Laporan Keberlanjutan BSI tahun 2024 menyajikan informasi yang berasal dari kantor pusat di Jakarta dan semua cabang yang tersebar di wilayah Indonesia. BSI tidak memiliki entitas anak sehingga Laporan Keberlanjutan ini mencakup entitas BSI saja sebagaimana entitas dalam Laporan Keuangan.

Laporan ini diterbitkan oleh BSI setiap tahun bersamaan dengan diterbitkannya Laporan Tahunan Bank. Periode pelaporan pada laporan ini yaitu sejak 1 Januari sampai 31 Desember 2024, sesuai dengan periode Laporan Keuangan BSI. Pada Laporan Keberlanjutan ini tidak terdapat informasi yang disajikan kembali. Laporan ini dipublikasikan pada 23 Maret 2025.

Informasi lebih lanjut yang bisa didapatkan mengenai laporan ini, para pemangku kepentingan dapat menghubungi kontak di bawah ini.



**Rima Dwi Permatasari**

**Senior Vice President  
Environmental, Social, & Governance Group**

**PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI)**

Head Office

Gedung The Tower  
Jl. Gatot Subroto No. 27 Kelurahan Karet Semanggi,  
Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12930

Telepon : +62 21 30405999

Fax : +62 21 30421888

Email : [esg.group@bankbsi.co.id](mailto:esg.group@bankbsi.co.id)

# Proses Penentuan Topik Material [GRI 3-1, 3-2]

Berdasarkan hasil identifikasi, evaluasi dan telaah yang telah dilakukan oleh Manajemen BSI bersama *stakeholder* dan ahli/*expert*, serta telah mendapat persetujuan dari Direksi Bank, diputuskan bahwa topik material BSI di tahun 2024 yaitu kinerja ekonomi, portofolio produk dan privasi nasabah. Berbeda dengan topik material di tahun 2023 yaitu kinerja ekonomi, portofolio produk, kesehatan dan keselamatan kerja, serta pelatihan dan pendidikan. Pada tahun 2024, terkait kesehatan dan keselamatan kerja BSI telah memiliki mekanisme K3 yang baik. Mekanisme penerapan K3 BSI telah tercantum dalam Standar Prosedur Operasional Human Capital dan Peraturan Perusahaan Bank Syariah Indonesia yang selalu diperbarui sesuai ketentuan perundang-undangan. Demikian pula dengan pelatihan dan

pendidikan, pada tahun 2024 BSI sudah memiliki kompetensi sumber daya manusia yang telah dibutuhkan melalui pelaksanaan pelatihan dan pendidikan yang baik yang telah dilakukan. Privasi nasabah menjadi topik material yang ditambahkan di tahun 2024, karena terdapat potensi risiko terkait kesalahan maupun kelalaian oleh BSI dalam pemrosesan data pribadi nasabah. Namun, BSI senantiasa melakukan pengelolaan risiko tersebut dengan baik, agar tidak terdapat kesalahan maupun kelalaian oleh BSI dalam pemrosesan data pribadi nasabah.

Proses penentuan topik material telah melewati tahapan-tahapan yaitu:



Topik Material	Isu Utama	Pemangku Kepentingan yang Terdampak	Alasan Bersifat Material	TPB
Kinerja Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nilai ekonomi langsung yang dihasilkan dan didistribusikan oleh BSI</li> <li>• Implikasi finansial serta risiko dan peluang lain akibat dari perubahan iklim</li> <li>• Kewajiban program pensiun manfaat pasti dan program pensiun lainnya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemegang saham</li> <li>• Pegawai</li> </ul>	Kinerja ekonomi BSI yang tumbuh positif selama tahun 2024 merupakan wujud nyata komitmen BSI dalam mengelola aspek ekonomi dengan baik dan konsisten. Oleh karenanya, BSI harus terus mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhan kinerja ekonominya agar dapat tumbuh secara berkelanjutan di masa yang akan datang.	
Portofolio Produk dan Jasa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase dari portofolio untuk lini bisnis menurut wilayah, menurut ukuran dan menurut sektor</li> <li>• Nilai moneter dari produk dan layanan yang dirancang untuk memberikan keuntungan sosial yang spesifik untuk setiap lini bisnis</li> <li>• Nilai moneter dari produk dan layanan yang dirancang untuk memberikan keuntungan lingkungan yang spesifik untuk setiap lini bisnis.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemegang saham</li> <li>• Pegawai</li> <li>• Nasabah</li> </ul>	Portofolio produk menggambarkan komitmen BSI dalam menerapkan keuangan berkelanjutan. Di tahun 2024, BSI memberikan dampak positif bagi seluruh pemangku kepentingan dengan meluncurkan <i>Sustainability Sukuk</i> yang merupakan sukuk yang dikhususkan dalam mendanai kegiatan yang berfokus pada tujuan keberlanjutan.	

Topik Material	Isu Utama	Pemangku Kepentingan yang Terdampak	Alasan Bersifat Material	TPB
Privasi Nasabah	Pembahasan terkait pengaduan nasabah tentang pelanggaran privasi dan hilangnya data nasabah.	Nasabah	Privasi nasabah merupakan wujud komitmen nyata BSI dalam menjaga dan melindungi data nasabah dari serangan pihak yang tidak bertanggungjawab. Pengelolaan privasi nasabah dengan baik merupakan suatu bentuk komitmen Bank untuk meningkatkan kepercayaan dan reputasi Bank bagi seluruh pemangku kepentingan.	

## Pengelolaan Topik Material [GRI 3-3]

### Kinerja Ekonomi

BSI berkomitmen untuk senantiasa melakukan pengelolaan kinerja ekonomi dengan baik. Komitmen BSI terkait pengelolaan kinerja ekonomi dituangkan ke dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) yang disusun dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang dapat mempengaruhi kinerja dan tujuan jangka panjang Bank. Pengelolaan kinerja ekonomi yang baik, akan memberikan dampak positif jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan BSI terutama dalam hal peningkatan kepercayaan dan reputasi Bank di hadapan para pemegang saham.

Evaluasi efektivitas dari penerapan kinerja ekonomi BSI dilakukan melalui penilaian ketercapaian target yang dituangkan dalam RBB dengan realisasinya selama tahun 2024. Pihak yang bertanggungjawab atas implementasi kinerja ekonomi BSI yaitu Strategic Planning & Performance Management Group.

### Portofolio Produk dan Jasa

Dalam menjalankan aktivitas bisnis, BSI senantiasa meningkatkan upaya dalam menerapkan prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan. Hal ini diwujudkan dengan penyaluran pembiayaan pada Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan (KUBL) dan untuk menunjang prinsip inklusif yaitu pada Kegiatan Usaha Berwawasan Sosial (KUBS). Pada tahun 2024, BSI telah menyalurkan pembiayaan pada sektor UMKM sebesar Rp52,4 triliun dan pada Kriteria Kegiatan Usaha Berkelanjutan (KKUB) sebesar Rp66,5 triliun. Penyaluran pembiayaan ini telah memberikan dampak positif pada peningkatan usaha di sektor UMKM dan Kegiatan Usaha Berkelanjutan.

Komitmen pembiayaan pada sektor UMKM dan Kegiatan Usaha Berkelanjutan telah dituangkan dalam Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) yang dievaluasi ketercapaiannya setiap tahun. Dalam RAKB telah dituangkan kegiatan prioritas 1 (satu) tahun dan 5 (lima) tahun.

Pada tahun 2024, BSI juga telah meluncurkan *Sustainability Sukuk* yang merupakan sukuk yang dikhususkan dalam mendanai kegiatan yang berfokus pada tujuan keberlanjutan. *Sustainability Sukuk* yang diluncurkan oleh BSI di tahap 1 (satu) mendapat antusias besar dari pasar hingga mencapai *oversubscribed* sebanyak 3 (tiga) kali. BSI juga telah memiliki BSI Deposito Wakaf yang merupakan produk investasi yang ditawarkan oleh BSI yang menggabungkan konsep deposito dengan prinsip wakaf. Produk ini bertujuan untuk memfasilitasi nasabah yang ingin berinvestasi sambil tetap memberikan dampak positif bagi masyarakat melalui wakaf, yang dalam Islam dianggap sebagai amal jariyah (amal yang pahalanya terus mengalir).

### Privasi Nasabah

Perkembangan teknologi yang kian pesat, memberikan dampak positif berupa kemudahan bagi seluruh pihak dalam mengakses hal apapun. Namun, di sisi lain hal tersebut juga dapat berpotensi memberikan dampak negatif terhadap kerahasiaan data Perusahaan apabila tidak dikelola dengan baik. Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (PDP) telah berlaku efektif 17 Oktober 2024, mewajibkan Pengendali Data Pribadi, Prosesor Data Pribadi dan pihak lain yang terkait dengan pemrosesan

data pribadi termasuk BSI untuk mengimplementasikan perlindungan data pribadi, baik dalam ruang lingkup produk, layanan dan aktivitas operasionalnya. BSI sebagai bagian dari industri perbankan nasional, konglomerasi keuangan Mandiri group dengan jaringan global mempunyai peranan penting untuk memastikan penerapan PDP atas seluruh produk jasa dan layanan yang digunakan baik oleh nasabah, pegawai, maupun seluruh mitra *stakeholdernya*.

Dalam era digital yang semakin berkembang, keamanan dan kerahasiaan Data Pribadi menjadi perhatian utama. BSI memiliki tanggung jawab yang besar dalam mempersiapkan kepatuhan terhadap prinsip dan ketentuan Pelindungan Data Pribadi (PDP) yang meliputi informasi identitas, informasi keuangan, riwayat transaksi dan data pribadi lainnya yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi individu, sesuai dengan visi dan misi BSI.

Pelindungan Data Pribadi tidak hanya penting untuk menjaga kepercayaan nasabah, tetapi juga merupakan kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh BSI sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta pemenuhan aspek *maqashid syariah*. Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) yang telah diberlakukan di Indonesia dan berbagai Negara lain menekankan pentingnya penerapan langkah-langkah pelindungan Data Pribadi yang ketat untuk mencegah penyalahgunaan, pencurian dan pelanggaran Data Pribadi.

BSI menyadari bahwa kegagalan dalam melindungi Data Pribadi nasabah dapat mengakibatkan risiko finansial dan risiko operasional yang signifikan, merusak reputasi dan berpotensi menimbulkan sanksi hukum. Oleh karena itu, BSI telah memiliki kebijakan internal sebagai wujud nyata penerapan standar prosedur yang komprehensif dan terintegrasi dalam tata kelola Pelindungan Data Pribadi.

Dalam rangka menjalankan tata kelola Pelindungan Data Pribadi dimaksud, maka Manajemen BSI telah membentuk unit kerja Pejabat Pelindungan Data Pribadi pada bulan Juni 2024. Unit kerja tersebut memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain:

1. Memantau dan memastikan kepatuhan Bank terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terkait aspek Pelindungan Data Pribadi, baik sebagai Pengendali Data Pribadi atau Prosesor Data Pribadi.
2. Merencanakan, menyusun, dan mengembangkan strategi termasuk di dalamnya terkait tata kelola implementasi Pelindungan Data Pribadi bersama-sama dengan Unit Kerja Data yang membawahkan fungsi Kepatuhan, Risk Management dan Unit Kerja terkait.
3. Berkoordinasi dan bertindak sebagai narahubung bagi Bank untuk isu yang berkaitan dengan aspek Pelindungan Data Pribadi.

4. Memberikan rekomendasi dan saran kepada unit, pejabat, atau pihak yang bertanggung jawab dalam keamanan pemrosesan Data Pribadi yang diproses oleh Bank sebagai Pengendali, Prosesor atau Pengendali Bersama Data Pribadi agar penyelenggaraan keamanan pemrosesan Data Pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sesuai Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, BSI sebagai Pengendali Data Pribadi berkewajiban untuk memastikan pengumpulan Data Pribadi dilakukan secara terbatas dan spesifik, sah secara hukum, dan transparan. Pemrosesan Data Pribadi harus dilakukan sesuai dengan tujuannya dan dilakukan dengan menjamin hak Subjek Data Pribadi.

Persetujuan adalah salah satu dasar pemrosesan Data Pribadi. Oleh karena itu untuk mendukung salah satu fokus strategi bisnis BSI, maka *form consent* nasabah telah tersedia di dalam salah satu *channel* digital yaitu Byond.

Sebagai bagian dari transparansi dalam Tata Kelola Pelindungan Data Pribadi, BSI telah menyusun Kebijakan Privasi atau *Privacy Notice* yang memuat informasi tentang pemrosesan Data Pribadi yang dilakukan oleh BSI, antara lain:

1. Identifikasi data pribadi yang diproses
2. Analisis tujuan pengumpulan data
3. Pihak-pihak yang terlibat di dalam pemrosesan data pribadi
4. Penentuan jangka waktu retensi
5. Identifikasi risiko
6. Keamanan siber dan penanganan insiden
7. Hak-hak subjek data
8. Peninjauan dan pembaharuan
9. Pilihan saluran publikasi
10. Kontak informasi

Kebijakan Privasi tersebut dapat diakses di laman *website corporate* BSI [www.bankbsi.co.id](http://www.bankbsi.co.id)

Penguatan SDM untuk mendukung Tata Kelola Pelindungan Data Pribadi dilakukan dengan melaksanakan pelatihan/*training* untuk seluruh unit kerja yang terlibat di dalam Tata Kelola tersebut. Selain itu, pelatihan juga diberikan kepada pegawai baru BSI yang mengikuti Officer Development Program (ODP) pada bulan Desember 2024 sebanyak 141 pegawai. Selain pelatihan, maka kegiatan sosialisasi *awareness* secara berkala dilakukan kepada *change agent* melalui kegiatan Taujih Pekan, video AKHLAK bertema Jaga Privasi, Lindungi Data Pribadi, dan juga poster Kebijakan Privasi. Sosialisasi *awareness* kepada nasabah juga dilaksanakan melalui beragam media, antara lain melalui *customer gathering*, informasi produk jasa Bank, akun media sosial yang dikelola oleh Bank dan aktivitas operasional yang dijalankan.



# STRATEGI KEBERLANJUTAN

# 02 »



# Penjelasan

## Strategi Keberlanjutan [OJK A.1, FS1, GRI 2-22, IFRS S1-STRATEGY, IFRS S2-STRATEGY, IFRS S1-METRIC AND TARGET, IFRS S2-METRIC AND TARGET, IFRS S1-RISK MANAGEMENT, IFRS S2-RISK MANAGEMENT]

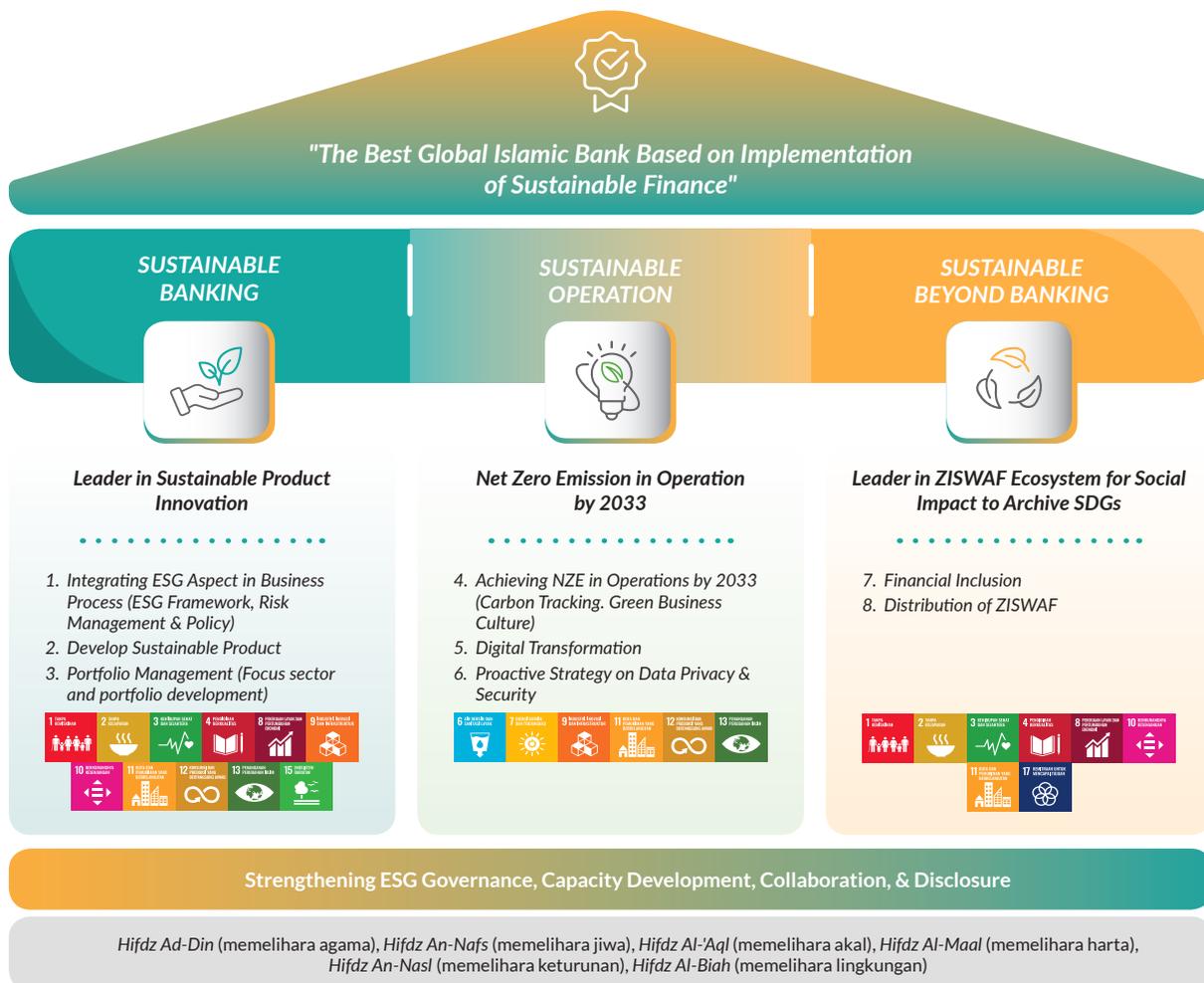
Keberlanjutan menjadi salah satu tujuan BSI. Sebagai bank syariah, BSI juga memiliki tanggung jawab untuk melindungi lingkungan dan memberikan manfaat sosial untuk masa depan. Hal ini sesuai dengan *Maqashid Syariah* yang meliputi *Hifdz Ad-Din* (menjaga agama), *Hifdz An-Nafs* (menjaga jiwa), *Hifdz Al'Aql* (menjaga akal), *Hifdz Al-Maal* (menjaga kekayaan), *Hifdz An-Nasb* (menjaga anak) dan *Hifdz Al-Bi'ah* (menjaga lingkungan).

Sebagai bentuk komitmen BSI dalam menjalankan praktik keberlanjutan yang sejalan dengan *Maqashid Syariah*, BSI telah melakukan penguatan struktur tata kelola keberlanjutan dengan membentuk *Environmental, Social, & Governance (ESG) Group* yang berada di bawah supervisi Wakil Direktur Utama sesuai dalam Surat Keputusan Direksi No.04/239-KEP/DIR tentang Pembentukan Struktur Organisasi *Environmental, Social, & Governance (ESG) Group*, serta menetapkan *ESG Sub-Committee* berada di bawah *Risk Management Committee*. Penguatan tata kelola juga dilakukan dengan penyusunan dan penerbitan Standar Prosedur Operasional (SPO) Keuangan Berkelanjutan, serta penyusunan

dan penerbitan *ESG Guiding Principle*. BSI juga memperkuat tata kelola yang dilakukan dengan mengembangkan kerangka kerja keuangan berkelanjutan yang didasarkan pada visi keberlanjutan BSI yaitu "*The Best Global Islamic Bank Based on Implementation of Sustainable Finance*." Kerangka kerja keuangan berkelanjutan terdiri dari 3 (tiga) pilar strategi yaitu *Sustainable Banking*, *Sustainable Operation* dan *Sustainable Beyond Banking*.

Terkait dengan pilar *sustainable banking*, BSI memiliki komitmen menjadi *leader in sustainable product innovation*. Selanjutnya, pada pilar *sustainable operation* BSI memiliki komitmen untuk mencapai *net zero emission in operation by 2033*. Pada pilar *sustainable beyond banking*, komitmen BSI yaitu menjadi *leader in ZISWAF ecosystem for social impact to archive SDGs*.

Melanjutkan kesuksesan di tahun 2024, BSI berkomitmen mengadopsi standar internasional, sebagaimana disebutkan dalam POJK No. 51 Tahun 2017, yaitu *Principles for Responsible Banking (PRB)* dan menjadi anggota *United Nations Environment Programme Finance Initiative (UNEP FI)* pada tahun 2025.





BSI telah mengembangkan *Roadmap* ESG tahun 2021 sampai 2025 untuk mengimplementasikan Visi dan Misi Keberlanjutan sebagai berikut:

2021	2022	2023	2024	2025
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Portofolio <i>Green</i> minimal Rp4,36 Triliun</li> <li>2. 5% pegawai mendapatkan pelatihan <i>sustainable finance awareness</i> dan 5% pegawai unit bisnis dan rekanan mengikuti pelatihan mitigasi risiko lingkungan</li> <li>3. Tersedianya prosedur <i>sustainable finance</i></li> <li>4. Terlaksananya 1 (satu) sub program <i>Eco Life Style</i></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Portofolio <i>Green</i> minimal Rp7 Triliun</li> <li>2. 60% pegawai mendapatkan pelatihan <i>sustainable finance awareness</i> dan 10% pegawai unit bisnis dan rekanan mengikuti pelatihan mitigasi risiko lingkungan</li> <li>3. Mengikuti <i>Sustainable Banking Assessment</i> (SUSBA)</li> <li>4. Mengikuti indeks Saham SRI KEHATI</li> <li>5. Pemasangan panel surya 2 (dua) titik jaringan kantor dan <i>Reverse Vending Machine</i> dan <i>Plasticpay Collection Point</i> di 50 titik</li> <li>6. Implementasi E-DOC BSI</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Portofolio <i>Green</i> minimal Rp10,7 Triliun</li> <li>2. 70% pegawai mendapatkan pelatihan <i>sustainable finance awareness</i> dan 20% pegawai unit bisnis dan rekanan mengikuti pelatihan mitigasi risiko lingkungan</li> <li>3. Instalasi solar panel 1 (satu) kantor cabang, <i>plasticpay</i> untuk 27 titik, penanaman pohon dan <i>green activity</i></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Portofolio <i>Green</i> tumbuh sesuai Rencana Bisnis Bank (RBB)</li> <li>2. Penerbitan Sukuk Subordinasi Rp5-7,5 Triliun untuk modal Tier 2</li> <li>3. 80% pegawai mendapatkan pelatihan <i>sustainable finance awareness</i> dan 40% pegawai unit bisnis dan rekanan mengikuti pelatihan mitigasi risiko lingkungan</li> <li>4. <i>ESG Risk Rating</i></li> <li>5. <i>Carbon Tracking</i></li> <li>6. <i>Green Campaign/Eco Lifestyle</i> (<i>Green Building, Charging Station, Electric Vehicle, Green Culture, Penanaman Pohon</i>)</li> <li>7. Aktivitas TJSL/CSR</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Portofolio <i>Green</i> tumbuh sesuai RBB</li> <li>2. <i>Reporting</i> sukuk subordinasi atau <i>sustainability</i> sukuk</li> <li>3. 90% pegawai mendapatkan pelatihan <i>sustainable finance awareness</i> dan 60% pegawai unit bisnis dan rekanan mengikuti pelatihan mitigasi risiko lingkungan</li> <li>4. <i>ESG Risk Rating</i></li> <li>5. <i>Carbon Tracking</i></li> <li>6. <i>Green Campaign/Eco Lifestyle</i></li> <li>7. Aktivitas TJSL/CSR</li> </ol>

BSI juga telah menetapkan program-program yang akan dilaksanakan dalam RAKB yang meliputi rencana 5 (lima) tahunan (2021 – 2025).

### Target Jangka Panjang BSI Tahun 2021-2025

Tahun	Target Kegiatan Prioritas	Indikator Keberhasilan
2021	<b>A. Pengembangan Produk dan/atau Jasa yang sesuai Kriteria Kegiatan Usaha Berkelanjutan (KKUB)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Portofolio UMKM</li> <li>- Portofolio <i>Green Financing</i>/Portofolio Hijau Non UMKM (segmen <i>wholesale</i>)</li> </ul>	<b>A. Pengembangan Produk dan/atau Jasa yang sesuai Kriteria Kegiatan Usaha Berkelanjutan (KKUB)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Outstanding</i> (OS) UMKM pada Desember 2021 minimal Rp36,42 triliun</li> <li>- OS Portofolio Hijau Non UMKM pada Desember 2021 minimal Rp4,36 triliun</li> </ul>
	<b>B. Pengembangan Kapasitas Internal Bank:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelatihan mengenai <i>Sustainable Finance Awareness</i></li> <li>- Pelatihan untuk pegawai dan rekanan (<i>developer/nasabah</i>) mengenai Mitigasi Risiko Lingkungan</li> <li>- Penyusunan E-Modul dan <i>Digital Learning</i> Sosialisasi keuangan berkelanjutan untuk Unit Bisnis dan Support.</li> </ul>	<b>B. Pengembangan Kapasitas Internal Bank:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 5% pegawai mendapat pelatihan mengenai <i>Sustainable Finance Awareness</i></li> <li>- 5% pegawai unit bisnis dan rekanan (<i>developer/nasabah</i>) mengikuti pelatihan Mitigasi Risiko Lingkungan</li> <li>- Tersedianya E-Modul dan <i>Digital Learning</i> Sosialisasi keuangan berkelanjutan untuk Unit Bisnis dan Support.</li> </ul>
	<b>C. Peningkatan Tata Kelola Penyusunan Standar Prosedur Operasional (SPO)/Petunjuk Teknis Operasional (PTO) <i>Sustainable Finance</i></b>	<b>C. Peningkatan Tata Kelola Tersedianya SPO/PTO <i>Sustainable Finance</i></b>
	<b>Aktivitas Pendukung</b> <b>A. <i>Green Campaign</i></b> Menciptakan " <i>Eco Life Style</i> " dalam lingkungan kantor	<b>Aktivitas Pendukung</b> <b>A. <i>Green Campaign</i></b> Terlaksananya 1 (satu) subprogram " <i>Eco Life Style</i> "
	<b>B. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menjalankan program BSI <i>Integrated Social Action</i> dengan pendekatan untuk pengembangan di aspek <i>socio-economic, spiritual, people</i> dan <i>environment</i></li> </ul>	<b>B. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Socio-economic</i>: program pemberdayaan masyarakat berbasis desa (<i>ex-legacy bank</i>) di 14 desa</li> <li>- <i>Spiritual</i>: <i>re-branding</i> Mobil Musholla ex-BSM menjadi <i>branding</i> BSI. Penambahan 1 (unit) Mobil Ambulance</li> <li>- <i>People</i>: lanjutan program <i>Islamic Sociopreneur Development Program</i> (ISDP) &amp; pengadaan <i>Test Swab/PCR/Genose/Vaksin</i> bagi masyarakat</li> <li>- <i>Environment</i>: 3 (tiga) kali dalam setahun melakukan <i>Green Campaign</i></li> </ul>

Tahun	Target Kegiatan Prioritas	Indikator Keberhasilan
2022	<p><b>A. Pengembangan Produk dan/atau Jasa yang sesuai Kriteria Kegiatan Usaha Berkelanjutan (KKUB)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Portofolio UMKM</li> <li>- Portofolio Hijau Non UMKM</li> <li>- Rasio Portofolio Pembiayaan Berkelanjutan</li> </ul>	<p><b>A. Pengembangan Produk dan/atau Jasa yang sesuai Kriteria Kegiatan Usaha Berkelanjutan (KKUB)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- OS UMKM pada Desember 2022 minimal Rp44,8 triliun</li> <li>- OS Portofolio Hijau Non UMKM pada Desember 2022 minimal Rp7 triliun</li> <li>- Rasio Pembiayaan Berkelanjutan terhadap Total Pembiayaan minimal 22%</li> </ul>
	<p><b>B. Pengembangan Kapasitas Internal Bank:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelatihan mengenai <i>Sustainable Finance Awareness</i> untuk segenap pegawai</li> <li>- Pelatihan <i>Green Financing</i> dan Mitigasi Risiko Lingkungan</li> </ul>	<p><b>B. Pengembangan Kapasitas Internal Bank:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Minimal 60% pegawai mendapat pelatihan mengenai <i>Sustainable Finance Awareness</i></li> <li>- Minimal 10% pegawai unit bisnis mengikuti pelatihan <i>Green Financing</i> dan Mitigasi Risiko Lingkungan</li> </ul>
	<p><b>C. Peningkatan Tata Kelola</b> <i>Updating</i> Ketentuan PTO <i>Sustainable Finance</i></p>	<p><b>C. Peningkatan Tata Kelola</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Updating</i> &amp; penyesuaian Kebijakan Pembiayaan pro Keuangan Berkelanjutan (penambahan terkait Risiko Lingkungan, Sosial, Tata Kelola/Iklm)</li> <li>- Penyempurnaan SPO &amp; PTO terkait Keuangan Berkelanjutan</li> <li>- Penyampaian kinerja keuangan berkelanjutan di <i>public expose</i> triwulanan</li> </ul>
	<p><b>Aktivitas Pendukung</b></p> <p><b>A. Green Campaign</b> <b>Efisiensi – Go Green</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemasangan Panel Surya</li> <li>- Pemasangan <i>Reverse Vending Machine</i> dan <i>Plasticpay Collection Point</i></li> <li>- E-Doc BSI (digitalisasi korespondensi berbasis web) untuk pengurangan penggunaan kertas di Unit Kerja Kantor Pusat dan <i>Outlet</i></li> </ul> <p><b>B. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan</b> Menjalankan program <i>BSI Integrated Social Action</i> dengan pendekatan untuk pengembangan pada aspek <i>socio-economic, spiritual, people</i> dan <i>environment</i></p>	<p><b>Aktivitas Pendukung</b></p> <p><b>A. Green Campaign</b> <b>Efisiensi – Go Green</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemasangan Panel Surya di 2 (dua) titik lokasi Jaringan Kantor</li> <li>- Pemasangan <i>Reverse Vending Machine</i> dan <i>Plasticpay Collection Point</i> di 50 titik lokasi seluruh Indonesia</li> <li>- E-Doc BSI (digitalisasi korespondensi berbasis web) untuk pengurangan penggunaan kertas di Unit Kerja Kantor Pusat dan <i>Outlet</i> sudah <i>pilot project</i> di Q1</li> </ul> <p><b>B. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan</b></p> <p><b>Socio-economic</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penambahan Desa BSI minimal 5 desa</li> </ul> <p><b>Spiritual</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyelesaian pembangunan Masjid BSI Bakauheni</li> <li>- Lanjutan <i>Rebranding</i> dan <i>Maintenance</i> Masjid</li> <li>- Tebar Hewan Qurban pada Momen Idul Adha 1443 H</li> </ul> <p><b>People</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lanjutan implementasi program “BSI Scholarship”</li> <li>- <i>Launching</i> program “BSI Entrepreneurship 2022 (ISDP)”</li> </ul> <p><b>Environment</b></p> <p>Penanaman pohon di daerah rawan bencana (Banten, Jawa Barat, &amp; Kalimantan Barat) dengan total 1000 pohon</p> <p><b>Charity</b></p> <p>Pemberian donasi yang bersifat <i>socio business</i></p> <p>Penyaluran dan pendistribusian TJSL direncanakan penyaluran &amp; pendistribusian TJSL tahun 2021 melalui BAZNAS dan LAZNAS BSI MASLAHAT dengan menggunakan sumber dana sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dana Zakat: 2,5% dari laba tahun 2021 (EBT) – RKAT BAZNAS</li> <li>- Dana Sosial / TBDSP: + Rp 32 Miliar – RAKB OJK</li> </ul>
2023	<p><b>A. Pengembangan Produk dan/atau Jasa yang sesuai Kriteria Kegiatan Usaha Berkelanjutan (KKUB)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembiayaan UMKM</li> <li>- <i>Green Financing</i> (pada segmen <i>wholesale</i>)</li> </ul>	<p><b>A. Pengembangan Produk dan/atau Jasa yang sesuai Kriteria Kegiatan Usaha Berkelanjutan (KKUB)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- OS UMKM pada Desember 2023 minimal Rp50,15 triliun</li> <li>- OS Portofolio Hijau Non UMKM pada Desember 22 minimal Rp10,7 triliun</li> <li>- Rasio Pembiayaan berkelanjutan terhadap Total pembiayaan 23%</li> </ul>
	<p><b>B. Pengembangan Kapasitas Internal Bank:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelatihan mengenai <i>Sustainable Finance Awareness</i></li> <li>- Pelatihan untuk pegawai dan rekanan (<i>developer/nasabah</i>) mengenai Mitigasi Risiko Lingkungan</li> </ul>	<p><b>B. Pengembangan Kapasitas Internal Bank:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Minimal 70% pegawai mendapat pelatihan mengenai <i>Sustainable Finance Awareness</i></li> <li>- Minimal 20% pegawai unit bisnis &amp; rekanan (<i>developer/nasabah</i>) mengikuti pelatihan Mitigasi Risiko Lingkungan</li> </ul>
	<p><b>C. Peningkatan Tata Kelola</b> Penyempurnaan Sistem informasi debitur yang pro <i>Sustainable Finance</i></p>	<p><b>C. Peningkatan Tata Kelola</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyusunan Ketentuan Internal sebagai antisipasi terbitnya POJK tentang Taksonomi Hijau Indonesia di tahun 2023</li> <li>- Menyelenggarakan FGD/<i>workshop</i> terkait kebijakan sektoral berdasarkan pemetaan risiko tinggi <i>environmental</i> dan <i>social</i> di tingkat portofolio. Secara lengkap (referensi: SUSBA Sector)</li> <li>- Menyampaikan permohonan <i>assessment Sustainable Banking Assessment</i> (SUSBA) untuk 8 (delapan) bank di setiap negara.</li> <li>- Penyampaian kinerja keuangan berkelanjutan di <i>public expose</i> triwulanan</li> </ul>

Tahun	Target Kegiatan Prioritas	Indikator Keberhasilan
	<b>Aktivitas Pendukung</b> <b>A. Green Campaign</b> Menciptakan "Eco Life Style" dalam lingkungan kantor	<b>Aktivitas Pendukung</b> <b>A. Green Campaign</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Instalasi solar panel di 1 kantor Jaringan (Kantor Cabang Mataram) <i>carry over</i> dari 2022.</li> <li>- Penambahan mesin RVM minimal 27 titik di seluruh Indonesia</li> <li>- Penyampaian inisiasi Program "penanaman pohon untuk nasabah griya dan pegawai BSI", total 5.000 pohon</li> <li>- Penyampaian inisiasi menu <i>green activity</i> dalam BSI Mobile</li> <li>- Lanjutan Implementasi E-Doc di kantor pusat &amp; Outlet</li> </ul>
	<b>B. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan</b> Menjalankan program BSI <i>Integrated Social Action</i> dengan pendekatan untuk pengembangan di aspek <i>socio-economic, spiritual, people</i> dan <i>environment</i>	<b>B. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan</b> <b>Socio-economic</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penambahan Desa BSI minimal 5 (lima) lokasi</li> </ul> <b>Spiritual</b> Maintenance dan Optimalisasi Masjid BSI Tebar Hewan Qurban pada Momen Idul Adha 1443 H
2024	<b>A. Pengembangan Produk dan/atau Jasa yang sesuai Kriteria Kegiatan Usaha Berkelanjutan (KKUB)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembiayaan UMKM</li> <li>- <i>Green Financing</i> (pada segmen <i>wholesale</i>)</li> <li>- Pendanaan dengan Sukuk Berkelanjutan</li> </ul>	<b>A. Pengembangan Produk dan/atau Jasa yang sesuai Kriteria Kegiatan Usaha Berkelanjutan (KKUB)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembiayaan UMKM pada Desember 2024, minimal mencapai Rp54,19 Triliun</li> <li>- <i>Green Financing</i> (pada segmen <i>wholesale</i>), pada Desember 2024 minimal mencapai Rp13 Triliun</li> <li>- Rasio Pembiayaan berkelanjutan terhadap Total pembiayaan 24%</li> <li>- Penerbitan <i>Sustainability Sukuk</i></li> </ul>
	<b>B. Pengembangan Kapasitas Internal Bank:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelatihan mengenai <i>Sustainable Finance Awareness</i></li> <li>- Pelatihan untuk pegawai dan rekanan (<i>developer/nasabah</i>) mengenai Mitigasi Risiko Lingkungan</li> </ul>	<b>B. Pengembangan Kapasitas Internal Bank:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Minimal 80% pegawai mendapat pelatihan mengenai <i>Sustainable Finance Awareness</i></li> <li>- Minimal 30% pegawai unit bisnis &amp; rekanan (<i>developer/nasabah</i>) mengikuti pelatihan Mitigasi Risiko Lingkungan</li> </ul>
	<b>C. Peningkatan Tata Kelola</b> Review Tata Kelola terkait <i>Sustainable Finance</i>	<b>C. Peningkatan Tata Kelola</b> Terlaksananya <i>Review Tata Kelola Sustainable Finance</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Update</i> PTO TBDSP</li> <li>- <i>Carbon tracking</i></li> <li>- <i>ESG Rating</i></li> </ul>
	<b>Aktivitas Pendukung</b> <b>A. Green Campaign</b> Menciptakan "Eco Life Style" dalam lingkungan kantor	<b>Aktivitas Pendukung</b> <b>A. Green Campaign</b> Terlaksananya 3 (tiga) subprogram "Eco Life Style" <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Electric Vehicle</i></li> <li>- Penyediaan <i>charging station</i></li> <li>- <i>Green Building</i></li> <li>- Penanaman bibit pohon</li> </ul>
	<b>B. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan</b> Menjalankan program BSI <i>Integrated Social Action</i> dengan pendekatan untuk pengembangan di aspek <i>socio-economic, spiritual, people</i> dan <i>environment</i>	<b>B. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Socio-economic:</b> Optimalisasi Desa BSI dan penambahan minimal 3 (tiga) Desa BSI</li> <li>- <b>Spiritual:</b> <i>maintenance</i> dan pembangunan 1 masjid, pengadaan mobil mushola</li> <li>- <b>People:</b> lanjutan BSI Scholarship</li> <li>- <b>Environment:</b> Optimalisasi program <i>charity</i> dan <i>environment</i></li> </ul>
	<b>A. Pengembangan Produk dan/atau Jasa yang sesuai Kriteria Kegiatan Usaha Berkelanjutan (KKUB)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembiayaan UMKM</li> <li>- <i>Green Financing</i> (pada segmen <i>wholesale</i>)</li> <li>- Menerbitkan Sukuk Subordinasi</li> <li>- <i>Sustainable financing ratio</i></li> </ul>	<b>A. Pengembangan Produk dan/atau Jasa yang sesuai Kriteria Kegiatan Usaha Berkelanjutan (KKUB)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembiayaan UMKM tumbuh sesuai target RBB 2025</li> <li>- <i>Green Financing</i> (pada segmen <i>wholesale</i>) tumbuh sesuai target RBB</li> <li>- Menerbitkan sukuk subordinated Rp 5-7,5 triliun untuk modal tier 2</li> <li>- <i>Sustainable financing ratio</i> &gt;25%</li> </ul>
<b>B. Pengembangan Kapasitas Internal Bank:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelatihan mengenai <i>Sustainable Finance Awareness</i></li> <li>- Pelatihan untuk pegawai dan rekanan (<i>developer/nasabah</i>) mengenai Mitigasi Risiko Lingkungan</li> </ul>	<b>B. Pengembangan Kapasitas Internal Bank:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Minimal 90% pegawai mendapat pelatihan mengenai <i>Sustainable Finance Awareness</i></li> <li>- Minimal 50% pegawai unit bisnis &amp; rekanan (<i>developer/nasabah</i>) mengikuti pelatihan Mitigasi Risiko Lingkungan</li> </ul>	
<b>C. Peningkatan Tata Kelola</b> Review Tata Kelola terkait <i>Sustainable Finance</i>	<b>C. Peningkatan Tata Kelola</b> Review Tata Kelola terkait <i>Sustainable Finance</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengikuti Sri Kehati Index</li> </ul>	

Tahun	Target Kegiatan Prioritas	Indikator Keberhasilan
	<b>Aktivitas Pendukung</b> <b>A. Green Campaign</b> Menciptakan "Eco Life Style" dalam lingkungan kantor	<b>Aktivitas Pendukung</b> <b>A. Green Campaign</b> Terlaksananya 4 (empat) subprogram "Eco Life Style" - Electric Vehicle - Penyediaan charging station - Green Building - Penanaman 10.000 bibit pohon
	<b>B. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan</b> Menjalankan program BSI <i>Integrated Social Action</i> dengan pendekatan untuk pengembangan pada aspek <i>socio-economic, spiritual, people</i> dan <i>environment</i>	<b>B. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan</b> - <b>Socio-economic:</b> Optimalisasi Desa BSI dan penambahan minimal 3 (tiga) Desa BSI - <b>Spiritual:</b> <i>maintenance</i> dan pembangunan 1 (satu) masjid, pengadaan mobil mushola - <b>People:</b> lanjutan BSI <i>Scholarship</i> - <b>Environment:</b> Optimalisasi program <i>charity</i> dan <i>environment</i>

Tahun 2024 merupakan tahun keempat dari rencana jangka panjang memiliki target kegiatan prioritas meliputi pengembangan produk dan/atau jasa yang sesuai kriteria Kegiatan Usaha Berkelanjutan (KKUB) dengan penekanan pada pembiayaan UMKM, *green financing* (pada segmen *wholesale*), Pendanaan dengan Sukuk Berkelanjutan; pengembangan kapasitas internal Bank dengan penekanan pelatihan mengenai *sustainable finance awareness*, pelatihan untuk pegawai dan rekanan (*developer/nasabah*) mengenai mitigasi risiko lingkungan; peningkatan tata kelola dengan penekanan melakukan *review* tata kelola terkait *sustainable finance*. BSI juga telah menetapkan target kegiatan prioritas pada aktivitas pendukung yang meliputi *green campaign* yang menekankan untuk menciptakan "Eco Life Style" dalam lingkungan kantor; serta tanggung jawab sosial dan lingkungan yang menekankan BSI untuk menjalankan program BSI *Integrated Social Action* dengan pendekatan untuk pengembangan pada aspek *socio-economic, spiritual, people*, dan *environment*.

Pencapaian target keberlanjutan yang tertuang di dalam RAKB adalah sebagai berikut.

No.	Uraian Aktivitas	September 2024	
		Jumlah	Nominal (Dalam Jutaan Rupiah)
I	Jumlah produk yang memenuhi kriteria Kegiatan Usaha Berkelanjutan (KKUB)		
	a. Penghimpunan Dana Penerbitan Sukuk Mudharabah Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank Syariah Indonesia (BSI) Tahap I Tahun 2024	1 Produk	3.000.000
	b. Penyaluran Dana/Pembiayaan		
	- UMKM	-	49.109.387
	- Portofolio Hijau (Non UMKM)	-	13.434.928
	<b>Total Aset Produktif Kegiatan Usaha Berkelanjutan</b>		
	a. Total Pembiayaan Kegiatan Usaha Berkelanjutan		62.544.315
	b. Total Pembiayaan Non Kegiatan Usaha Berkelanjutan		204.522.694
	<b>Total Pembiayaan</b>		<b>267.067.009</b>
	Persentasi total pembiayaan kegiatan usaha berkelanjutan terhadap total pembiayaan bank (%)		23,42%

Jumlah dan kualitas pembiayaan berdasarkan kategori kegiatan usaha berkelanjutan	Nominal (Dalam Jutaan Rupiah)	NPF (%)
a. Energi terbarukan	701.541	0,00
b. Efisiensi Energi	-	-
c. Pencegahan dan pengendalian Polusi	-	-
d. Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati dan Penggunaan Lahan yang Berkelanjutan	6.665.872	0,00
e. Konservasi Keanekaragaman Hayati Darat dan Air	-	-
f. Transportasi Ramah Lingkungan	38.525	0,00
g. Pengelolaan Air dan Air Limbah yang Berkelanjutan	77.432	0,00
h. Adaptasi Perubahan Iklim	-	-

Jumlah dan kualitas pembiayaan berdasarkan kategori kegiatan usaha berkelanjutan	Nominal (Dalam Jutaan Rupiah)	NPF (%)
i. Produk yang dapat Mengurangi Penggunaan Sumber Daya dan Menghasilkan Lebih Sedikit Polusi ( <i>Eco-Efficient</i> )	5.551.905	0,00
j. Bangunan Berwawasan Lingkungan yang Memenuhi Standar atau Sertifikasi yang Diakui Secara Nasional, Regional, atau Internasional	136.716	0,00
k. Kegiatan Usaha dan/atau Kegiatan Lain dari Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan Lainnya	262.936	0,00
l. Kegiatan UMKM	49.109.387	2,87

No.	Uraian Aktivitas	Pencapaian
II	Pengembangan Kapasitas Internal	Telah dilaksanakan pengembangan kapasitas internal bank yang terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 85% pegawai telah mendapat pelatihan <i>Sustainable Finance Awareness</i></li> <li>- 62% pegawai unit bisnis telah mengikuti mitigasi risiko lingkungan</li> </ul>
III	Peningkatan Tata Kelola	Telah dilaksanakan peningkatan tata kelola yang terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Update</i> Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Dana Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan (TBDSP)</li> <li>- Pengembangan <i>Digital Carbon tracking</i> untuk mendapatkan <i>baseline emisi carbon</i></li> <li>- <i>ESG Risk Rating</i> dari <i>Sustainalytic</i> dengan skor 27,3 (<i>medium risk</i>)</li> <li>- Dibentuknya <i>ESG Group</i></li> </ul>
IV	<i>Green Activity/Eco Lifestyle</i>	Telah dilaksanakan aktivitas pendukung <i>green campaign</i> yang terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 37 <i>electric vehicle</i> yang terdiri dari 35 motor dan 2 (dua) mobil</li> <li>- Penyediaan 2 (dua) unit <i>charging station (landmark Aceh dan Wisma Mandiri)</i></li> <li>- <i>Green Building Landmark Aceh Gold Certification</i></li> </ul>
V	Penyaluran <i>Corporate Social Responsibility (CSR)/Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)</i>	Telah dilaksanakan program <i>TJSL</i> yang terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penambahan 3 (tiga) Desa BSI (Aceh Besar, Bener Meriah dan Mojokerto)</li> <li>- Pembangunan Masjid BSI di Landmark Aceh</li> <li>- <i>Maintenance</i> 3 (tiga) Masjid BSI (Bromo, Cipali dan Cipularang)</li> <li>- Penambahan 3 (tiga) Mobil Mushola</li> <li>- Penyaluran BSI Scholarship dengan penambahan penerima manfaat sebanyak 2.300 orang</li> <li>- Penyaluran <i>charity</i> senilai Rp29,7 miliar</li> </ul>

## Strategi dalam Pengelolaan Risiko dan Peluang Terkait Keberlanjutan

[IFRS S1-STRATEGY, IFRS S2-STRATEGY, IFRS S1-METRIC AND TARGET, IFRS S2-METRIC AND TARGET, IFRS S1-RISK MANAGEMENT, IFRS S2-RISK MANAGEMENT, GRI 201-2]

Dalam mengembangkan strategi, BSI juga mempertimbangkan risiko dan peluang keberlanjutan termasuk risiko dan peluang terkait perubahan iklim. Proses manajemen risiko iklim dikelola secara terintegrasi ke dalam sistem manajemen risiko Bank. Proses ini diawali dengan identifikasi risiko dan peluang iklim; pengukuran risiko iklim dengan menetapkan beberapa metrik terkait risiko fisik dan risiko transisi; selanjutnya menilai dampak risiko iklim terhadap finansial Bank; kemudian mengevaluasi dampak risiko iklim dan menyusun langkah-langkah strategis yang diperlukan untuk mengelola dampak dari risiko iklim tersebut. Adapun risiko dan peluang terkait keberlanjutan termasuk risiko dan peluang terkait perubahan iklim serta dampaknya terhadap model bisnis dan rantai nilai, strategi, dan kondisi keuangan di tahun 2024 disajikan sebagai berikut.

Jenis Risiko	Dampak	Potensi Implikasi Finansial	Pengelolaan Risiko
<b>Ekonomi</b>			
<p><b>Risiko Kredit</b> Risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati.</p> <p><b>Risiko Investasi</b> Risiko terkait pembiayaan dan investasi yang diberikan.</p>	<p>Peningkatan rasio kredit bermasalah (<i>Non-Performing Loan/ NPL</i>)</p>	<p>Penurunan pendapatan Bank</p>	<p>BSI melakukan pengelolaan risiko kredit melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Arah ekspansi pembiayaan mengacu pada <i>Portfolio Guideline</i>.</li> <li>Penetapan metode <i>acquisition</i> dan pengukuran risiko nasabah melalui <i>originating system, Risk Acceptance Criteria, scoring</i> pembiayaan ritel dan <i>financing risk rating</i> pembiayaan SME lebih dari Rp1,5 miliar dan pembiayaan <i>wholesale</i>.</li> <li><i>Early warning system</i> dengan menggunakan <i>watchlist tools</i> yang dapat memberikan indikasi/deteksi secara dini kondisi nasabah.</li> <li>Pengembangan <i>Rescue tools</i> sebagai alat bantu dalam memantau upaya yang dilakukan oleh Bank terhadap pembiayaan bermasalah yang masih mempunyai prospek usaha, kinerja, kemampuan membayar serta itikad baik, dengan tujuan meminimalkan kemungkinan timbulnya kerugian bagi Bank dan menyelamatkan kembali pembiayaan yang telah diberikan.</li> <li>Pelaksanaan <i>stress test</i> terhadap kondisi ekstrem tetapi mungkin terjadi (<i>plausible</i>) baik secara berkala maupun insidental yang bertujuan untuk mengantisipasi kondisi terburuk apabila terjadi perubahan kondisi eksternal seperti makro ekonomi yang dapat mempengaruhi kinerja pembiayaan Bank.</li> <li>Penetapan jangka waktu pembiayaan dengan mempertimbangkan jenis pembiayaan, imbal hasil, likuiditas dan potensi risiko.</li> <li>Kajian/evaluasi kecukupan limit risiko. Penetapan sistem pengendalian internal yang terintegrasi dalam sistem dan prosedur pembiayaan.</li> </ul>
<p><b>Risiko Pasar</b> Risiko akibat perubahan harga pasar, antara lain risiko dari perubahan nilai aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan. Risiko pasar terdiri dari dua jenis risiko: risiko nilai tukar dan risiko <i>benchmark</i> suku bunga.</p>	<p>Pergerakan variabel pasar terhadap portofolio Bank.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kerugian pada Investasi dan Aset Keuangan</li> <li>Kerugian dari Fluktuasi Mata Uang</li> </ul>	<p>BSI mengelola Risiko <i>Benchmark</i> Suku Bunga melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Identifikasi risiko pada produk dan aktivitas bank melalui analisa risiko dan memberikan rekomendasi kepada unit bisnis dan manajemen.</li> <li>Pengukuran risiko melalui metode Standard dan metode internal yaitu <i>Value at Risk (VaR)</i>.</li> <li>Pemantauan eksposur risiko secara harian, mingguan dan bulanan.</li> <li>Pengendalian risiko melalui penetapan limit <i>trading</i> surat berharga.</li> </ol> <p>BSI mengelola Risiko Nilai Tukar melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Identifikasi risiko pada produk dan aktivitas bank.</li> <li>Pengukuran risiko melalui <i>tools Value at Risk (VaR)</i>.</li> <li>Pemantauan eksposur risiko dilakukan secara harian, mingguan dan bulanan.</li> <li>Pengendalian risiko dilakukan melalui penetapan limit dan <i>squaring</i> posisi valas.</li> </ol>

Jenis Risiko	Dampak	Potensi Implikasi Finansial	Pengelolaan Risiko
<b>Risiko Likuiditas</b> Risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo.	Tidak terpenuhinya kewajiban keuangan Bank	Peningkatan Biaya Dana	BSI mengelola likuiditas melalui: <ol style="list-style-type: none"> <li>Identifikasi risiko likuiditas pada produk dan aktivitas bank</li> <li>Penempatan dana pada aset likuid berkualitas tinggi sebagai cadangan likuiditas</li> <li>Pengukuran rasio-rasio likuiditas, proyeksi <i>cashflow</i>, <i>liquidity gap</i>, <i>Liquidity Coverage Ratio</i> (LCR), dan <i>Net Stable Funding Ratio</i> (NSFR)</li> <li>Pemeliharaan akses ke pasar uang antar Bank Syariah</li> <li>Pelaksanaan <i>stress test</i> risiko likuiditas secara berkala.</li> <li>Penetapan limit risiko likuiditas sesuai kondisi internal dan ketentuan regulasi yang berlaku.</li> <li>Pemantauan rasio likuiditas secara rutin</li> <li>Penetapan Indikator Peringatan Dini dan Rencana Pendanaan Darurat atau <i>Liquidity Contingency Plan</i> (LCP) antara lain melalui penggunaan instrumen <i>money market</i>, penjualan surat berharga, peningkatan nisbah imbal hasil dana dan penggunaan fasilitas pinjaman dari Bank Indonesia.</li> <li>Pemantauan pergerakan indikator eksternal antara lain nilai tukar USD/IDR, <i>yield</i>, surat berharga pemerintah, tingkat imbal hasil pasar, harga emas dan informasi pasar terkini.</li> </ol>
<b>Risiko Operasional</b> Risiko kerugian yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, adanya kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian/insiden eksternal yang mempengaruhi operasional Bank.	Peningkatan eksposur risiko yang disebabkan faktor kesalahan manusia, ketidakcukupan prosedur internal, kegagalan sistem dan kejadian eksternal.	Penurunan pendapatan Bank	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyusunan manual produk, kebijakan, prosedur dan petunjuk teknis operasional sebagai panduan dalam melaksanakan aktivitas operasional Bank dan mensosialisasikannya secara memadai.</li> <li>Pembentukan <i>Senior Operational Risk Head</i> ("SORH") yang mengkoordinir fungsi DCOR dan RBC dalam rangka pengelolaan risiko operasional di unit kerja Kantor Pusat dan unit jaringan.</li> <li>Penyiapan <i>tools</i> yang digunakan dalam penerapan manajemen risiko operasional, antara lain <i>Risk &amp; Control Self Assessment</i>, <i>Key Risk Indicator</i>, <i>Loss Event Database</i>, Laporan Profil Risiko Operasional, dan <i>Control Testing</i>.</li> <li>Pelaksanaan kajian &amp; analisis risiko operasional atas produk baru yang diusulkan dan atau kegiatan yang akan diluncurkan oleh Bank.</li> <li>Penerapan <i>Business Continuity Management</i> ("BCM") untuk memastikan kelangsungan operasional Bank secara terus menerus meskipun terjadi gangguan (bencana) untuk melindungi kepentingan <i>stakeholders</i>.</li> <li>Menerapkan tata kelola IT secara baik dan memadai, antara lain melalui pembentukan <i>IT Steering Committee</i>, penerapan mekanisme <i>System Development Life Cycle</i>, penerapan standar keamanan IT dan manajemen akses, penerapan standar perangkat IT, dan penerapan <i>Disaster Recovery Plan</i>.</li> </ul>
<b>Risiko Imbal Hasil</b> Risiko imbal hasil adalah risiko yang timbul karena adanya fluktuasi pasar, perubahan ekonomi, atau faktor lain yang bisa memengaruhi keuntungan atau kerugian dari investasi yang dilakukan.	Ketidakpastian perbedaan antara imbal hasil yang diharapkan dan hasil yang sebenarnya dari sebuah investasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penurunan Profitabilitas</li> <li>Penurunan Nilai Aset</li> </ul>	Review imbal hasil pendanaan

Jenis Risiko	Dampak	Potensi Implikasi Finansial	Pengelolaan Risiko
<b>Lingkungan</b>			
<p><b>Risiko Fisik</b> Risiko akibat dampak langsung dari bencana alam yang parah (risiko fisik akut) dan risiko yang secara bertahap terdampak oleh perubahan iklim dalam jangka panjang, misalnya kenaikan temperatur permukaan air laut (risiko fisik kronis), dan perubahan pola curah hujan.</p>	<p>Risiko fisik berpotensi memberikan dampak yang signifikan terhadap risiko perbankan, diantaranya:</p> <p><b>a. Risiko Kredit</b> Banjir dan kebakaran lahan berdampak pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kerusakan fisik agunan/property nasabah yang mengakibatkan penurunan harga agunan/property yang berdampak pada peningkatan <i>Loss Given Default</i> (LGD).</li> <li>2) Penurunan produktivitas lahan terutama pada sektor pertanian &amp; Perkebunan yang mengakibatkan penurunan kemampuan bayar nasabah.</li> </ol> <p><b>b. Risiko Likuiditas</b> Kebakaran hutan atau banjir berpotensi mengakibatkan penarikan dana yang tak terduga, menghasilkan aliran keluar yang lebih besar dari yang diperkirakan.</p> <p><b>c. Risiko Operasional</b> Banjir dan kebakaran berpotensi merusak aset bank seperti kantor cabang, ATM, pusat data atau menghambat operasional bank secara keseluruhan. Hal tersebut akan meningkatkan potensi kerugian akibat penurunan <i>revenue</i> yang dihasilkan karena bencana alam.</p>	<p>Risiko fisik dan risiko transisi memiliki potensi implikasi finansial dan operasional yang cukup signifikan terhadap Bank, diantaranya:</p> <p><b>a. Risiko Kredit</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Peningkatan <i>Probability of Default</i> (PD) dan <i>Loss Given Default</i> (LGD) sehingga berimplikasi meningkatkan biaya CKPN.</li> <li>2) Penurunan profit dan rasio kecukupan modal (CAR).</li> </ol> <p><b>b. Risiko Pasar</b> <i>Capital Charge</i> dan ATMR risiko pasar berpotensi meningkat sejalan dengan proyeksi peningkatan <i>Probability of Default</i> surat berharga akibat Risiko Iklim.</p> <p><b>c. Risiko Likuiditas</b> Pengetatan likuiditas yang tercermin dari penurunan <i>Liquidity Coverage Ratio</i> (LCR) akibat penarikan dana yang tak terduga dalam jumlah yang cukup besar.</p> <p><b>d. Risiko Operasional</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kerusakan <i>asset</i> dan penurunan nilai <i>property</i> Bank. Tambahkan biaya operasional yang timbul untuk kebutuhan <i>training</i> pegawai mengenai risiko iklim dan/atau ESG, biaya pengembangan <i>green building</i>/investasi terkait teknologi terbarukan, biaya tenaga ahli terkait pengelolaan risiko iklim/ESG, dan biaya lainnya.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan <i>framework</i> manajemen risiko yang mempertimbangkan aspek LST/ESG</li> <li>2. Penetapan strategi manajemen portofolio pembiayaan dengan mempertimbangkan aspek LST melalui <i>portfolio guideline</i>.</li> <li>3. Secara bertahap, melakukan penurunan limit penyaluran pembiayaan pada nasabah dengan sektor usaha yang menghasilkan emisi karbon tinggi.</li> <li>4. Penyusunan kebijakan yang mendukung penyaluran pembiayaan ke arah <i>green financing</i>.</li> <li>5. Pengukuran dan analisis risiko iklim melalui <i>Climate Risk Stress Test</i> (CRST).</li> <li>6. Investasi pada surat berharga pemerintah dan surat berharga korporasi pada sektor ramah lingkungan.</li> <li>7. Peningkatan pendanaan melalui penghimpunan dana pihak ketiga dengan <i>run off rate</i> rendah sesuai komponen LCR dan penerbitan sukuk berkelanjutan.</li> <li>8. Investasi pada teknologi atau infrastruktur baru yang berkelanjutan.</li> <li>9. Peningkatan kompetensi pegawai terkait ESG dan risiko iklim.</li> </ol>
<p><b>Risiko Transisi</b> Risiko yang muncul akibat perubahan arah kebijakan pemerintah, kemajuan teknologi, dan dinamika sosial seiring dengan bergesernya tujuan perekonomian dunia ke arah ekonomi rendah karbon.</p>	<p>Risiko transisi juga memberikan dampak yang signifikan terhadap risiko perbankan, diantaranya:</p> <p><b>a. Risiko Kredit</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Perubahan kebijakan regulasi oleh pemerintah/otoritas yang lebih ketat seperti pengaturan <i>carbon emission</i>, <i>carbon tax</i>, dan peralihan teknologi dapat mempengaruhi kinerja keuangan nasabah dan kemampuan bayar nasabah kepada bank, terutama nasabah dengan bisnis yang sensitif atas peristiwa iklim ekstrem atau perubahan kebijakan iklim.</li> <li>2) Perubahan preferensi konsumen yang mengedepankan aspek ESG, berdampak terhadap penurunan pendapatan nasabah dan berujung meningkatkan risiko gagal bayar bagi nasabah yang tidak dapat menyesuaikan rencana bisnis dengan kebijakan transisi dan perubahan teknologi ke arah <i>green</i>.</li> </ol>		

Jenis Risiko	Dampak	Potensi Implikasi Finansial	Pengelolaan Risiko
	<p><b>b. Risiko Pasar</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Peningkatan nilai tukar yang disebabkan oleh perubahan kebijakan iklim sehingga berpengaruh pada Posisi Devisa Neto (PDN) Bank.</li> <li>2) Perubahan <i>customer behavior</i> yang beralih ke produk ramah lingkungan dan berkelanjutan, berpotensi mengakibatkan penurunan permintaan surat berharga non-berkelanjutan yang berdampak pada penurunan nilai surat berharga.</li> <li>3) Peningkatan suku bunga atau perubahan asumsi makroekonomi lainnya berdasarkan <i>scenario</i> NGFS mengakibatkan peningkatan <i>yield</i> surat berharga pemerintah dan korporasi, serta penurunan harga pasar surat berharga saat dilakukan <i>mark-to-market</i>.</li> </ol> <p><b>c. Risiko Likuiditas</b> Risiko transisi berdampak pada penurunan valuasi asset likuid berkualitas tinggi (HQLA), <i>cash outflow</i>, dan <i>cash inflow</i> Bank. Penurunan tersebut disebabkan oleh faktor penurunan valuasi surat berharga, peningkatan <i>run off rate</i>, dan <i>inflow rate</i>.</p> <p><b>e. Risiko Operasional</b> Risiko transisi berdampak pada potensi tambahan biaya/<i>cost</i> yang harus dikeluarkan Bank untuk melakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) investasi pada teknologi atau infrastruktur baru yang berkelanjutan.</li> <li>2) <i>training</i> pegawai terkait risiko iklim dan/atau ESG.</li> <li>3) rekrutmen pegawai baru untuk mengelola risiko iklim akan direkrut bank.</li> <li>4) implementasi pembiayaan atau pendanaan yang berkelanjutan.</li> </ol> <p>Inisiatif lain seperti jasa kerjasama dengan pihak ketiga pada pengelolaan risiko iklim.</p>		
<b>Sosial</b>			
<p><b>Risiko Reputasi</b> Risiko yang timbul akibat adanya potensi kerugian yang dapat terjadi ketika citra atau nama baik perusahaan terganggu di mata publik, pelanggan, investor, atau pihak terkait lainnya. Hal ini bisa terjadi akibat berbagai faktor, baik yang berkaitan langsung dengan operasi perusahaan atau isu eksternal yang memengaruhi persepsi orang terhadapnya.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penurunan Kepercayaan Pelanggan</li> <li>2. Kehilangan Pangsa Pasar</li> <li>3. Tantangan dalam Mengembangkan Produk Baru</li> </ol>	Penurunan pendapatan Bank	Penyelesaian pengaduan nasabah melalui <i>Complaint Handling Management</i> dan pengukuran risiko reputasi melalui <i>Publicity Effectiveness Level (PEL)</i> , serta pemantauan terhadap pemberitaan-pemberitaan di media.

Jenis Risiko	Dampak	Potensi Implikasi Finansial	Pengelolaan Risiko
<b>Tata Kelola</b>			
<b>Risiko Strategik</b> Risiko yang muncul karena potensi kerugian yang timbul akibat keputusan strategis yang kurang tepat atau gagal dalam mengantisipasi perubahan pasar dan lingkungan bisnis. Risiko ini berkaitan langsung dengan arah jangka panjang perusahaan dan bisa berasal dari faktor internal maupun eksternal yang memengaruhi posisi dan daya saing perusahaan.	Keputusan strategis yang kurang baik dapat mengganggu hubungan dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemasok, mitra bisnis, atau investor. Hal ini dapat menyebabkan kerugian jangka panjang dalam hal kerja sama dan kesempatan bisnis.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan biaya operasional</li> <li>• Penurunan Profitabilitas</li> </ul>	Evaluasi kinerja dan efektivitas strategi melalui <i>review</i> kinerja secara berkala dan berjenjang.
<b>Risiko Kepatuhan</b> Risiko yang timbul dari kegagalan Bank dalam mematuhi dan/atau menerapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip Syariah.	Penurunan reputasi dan kepercayaan investor serta peluang bisnis	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan Biaya Penyelesaian Kasus Hukum</li> <li>• Kehilangan Pendapatan atau Peluang Bisnis</li> <li>• Kehilangan Reputasi dan Kepercayaan Investor</li> </ul>	Dalam mengelola risiko kepatuhan, Bank melakukan tindakan di antaranya: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan pemahaman tentang GCG dan kode etik.</li> <li>• Penguatan pelaksanaan GCG dan memastikan bahwa semua debitur pembiayaan untuk memenuhi semua kebutuhan pembiayaan.</li> <li>• Penyusunan dan penyampaian laporan GCG kepada Otoritas Jasa Keuangan.</li> <li>• Persiapan dan peyerahan GCG to <i>Financial Services Authority</i>.</li> <li>• Peningkatan pelaksanaan <i>Know Your Customer</i> ("KYC"), Anti Pencucian Uang ("APU"), dan Pencegahan Pendanaan Teroris ("PPT").</li> <li>• Peningkatan pelaksanaan <i>compliance certification</i>.</li> <li>• Pemastian kepatuhan Bank terhadap prinsip syariah melalui kerjasama dengan DPS.</li> <li>• <i>Review</i> dan analisis kepatuhan produk Bank/kegiatan dengan prinsip syariah secara berkala.</li> </ul>
<b>Risiko Hukum</b> Risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis.	Menurunnya reputasi dan kepercayaan investor serta peluang bisnis	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kehilangan Pendapatan atau Peluang Bisnis</li> <li>• Kehilangan Reputasi dan Kepercayaan Investor</li> <li>• Peningkatan biaya perkara</li> </ul>	Dalam mengelola risiko hukum, Bank melakukan tindakan di antaranya: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Review</i> terhadap kebijakan dan prosedur operasi standar yang terkait dengan pengelolaan risiko hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku.</li> <li>• Pengembangan organisasi hukum yang kuat.</li> <li>• Standarisasi akad dan perjanjian kerja sama sesuai dengan peraturan yang berlaku.</li> <li>• Penetapan kebijakan cadangan perkara.</li> <li>• Penanganan dan pemantauan eksposur risiko hukum, baik perkara pidana maupun non pidana. Pengendalian risiko hukum dilakukan antara lain dengan membentuk cadangan kerugian untuk mengantisipasi potensi kerugian akibat tuntutan hukum. Apabila diperlukan, Bank menggunakan jasa <i>external lawyer</i> dalam membantu penanganan kasus-kasus hukum yang mengandung tuntutan ganti rugi.</li> </ul>

**Tabel Peluang Keberlanjutan dan Potensi Dampak Finansial**

Jenis	Peluang Perubahan Iklim	Potensi Dampak Finansial
<b>Ekonomi</b>		
Pembiayaan	Peningkatan pembiayaan	Meningkatkan pendapatan Pengelolaan Dana sebagai <i>Mudharib</i>
<b>Lingkungan</b>		
Efisiensi penggunaan sumber daya	Penurunan penggunaan energi dan air melalui <i>green campaign</i> BSI	Menurunkan biaya operasional BSI
Sumber Energi	Menggunakan 115 <i>electric vehicle</i> dalam menunjang aktivitas operasionalnya	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menurunkan biaya penggunaan listrik</li> <li>• Mengurangi dampak dari kenaikan harga bahan bakar fosil di masa depan.</li> </ul>

Jenis	Peluang Perubahan Iklim	Potensi Dampak Finansial
Produk dan Jasa	Pengembangan produk keuangan berkelanjutan	Meningkatkan pendapatan
Pasar	Akses pada pasar baru melalui penerbitan <i>Sustainability Sukuk</i>	Meningkatkan diversifikasi pada aset keuangan
Ketahanan	Penggunaan solar panel untuk menghasilkan energi listrik	Meningkatkan valuasi pasar melalui rencana ketahanan
<b>Sosial</b>		
Turnover Pegawai	Peningkatan produktivitas pegawai sebagai akibat rendahnya <i>turnover</i>	Meningkatkan pendapatan
Kepuasan Nasabah	Peningkatan loyalitas nasabah dan potensi bertambahnya nasabah baru	Meningkatkan pendapatan

Strategi yang telah dikembangkan oleh BSI dalam ESG *Roadmap* maupun dalam RAKB telah didasarkan pada identifikasi risiko dan peluang keberlanjutan di atas. Pada tahun 2024, BSI telah membentuk ESG Working Group yang berada di bawah Risk Management Committee (RMC). ESG Working Group bertugas membantu RMC untuk mendukung komite dalam merumuskan usulan hingga menjadi rekomendasi yang diputuskan oleh komite dalam rapat RMC. Sejak mulai disusunnya RAKB, BSI telah menyesuaikan model bisnis dengan meningkatkan pembiayaan UMKM dan memfokuskan pada peningkatan pembiayaan berkelanjutan serta menerbitkan *Sustainability Sukuk*. BSI juga melakukan penyesuaian dengan meningkatkan pengembangan kapasitas internal Bank.

## Policy Commitment [GRI 2-23, GRI 2-24, FS9]

Dalam menjalankan kegiatan usahanya BSI senantiasa berkomitmen untuk mematuhi berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan proses bisnis yang dijalankan, baik peraturan nasional maupun internasional. Berbagai peraturan perundang-undangan nasional yang menjadi landasan kegiatan usaha BSI di antaranya:

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen berikut segala perubahannya.
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 tanggal 16 Juli 2008 tentang Perbankan Syariah berikut segala perubahannya.
3. Undang-undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
4. Peraturan Presiden Nomor 111 tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik.
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan, sebagaimana telah diubah sebagian oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 61/POJK.07/2020 Tahun 2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan.
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
10. Peraturan Anggota Dewan Gubernur No. 20 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pelindungan Konsumen Bank Indonesia.
11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.07/2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.
12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan.
13. Peraturan Bank Indonesia No. 3 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen Bank Indonesia.
14. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/SEOJK.07/2017 tentang Pelaksanaan Edukasi dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan kepada Konsumen dan/atau Masyarakat.
15. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 7/SEOJK.07/2015 tentang Pedoman Penilaian Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan.

16. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku berikut segala perubahannya.
17. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 17/SEOJK.07/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Layanan Pengaduan Konsumen di sektor Jasa Keuangan.
18. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 3/SEOJK.03/2021 Tahun 2021 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan.
19. *Bye Laws* 2023 tentang Penanganan Penundaan Transaksi Transfer Dana Antar Bank.

Perseroan juga mengacu pada peraturan internasional di antaranya United Nations (UN) Guiding Principles on Business and Human Rights, United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), International Labour Organization (ILO) Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work yang juga telah diratifikasi dalam peraturan perundang-undangan nasional serta Undang-undang Nomor 16 tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement to The United Nations Framework Convention on Climate Change.

Selain peraturan nasional maupun internasional, BSI senantiasa memastikan bahwa aktivitas operasionalnya telah sesuai dengan standar internasional yang ditunjukkan dengan diperolehnya berbagai sertifikasi ISO sebagai berikut:

Sertifikasi	Masa Berlaku	
	Sejak	Sampai
ISO/IEC 27001:2022 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi	24 Maret 2024	23 Maret 2027
ISO 22301:2019 tentang <i>Business Continuity Management System</i>	5 Juni 2023	4 Juni 2026
ISO 9001:2015 tentang Sistem Manajemen Mutu	4 Februari 2023	3 Februari 2027
ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti-Penyuapan ( <i>Anti-Bribery Management System/ABMS</i> )	17 Desember 2021	16 Desember 2024
ISO 37301:2021 tentang Sistem Manajemen Kepatuhan	22 Desember 2022	21 Desember 2025

Sebagai bentuk komitmen BSI dalam mematuhi berbagai peraturan perundang-undangan, BSI telah memiliki berbagai kebijakan internal yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut bertujuan agar kegiatan usaha BSI tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat dan memberikan penyelesaian yang sesuai jika terdapat dampak negatif dari kegiatan usaha BSI. Berbagai kebijakan tersebut telah dilengkapi dengan uji tuntas (*due diligence*) dan prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*). Penerapan prinsip kehati-hatian juga tercermin dalam Kebijakan Manajemen Risiko BSI. Di dalam kebijakan tersebut menyatakan bahwa Bank senantiasa melakukan fungsi pengendalian dan pengawasan secara melekat dalam setiap transaksi dan aktivitas operasional Bank.

Berikut adalah kebijakan internal dan proses uji tuntas yang diterapkan BSI.

Kebijakan	Uji Tuntas	Penanggungjawab	Tanggal Terbit Terakhir
Kebijakan Tata Kelola	ISO 37301:2021 tentang Sistem Manajemen Kepatuhan tersertifikasi pada ruang lingkup Anti Money Laundering & Countering Financing of Terrorism	1. Policy & Procedure Group 2. Compliance & Anti Money Laundering (AML) - Countering - Countering Financing of Terrorism (CFT) Group (CAC)	1 Februari 2021
Kebijakan Manajemen Risiko	Laporan Tingkat Kesehatan Bank dan Profil Risiko	Enterprise Risk Management Group	31 Desember 2024
Kebijakan Sistem Pengendalian Intern (KSPI)	Pelaksanaan audit	Satuan Unit Kerja Audit	1 Februari 2021
Kebijakan <i>Anti-Fraud</i>	Laporan <i>Anti-Fraud</i> yang disampaikan ke OJK pada setiap semester, ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti-Penyuapan ( <i>Anti-Bribery Management System/ABMS</i> )	International & Financial Institution Group	1 Februari 2021
Kebijakan Dana dan Jasa	Survei kepuasan nasabah	1. Retail Deposit Solution Group, 2. Wealth Management Group, 3. Institutional Banking Group, 4. Transaction Banking Wholesale Group, 5. Executive Business Officer, 6. Corporate Transformation Office	8 November 2024
Kebijakan Teknologi Informasi	ISO/IEC 27001:2022 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi	IT Strategic Planning Group	03 Juli 2023

Kebijakan	Uji Tuntas	Penanggungjawab	Tanggal Terbit Terakhir
Kebijakan Treasury	Evaluasi berkala	1. Treasury & Global Market Group, 2. International & Financial Institution Group	05 April 2024
Kebijakan Hukum, Kepatuhan, Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU, PPT dan PPPSPM)	ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti-Penyuapan ( <i>Anti-Bribery Management System/ABMS</i> )	1. Compliance Group, 2. Legal Group, 3. Anti Money Laundering - Countering Financing of Terrorism (AML - CFT) Group	20 Februari 2024
Kebijakan Pembiayaan	Evaluasi berkala	1. Consumer Business 1 Group 2. Consumer Business 2 Group 3. Card Business Group 4. Gold & Pawning Business Group 5. Small Medium Enterprise (SME) Business Group 6. Micro Business Group 7. Transaction Banking Wholesale 8. Corporate Business 1 Group 9. Corporate Business 2 Group 10. Corporate Business 3 Group 11. Corporate Finance & Solution Group 12. Commercial Business 1 Group 13. Commercial Business 2 Group	10 Januari 2024
Kebijakan Penyertaan Modal dan Pengelolaan Perusahaan Anak	Evaluasi berkala	Corporate Transformation Office	9 Februari 2022
Kebijakan Human Capital	<i>Improvement survei Human Capital Policy</i>	Human Capital Strategy & Policy Group	1 Februari 2021
Kebijakan Akuntansi	Pelaksanaan audit	Corporate Finance & Accounting Group	1 Februari 2021
Kebijakan Internal Audit	Pelaksanaan audit internal	Wholesale & Corporate Center Audit Group	24 Januari 2023
Kebijakan Operasional yang didalamnya mencakup pengaturan mengenai: a. Prinsip Kehati-hatian b. Pengadaan dan pengelolaan aset c. Layanan dan Kerjasama dengan pihak ketiga d. Pengelolaan Anggaran e. Tata Kelola Kesekretariatan f. Pelindungan Data Pribadi g. Pemenuhan Prinsip Syariah h. Pelindungan dan Pengaduan Nasabah	Evaluasi berkala	1. Procurement & Fixed Asset Group 2. Customer Care Group 3. Strategic Planning & Performance Management Group 4. Corporate Secretary Group 5. Data Protection Group 6. Compliance Group	20 September 2023

Khusus terkait penegakkan terhadap hak asasi manusia, BSI telah memiliki Petunjuk Teknis Operasional (PTO) terkait implementasi Pedoman Saling Menghargai Sesama Pegawai di Lingkungan Kerja (RWP). Kebijakan tersebut digunakan sebagai pedoman bagi seluruh insan BSI dalam menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari diskriminasi, kekerasan dan pelecehan serta menciptakan lingkungan kerja yang inklusif, menghargai perbedaan, kesetaraan termasuk dalam menghargai pegawai yang berkebutuhan khusus, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia untuk mendorong kinerja, pertumbuhan dan keberlangsungan Bank. Atas komitmen BSI terhadap penegakkan HAM, sepanjang tahun 2024, tidak terdapat pelanggaran HAM pada seluruh aktivitas operasional BSI.

Seluruh kebijakan telah ditandatangani Direksi dan diberlakukan sesuai dengan lingkup kebijakan terkait. Beberapa kebijakan seperti Kebijakan Manajemen Risiko, Kebijakan Anti-Fraud dan Kebijakan Hak Nasabah Dana telah disosialisasikan kepada seluruh pemangku kepentingan melalui *website* resmi Bank yaitu [www.bankbsi.co.id](http://www.bankbsi.co.id). Sedangkan, untuk kebijakan lain yang tidak diunggah ke dalam *website* resmi Bank disosialisasikan melalui New Policy System (NPS) yang bisa diakses oleh jaringan internal BSI. Hal ini dikarenakan lingkup kebijakan hanya untuk internal BSI. Khusus kebijakan yang diberlakukan kepada mitra bisnis yang tidak diunggah di dalam *website*, disosialisasikan melalui pertemuan dengan mitra bisnis serta disampaikan melalui dokumen kontrak kerja dengan mitra bisnis.

Kebijakan-kebijakan tersebut kemudian diadopsi ke dalam Standar Prosedur Operasional dan Petunjuk Teknis Operasional yang dijadikan oleh seluruh insan BSI sebagai pedoman kerja. Untuk memaksimalkan implementasi atas kebijakan yang dimiliki, BSI telah menyelenggarakan berbagai pelatihan yang dibutuhkan agar kebijakan-kebijakan tersebut bisa dipahami dan diterapkan dengan baik.

## Proses untuk Memulihkan Dampak Negatif [GRI 2-25, 418-1]

Potensi dampak negatif yang mungkin terjadi dari kegiatan usaha BSI adalah adanya kesalahan maupun kelalaian oleh BSI dalam pemrosesan Data Pribadi nasabah. Terkait dengan hal ini, BSI telah memiliki Kebijakan Privasi PT Bank Syariah Indonesia Tbk yang mengatur ketentuan terkait pemerolehan dan pengumpulan, pengolahan dan penganalisisan, penyimpanan, perbaikan dan pembaruan, penampilan, pengumuman, transfer, penyebarluasan, pengungkapan, penghapusan atau pemusnahan data nasabah termasuk di dalamnya Data Pribadi nasabah oleh BSI.

Kebijakan Privasi ini merupakan bentuk upaya BSI untuk melindungi setiap data nasabah termasuk Data Pribadi nasabah baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan/atau non elektronik. Dalam kebijakan tersebut telah diatur hak nasabah di antaranya adalah dapat mengajukan ganti rugi, baik secara materil maupun non materil, apabila terbukti telah terjadi pelanggaran atas kesalahan maupun kelalaian oleh BSI dalam pemrosesan Data Pribadi.



Mekanisme pemulihan dampak negatif dilakukan melalui saluran pengaduan BSI Call 14040, Mobile banking, E-mail [contactus@bankbsi.co.id](mailto:contactus@bankbsi.co.id), kantor cabang dan kantor pusat. Dalam menangani pengaduan, BSI berpedoman pada SPO Pelindungan dan Pengaduan Nasabah, sehingga 84,69% pengaduan yang diterima selama tahun 2024 dapat diselesaikan maksimal 4 (empat) hari kerja, lebih cepat dari *Service Level Agreement* (SLA) yang ditentukan oleh regulator. Berdasarkan jumlah pengaduan di tahun 2024, sebanyak 99,97% pengaduan telah diselesaikan. Proses pengaduan dilakukan dengan metode pemberian tiket yang diberi nomor untuk memantau penyelesaian pengaduan.





# IKHTISAR KINERJA KEBERLANJUTAN [OJK B]

# 03 »



# Ikhtisar Kinerja Keberlanjutan [OJK B]

## Kinerja Aspek Ekonomi [OJK B.1]

		2024 Growth YoY	2024	2023	2022
	<b>Total Pembiayaan</b>	Dalam Miliar Rupiah	278.481	240.316	207.705
	• Pembiayaan pada <i>Retail Banking</i>	Dalam Miliar Rupiah	49.381	42.258	37.632
	• Pembiayaan pada <i>Wholesale Banking</i>	Dalam Miliar Rupiah	77.218	67.511	57.197
	• <i>Consumer, Gold Business &amp; Card</i>	Dalam Miliar Rupiah	151.883	130.547	112.875
	<b>Dana Pihak Ketiga</b>	Dalam Miliar Rupiah	327.454	293.776	261.491
	<b>Pendapatan Pengelolaan Dana Sebagai Mudharib</b>	Dalam Miliar Rupiah	25.298	22.250	19.620
	<b>Pendapatan Usaha Lainnya</b>	Dalam Miliar Rupiah	5.556	4.204	3.701
	<b>Laba Bersih</b>	Dalam Miliar Rupiah	7.006	5.704	4.260
	<b>Total Penerima Manfaat CSR</b>	Individu	1.544.913	333.000	145.962
		Lembaga	2.255	1.019	1.594
	<b>Program CSR</b>	Dalam Miliar Rupiah	305,57	255,10	187,57
	<b>Penyaluran Zakat Perusahaan dan Pegawai BSI kepada BAZNAS RI</b>	Dalam Miliar Rupiah	268,6	223	173
	<b>Pembiayaan sesuai Kriteria Kegiatan Usaha Berkelanjutan (KKUB)*</b>				
	• <i>Green Financing Portofolio</i>	Dalam Miliar Rupiah	14.084	12.235	9.327
	• <i>Social Financing Portofolio</i>	Dalam Miliar Rupiah	52.415	45.469	41.909
	<b>Total Pemasok dalam Negeri</b>	Dalam Pemasok/ Vendor	413	701	310
		%	99,04	99,43	98,73

Keterangan:

\* Pembiayaan Kriteria Kegiatan Usaha Berkelanjutan (KKUB) merupakan Produk Ramah Lingkungan Bank

## Sustainability Sukuk

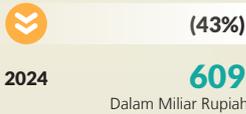


## Pembiayaan Sesuai Kriteria Kegiatan Usaha Berkelanjutan (KKUB)

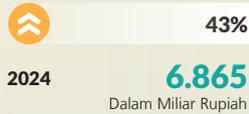
### Green Financing (KUBL)



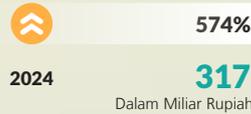
Energi terbarukan



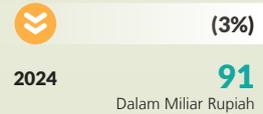
Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati dan Penggunaan Lahan yang Berkelanjutan



Transportasi Ramah Lingkungan



Pengelolaan Air dan Air Limbah yang Berkelanjutan



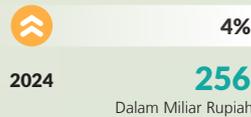
Produk yang Dapat Mengurangi Penggunaan Sumber Daya dan Menghasilkan Lebih Sedikit Polusi (Eco-Efficient)



Bangunan Berwawasan Lingkungan yang Memenuhi Standar atau Sertifikasi yang Diakui Secara Nasional, Regional, atau Internasional



Kegiatan Usaha dan/atau Kegiatan Lain dari Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan Lainnya



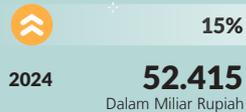
Total Green Financing (KUBL)



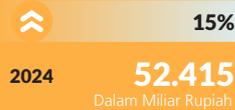
### Sosial Financing (KUBS)



Pembiayaan UMKM



Total Sosial Financing (KUBS)



ESG Financing/Pembiayaan Berkelanjutan (KKUB)



## BSI Agen



Jumlah Agen  
Agen



Jumlah Transaksi  
Juta kali



Nilai Transaksi  
Dalam triliun rupiah



## Kinerja Aspek Lingkungan Hidup [OJK B.2]



Metric	2023	2022
Penggunaan BBM (Liter)	281.983**	97.672**
Penggunaan Listrik (kWh)	2.117.285**	5.155.191**
Penggunaan Lampu LED (%)	100	100
Penggunaan Air (M³)	1.824**	1.905**
Pengurangan Emisi GRK Cakupan 1 (Ton CO <sub>2</sub> -eq)	116,56	-
Pengurangan Emisi GRK Cakupan 2 (Ton CO <sub>2</sub> -eq)	2.547,08	-
Pengurangan Limbah dan Efluen (Ton)	Data belum tersedia	Data belum tersedia
Pelestarian Keanekaragaman Hayati (Pohon)	39.329	33.500

**Keterangan:**  
\*\* Data tahun 2023 dan 2022 hanya mencakup wilayah Kantor Pusat The Tower.  
Sampai dengan tahun 2024, BSI belum melakukan perhitungan atas limbah yang dihasilkan





### Reverse Vending Machine (RVM) & Plasticpay Collection Point

2024



**70 unit**  
di 70 titik lokasi



**21.432 kg**  
Reduksi Sampah Plastik



**113,4 ton Co<sub>2</sub>eq**  
Reduksi Jejak Karbon



Membangun  
**Green Building**  
Landmark BSI Aceh yang  
Merupakan Gedung  
Tertinggi di Aceh

Penggunaan Solar Panel  
Landmark BSI Aceh



2024 **37,4 kWp**



**Electric Vehicle**

2024 **115 Electric Vehicle**

(113 motor dan 2 mobil)

### Water Station Bank Syariah Indonesia (BSI)

**6 Fasilitas Air  
Minum Gratis**

**56.063**  
Air Minum  
dalam Liter

Berkontribusi  
mengurangi  
sampah air minum  
kemasan sebanyak  
**93.438 botol**  
plastik



# Kinerja Aspek Sosial [OJK B.3]

## Dampak Positif



Turnover Pegawai	
Persentase	
2024	3,21
2023	3,77
2022	4,57

Jam Pelatihan	
Jam	
2024	258.103
2023	1.392.792
2022	2.274.326

Biaya Pelatihan	
Dalam Miliar Rupiah	
2024	141,59
2023	90,64
2022	97,22

Komposisi Pegawai Penyandang Disabilitas	
Orang	
2024	7
2023	7
2022	2

Survei Kepuasan Nasabah	
%	
2024	64,91 (Engaged)
2023	60,60 (Rationally Royal)
2022	52,50 (Rationally Royal)

UMKM Binaan	
UMKM	
2024	4.478
2023	3.009
2022	1.517



## Dampak Negatif

Seperti sudah disampaikan pada bagian Pemulihan Dampak Negatif dalam Laporan keberlanjutan ini, dalam kegiatan usaha BSI, terdapat potensi adanya kesalahan maupun kelalaian oleh BSI dalam pemrosesan data pribadi nasabah. Oleh karena itu, BSI telah memiliki Kebijakan Privasi PT Bank Syariah Indonesia Tbk yang mengatur ketentuan terkait pemerolehan dan pengumpulan, pengolahan dan penganalisisan, penyimpanan, perbaikan dan pembaruan, penampilan, pengumuman, transfer, penyebarluasan, pengungkapan, penghapusan atau pemusnahan data nasabah termasuk didalamnya data pribadi nasabah oleh BSI.

Potensi dampak negatif juga dimungkinkan terjadi karena pemahaman nasabah yang kurang terkait produk BSI, sehingga mengakibatkan adanya keluhan-keluhan yang timbul dari nasabah. BSI telah mengakomodir dan memiliki ketentuan Pelindungan dan Pengaduan Nasabah yang menjadi rujukan kebijakan Dana dan Jasa yang mengatur bahwa dalam setiap pemasaran produk dan layanan bank, hak hak nasabah menjadi perhatian penting yang meliputi:

1

Hak untuk mendapatkan penjelasan dari Bank mengenai istilah, frasa, dan/atau kalimat yang mudah dimengerti mengenai produk dan layanan Bank.

2

Hak untuk mendapatkan informasi baik mengenai produk dana dan jasa yang diterbitkan Bank maupun produk dan jasa pihak lain yang dipasarkan melalui Bank.

3

Hak untuk mendapatkan informasi apabila terdapat perubahan, penambahan dan atau pengurangan yang dilakukan pada fitur produk dan jasa layanan Bank maupun pihak lain yang dipasarkan melalui Bank.

4

Hak untuk mengetahui karakteristik produk dana dan jasa Bank atau pihak lain secara memadai terutama mengenai manfaat, risiko dan biaya-biaya serta perhitungan nisbah/bagi hasil yang melekat pada produk dan jasa tersebut; serta hak untuk mengetahui jaminan terhadap produk dan layanan yang ditawarkan Bank.



# BSI

## BANK SYARIAH INDONESIA



# PROFIL PERUSAHAAN [OJK C]

# 04 »



# Visi, Misi, dan Nilai Keberlanjutan [OJK C.1]



## VISI BSI

“Menjadi **Top 10** bank syariah global berdasarkan kapitalisasi pasar dalam waktu 5 tahun.”



## » VISI Keberlanjutan

BSI telah memiliki visi keberlanjutan yang tercantum di dalam ESG Guiding Principle, sebagai berikut:



**The Best Global  
Islamic Bank Based  
on Implementation of  
Sustainable Finance.**



## MISI BSI



## » MISI Keberlanjutan

BSI juga telah mengembangkan misi implementasi keuangan berkelanjutan yang selaras dengan misi BSI yaitu:



# NILAI Keberlanjutan

Keberlanjutan telah menjadi salah satu fokus utama bagi PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI). Sebagai perbankan berbasis syariah, sudah menjadi kewajiban bagi kami untuk menjaga lingkungan dan memberikan manfaat sosial demi masa depan. Hal ini sejalan dengan *Maqashid Syariah* yang terdiri dari *Hifdz Ad-Din* (memelihara agama), *Hifdz An-Nafs* (memelihara jiwa), *Hifdz Al'Aql* (memelihara akal), *Hifdz Al-Maal* (memelihara harta), *Hifdz An-Nasb* (memelihara keturunan), dan *Hifdz Al-Bi'ah* (memelihara lingkungan).

Dalam implementasinya, BSI senantiasa berkomitmen dalam menjalankan kegiatan usaha yang bertanggung jawab serta memberikan nilai tambah yang berkelanjutan untuk kebaikan dunia dan akhirat. Internalisasi Nilai Keberlanjutan BSI terwujud dalam 3 (tiga) Pilar Keberlanjutan, yakni:



## Pilar Sustainable Banking: *leader in sustainable product innovation*

Pada pilar pertama, BSI fokus dalam menjalankan aktivitas bisnis Bank yang berkelanjutan dengan komitmen "*Leader in Sustainable Product Innovation*". Hal ini diwujudkan melalui integrasi aspek ESG pada seluruh aktivitas bisnis BSI yang mencakup pengelolaan aspek risiko dan aspek bisnis melalui pengembangan produk/layanan keuangan dan pengelolaan portofolio yang berkelanjutan termasuk membantu nasabah dapat berperan dalam ekonomi rendah karbon dan aktivitas bisnis yang berkelanjutan.



## Pilar Sustainable Operation: *net zero emission in operations by 2033*

Pilar ini merupakan bentuk dukungan BSI pada target *Net Zero Emission* yang telah ditetapkan oleh Pemerintah pada tahun 2060. Pada pilar kedua, dalam rangka mendukung pencapaian salah satu target keberlanjutan yaitu *Net Zero Emission* pada operasional pada tahun 2033, BSI memastikan integrasi prinsip-prinsip ESG di seluruh kegiatan bisnis yang mencakup aspek kesadaran (*awareness*), operasional ramah lingkungan, penerapan teknologi untuk menjaga perlindungan data pribadi nasabah, mitigasi risiko atas perubahan iklim, hingga pengelolaan sumber daya manusia (SDM) yang memperluas keberagaman, kesetaraan, dan inklusivitas (*diversity, equality, inclusivity/DEI*) di lingkungan kerja. Pencapaian target *Net Zero Emission* pada operasional di tahun 2033 juga didukung program *digital transformation* yang sejalan dengan strategi BSI. *Digital transformation* mengintegrasikan teknologi digital ke dalam seluruh aspek operasional, strategi, dan budaya organisasi untuk menciptakan nilai tambah, meningkatkan efisiensi, dan memberikan pengalaman yang lebih baik kepada pelanggan atau pemangku kepentingan. BSI telah menerapkan Pelindungan Data Pribadi (PDP) yang mengacu pada Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah beserta perubahannya, dan peraturan perundang-undangan lainnya di bidang pelindungan Data Pribadi dan jasa keuangan, serta regulasi yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Bank Indonesia. Komitmen BSI dalam pengelolaan data nasabah juga tercermin dari telah dimilikinya ISO/IEC 27001:2022 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi.



## Pilar Sustainable Beyond Banking: *leader in ZISWAF ecosystem for social impact to achieve SDGs*

Pada pilar ketiga, BSI memperluas komitmen terhadap keberlanjutan dengan melakukan penajaman kegiatan di luar bisnis inti perbankan dan operasional dalam aspek sosial untuk meningkatkan skala ekonomi masyarakat melalui berbagai program pemberdayaan dengan memberdayakan masyarakat serta komunitas dalam rangka mencapai sinergi antara pertumbuhan bisnis dan kemaslahatan. Salah satu bentuk program tersebut adalah dengan menyediakan titik akses melalui BSI Agen. BSI Agen merupakan agen Laku Pandai atau Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif. Terdapat 119 Kabupaten daerah *blankspace* yang sudah dilayani oleh 3.040 BSI Agen. BSI Agen saat ini berjumlah 119.295 titik Agen yang tersebar di seluruh daerah Indonesia. Jumlah BSI Agen meningkat 38% dibandingkan dengan tahun 2023 yang jumlahnya sebanyak 86.200 agen.



# Identitas Perusahaan [OJK C.2, GRI 2-1, GRI 2-6]



## NAMA PERUSAHAAN [GRI 2-1]

PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK



NAMA SINGKAT  
Bank BSI

## DASAR HUKUM PENDIRIAN



- Berita Negara RI No. 43 – 28 Mei 1971 No. 242
- Berita Negara RI No. 85-23 Oktober 2009 No. 26142
- Berita Negara RI No. 96 – 1 Desember 2009 No. 27908

## IZIN USAHA [GRI 2-1]



- Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.10/67/KEP.GBI/DpG/2008 tanggal 16 Oktober 2008
- Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.11/63/KEP.GBI/DpG/2009 tanggal 15 Desember 2009

## MODAL DASAR



Rp40.000.000.000.000

## BURSA EFEK



Saham Perseroan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 9 Mei 2018

## MODAL DITEMPATKAN DAN DISETOR PENUH



Rp23.064.630.069.000

## BIDANG USAHA [GRI 2-6]



Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah

## JUMLAH PEGAWAI [OJK C.3]



17.234 orang per 31 Desember 2024

Informasi alamat kantor cabang dan kantor perwakilan telah disajikan secara lengkap pada Laporan Tahunan bagian Profil Perusahaan.



#### Akses Informasi [GRI 2-1]

##### Sekretaris Perusahaan

Wisnu Sunandar

**E-mail:** corporate.secretary@bankbsi.co.id

##### Investor Relation

Rizky Budinanda

**E-mail:** investor-relations@bankbsi.co.id

##### Kantor Pusat

Gedung The Tower

Jl. Gatot Subroto No.27, Karet Semanggi, Setiabudi,  
Jakarta Selatan, 12930, Indonesia

**Telepon** : 021-30405999

**Faks** : (021) 30421888

**Website** : www.bankbsi.co.id

**E-mail** : contactus@bankbsi.co.id

##### Call Center

14040

1500789 (khusus melayani nasabah perusahaan  
dan institusi)

##### Media Sosial

**Instagram** : @banksyariahindonesia, @lifewithbsi,  
@BSIMobile

**X (Twitter)** : @bankbsi\_id, @bsihelp

**Facebook** : Bank Syariah Indonesia

**Youtube** : Bank Syariah Indonesia



#### Kepemilikan [GRI 2-1]

##### Saham Seri A Dwiwarna:

Negara Republik Indonesia 1 Lembar

##### Saham Seri B Dwiwarna:

- PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 51,47%
- PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 23,24%
- PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 15,38%
- Pemegang Saham Lainnya (termasuk Publik) 9,91%



#### Data Jaringan Kantor

##### Jaringan kantor terdiri dari:

- 10 Kantor Wilayah
- 153 Kantor Cabang (KC)
- 1 Kantor Cabang Luar Negeri (KCLN)
- 886 Kantor Cabang Pembantu (KCP)
- 60 KCP Mobile (dhi: MKK)
- 91 Kantor Fungsional (KF)
- 23 Konter Layanan Priority
- 754 Konter Layanan Gadai
- 5.425 Anjungan Tunai Mandiri (ATM)

# Skala Perusahaan [OJK C.3]

Rincian terkait skala perusahaan disajikan pada tabel di bawah ini:

Uraian	Satuan	2024	2023	2022
Pendapatan Pengelolaan Dana Sebagai <i>Mudharib</i>	Dalam Miliar Rupiah	25.298	22.251	19.620
Laba Bersih	Dalam Miliar Rupiah	7.006	5.704	4.260
Total Aset	Dalam Miliar Rupiah	408.613	353.624	305.727
Total Liabilitas	Dalam Miliar Rupiah	105.647	87.222	73.655
Dana <i>Syirkah</i> Temporer	Dalam Miliar Rupiah	257.924	227.662	198.566
Total Ekuitas	Dalam Miliar Rupiah	45.041	38.739	33.505
Nama Pemegang Saham dan Persentase		<b>Saham Seri A Dwiwarna:</b> Negara Republik Indonesia 1 Lembar  <b>Saham Seri B Dwiwarna:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 51,47%</li> <li>PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 23,24%</li> <li>PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 15,38%</li> <li>Pemegang Saham Lainnya (termasuk Publik) 9,91%</li> </ul>	<b>Saham Seri A Dwiwarna:</b> Negara Republik Indonesia 1 Lembar  <b>Saham Seri B Dwiwarna:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 51,47%</li> <li>PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 23,24%</li> <li>PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 15,38%</li> <li>Pemegang Saham Lainnya (termasuk Publik) 9,91%</li> </ul>	<b>Saham Seri A Dwiwarna:</b> Negara Republik Indonesia 1 Lembar  <b>Saham Seri B Dwiwarna:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 51,47%</li> <li>PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 23,24%</li> <li>PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 15,38%</li> <li>Pemegang Saham Lainnya (termasuk Publik) 9,91%</li> </ul>
Jumlah Pegawai	Dalam Orang	17.234	17.909	18.581
Jaringan ATM	Dalam Unit	5.425	2.571	2.548

## Informasi Mengenai Pegawai [OJK C.3, GRI 2-7, GRI 2-8]

Sampai dengan 31 Desember 2024, BSI telah mempekerjakan sebanyak 17.234 orang pegawai yang terdiri dari 16.691 orang pegawai tetap dan 543 orang pegawai tidak tetap/kontrak. Data pegawai yang dilaporkan pada Laporan Keberlanjutan ini merupakan total pegawai BSI yang tersebar di seluruh area operasional di seluruh Indonesia per 31 Desember 2022, 2023, dan 2024. Metodologi yang digunakan untuk menyusun data adalah menggunakan *in head count* dan merupakan kondisi pada akhir periode pelaporan. Seluruh pegawai BSI merupakan pegawai penuh waktu. BSI tidak mempekerjakan *non-guaranteed hours employee*. Dalam Laporan Keberlanjutan ini tidak terdapat fluktuasi yang signifikan baik selama periode tahun 2024 maupun selama 3 (tiga) tahun terakhir (antar periode).

Pada tahun 2024, BSI juga telah mempekerjakan pekerja bukan pegawai yaitu tenaga alih daya sebanyak 6.743 orang. Tenaga alih daya ditempatkan pada bidang *Business* dan *Support*. Selain itu, BSI juga memberikan kesempatan magang kepada mahasiswa tingkat akhir untuk memenuhi kebutuhan studinya sebanyak 99 orang yang ditempatkan di Kantor Pusat. Sebagian besar tenaga magang ditempatkan pada bidang *Business*, *Risk* dan *Support*.

Komposisi pegawai diuraikan sebagai berikut.

## Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

(dalam satuan orang)

Jenis Kelamin	2024	2023	2022
Pria	10.168	10.542	11.008
Wanita	7.066	7.367	7.573
Jumlah	17.234	17.909	18.581

## Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin



## Komposisi Pegawai Berdasarkan Level Jabatan dan Jenis Kelamin

Tabel Komposisi Pegawai Berdasarkan Level Jabatan dan Jenis Kelamin

(dalam satuan orang)

Level Jabatan	2024			2023			2022		
	Pria	Wanita	Total	Pria	Wanita	Total	Pria	Wanita	Total
Senior Manager	69	26	95	75	21	96	68	20	88
Middle Manager	371	112	483	352	103	455	333	96	429
Manager	1.785	578	2.363	1.702	538	2.240	1.703	515	2.218
Officer	3.587	2.189	5.776	3.679	2.148	5.827	3.919	2.169	6.088
Staff	4.356	4.161	8.517	4.734	4.557	9.291	4.985	4.773	9.758
<b>Jumlah</b>	<b>10.168</b>	<b>7.066</b>	<b>17.234</b>	<b>10.542</b>	<b>7.367</b>	<b>17.909</b>	<b>11.008</b>	<b>7.573</b>	<b>18.581</b>

## Komposisi Pegawai Berdasarkan Usia dan Jenis Kelamin

Tabel Komposisi Pegawai Berdasarkan Usia dan Jenis Kelamin

(dalam satuan orang)

Usia	2024			2023			2022		
	Pria	Wanita	Total	Pria	Wanita	Total	Pria	Wanita	Total
< 25 tahun	92	142	234	76	158	234	81	170	251
25-30 tahun	1.028	1.557	2.585	1.393	2.040	3.433	1.823	2.367	4.190
30-35 tahun	2.149	1.912	4.061	2.419	2.056	4.475	2.771	2.320	5.091
35-40 tahun	3.263	2.135	5.398	3.294	1.967	5.261	3.193	1.671	4.864
40-45 tahun	2.113	806	2.919	1.959	698	2.657	1.876	678	2.554
45-50 tahun	1.035	364	1.399	1.004	334	1.338	860	252	1.112
> 50 tahun	488	150	638	397	114	511	404	115	519
<b>Jumlah</b>	<b>10.168</b>	<b>7.066</b>	<b>17.234</b>	<b>10.542</b>	<b>7.367</b>	<b>17.909</b>	<b>11.008</b>	<b>7.573</b>	<b>18.581</b>

## Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin

Tabel Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin

(dalam satuan orang)

Tingkat Pendidikan	2024			2023			2022		
	Pria	Wanita	Total	Pria	Wanita	Total	Pria	Wanita	Total
Doktoral	11	3	14	7	3	10	9	2	11
Magister	693	323	1.016	652	291	943	632	268	900
Sarjana	8.610	5.993	14.603	8.943	6.257	15.200	9.285	6.430	15.715
Diploma	829	743	1.572	910	810	1.720	1.033	865	1.898
SMA	25	4	29	30	6	36	49	8	57
<b>Jumlah</b>	<b>10.168</b>	<b>7.066</b>	<b>17.234</b>	<b>10.542</b>	<b>7.367</b>	<b>17.909</b>	<b>11.008</b>	<b>7.573</b>	<b>18.581</b>

## Komposisi Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian dan Jenis Kelamin

Tabel Komposisi Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian dan Jenis Kelamin

(dalam satuan orang)

Status Kepegawaian	2024			2023			2022		
	Pria	Wanita	Total	Pria	Wanita	Total	Pria	Wanita	Total
Tetap (PKWTT)	9.860	6.831	16.691	10.220	7.025	17.245	10.572	7.064	17.636
Tidak Tetap (PKWT - Kontrak)	308	235	543	322	342	664	436	509	945
<b>Total</b>	<b>10.168</b>	<b>7.066</b>	<b>17.234</b>	<b>10.542</b>	<b>7.367</b>	<b>17.909</b>	<b>11.008</b>	<b>7.573</b>	<b>18.581</b>

## Komposisi Pegawai Berdasarkan Wilayah dan Jenis Kelamin

Tabel Komposisi Pegawai Berdasarkan Wilayah dan Jenis Kelamin

(dalam satuan orang)

Wilayah Kerja	2024			2023			2022		
	Pria	Wanita	Total	Pria	Wanita	Total	Pria	Wanita	Total
Kantor Pusat	3.308	1.485	4.793	3.278	1.495	4.773	3.245	1.414	4.659
Region I - Medan	1.155	776	1.931	1.223	801	2.024	1.283	811	2.094
Region II - Palembang	570	427	997	598	454	1.052	637	470	1.107
Region III - Jakarta	787	571	1.358	830	594	1.424	882	626	1.508
Region IV - Bandung	600	671	1.271	640	707	1.347	693	766	1.459
Region V - Semarang	500	541	1.041	516	555	1.071	534	572	1.106
Region VI - Surabaya	558	445	1.003	609	464	1.073	679	477	1.156
Region VII - Indonesia Timur	686	525	1.211	714	562	1.276	767	587	1.354
Region VIII - Makassar	1.062	825	1.887	1.137	874	2.011	1.241	950	2.191
Region IX - Aceh	400	368	768	425	399	824	451	425	876
Region X - Banjarmasin	542	432	974	572	462	1.034	596	475	1.071
<b>Jumlah</b>	<b>10.168</b>	<b>7.066</b>	<b>17.234</b>	<b>10.542</b>	<b>7.367</b>	<b>17.909</b>	<b>11.008</b>	<b>7.573</b>	<b>18.581</b>

## Komposisi Pegawai Tetap Berdasarkan Wilayah dan Jenis Kelamin

Tabel Komposisi Pegawai Tetap Berdasarkan Wilayah dan Jenis Kelamin

(dalam satuan orang)

Wilayah Kerja	2024			2023			2022		
	Pria	Wanita	Total	Pria	Wanita	Total	Pria	Wanita	Total
Kantor Pusat	1.429	3.161	4.590	3.154	1.384	4.538	3.155	1.353	4.508
Region I – Medan	648	1.030	1.678	1.084	647	1.731	1.071	551	1.622
Region II – Palembang	426	565	991	594	453	1.047	626	457	1.083
Region III – Jakarta	569	782	1.351	822	590	1.412	853	608	1.461
Region IV – Bandung	666	599	1.265	638	703	1.341	679	741	1.420
Region V – Semarang	533	497	1.030	512	553	1.065	527	560	1.087
Region VI – Surabaya	443	556	999	607	461	1.068	666	457	1.123
Region VII – Indonesia Timur	524	686	1.210	713	554	1.267	762	576	1.338
Region VIII – Makassar	804	1.048	1.852	1.115	834	1.949	1.211	890	2.101
Region IX – Aceh	358	396	754	413	389	802	436	409	845
Region X – Banjarmasin	431	540	971	568	457	1.025	586	462	1.048
<b>Jumlah</b>	<b>6.831</b>	<b>9.860</b>	<b>16.691</b>	<b>10.220</b>	<b>7.025</b>	<b>17.245</b>	<b>10.572</b>	<b>7.064</b>	<b>17.636</b>

## Komposisi Pegawai Tidak Tetap/Kontrak Berdasarkan Wilayah dan Jenis Kelamin

Tabel Komposisi Pegawai Tidak Tetap/Kontrak Berdasarkan Wilayah dan Jenis Kelamin

(dalam satuan orang)

Wilayah Kerja	2024			2023			2022		
	Pria	Wanita	Total	Pria	Wanita	Total	Pria	Wanita	Total
Kantor Pusat	147	56	203	124	111	236	90	61	151
Region I – Medan	125	128	253	139	154	293	212	260	472
Region II – Palembang	5	1	6	4	1	5	11	13	24
Region III – Jakarta	5	2	7	8	4	12	29	18	47
Region IV – Bandung	1	5	6	2	4	6	14	25	39
Region V – Semarang	3	8	11	4	2	236	7	12	19
Region VI – Surabaya	2	2	4	2	3	6	13	20	33
Region VII – Indonesia Timur	-	1	1	1	8	5	5	11	16
Region VIII – Makassar	14	21	35	22	40	9	30	60	90
Region IX – Aceh	4	10	14	12	10	22	15	16	31
Region X – Banjarmasin	2	1	3	4	5	9	10	13	23
<b>Jumlah</b>	<b>308</b>	<b>235</b>	<b>543</b>	<b>322</b>	<b>342</b>	<b>664</b>	<b>436</b>	<b>509</b>	<b>945</b>

## Komposisi Pekerja yang Bukan Pegawai (Tenaga Alih Daya) Berdasarkan Jenis Kelamin dan Penempatan [GRI 2-8]

### Komposisi Pekerja yang Bukan Pegawai (Tenaga Alih Daya) Berdasarkan Jenis Kelamin dan Penempatan

(dalam satuan orang)

Wilayah Kerja	2024			2023			2022		
	Pria	Wanita	Total	Pria	Wanita	Total	Pria	Wanita	Total
Kantor Pusat	953	293	1.246	913	272	1.185	801	294	1.095
Region I – Medan	490	49	539	540	75	615	671	91	762
Region II – Palembang	461	109	570	458	101	559	539	109	648
Region III – Jakarta	492	52	544	525	91	616	630	91	721
Region IV – Bandung	694	129	823	709	113	822	805	141	946
Region V – Semarang	534	99	633	537	101	638	596	121	717
Region VI – Surabaya	412	40	452	427	49	476	511	67	578
Region VII – Indonesia Timur	449	29	478	482	61	543	552	106	658
Region VIII – Makassar	638	29	667	689	82	771	827	160	987
Region IX – Aceh	300	76	376	293	73	366	374	86	460
Region X – Banjarmasin	326	89	415	303	72	375	371	102	473
<b>Jumlah</b>	<b>5.749</b>	<b>994</b>	<b>6.743</b>	<b>5.876</b>	<b>1.090</b>	<b>6.966</b>	<b>6.677</b>	<b>1.368</b>	<b>8.045</b>

## Wilayah Operasional [OJK C.3, GRI 2-1]

Bank BSI beroperasi di berbagai wilayah di Negara Republik Indonesia dan juga di beberapa negara lain yaitu di negara Dubai, Uni Emirat Arab. Per Desember 2024, Bank BSI memiliki 1 (satu) Kantor Pusat, 10 Kantor Wilayah, 153 Kantor Cabang, 1 (satu) Kantor Cabang Luar Negeri (KCLN), 886 Kantor Cabang Pembantu (KCP), 60 KCP Mobile (dhi: MKK), 91 Kantor Fungsional (KF), 23 Konter Layanan Priority, 754 Konter Layanan Gadai, dan 5.425 Anjungan Tunai Mandiri (ATM).

### Tabel Jaringan Kantor BSI

Jenis Kantor	2024	2023	2022	2021
Kantor Wilayah	10	10	10	10
Kantor Cabang (KC)	153	153	153	272
Kantor Cabang Luar Negeri (KCLN)	1	1	-	-
Kantor Cabang Pembantu (KCP)	886	886	959	985
KCP Mobile (dhi: MKK)	60	60	60	-
Kantor Fungsional (KF)	91	91	96	34
Kantor Kas (KK)	-	-	-	74
Payment Point (PP)	-	-	-	179
Konter Layanan Priority	23	20	16	11
Layanan Gadai	754	765	734	530
Anjungan Tunai Mandiri (ATM)	5.425	2.571	2.548	2.618

**Keterangan:**

- PP tahun 2022 Reformat menjadi KFO (cfm. POJK No.16 Tahun 2022)  
- KK tahun 2022 Reformat menjadi KCP (cfm. POJK No.16 Tahun 2022)

Tabel Jaringan Kantor Per Wilayah Tahun 2024

Wilayah	Jenis Kantor						
	KC	KCLN	KCP	KCP Mobile	KF	Konter Layanan Priority	Layanan Gadai
Kantor Wilayah 1	16	0	137	1	7	2	80
Kantor Wilayah 2	15	0	80	7	7	2	58
Kantor Wilayah 3	16	0	87	8	2	1	73
Kantor Wilayah 4	15	0	111	10	11	5	85
Kantor Wilayah 5	15	0	84	2	7	5	63
Kantor Wilayah 6	12	0	68	6	0	2	65
Kantor Wilayah 7	13	0	91	7	13	3	71
Kantor Wilayah 8	20	0	119	10	26	1	127
Kantor Wilayah 9	16	0	53	5	0	1	55
Kantor Wilayah 10	15	0	56	4	18	1	77
<b>TOTAL</b>	<b>153</b>	<b>0</b>	<b>886</b>	<b>60</b>	<b>91</b>	<b>23</b>	<b>754</b>

## Produk, Layanan dan Kegiatan Usaha yang Dijalankan [OJK C.4, GRI 2-6]

Sesuai dengan Anggaran Dasar Nomor 37 tanggal 17 Mei 2024, maksud dan tujuan BSI adalah menyelenggarakan usaha dalam bidang perbankan berdasarkan prinsip syariah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, BSI menjalankan kegiatan usaha utama dan kegiatan usaha penunjang yang mendukung kegiatan utama. Informasi lengkap terkait dengan kegiatan usaha utama dan kegiatan usaha penunjang yang mendukung kegiatan utama telah disampaikan secara rinci pada Laporan Tahunan bagian Profil Perusahaan. Seluruh kegiatan usaha menurut Anggaran Dasar telah dijalankan oleh Bank.

Sampai dengan akhir tahun 2024, BSI menyediakan beragam produk dan layanan sesuai dengan kebutuhan dan profil masing-masing nasabah. Produk dan layanan tersebut terbagi dalam 4 (empat) kategori yaitu individu, perusahaan, *digital banking* dan kartu. Rincian dari 4 (empat) kategori, sebagai berikut.

Kategori	Jenis Produk dan Layanan
Individu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bisnis</li> <li>• Emas</li> <li>• Haji dan Umroh</li> <li>• Investasi</li> <li>• Pembiayaan</li> <li>• Prioritas</li> <li>• Tabungan</li> <li>• Transaksi</li> </ul>
Perusahaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cash Management</li> <li>• Treasury</li> <li>• Service</li> <li>• Pembiayaan</li> <li>• Simpanan</li> </ul>

Kategori	Jenis Produk dan Layanan
Digital Banking	SuperApps BYOND
Kartu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kartu Pembiayaan</li> <li>• Kartu Debit</li> </ul>

Informasi terkait rincian jenis produk dan layanan beserta penjelasannya telah disajikan secara lengkap pada Laporan Tahunan bagian Profil Perusahaan.

Pasar yang dilayani terdiri atas segmen usaha *wholesale banking*, segmen usaha hubungan kelembagaan, segmen usaha ritel serta segmen usaha *treasury banking* dan kantor pusat.

Segmen Usaha	Pasar Dilayani
<i>Wholesale Banking</i>	Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan anak perusahaannya, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan anak perusahaannya, lembaga negara, <i>multinational company</i> , serta bank dan lembaga keuangan bukan bank (termasuk modal ventura <i>non linkage</i> ).
Hubungan Kelembagaan	Pengelolaan dana nasabah dan transaksi-transaksi lainnya milik nasabah Kementerian Negara/Lembaga, BUMN, Perguruan Tinggi Negeri/Swasta, Rumah Sakit dan Swasta Bonafide.
Ritel	<i>Small Medium Enterprise (SME)</i> , Mikro dan Konsumer.
<i>Treasury Banking</i> dan Kantor Pusat	Melayani produk-produk di luar pembiayaan, produk simpanan dan non simpanan.

## Rantai Pasok [GRI 2-6]

Dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya, BSI bekerja sama dengan mitra pemasok yang berfungsi sebagai penyedia berbagai kebutuhan, termasuk barang kantor, tenaga kerja, sarana transportasi, konsultan perencana, pelaksana dan pengawas infrastruktur, serta jasa pendampingan lainnya. Hingga akhir Desember 2024, BSI telah melakukan pengadaan sejumlah 873 pengadaan dan telah melakukan kerja sama dengan 417 pemasok.

Uraian	2024	2023	2022
Pengadaan Barang dan Jasa IT	314	449	225
Pengadaan Barang dan Jasa Non-IT	364	438	460
Pengadaan Renovasi/Relokasi	195	86	237
<b>Total Pengadaan</b>	<b>873</b>	<b>973</b>	<b>922</b>

### Jumlah Pemasok Barang dan Jasa

Keterangan	Jumlah Pemasok					
	2024		2023		2022	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Pemasok Dalam Negeri	413	99,04	701	99,43	310	98,73
Pemasok Luar Negeri	4	0,96	4	0,57	4	1,27
<b>Total</b>	<b>417</b>	<b>100</b>	<b>705</b>	<b>100</b>	<b>314</b>	<b>100</b>

## Entitas Hilir dan Relasi Bisnis Lainnya [GRI 2-6]

Sampai dengan 31 Desember 2024, BSI tidak memiliki entitas anak, entitas asosiasi dan hubungan bisnis dalam bentuk ventura bersama.

## Keanggotaan Asosiasi [OJK C.5, GRI 2-28]

Dalam rangka meningkatkan wawasan dan memperoleh informasi terkini terkait perubahan industri perbankan syariah, regulasi, kondisi ekonomi, dan kebutuhan nasabah, BSI telah berpartisipasi dalam berbagai asosiasi dan organisasi industri

serta profesi. Hingga akhir tahun 2024, BSI telah tergabung dalam berbagai asosiasi pada tingkat nasional maupun internasional di antaranya sebagai berikut.

No.	Asosiasi	Posisi	Skala
1.	Perhimpunan Bank-bank Nasional (Perbanas)	Anggota	Nasional
2.	Pekumpulan Bank Syariah Indonesia (Asbisindo)	Ketua Umum	Nasional
3.	Islamic Financial Services Board (IFSB)	Anggota	Internasional
4.	Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK)	Anggota	Nasional
5.	Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan (FKDKP)	Anggota	Nasional
6.	Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI)	Anggota	Nasional
7.	Asosiasi Bank Agen Penjual Efek Reksa Dana Indonesia (ABAPERDI)	Anggota	Nasional
8.	Asosiasi Emiten Indonesia (AEI)	Anggota	Nasional
9.	Masyarakat Ekonomi Syariah (MES)	Anggota	Nasional
10.	Ikatan Bankir Indonesia (IBI)	Anggota	Nasional
11.	Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI)	Anggota	Nasional
12.	Badan Musyawarah Perbankan Daerah (BMPD)	Anggota	Nasional
13.	Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan (FK IJK)	Anggota	Nasional
14.	Forum Human Capital Indonesia (FHCI)	Anggota	Nasional
15.	Indonesia Corporate Secretary Association (ICSA)	Anggota	Nasional
16.	Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN - MUI)	Anggota	Nasional
17.	Asosiasi Kartu Kredit Indonesia (AKKI)	Anggota	Nasional
18.	Asosiasi Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing Indonesia (APUVINDO)	Anggota	Nasional
19.	Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)	Anggota	Nasional

## Perubahan Perusahaan yang Bersifat Signifikan pada Organisasi [OJK C.6, GRI 2-6]

Selama tahun 2024, tidak terdapat perubahan perusahaan yang bersifat signifikan. Namun demikian, terdapat penambahan

3 (tiga) Konter Layanan Priority, penutupan 11 Layanan Gadai dan penambahan 2.854 unit mesin ATM.

# Penjelasan Direksi

[OJK D.1, GRI 2-22]

“ BSI hadir menjadi denyut nadi keuangan syariah yang mengintegrasikan keseimbangan aspek *Environmental, Social, & Governance (ESG)* dan nilai-nilai *Maqashid Syariah*, mendukung Asta Cita Pemerintah dalam mendorong kemandirian bangsa melalui ekonomi hijau, bergerak bersama menuju aksi keberlanjutan yang unggul, dan menginspirasi dunia.”

Hery Gunardi  
Direktur Utama



*Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.*

#### Para pemangku kepentingan yang kami hormati,

Pertama-tama, izinkan kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan dan dukungan yang telah diberikan oleh para pemegang saham, mitra usaha, dan seluruh pemangku kepentingan kepada BSI. Dukungan dan kepercayaan tersebut menjadi penyemangat kami untuk terus melanjutkan peran strategis BSI sebagai bank syariah terbesar di Indonesia, yang hadir sebagai sahabat finansial, sosial, dan spiritual untuk memberikan manfaat berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan.

Puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala, karena atas kehendak-Nya, BSI mampu memperoleh capaian yang baik di tahun 2024. Kinerja keuangan BSI tahun 2024 berada di atas pertumbuhan industri, dengan kualitas yang sehat. Aset BSI tumbuh sebesar 15,55% *year-on-year* (YoY) menjadi Rp409 triliun. DPK BSI tumbuh sebesar 11,46% YoY menjadi Rp327 triliun. Hal ini memperkokoh CASA BSI menjadi Rp197 triliun. Di sisi lain, pembiayaan tumbuh 15,88% YoY menjadi Rp278 triliun. *Fee Based Income* BSI tumbuh *double-digit* sebesar 32,58% YoY menjadi Rp5,51 triliun. Seluruh pencapaian ini membuat BSI mampu mencetak laba bersih sebesar Rp7,01 triliun atau naik 22,83% YoY.

Rekan-rekan sejawat, para pemegang saham, mitra usaha, dan seluruh pemangku kepentingan, dengan penuh rasa tanggung jawab kami persembahkan Laporan Keberlanjutan BSI tahun buku 2024. Laporan ini merupakan bukti komitmen BSI untuk mengintegrasikan praktik berkelanjutan ke dalam aktivitas bisnis dan operasional, berbagai tantangan yang dihadapi, program-program keberlanjutan yang telah dijalankan, serta pencapaian kinerja, baik finansial maupun non-finansial. Melalui laporan ini, kami ingin menginformasikan berbagai inisiatif dan prestasi yang telah dicapai dalam aspek *Environmental, Social, & Governance* (ESG) dan komitmen dalam mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).

### Mewujudkan Visi Keberlanjutan BSI: *The Best Global Islamic Bank Based On Sustainable Finance*

Keberlanjutan merupakan komitmen dunia yang membutuhkan peran serta dan kolaborasi dari seluruh pihak, termasuk sektor keuangan. Tahun 2024 merupakan tahun yang sangat penting

bagi BSI dalam menghadapi tantangan global, seperti perubahan iklim, kemiskinan dan ketimpangan, tekanan sosial ekonomi, dan kebutuhan untuk membangun sistem ekonomi yang universal, modern, inklusif, dan terintegrasi.

Kami memahami tanggung jawab besar tersebut tidak dapat dicapai tanpa penguatan tata kelola yang baik. Sepanjang tahun 2024, BSI melakukan penguatan tata kelola sebagai fondasi dasar yang sangat penting dalam mewujudkan keberlanjutan, di antaranya penetapan visi keberlanjutan BSI menjadi *The Best Global Islamic Bank Based on Implementation of Sustainable Finance*. Melalui penetapan visi ini, BSI memperkuat tujuan dan komitmennya dalam menjalankan setiap langkah untuk menjaga keseimbangan alam, sosial, dan ekonomi dalam bisnis dan operasionalnya. Selanjutnya, aspek ESG telah menjadi salah satu penguatan *Fundamental Enablers* dalam Rencana Bisnis Bank 2025 - 2027.

BSI juga melakukan penguatan struktur organisasi melalui pembentukan unit kerja khusus *Environmental, Social, Governance* (ESG) yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi No.04/219-KEP/DIR pada tanggal 6 Juni 2024. Unit ESG berada di bawah supervisi langsung Wakil Direktur Utama untuk memperkuat tata kelola organisasi BSI dalam pelaksanaan keuangan berkelanjutan.

Di samping itu, BSI melakukan penguatan dan perbaikan pada kerangka kerja ESG melalui tiga pilar utama: *Sustainable Banking, Sustainable Operation, dan Sustainable Beyond Banking*. Pilar pertama, *Sustainable Banking* untuk mendukung pencapaian BSI menjadi *leader in sustainable product innovation*. Pilar kedua, *Sustainable Operation* untuk mendukung pencapaian BSI dalam mencapai *Net Zero Emission* dalam operasional. Pilar ketiga, *Sustainable Beyond Banking* untuk mendukung pencapaian BSI dalam memperluas akses inklusi keuangan dan pemberdayaan aspek sosial lingkungan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sebagai bentuk komitmen BSI dalam menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan, BSI sangat memperhatikan keselarasan kegiatan usahanya dalam mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang telah ditetapkan pada tiap-tiap pilar. Pilar *Sustainable Banking* memberikan kontribusi pada TPB 1 Tanpa Kemiskinan, TPB 2 Tanpa Kelaparan, TPB 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera, TPB 4 Pendidikan Berkualitas, TPB 5 Kesetaraan Gender, TPB 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak, TPB 7 Energi Bersih dan Terjangkau, TPB 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi, TPB 9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur,

TPB 10 Berkurangnya Kesenjangan, TPB 11 Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan, TPB 12 Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab, TPB 13 Penanganan Perubahan Iklim, TPB 14 Ekosistem Lautan, TPB 15 Ekosistem Daratan, TPB 16 Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh, serta TPB 17 Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

BSI memasukkan ESG ke dalam *Working Group* Komite Manajemen Risiko yang ditegaskan dalam Surat Keputusan Direksi No.04/503A-KEP/DIR tentang Komite Manajemen Risiko BSI tanggal 14 Oktober 2024. Penguatan tata kelola juga dilakukan oleh BSI dengan menerbitkan Standar Prosedur Operasional (SPO) Keuangan Berkelanjutan pada tanggal 2 Desember 2024 dan menerbitkan *ESG Guiding Principle* yang telah ditandatangani seluruh Direksi sebagai bentuk komitmen dan strategi BSI dalam mengintegrasikan aspek ESG dalam aktivitas bisnis dan operasional di seluruh unit kerja.

Sebagai upaya mendorong transformasi sektor keuangan, BSI bersama dengan enam bank lainnya menandatangani deklarasi komitmen bersama untuk mendukung pencapaian target *Net Zero Emission* (NZE) Indonesia tahun 2060 atau lebih cepat dalam acara peluncuran *Climate Risk Management and Scenario Analysis* (CRMS) yang di inisiasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 4 Maret 2024. Hal tersebut sebagai manifestasi upaya BSI dalam mendukung komitmen global terkait perubahan iklim.

Bentuk dukungan BSI terhadap pencapaian target NZE Indonesia juga diwujudkan melalui pengembangan *platform Digital Carbon Tracking*, menjadikan BSI sebagai bank syariah pertama di Indonesia yang memiliki *platform Digital Carbon Tracking*. *Platform* ini digunakan untuk mengukur, mengelola, dan melaporkan emisi gas rumah kaca (GRK) yang dihasilkan dari kegiatan operasional BSI di kantor pusat dan 1.130 outlet di seluruh Indonesia secara digital.

BSI juga menjadi salah satu dari delapan belas bank yang berpartisipasi dalam *Initial Phase Bottom Up Climate Risk Stress Test* (CRST) melalui surat Surat OJK No.S-16/PB.013/2023 tanggal 26 Agustus 2023. CRST dilakukan untuk menilai ketahanan Bank terhadap perubahan iklim yang terdiri atas risiko fisik dan risiko transisi. BSI melakukan analisis dampak risiko iklim pada 51,63% total portofolio pembiayaan yang terdiri atas sektor *mandatory* dari OJK dan sektor opsional yang ditetapkan Bank untuk memenuhi 50% portofolio. CRST BSI dilakukan dengan menggunakan skenario banjir dan kebakaran hutan untuk risiko fisik dan skenario iklim mencakup skenario *Current Policies*, *Delayed Transition*, dan *Net Zero 2050* untuk risiko transisi yang disusun oleh *Network for Greening the Financial System* (NGFS).

BSI melakukan penetapan kebijakan pembiayaan berbasis lingkungan sebagai salah satu strategi meminimalkan dampak risiko iklim dengan menambahkan *negative list* pada kebijakan pembiayaan, pembatasan portofolio pada *brown sector*, serta memasukkan *exclusion list* pada standar prosedur pembiayaan untuk mengintegrasikan penyaluran pembiayaan yang mendukung prinsip keberlanjutan.

## Penerapan Keuangan Berkelanjutan BSI

### *Sustainable Banking*

Pada pilar *Sustainable Banking*, BSI berkomitmen untuk terus mendukung transisi Indonesia menuju ekonomi rendah karbon melalui pengembangan produk berkelanjutan serta pembiayaan kepada kegiatan usaha yang mengintegrasikan prinsip-prinsip ESG. Nilai-nilai keberlanjutan tersebut menjadi dasar bagi BSI dalam mewujudkan komitmennya terhadap keberlanjutan.

BSI telah memiliki portofolio pembiayaan dan investasi pada instrumen keuangan yang sejalan dengan keuangan berkelanjutan. Sesuai dengan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) yang telah ditetapkan, salah satu dari target kegiatan prioritas adalah Pengembangan Produk dan/atau Jasa yang sesuai Kriteria Kegiatan Usaha Berkelanjutan (KKUB). Kriteria KKUB yang digunakan oleh BSI mengacu pada Pedoman Teknis POJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik yang mengatur tentang pembiayaan berkelanjutan atau usaha berwawasan lingkungan BSI. Hingga Desember 2024, pembiayaan berkelanjutan BSI mencapai Rp66,5 triliun, meningkat 15,2% *year-on-year* (YoY) yang terdiri atas Pembiayaan Hijau (*Green Financing*) Rp14.1 triliun meningkat sebesar 15,1% YoY dan Pembiayaan Sosial (*Social Financing*) Rp52,4 triliun, meningkat 15,2% YoY.

BSI menerbitkan inovasi *Sustainability Sukuk* dengan nama Sukuk Mudharabah Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BSI Tahap I Tahun 2024 sebesar Rp3 triliun pada bulan Juni 2024. Inisiatif ini merujuk pada POJK No.18 Tahun 2023 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang dan Sukuk Berlandaskan Berkelanjutan yang diterbitkan pada tanggal 10 Oktober 2023. Inovasi ini menjadikan BSI sebagai bank syariah pertama di Indonesia yang menerbitkan *Sustainability Sukuk* yang dikenal juga dengan ESG Sukuk, membuka jalan bagi penyaluran yang lebih baik antara prinsip-prinsip syariah dan keberlanjutan. Instrumen ini mendapatkan animo tinggi yang ditandai dengan tiga kali *oversubscribed* menunjukkan minat pasar terhadap investasi yang bertanggung jawab secara lingkungan dan sosial terus tumbuh. Alokasi penggunaan dana hasil *Sustainability Sukuk* dibagi menjadi 42% pada Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan (KUBL) dan 58% pada Kegiatan Usaha Berwawasan Sosial (KUBS).

Tidak hanya sukuk, sebagai barometer perbankan syariah di Indonesia, BSI juga mempelopori penerbitan produk BSI Deposito Wakaf yang menghubungkan aspek bisnis dan sosial. BSI Deposito Wakaf merupakan salah satu inovasi produk BSI yang menggabungkan instrumen keuangan komersial syariah dengan keuangan sosial syariah. Selain inovatif, Deposito Wakaf memiliki kekhasan (*unique preposition*). Nilai pokok dari deposito berfungsi sebagai wakaf temporer dan bagi hasil depositonya akan dimanfaatkan sebagai wakaf ke dalam proyek wakaf. Mekanisme ini membuktikan esensi keberlanjutan dalam instrumen wakaf sekaligus peran bank syariah dalam penerapan



keuangan berkelanjutan. BSI telah menerbitkan BSI Deposito Wakaf Seri I dan II dengan total pengumpulan dana sebesar Rp30 miliar dan 3.352 wakif. Bagi hasil yang didapatkan dari deposito ini disalurkan untuk bantuan biaya pendidikan dengan total penerima manfaat sebanyak 189 orang.

### Sustainable Operation

Pada pilar *Sustainable Operation*, BSI mengembangkan *platform Digital Carbon Tracking* untuk menghitung emisi gas rumah kaca scope 1 & 2 yang dihasilkan dari seluruh outlet BSI. Dari hasil perhitungan *platform Digital Carbon Tracking* ini telah didapatkan hasil *baseline* sebesar 83.404 Ton CO<sub>2</sub>-eq yang dihasilkan dari emisi scope 1 (Bahan Bakar Minyak/BBM) sebesar 17.685 Ton CO<sub>2</sub>-eq dan emisi scope 2 (Listrik) sebesar 65.719 Ton CO<sub>2</sub>-eq.

BSI terus memperkuat implementasi aksi berkelanjutan dalam mendukung pelaksanaan kegiatan operasional rendah karbon dengan melaksanakan program *eco lifestyle* yang terdiri atas penggunaan 115 *electric vehicle* (meningkat 228 % dibanding tahun 2023), penyediaan 6 (enam) unit *charging station* (meningkat 500% dibanding tahun 2023), dan memiliki 1 (satu) *Green Building Landmark Aceh Gold Certification*. Tahun 2024, BSI juga telah melaksanakan penambahan penanaman 10.671 pohon yang terdiri atas pohon buah dan pohon lainnya yang tersebar di provinsi Lampung, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Selatan untuk memberikan manfaat sosial dan lingkungan bagi masyarakat. Dengan demikian, BSI telah ikut menghijaukan Indonesia dengan menanam 50.000 pohon di seluruh Indonesia (2022-2024) dengan estimasi penyerapan karbon sebesar 4.129 Ton CO<sub>2</sub>-eq.

Dalam operasionalnya, BSI berfokus untuk senantiasa meningkatkan transformasi digital, diantaranya dengan meluncurkan SuperApps BYOND By BSI. BSI juga terus menekankan perlindungan terhadap privasi data, antipencucian uang, dan antikorupsi. Sebagai langkah konkret, BSI membentuk Pejabat Pelindungan Data Pribadi (PPDP) di bawah supervisi Direktur Kepatuhan & Sumber Daya Manusia yang ditetapkan melalui SK Direksi Nomor 04/219-KEP/DIR tanggal 6 Juni 2024. Dalam menjaga privasi data, BSI telah memiliki kebijakan Pelindungan Data Pribadi dan telah tersertifikasi ISO/IEC 27001:2022 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi. Terkait dengan antikorupsi, BSI telah memiliki kebijakan *anti-fraud* tersertifikasi ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti-Penyuapan (*Anti-Bribery Management System/ABMS*).

### Sustainable Beyond Banking

Pada pilar *Sustainable Beyond Banking*, BSI menyadari peran sentral sebagai lembaga jasa keuangan syariah yang merupakan penggerak ekonomi syariah berkelanjutan. Untuk mendukung peran tersebut, BSI terus berupaya memberikan perluasan akses layanan keuangan dan menjangkau masyarakat di daerah yang

belum terlayani (*blankspot*) oleh kantor cabang BSI. Akses layanan keuangan disediakan melalui BSI Agen yang merupakan agen Laku Pandai atau Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Inklusi Keuangan. Terdapat 119 kabupaten daerah *blankspot* yang sudah dilayani oleh 3.040 BSI Agen. Per tahun 2024, jumlah BSI Agen 119.295 yang tersebar di seluruh Indonesia (meningkat 38% dibandingkan dengan tahun 2023 yang berjumlah 86.200 agen). Nilai transaksi mencapai Rp59,02 triliun meningkat 34% dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp43,80 triliun

Sejak merger s.d. 2024, BSI terus memberikan kontribusi terbaik untuk negeri & umat. Tahun 2024, BSI telah membayarkan Pajak Perusahaan sebesar Rp2.045 miliar (naik 20,57% yoy), Zakat Perusahaan sebesar Rp232 miliar (naik 22,31%), Zakat Pegawai sebesar Rp36 miliar (naik 10,33%), serta Zakat Nasabah & Umum sebesar Rp39 miliar (naik 11,55%). Selain inklusi keuangan, BSI hadir sebagai sahabat sosial dan spiritual untuk meningkatkan skala ekonomi dan spiritual masyarakat melalui berbagai program pendayagunaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) dengan memberdayakan masyarakat serta komunitas dalam rangka mencapai sinergi antara pertumbuhan bisnis dan kemaslahatan.

Kehadiran BSI sebagai sahabat sosial dan spiritual dilakukan melalui beberapa program, diantaranya pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui penambahan tiga desa binaan BSI, yaitu di Aceh Besar, Bener Meriah, dan Mojokerto. Dalam bidang pendidikan, BSI melaksanakan program BSI Scholarship dengan penambahan penerima manfaat sebanyak 2.300 orang (meningkat 39% dibandingkan tahun 2023). Total penerima manfaat sebanyak 5.456 orang di seluruh Indonesia sejak tahun 2021. Dalam aspek spiritual, BSI telah melaksanakan pembangunan masjid BSI di Landmark Aceh, perawatan dan pemeliharaan 3 (tiga) masjid BSI, dan penambahan 3 (tiga) mobil musala. Melalui berbagai program tersebut, BSI konsisten dalam menciptakan kemaslahatan yang menjadi nafas dan jiwa kehadiran bank syariah dalam mewujudkan manfaat bagi alam semesta.

BSI berkolaborasi dengan dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) telah meluncurkan inisiatif *Green Zakat Framework* pada tanggal 2 November 2024 dalam acara *World Zakat and Waqf Forum (WZWF)*. *Green Zakat Framework* merupakan kerangka kerja yang bertujuan untuk mengintegrasikan nilai-nilai keberlanjutan dalam praktik zakat. Kerangka kerja tersebut didesain dengan pemahaman bahwa zakat tidak hanya sebagai instrumen pengentasan kemiskinan, tetapi juga sebagai alat untuk mendukung pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya, pada tahun 2025 BSI akan melanjutkan implementasi *Green Zakat* bersama dengan Baznas dan *United Nations Development Programme (UNDP)* sebagai landasan untuk program-program yang mendukung keberlanjutan dan memberikan dampak sosial dan lingkungan.

Selain ketiga pilar tersebut, BSI juga berhasil mencapai berbagai prestasi selama tahun 2024, di antaranya:

1. BSI meraih penghargaan sebagai Indonesia's Best Digital Bank 2024 dari Euromoney Awards for Excellence.
2. BSI masuk ke peringkat sembilan berdasarkan kapitalisasi pasar senilai Rp138,85 triliun yang menjadikan BSI satu-satunya bank syariah di Indonesia yang masuk ke dalam Top 10 Islamic Global Bank.
3. BSI berhasil meraih penghargaan Indonesia Most Trusted Companies dalam ajang Corporate Governance Perception Index (CGPI) Award 2024.
4. BSI masuk ke dalam 30 besar World Most Trustworthy Companies 2024 kategori Bank Versi Newsweek.
5. Kenaikan peringkat ESG secara Global dalam *Bloomberg ESG Score* ke level 3.86 dari sebelumnya 2.24, dan meningkat dari kategori 'ABOVE MEDIAN' ke dalam kategori 'LEADING' di sektor bank komersial global. Atas capaian ini, BSI menduduki peringkat ke-4 Top Global Islamic Bank dalam implementasi ESG.

## Penutup dan Apresiasi

Kesuksesan BSI tahun 2024 tentunya tidak terlepas dari dukungan dan kepercayaan para pemangku kepentingan. Kami menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh pemangku kepentingan atas dukungan dan kepercayaan yang terus diberikan kepada BSI. Berkat komitmen, dedikasi, dan kolaborasi yang kuat, BSI berhasil mencapai berbagai raih signifikan dalam menerapkan keuangan berkelanjutan.

Kami menyadari bahwa perjalanan menuju keberlanjutan bukanlah tugas yang mudah. Namun, dengan kerja sama dan komitmen bersama, kami percaya BSI dapat terus berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan dan memberikan manfaat jangka panjang bagi ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Akhir kata, mewakili Direksi BSI, saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pemangku kepentingan atas kepercayaan, kerja sama, dan berbagai masukan sehingga BSI dapat terus memperkuat langkah dan manfaat kehadiran kami di tengah masyarakat. Mari kita satukan langkah dan tujuan untuk memberikan kemanfaatan yang lebih luas bagi keberlanjutan dan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

*Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh*  
Jakarta, 21 Maret 2025



**Hery Gunardi**  
Direktur Utama



# Tanggung Jawab Laporan Keberlanjutan

## Tahun Buku 2024 [GRI 2-14]

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa Laporan Keberlanjutan PT Bank Syariah Indonesia Tbk tahun buku 2024 telah disusun dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik, dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 16/SEOJK.04/2021 tentang Bentuk dan isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.

Semua informasi dalam Laporan ini telah dimuat secara lengkap sesuai regulasi tersebut dan kami bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Keberlanjutan Perusahaan.

Jakarta, 21 Maret 2025

### DIREKSI



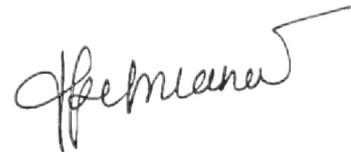
**Hery Gunardi**  
Direktur Utama



**Bob Tyasika Ananta**  
Wakil Direktur Utama



**Harry Gusti Utama**  
Direktur Retail Banking



**Tribuana Tunggadewi**  
Direktur Compliance & Human Capital



**Ade Cahyo Nugroho**  
Direktur Finance & Strategy



**Anton Sukarna**  
Direktur Sales & Distribution



**Saladin Dharmanugraha Effendi**  
Direktur Information Technology



**Grandhis Helmi Harumansyah**  
Direktur Risk Management



**Zaidan Novari**  
Direktur Wholesale Transaction Banking



**Ari Rizaldi**  
Direktur Treasury & International Banking

---

DEWAN KOMISARIS



**Muliaman Dharmansyah Hadad**

Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen



**Adiwarmen Azwar Karim**

Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen



**Komaruddin Hidayat**

Komisaris Independen



**Mohamad Nasir**

Komisaris Independen



**Felicitas Tallulembang**

Komisaris Independen



**Suyanto**

Komisaris



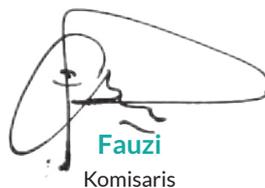
**Masduki Baidlowi**

Komisaris



**Abu Rokhmad**

Komisaris



**Fauzi**

Komisaris



**Nazaruddin**

Komisaris



# TATA KELOLA

# 06 »



# Struktur dan Komposisi Tata Kelola [GRI 2-9, GRI 2-11]

Struktur tata kelola BSI berlandaskan pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang terdiri dari organ utama dan organ pendukung Perseroan serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Organ utama Perseroan meliputi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan Direksi. Sementara organ pendukung Perseroan dibentuk melalui komite-komite di bawah Dewan Komisaris, komite-komite di bawah Dewan Pengawas Syariah, dan komite-komite di bawah Direksi. Total anggota Dewan Komisaris sebanyak 10 orang yang terdiri dari 5 (lima) Komisaris Independen dan 5 (lima) Komisaris. Total anggota Dewan Pengawas Syariah sebanyak 5 (lima) orang. Sedangkan total Direksi sebanyak 10 orang.

Profil lengkap Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan Direksi yang di antaranya adalah profil Komisaris Independen, masa jabatan, jenis kelamin, rangkap jabatan, serta pengalaman kerja telah disajikan pada Laporan Tahunan bagian Profil

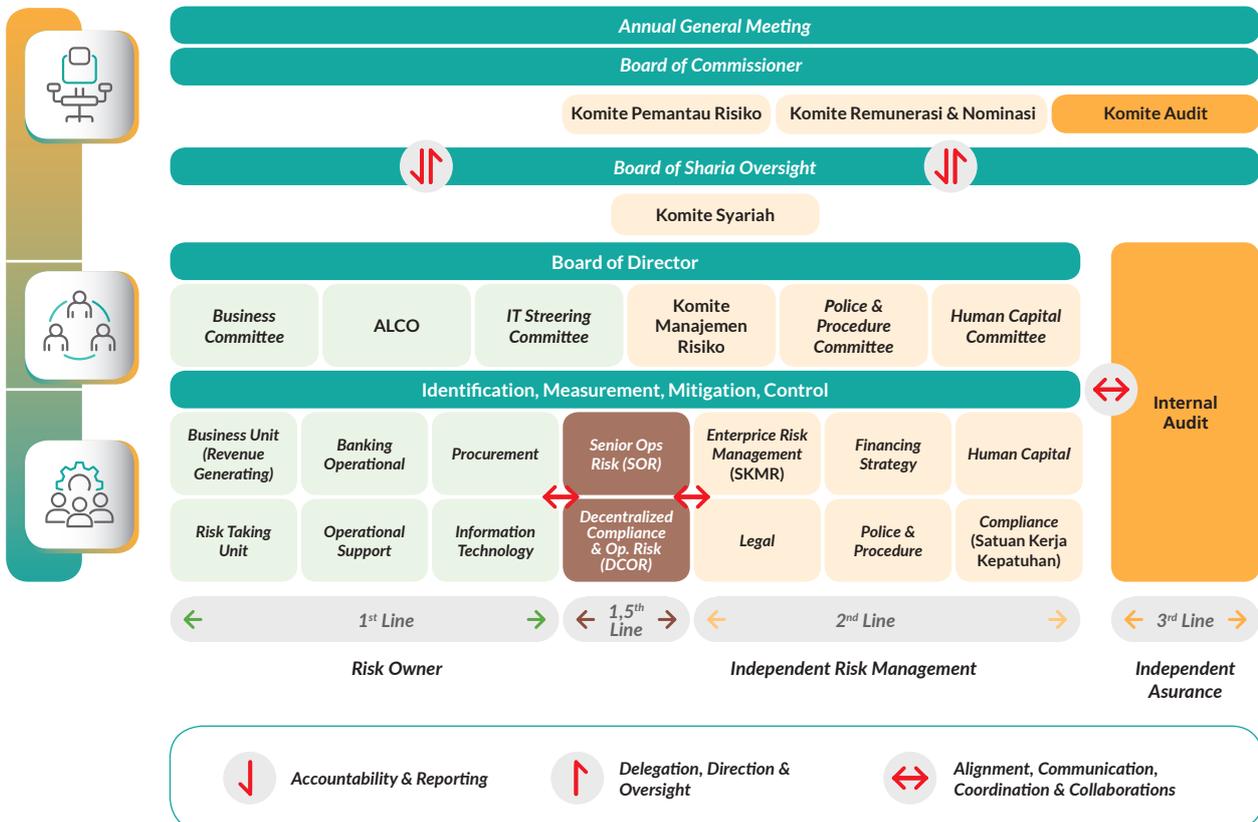
Perusahaan. Sedangkan, profil komite beserta tugas dan tanggung jawab komite serta Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan Direksi telah disajikan secara rinci pada Laporan Tahunan bagian Tata Kelola Perusahaan.

Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Komisaris dibantu oleh organ pendukung yaitu Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi serta Komite Pemantau Risiko. Sedangkan, Direksi dibantu oleh organ pendukung yaitu Sekretaris Perusahaan, Satuan Kerja Audit Intern, dan Enterprise Risk Management (Satuan Kerja Manajemen Risiko/SKMR) serta komite di bawah Direksi meliputi Business Committee, Asset and Liability Committee, IT Steering Committee, Risk Management Committee, Policy & Procedure Committee, Business Committee, dan Human Capital Committee. Dalam struktur tata kelola BSI, Komisaris Utama dan Ketua Dewan Pengawas Syariah merupakan ketua badan tata kelola tertinggi. Komisaris Utama merupakan Komisaris Independen.

Struktur tata kelola BSI adalah sebagai berikut.

## Struktur Good Corporate Governance

"BSI menggunakan *Three Lines Model* dalam membantu organisasi mengidentifikasi struktur dan proses yang efektif untuk memungkinkan pencapaian tujuan, dan memfasilitasi tata kelola dan manajemen risiko yang kuat."



## Conflict of Interest [GRI 2-15]

Ketentuan tentang pencegahan Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest*) telah ditetapkan dalam Kode Etik (*Code of Conduct*). Benturan Kepentingan adalah kondisi dimana anggota Jajaran Bank dalam menjalankan tugas dan kewajibannya mempunyai kepentingan di luar kepentingan dinas, baik menyangkut kepentingan pribadi, keluarga, maupun kepentingan pihak-pihak lain yang memungkinkan anggota Jajaran Bank tersebut kehilangan obyektivitasnya, dengan ruang lingkup bahwa Jajaran Bank.

- a. Wajib menghindarkan diri dari kegiatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.
- b. Bertindak terhormat dan bertanggung jawab serta bebas dari pengaruh yang memungkinkan hilangnya obyektivitas dalam pelaksanaan tugas atau mengakibatkan Bank kehilangan bisnis dan/atau reputasi.
- c. Dilarang menyalahgunakan *corporate identity* Bank. *Corporate identity* hanya dapat digunakan untuk kepentingan Bank dan dengan seizin Bank.

BSI telah memiliki kebijakan pengelolaan Benturan Kepentingan yang memuat:

- a. Identifikasi, mitigasi, dan pengelolaan atas benturan kepentingan termasuk yang berasal dari transaksi dengan pihak afiliasi dan transaksi intra group;
- b. Larangan bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank; dan
- c. Kewajiban mengungkapkan apabila terjadi benturan kepentingan dalam setiap pengambilan keputusan.

Terkait kebijakan benturan kepentingan bagi Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah, BSI telah memiliki ketentuan sebagai berikut.

Apabila terjadi sesuatu hal di mana kepentingan Bank bertentangan dengan kepentingan pribadi salah seorang anggota Direksi, maka Bank akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dan dalam hal Bank mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Bank akan diwakili oleh Dewan Komisaris atau seorang yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal tidak ada anggota Dewan Komisaris maka RUPS mengangkat seorang atau lebih untuk mewakili Bank dalam menjalankan tugas tersebut.

Dalam menjalankan tugas, tanggung jawab dan fungsinya, Dewan Pengawas Syariah dilarang untuk:

1. Memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang dapat mengurangi aset dan/atau keuntungan Perseroan.
2. Mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Perseroan selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan oleh RUPS.
3. Merangkap jabatan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sampai dengan akhir periode pelaporan, seluruh anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi tidak memiliki hubungan keuangan dan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi lainnya serta pemegang saham pengendali secara langsung maupun tidak langsung, serta hubungan kepengurusan dengan perusahaan lain termasuk pemasok. Dewan Komisaris dan Direksi juga tidak memiliki kepemilikan saham pada pemasok perusahaan. Kepemilikan saham mayoritas Bank dimiliki oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan kepemilikan saham sebesar 51,47%. Dengan demikian, Pemegang Saham Utama dan Pengendali Bank adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sehingga tidak terdapat Pemegang Saham Utama dan Pengendali secara tidak langsung.

Pada tahun 2024, terdapat anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang memiliki saham Perseroan. Merujuk pada POJK Nomor 4 tahun 2024 dan didukung POJK Nomor 2 tahun 2024, selain Dewan Direksi & Komisaris, Dewan Pengawas Syariah (DPS) juga wajib melaporkan kepemilikan saham yang mencapai 5% atau lebih, baik pada bank yang bersangkutan maupun pada bank dan/atau perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri. Seluruh anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan DPS tidak memiliki saham pada perusahaan lainnya yang mengandung benturan kepentingan. Tidak terdapat transaksi yang memenuhi kategori transaksi benturan kepentingan. Pembahasan terkait kepemilikan saham Dewan Komisaris dan Direksi ini mengacu pada Laporan Tahunan bagian Tata Kelola Perusahaan. Sedangkan, pembahasan terkait transaksi yang mengandung benturan kepentingan ini mengacu pada Laporan Tahunan bagian Analisis dan Pembahasan Manajemen.

## Nominasi dan Seleksi Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan Direksi [GRI 2-10]

Proses nominasi Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan berdasarkan usulan Dewan Komisaris kepada RUPS dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi. Para anggota Dewan Komisaris dan Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS dengan memperhatikan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang berlaku pada Anggaran Dasar. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi harus mendapatkan persetujuan dari otoritas yang berwenang (Otoritas Jasa Keuangan/OJK).

Proses nominasi Dewan Pengawas Syariah diangkat oleh RUPS atas rekomendasi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, dengan tetap memperhatikan ketentuan OJK atau penggantinya, ketentuan Dewan Syariah Nasional dan peraturan

perundang-undangan lainnya yang mengatur mengenai hal tersebut. Pengangkatan Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah wajib memenuhi persyaratan pada saat diangkat sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pengangkatan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah mengedepankan komposisi secara profesional, independensi, kesesuaian kompetensi, dan memperhatikan keberagaman, yang dibutuhkan secara tepat dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab. Informasi terkait proses nominasi dan seleksi Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah dan Keberagaman Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas telah disajikan secara lengkap pada Laporan Tahunan bagian Tata Kelola Perusahaan.

## Penilaian Kinerja Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan Direksi [GRI 2-18]

Penilaian kinerja Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah dilakukan dalam RUPS Tahunan. Dalam RUPS Tahunan Direksi menyampaikan Laporan Tahunan, sedangkan Dewan Komisaris menyampaikan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris tahunan. Penilaian kinerja Dewan Pengawas Syariah (DPS) dilakukan secara self assessment yang dilaksanakan secara periodik setiap semester yang dilaporkan kepada OJK untuk mendapatkan persetujuan. Pemenuhan penyampaian Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah yang disampaikan secara semesteran kepada Departemen Perbankan Syariah OJK dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Implementasi ESG termasuk dalam hal ini implementasi Keuangan Berkelanjutan merupakan salah satu *Key Performance Indicator* (KPI) Direksi yang mendapatkan pengawasan dari Dewan Komisaris. Setiap tahun, BSI telah menyampaikan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) kepada OJK yang ditandatangani Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris.

RUPS dapat memberhentikan para anggota Dewan Komisaris dan Direksi sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya yaitu anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang bersangkutan:

- 1) tidak/kurang dapat memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam kontrak manajemen;
- 2) tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
- 3) melanggar ketentuan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 4) melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai anggota Direksi;
- 5) terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan dan/atau negara;
- 6) dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 7) alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS demi kepentingan dan tujuan Perseroan.

# Kebijakan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi [GRI 2-19, GRI 2-20, GRI 2-21]

Bank telah memiliki kebijakan Tata Kelola Remunerasi Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah mengacu/berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 59/POJK.03/2017 tanggal 18 Desember 2017 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Dalam kebijakan tersebut, Bank telah menetapkan kebijakan remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS antara lain meliputi:

1. Remunerasi yaitu penghasilan dalam bentuk keuangan (non natura) antara lain gaji, tunjangan (*net*), kompensasi dalam bentuk saham, bonus dan bentuk remunerasi lainnya.
2. Fasilitas lain yaitu fasilitas yang diterima tidak dalam bentuk keuangan (*natura*) bagi Dewan Komisaris dan Direksi, antara lain:
  - a. Tunjangan Hari Raya
  - b. Tunjangan Purna Jabatan
  - c. Tunjangan Perumahan dan Utilitas
  - d. Fasilitas Kendaraan dan Tunjangan Transportasi
  - e. Fasilitas Kesehatan
  - f. Fasilitas *Club Membership* dan Anggota Perkumpulan Profesi
  - g. Fasilitas Biaya Komunikasi
  - h. Fasilitas Kantor Non Inventaris
  - i. Fasilitas Perjalanan Dinas
  - j. Fasilitas Bantuan Hukum
  - k. Izin Cuti
3. Fasilitas lain yaitu fasilitas yang diterima tidak dalam bentuk keuangan (*natura*) bagi Dewan Pengawas Syariah, antara lain:
  - a. Tunjangan Hari Raya
  - b. Tunjangan Purna Jabatan
  - c. Fasilitas Kesehatan
  - d. Fasilitas Perjalanan Dinas

Dalam penentuan besaran remunerasi, BSI telah memperhatikan beberapa indikator di antaranya kinerja keuangan, pemenuhan pembentukan penyisihan penghapusan aktiva, kewajaran dengan *peer group*, dan pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang BUS. Dalam penentuan remunerasi juga telah mempertimbangkan kinerja ESG yang telah tercakup pada KPI ESG Group, salah satunya adalah ketercapaian implementasi RAKB.

Prosedur penetapan remunerasi Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah dilakukan melalui tahapan berikut:

1. Komite Nominasi dan Remunerasi melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi yang berlaku bagi Dewan Komisaris.

2. Selanjutnya Komite Nominasi dan Remunerasi akan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris.
3. Dewan Komisaris menyampaikan usulan rekomendasi remunerasi berupa gaji/honorarium dan tantiem kepada Pemegang Saham Pengendali untuk mendapat persetujuan RUPS.



Tantiem dan gaji/honorarium diputuskan di dalam RUPS Tahunan. Untuk tantiem dan gaji/honorarium telah diputuskan dalam Mata Acara Rapat Keempat RUPS Keempat dengan hasil pemungutan suara setuju sebanyak 43.117.263.201 suara atau 98,43% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat, abstain 102.105.607 suara atau 0,23% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat, serta tidak setuju 685.685.188 suara atau 1,57% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

BSI juga melaporkan rasio total kompensasi tahunan rata-rata Direksi dengan median total gaji tahunan untuk semua pegawai. Total kompensasi pegawai merupakan jumlah dari seluruh kompensasi yang diterima oleh pegawai. Adapun rincian disajikan sebagai berikut.

Uraian	Rasio
Rasio total kompensasi tahunan rata-rata Direksi terhadap median total gaji tahunan untuk semua pegawai	23,47 : 1
Rasio persentase kenaikan total kompensasi tahunan rata-rata Direksi terhadap rasio peningkatan persentase median total gaji untuk semua pegawai	(1,18) : 1

## Aktivitas Lobi dan Kontribusi Politik

Aktivitas lobi merujuk pada upaya yang dilakukan untuk mempengaruhi kebijakan publik, peraturan, atau keputusan Pemerintah yang berdampak pada operasional atau kepentingan bisnis perusahaan. Namun demikian, selama tahun 2024,

BSI tidak terlibat pada aktivitas lobi. Di samping itu, BSI juga tidak terlibat dengan kontribusi politik dalam bentuk apapun sepanjang tahun 2024.

## Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU), Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPPSPM)

Bank Syariah sebagai bagian dari industri perbankan nasional dengan jaringan nasional dan global mempunyai peranan penting untuk memastikan integritas transaksi keuangan atas seluruh produk dan layanan yang digunakan oleh nasabah serta membantu penegakan hukum dalam menjalankan program anti pencucian uang pencegahan pendanaan terorisme dan pendanaan proliferasi. Bagi BSI, hal ini tidak hanya sebagai wujud pemenuhan komitmen kepatuhan atas regulasi, namun juga sebagai upaya merealisasikan kemaslahatan bagi manusia dan menghilangkan kemudorotan dengan memperhatikan nilai-nilai

dasar syariah. Penerapan program APU, PPT dan PPPSPM di BSI telah sejalan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan *International Best Practices* yang mencakup 5 (lima) pilar APU PPT & PPPSPM yang meliputi pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris, kebijakan dan prosedur, pengendalian internal, sistem informasi manajemen serta sumber daya manusia dan pelatihan. Pembahasan terkait dengan program APU, PPT dan PPPSPM di BSI telah disampaikan pada Laporan Tahunan bagian Tata Kelola Perusahaan.

## Tata Kelola Keberlanjutan [OJK E]

### Penanggung Jawab Penerapan Keuangan Berkelanjutan

[OJK E.1, GRI 2-9, GRI 2-12, GRI 2-13, IFRS S1-GOVERNANCE, IFRS S2- GOVERNANCE]

Bank telah memiliki struktur tata kelola keberlanjutan (ESG *Governance Structure*) yang tercantum dalam *ESG Guiding Principle*. Dalam mengimplementasikan ESG, BSI melibatkan Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah

untuk melakukan pengawasan aktif pada penerapan Keuangan Berkelanjutan. Pengawasan aktif yang dilaksanakan mencakup penyusunan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan, penyusunan Laporan Keberlanjutan, dan penetapan strategi keberlanjutan.

Dewan Komisaris/Komite Dewan Komisaris Terkait	Dewan Pengawas Syariah
Direksi / Komite Direksi Terkait	
ESG Working Group	
Unit Kerja Koordinator ESG	
Unit Kerja Kontributor ESG	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Unit Bisnis</li> <li>Unit Support</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Unit Enabler</li> <li>Regional Office</li> </ul>

BSI telah membentuk ESG Working Group yang berada di bawah Risk Management Committee (RMC) yang telah tercantum dalam Surat Keputusan Direksi No. 03/219-KEP/DIR tanggal 6 Juni 2024 tentang Pembentukan ESG Group di bawah supervisi Wakil Direktur Utama & Penunjukkan Pejabat Pelindungan Data Pribadi (PPDP) di bawah supervisi Direktur Kepatuhan & SDM. ESG Working Group bertugas membantu RMC untuk mendukung komite dalam merumuskan usulan hingga menjadi rekomendasi yang diputuskan oleh komite dalam rapat komite. Selain itu, BSI telah membentuk Unit Kerja Koordinator ESG yang berfungsi sebagai koordinator dalam penyusunan kerangka kerja, visi, komitmen, strategi, dan inisiatif dalam rangka mengintegrasikan aspek ESG termasuk implementasi keuangan berkelanjutan di seluruh aktivitas bisnis dan operasional BSI. Integrasi aspek ESG dan implementasi keuangan berkelanjutan juga melibatkan Unit Kerja Kontributor yang secara aktif menjalankan strategi dan inisiatif ESG pada seluruh aktivitas bisnis dan operasional sesuai cakupan masing-masing yang sejalan dengan kerangka, visi dan komitmen ESG BSI yang telah ditetapkan. Unit Kerja Kontributor ESG meliputi Unit Bisnis, Unit Support, Unit Enabler dan Regional Office. Selain itu, untuk mewujudkan dampak yang luas terhadap lingkungan dan sosial dari penerapan aspek ESG, diperlukan peran serta dari setiap pegawai BSI. ESG Working

Group, Unit Kerja Koordinator ESG dan Unit Kerja Kontributor ESG senantiasa mendasarkan pada identifikasi risiko dan peluang keberlanjutan dalam usulan yang diputuskan dalam rapat RMC serta dalam penyusunan kerangka kerja, visi, komitmen, strategi, dan inisiatif ESG.

Sebagai perusahaan yang bergerak di industri jasa keuangan, fokus dari program ESG dituangkan dalam kegiatan Keuangan Berkelanjutan yang setiap tahun ditetapkan dalam RAKB. Tugas dan tanggung jawab Keuangan Berkelanjutan dialokasikan sebagai berikut.

1. Dewan Komisaris: memberikan arahan dan persetujuan atas usulan RAKB yang diajukan oleh Direksi. Pengawasan Dewan Komisaris atas implementasi pelaksanaan RAKB dilakukan melalui Komite Pemantau Risiko yang dilakukan setiap triwulan.
2. Direksi: memberikan arahan dan persetujuan atas strategi dan implementasi keuangan berkelanjutan BSI yang sejalan dengan strategi dan implementasi keuangan berkelanjutan BSI yang sejalan dengan strategi *bankwide*.
3. Dewan Pengawas Syariah: memastikan program RAKB yang dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
4. Subkomite ESG: menetapkan strategi, menyempurnakan penerapan manajemen risiko, serta menetapkan hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis maupun operasional dalam ruang lingkup *Environmental, Social, & Governance*.
5. Environmental, Social, & Governance Group: melakukan koordinasi dan konsolidasi bersama unit kerja terkait pelaksanaan program keuangan berkelanjutan, melakukan penyusunan Dokumen RAKB BSI tahun 2025 dan menyampaikannya kepada regulator. ESG Group juga melakukan pemantauan bulanan dalam implementasi program RAKB.
6. Seluruh Sumber Daya Manusia unit kerja yang terlibat dalam pelaksanaan program RAKB 2025.

Pihak yang menjadi penanggung jawab pelaksanaan program Keuangan Berkelanjutan adalah sebagai berikut.

Unit Kerja	Fungsi
Environmental Social, & Governance (ESG)	Menyusun kerangka kerja, strategi, <i>roadmap</i> , komitmen dan target terkait implementasi keuangan berkelanjutan BSI
Strategy Planning & Performance Management Group (SPM)	Membuat strategi dan Rencana Bisnis Bank yang akan dijalankan setiap tahunnya. Pelaksana program: 1. <i>Green Financing</i> 2. Portofolio UMKM/ <i>Social Financing</i> 3. Rasio <i>Sustainable Financing</i>
Corporate Business: 1. Corporate Business 1 Group 2. Corporate Business 2 Group 3. Corporate Business 3 Group	a. Melaksanakan penyaluran pembiayaan sesuai dengan prinsip keuangan berkelanjutan ( <i>Green Financing</i> dan UMKM/ <i>Social Financing</i> ) b. Mengembangkan produk perbankan yang mendukung prinsip keuangan berkelanjutan Pelaksana program: 1. <i>Green Financing</i> 2. Rasio <i>Sustainable Financing</i>
Commercial Business: 1. Commercial Business 1 Group 2. Commercial Business 2 Group	Pelaksana program: 1. <i>Green Financing</i> 2. Rasio <i>Sustainable Financing</i>
Small Medium Enterprise (SME) Busines Group (MBG)	Pelaksana program: 1. Portofolio UMKM/ <i>Social Financing</i> 2. Rasio <i>Sustainable Financing</i>
Micro Busines Group (MBG)	Pelaksana program: 1. Portofolio UMKM/ <i>Social Financing</i>

Unit Kerja	Fungsi
Islamic Ecosystem Solution Group (ISE)	Pelaksana program: 1. Pengembangan produk
International & Financial Institution Group (FIG)	Pelaksana program: 1. Pengembangan produk
Treasury & Global Market Group (TGM)	Pelaksana program: 1. Pengembangan produk
Operational-Portfolio & Market Risk Group (ERM)	Pelaksana program: 1. Pilar Tata Kelola & Kebijakan
Data & Decision Management Group (DDM)	Pelaksana program: 1. <i>Green Financing</i> 2. Portofolio UMKM/ <i>Social Financing</i>
Compliance & Anti Money Laundering (AML) – Countering – Countering Financing of Terrorism (CFT) Group (CAC)	Pelaksana program: 1. Pengembangan produk
Policy & Procedure Group (PPG)	Pembuatan ketentuan internal untuk mendukung program keuangan berkelanjutan. Pelaksana program: 1. Pilar Tata kelola dan Kebijakan
Distribution Strategy Group (DSG)	Mendukung terlaksananya implementasi program keuangan berkelanjutan berkelanjutan di seluruh outlet BSI dan optimalisasi penyaluran pembiayaan ekosistem bisnis retail pada titik tumbuh cabang yang telah ditetapkan. Pelaksana program: 1. <i>Digital Carbon Trading</i> 2. Penyaluran pembiayaan berkelanjutan
Corporate Secretary & Communication Group (CSG)	Menjalankan fungsi CSR dan komunikasi perusahaan. Pelaksana program: 1. <i>Signature campaign – BSI Sustainable Movement</i> 2. <i>1 home 1 tree</i> 3. <i>Sustainability on Campus Collabs with BSI Rock</i> 4. <i>Green Business Culture Internal Campaign</i> 5. ISO 26000 dan Perhitungan SROI 6. Desa Binaan BSI dengan Perhitungan dampak ESG 7. <i>BSI Scholarship</i> 8. Optimalisasi Distribusi Zakat 9. <i>Waste Management Pilot Project (Circular Economy)</i> 10. <i>Pilot Project Green Zakat</i>
Bank Syariah Indonesia Corporate University	Menyelenggarakan pelatihan/program untuk meningkatkan kapabilitas pegawai dalam rangka penerapan keuangan berkelanjutan. Pelaksana program: 1. <i>Sustainable finance awareness</i> 2. Kewajiban pelatihan SF pengawasan dan pengurus BSI 3. Kewajiban pelatihan ESG 4. <i>Green Business Culture Internal Campaign</i>
Marketing & Communication Group (MCG)	Mendukung komunikasi pemasaran produk berdasarkan prinsip keuangan berkelanjutan Pelaksana program: 1. <i>Signature campaign – BSI Sustainable Movement</i>
Card Business Group (CBG)	Pelaksana program: 1. Kartu Syariah Ramah Lingkungan
Human Capital Strategy & Policy Group (HCP)	Pelaksana program: 1. <i>Sustainable finance awareness</i> 2. Kewajiban pelatihan ESG
Procurement & Fixed Asset Group (PFA)	Melakukan pengadaan infrastruktur yang mendukung implementasi keuangan berkelanjutan Pelaksana program: 1. <i>Green Building</i> 2. <i>Electric Vehicle</i> 3. <i>Charging Station</i> 4. Solar Panel
Corporate Finance & Accounting Group (CFA)	Konsolidasi laporan keuangan terkait dengan portofolio keuangan berkelanjutan dan penghimpunan dana zakat perusahaan. Pelaksana program: 1. Optimalisasi Distribusi Zakat

Unit Kerja	Fungsi
BSI Maslahat	Mitra Lembaga sosial BSI yang berperan dalam melakukan penyaluran program-program pendayagunaan zakat. Pelaksana program: 1. Solar Panel 2. ISO 26000 dan perhitungan SROI 3. Desa binaan BSI dengan perhitungan dampak ESG 4. BSI <i>Scholarship</i> 5. Optimalisasi Distribusi Zakat 6. <i>Waste Management Pilot Project (Circular Economy)</i> 7. <i>Pilot Project Green Zakat</i>

Hasil pelaksanaan RAKB kemudian disampaikan kepada Direksi. Selanjutnya, hasil tersebut akan disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat arahan. ESG Working Group juga melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan prioritas RAKB per triwulanan dan melaporkannya kepada RMC yang selanjutnya akan melaporkan Direktur Supervisi ESG Group dan Komite Audit. Hasil pelaksanaan RAKB juga menjadi agenda pembahasan dalam Rapat Dewan Komisaris dan Direksi (Rakomdir). Kinerja keberlanjutan Bank juga akan dilaporkan oleh BSI kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Seluruh pemegang saham dapat menyampaikan pendapat terkait isu *Environment, Social, and Governance (ESG)* atau Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (LST) dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Penguatan tata kelola juga diwujudkan dengan penyesuaian aspek ESG dalam Arsitektur Kebijakan. BSI telah menyesuaikan aspek ESG pada ketentuan penyaluran pembiayaan yang meliputi:

1. *Negative List* pada Kebijakan Pembiayaan
2. *Portfolio Guideline*
3. *Exclusion List* pada Standar Prosedur Pembiayaan
4. *Industry Acceptance Criteria*

## Pengembangan Kompetensi Terkait Keuangan Berkelanjutan

[OJK E.2, GRI 2-17, FS4, IFRS-S1-GOV, IFRS-S2-GOV]

Implementasi ESG serta Keuangan Berkelanjutan membutuhkan kompetensi khusus terkait keberlanjutan. BSI menyadari bahwa pengembangan kompetensi terkait keberlanjutan perlu dilakukan secara berkala. Pada tahun 2024, BSI telah melaksanakan berbagai program pelatihan dan pengembangan kompetensi kepada pegawai. Hal ini juga dimaksudkan memberikan informasi kepada pegawai terkait dengan perkembangan ilmu dan isu-isu terkini terkait keberlanjutan. Berbagai program pelatihan dan pengembangan kompetensi pegawai di bawah tanggung jawab Bank Syariah Indonesia Corporate University. Selama tahun 2024, sebanyak 8.420 pegawai BSI telah mengikuti pendidikan dan pelatihan terkait materi Keuangan Berkelanjutan (*Sustainable Finance*). Pelatihan ini juga mencakup pemahaman terhadap ESG khususnya pada segmen SME dan *Wholesale*.

Sepanjang tahun 2024, BSI telah melaksanakan pengembangan kompetensi bagi Dewan Komisaris dan Direksi yang terkait dengan pembangunan berkelanjutan. Adapun jenis pelatihan, materi dan penyelenggara pelatihan yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel Pengembangan Kompetensi Keuangan Berkelanjutan bagi Dewan Komisaris

Nama	Jabatan	Jenis Pendidikan dan Pelatihan	Materi Pendidikan dan Pelatihan	Tanggal	Penyelenggara
Felicitas Tallulembang	Komisaris Independen	<i>Sharing Forum</i>	<i>Sharing Session</i> dengan Tema <i>Sustaining Growth Momentum Amid Global Uncertainties and Challenges</i>	28 Agustus 2024	Bank Mandiri
Suyanto	Komisaris	<i>Sharing Forum</i>	<i>Sharing Session</i> dengan Tema <i>Sustaining Growth Momentum Amid Global Uncertainties and Challenges</i>	28 Agustus 2024	Bank Mandiri
Masduki Baidlowi	Komisaris	<i>Sharing Forum</i>	<i>Sharing Session</i> dengan Tema <i>Sustaining Growth Momentum Amid Global Uncertainties and Challenges</i>	28 Agustus 2024	Bank Mandiri

Tabel Pengembangan Kompetensi Keuangan Berkelanjutan bagi Direksi

Nama	Jabatan	Jenis Pendidikan dan Pelatihan	Materi Pendidikan dan Pelatihan	Tanggal	Penyelenggara
Hery Gunardi	Direktur Utama	Workshop	<i>Strategic Approach to Risk Management towards SOE's Business Sustainability</i>	19 Januari 2024	Kementrian BUMN RI
		Workshop	<i>Level Up To The Next Journey</i>	20 Januari 2024	PT Bank Syariah Indonesia Tbk, Bank Syariah Indonesia Corporate University, Distribution Strategy Group (DSG)
		Top Executive Learning Program (TELP)	<i>Leadership Transformation</i>	26 Februari 2024	PT Bank Syariah Indonesia Tbk Bank Syariah Indonesia Corporate University
		Workshop	<i>Foundation of Strategic Governance and Navigating Disruption</i>	30 September sampai 1 Oktober 2024	IMD Lausanne Swiss
		Seminar	Seminar Penyelarasan Jenjang 7 untuk Direksi Pemegang Sertifikat Manajemen Risiko level 5	5-6 Juni 2024	Bankers Association for Risk Management (BARA)
Bob Tyasika Ananta	Wakil Direktur Utama	Workshop	<i>Strategic Approach to Risk Management towards SOE's Business Sustainability</i>	19 Januari 2024	Kementrian BUMN RI
		Workshop	<i>Level Up To The Next Journey</i>	20 Januari 2024	PT Bank Syariah Indonesia Tbk, Bank Syariah Indonesia Corporate University, Distribution Strategy Group (DSG)
		Focus Group Discussion (FGD)	Implementasi Strategi Pelaksanaan Kegiatan Literasi dan Inklusi Keuangan Tahun 2024	26 Januari 2024	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
		Top Executive Learning Program (TELP)	<i>Leadership Transformation</i>	26 Februari 2024	PT Bank Syariah Indonesia Tbk Bank Syariah Indonesia Corporate University
		Sertifikasi	Sertifikasi Kompetensi Kualifikasi 7 - Bidang Manajemen Risiko Perbankan	24 Juni 2024	Lembaga Sertifikasi Keuangan Syariah (LSPKS)
		Workshop	<i>Monitoring Implementasi ESG di Mandiri Group dan Sharing Best Practice terkait ESG Framework &amp; Disclosure</i>	25 Juli 2024	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
		Focus Group Discusson (FGD)	<i>Enhancing Fraud Detection System to Strengthen Cybersecurity Resilience in the Payment System Industry</i>	27 Agustus 2024	Bank Indonesia (BI)
		Workshop	<i>Championing The Future Admist Great Challenge Through Transformational Leadership</i>	29 Agustus 2024	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
		Sharing Session	<i>Collborative Future - Paving Pathways For Better Indonesia</i>	15 November 2024	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
		Seminar	Penyelarasan Jenjang 7 untuk Direksi Pemegang Sertifikat Manajemen Risiko Level 5	20 Mei 2024	JMS Education
Sertifikasi	Sertifikasi Kompetensi Kualifikasi 7 - Bidang Manajemen Risiko Perbankan	24 Juni 2024	Lembaga Sertifikasi Keuangan Syariah (LSPKS)		

Nama	Jabatan	Jenis Pendidikan dan Pelatihan	Materi Pendidikan dan Pelatihan	Tanggal	Penyelenggara
Tribuana Tunggadewi	Direktur Compliance & Human Capital	Refreshment Manajemen Risiko Perbankan Level 5	Mengelola Risiko Hukum, Kepatuhan, Reputasi dan Strategik	25 Januari 2024	Bank Syariah Indonesia Corporate University, Maisa Edukasi
		Refreshment Manajemen Risiko Perbankan Level 5	Mengelola Risiko Asuransi, Risiko Transaksi Intra Group, Stress & Back Testing dan Menganalisa Kebutuhan Sistem Informasi	26 Januari 2024	PT Bank Syariah Indonesia Tbk Bank Syariah Indonesia Corporate University
		Top Executive Learning Program (TELP)	Leadership Transformation	26 Februari 2024	PT Bank Syariah Indonesia Tbk Bank Syariah Indonesia Corporate University
		Seminar	Optimalisasi Peran Industri Keuangan Guna Pencegahan Green Financial Crime dan Tindak Pidana Asal Lainnya	29 April 2024	Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan (FKDKP)
		Seminar	Penyelarasan Jenjang 7 untuk Direksi Pemegang Sertifikat Manajemen Risiko Level 5	Kamis, 7-8 Mei 2024	Bankers Association for Risk Management (BARA)
		Seminar	Penyelarasan Jenjang 7 untuk Direksi Pemegang Sertifikat Manajemen Risiko Level 5	20 Mei 2024	Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan (FKDKP)
		Seminar	Kegiatan Edukasi Keuangan bagi Ibu/Perempuan "Bundaku SiCantiks: Ibu Cerdas Keuangan, Mewujudkan Keluarga Sejahtera"	25 Juni 2024	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
		Webinar	Penanganan Kejahatan Siber termasuk Perjudian Daring sebagai Tindak Pidana Asal Tindak Pidana Pencucian Uang	17 Juli 2024	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
		Workshop	Mandiri Leadership Forum Workshop	29 Agustus 2024	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
		Workshop	Workshop Wakil Menteri BUMN "SOE's Strategic Program and Risk Management for Indonesia's Future"	13 September 2024	Kementerian BUMN
		Conference	Employee & Industrial Relations Conference 2024 Forum Human Capital Indonesia (FHCI) BUMN	20 September 2024	Forum Human Capital Indonesia (FHCI) BUMN
Webinar FKDKP	Prospek Ekonomi Tahun 2025 Mencapai Indonesia Emas 2045	11 Desember 2024	Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan (FKDKP)		
Anton Sukarna	Direktur Sales & Distribution	Workshop Digital & Transaction Strategic Direction	Level Up To The Next Journey	20 Januari 2024	PT Bank Syariah Indonesia Tbk Bank Syariah Indonesia Corporate University Distribution Strategy Group (DSG)
		Refreshment Manajemen Risiko Perbankan Level 5	Mengelola Risiko Hukum, Kepatuhan, Reputasi dan Strategik	25 Januari 2024	Bank Syariah Indonesia Corporate University, Maisa Edukasi
		Refreshment Manajemen Risiko Perbankan Level 5	Mengelola Risiko Asuransi, Risiko Transaksi Intra Group, Stress & Back Testing dan Menganalisa Kebutuhan Sistem Informasi	26 Januari 2024	PT Bank Syariah Indonesia Tbk Bank Syariah Indonesia Corporate University, Maisa Edukasi
		Seminar	Penyelarasan Jenjang 7 untuk Direksi Pemegang Sertifikat Manajemen Risiko Level 5	7-8 Mei 2024	Bankers Association for Risk Management (BARA)
		Pelatihan	Program Pelatihan Steward Leadership Impact	11-15 November 2024	Internal Bank
Ade Cahyo Nugroho	Direktur Finance & Strategy	Workshop Kementerian BUMN	Strategic Approach to Risk Management towards SOE's Business Sustainability	19 Januari 2024	Kementerian BUMN RI
		Top Executive Learning Program (TELP)	Leadership Transformation	26 Februari 2024	PT Bank Syariah Indonesia Tbk Bank Syariah Indonesia Corporate University
		Seminar	Penyelarasan Jenjang 7 untuk Direksi Pemegang Sertifikat Manajemen Risiko level 5	3-4 Juli 2024	Bankers Association for Risk Management (BARA)
		Workshop	Mandiri Leadership Forum Workshop	29 Agustus 2024	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Nama	Jabatan	Jenis Pendidikan dan Pelatihan	Materi Pendidikan dan Pelatihan	Tanggal	Penyelenggara
Zaidan Novari	Direktur Wholesale Transaction Banking	Workshop Digital & Transaction Strategic Direction	Level Up To The Next Journey	20 Januari 2024	PT Bank Syariah Indonesia Tbk Bank Syariah Indonesia Corporate University Distribution Strategy Group (DSG)
		Top Executive Learning Program (TELP)	Leadership Transformation	26 Februari 2024	PT Bank Syariah Indonesia Tbk Bank Syariah Indonesia Corporate University
		Seminar	Penyelarasan Jenjang 7 untuk Direksi Pemegang Sertifikat Manajemen Risiko Level 5	10 September 2024	PT Bank Syariah Indonesia Tbk Bank Syariah Indonesia Corporate University
		Pelatihan	Executive Leadership: Executive Leadership: Performance People Skills for Leaders	7-20 Oktober 2024	London Business School, UK (Inggris)
Saladin Dharmanugraha Effendi	Direktur Information Technology	Workshop Digital & Transaction Strategic Direction	Level Up To The Next Journey	20 Januari 2024	PT Bank Syariah Indonesia Tbk Bank Syariah Indonesia Corporate University Distribution Strategy Group (DSG)
		Top Executive Learning Program (TELP)	Leadership Transformation	26 Februari 2024	PT Bank Syariah Indonesia Tbk Bank Syariah Indonesia Corporate University
		Seminar	Penyelarasan Jenjang 7 untuk Direksi Pemegang Sertifikat Manajemen Risiko Level 5	05 - 06 Juni 2024	PT Bank Syariah Indonesia Tbk Bank Syariah Indonesia Corporate University
		Sertifikasi	Resertifikasi Manajemen Risiko Level 7	17 Juli 2024	PT Bank Syariah Indonesia Tbk Bank Syariah Indonesia Corporate University
Grandhis Helmi Harumansyah	Direktur Risk Management	Workshop Digital & Transaction Strategic Direction	Level Up To The Next Journey	20 Januari 2024	PT Bank Syariah Indonesia Tbk Bank Syariah Indonesia Corporate University Distribution Strategy Group (DSG)
		Seminar	Penyelarasan Jenjang 7 untuk Direksi Pemegang Sertifikat Manajemen Risiko level 5	19-20 Juni 2024	Bankers Association for Risk Management (BARA)
		Seminar	Seminar Internasional Manajemen Risiko	27 Juni 2024	Bank Indonesia
		Konvensi	Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKN) Bidang Manajemen Risiko Perbankan	08 Juli 2024	Otoritas Jasa Keuangan
		Sertifikasi	Resertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7	17 Juli 2024	PT Bank Syariah Indonesia Tbk Bank Syariah Indonesia Corporate University
		Seminar	Forum Edukasi dan Temu Bisnis Akses Keuangan Syariah (FEBIS) dan Ekosistem Pesantren Inklusif Keuangan Syariah (EPIKS)	23 Juli 2024	Otoritas Jasa Keuangan
		Seminar	Nusantara Sharia Economic Forum 2024	30 Juli 2024	NET TV
		Seminar	Risk & Governance Summit 2024	26 November 2024	Otoritas Jasa Keuangan
		Seminar	AI for Leaders Leveraging Data Analytics	2-6 Desember 2024	National University of Singapore
Harry Gusti Utama	Direktur Retail Banking	Seminar	Penyelarasan Jenjang 7 untuk Direksi Pemegang Sertifikat Manajemen Risiko level 5	5-6 Juni 2024	Bankers Association for Risk Management (BARA)
		Sertifikasi	Sertifikasi Kualifikasi 7 Bidang Manajemen Risiko Perbankan	26 Juni 2024	PT Bank Syariah Indonesia Tbk Bank Syariah Indonesia Corporate University Lembaga Sertifikasi Profesi Keuangan Syariah - LSPKS
		Pelatihan	Pelatihan Dasar Perbankan Syariah	4-5 Juli 2024	LPP

Nama	Jabatan	Jenis Pendidikan dan Pelatihan	Materi Pendidikan dan Pelatihan	Tanggal	Penyelenggara
Ari Rizaldi	Direktur Treasury & International Banking	Sertifikasi	Ujian Resertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7	26 Juni 2024	PT Bank Syariah Indonesia Tbk Bank Syariah Indonesia Corporate University Lembaga Sertifikasi Profesi Keuangan Syariah - LSPKS
		Seminar	Executive Overview of Islamic Banking	04 - 05 Juli 2024	PT Bank Syariah Indonesia Tbk Bank Syariah Indonesia Corporate University Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPPP)
		Seminar	Penyelarasan Jenjang 7 untuk Direksi Pemegang Sertifikat Manajemen Risiko Level 5	4-5 September 2024	PT Bank Syariah Indonesia Tbk Bank Syariah Indonesia Corporate University Lembaga Sertifikasi Profesi Keuangan Syariah - LSPKS

**Tabel Pengembangan Kompetensi Keuangan Berkelanjutan bagi Unit Penanggungjawab**

Nama	Jabatan	Jenis Pelatihan	Materi Pelatihan	Tanggal	Penyelenggara
Yurista Pradana	Area Commercial Business Manager	Pelatihan Modular	Sustainable Financing Wholesale	1 Juli 2024	Internal Bank
Shelinda Rahman	Area Commercial Business Relationship Manager	Pelatihan Modular	Sustainable Financing Wholesale	1 Juli 2024	Internal Bank
R. Yogi Ariefiandi	Client Service Team Leader	Pelatihan Modular	Sustainable Financing Wholesale	1 Juli 2024	Internal Bank
Adi Supriadi	Senior Commercial Risk Reviewer	Pelatihan Modular	Sustainable Financing Wholesale	1 Juli 2024	Internal Bank
Muhammad Ilham Setiadi	Senior Commercial Risk Reviewer	Pelatihan Modular	Sustainable Financing Wholesale	1 Juli 2024	Internal Bank
Exval Mahendra Saputro	Corporate Business Senior Relationship Manager	Pelatihan Modular	Sustainable Financing Wholesale	1 Juli 2024	Internal Bank
Doli Ahdar Furqoni Matondang	Corporate Business Senior Relationship Manager	Pelatihan Modular	Sustainable Financing Wholesale	1 Juli 2024	Internal Bank
Aldida Safia Ruzis	Corporate Business Sector 3 Analyst	Pelatihan Modular	Sustainable Financing Wholesale	1 Juli 2024	Internal Bank
Winda Mega Permata	Corporate Business Sector 1 Analyst	Pelatihan Modular	Sustainable Financing Wholesale	1 Juli 2024	Internal Bank
Anggita Ferina Puteri	Corporate Business Sector 2 Senior Analyst	Pelatihan Modular	Sustainable Financing Wholesale	1 Juli 2024	Internal Bank
Asry Sofwan	Corporate Account Maintenance Officer	Pelatihan Modular	Sustainable Financing Wholesale	1 Juli 2024	Internal Bank
Budi Septiawan	Corporate Business Senior Relationship Manager	Pelatihan Modular	Sustainable Financing Wholesale	1 Juli 2024	Internal Bank
Dita Puspitasari	Corporate Business Sector 1 Analyst	Pelatihan Modular	Sustainable Financing Wholesale	1 Juli 2024	Internal Bank
Muhamad Chusni Aziz	Corporate Business Sector 2 Analyst	Pelatihan Modular	Sustainable Financing Wholesale	1 Juli 2024	Internal Bank
Val Azura Abdurrahman	Corporate Business Sector 2 Analyst	Pelatihan Modular	Sustainable Financing Wholesale	1 Juli 2024	Internal Bank
Tuti Aditama	Legal Wholesale Department Head	Pelatihan Modular	Sustainable Financing Wholesale	1 Juli 2024	Internal Bank
Fierda Financyana	Value Chain Business Department Head	Pelatihan Modular	Sustainable Financing Wholesale	1 Juli 2024	Internal Bank
Fenny Aslinda	Wholesale Business Strategy Department Head	Pelatihan Modular	Sustainable Financing Wholesale	1 Juli 2024	Internal Bank
Helga Pratiwi Anggraesti	Corporate Financing Risk 1 Senior Analyst	Pelatihan Modular	Sustainable Financing Wholesale	1 Juli 2024	Internal Bank
Yondi Kharisma Saputro	Corporate Financing Risk 3 Senior Analyst	Pelatihan Modular	Sustainable Financing Wholesale	1 Juli 2024	Internal Bank

Nama	Jabatan	Jenis Pelatihan	Materi Pelatihan	Tanggal	Penyelenggara
Rakhmad Syarifudin	Regional Analyst	Pelatihan Modular	<i>Sustainable Financing Wholesale</i>	1 Juli 2024	Internal Bank
Eka Nurdiana Septiyani	Portfolio Analytics Management Officer	Pelatihan Modular	<i>Sustainable Financing Wholesale</i>	1 Juli 2024	Internal Bank
Zendy Prima	Decentralized Compliance & Operational Risk Team Leader - RMD	Pelatihan Modular	<i>Sustainable Financing Wholesale</i>	1 Juli 2024	Internal Bank
Septiana Sakti Praharani	Corporate Business Sector 1 Analyst	Pelatihan Modular	<i>Sustainable Financing Wholesale</i>	1 Juli 2024	Internal Bank
Muhammad Faisal	Corporate Business Sector 4 Analyst	Pelatihan Modular	<i>Sustainable Financing Wholesale</i>	1 Juli 2024	Internal Bank
Aris Widi Setiawan	Sustainable Finance Department Head	Pelatihan Modular	<i>Sustainable Financing Wholesale</i>	1 Juli 2024	Internal Bank
Wulandari Syaputri	ESG Strategy & Portfolio Management Senior Officer	Pelatihan Modular	<i>Sustainable Financing Wholesale</i>	1 Juli 2024	Internal Bank
Aldi Rahadhika	Funding & Liquidity Management Department Head	Pelatihan Modular	<i>Sustainable Financing Wholesale</i>	1 Juli 2024	Internal Bank
Noviar Yulianti	Senior Forex, Structured Product & Treasury Overseas Analyst	Pelatihan Modular	<i>Sustainable Financing Wholesale</i>	1 Juli 2024	Internal Bank
Abdul Gafur	SME Risk Department Head	Pelatihan Modular	<i>Sustainable Financing Segmen SME</i>	1 Juli 2024	Internal Bank
Aditya David Bagus Setyawan	SME Agribusiness Officer	Pelatihan Modular	<i>Sustainable Financing Segmen Sme</i>	10-Sep-24	LPPI
Aditya Sanjaya	SME Relationship Manager	Pelatihan Modular	<i>Sustainable Financing Segmen SME</i>	10-Sep-24	LPPI
Agus Rahmanto	Micro Business Distribution Team Leader	Pelatihan Modular	<i>Sustainable Financing Segmen SME</i>	10-Sep-24	LPPI
Agus Sudrajat	SME Senior Relationship Manager	Pelatihan Modular	<i>Sustainable Financing Segmen SME</i>	10-Sep-24	LPPI
Arie Normandia	Micro Product Risk Section Head	Pelatihan Modular	<i>Sustainable Financing Segmen SME</i>	10-Sep-24	LPPI
Arif Budiman	SME Agribusiness Officer	Pelatihan Modular	<i>Sustainable Financing Segmen SME</i>	10-Sep-24	LPPI
Arif Ridwan	SME Product Risk Officer	Pelatihan Modular	<i>Sustainable Financing Segmen SME</i>	10-Sep-24	LPPI
Aris Rusdiyanto	SME Relationship Manager	Pelatihan Modular	<i>Sustainable Financing Segmen SME</i>	10-Sep-24	LPPI
Azmi Muhammad Sidqi	SME Relationship Manager	Pelatihan Modular	<i>Sustainable Financing Segmen SME</i>	10-Sep-24	LPPI
Deni Rezky	SME Relationship Manager	Pelatihan Modular	<i>Sustainable Financing Segmen SME</i>	10-Sep-24	LPPI
Denny Susetyo Wibowo	Insurance & Guarantee Management Officer	Pelatihan Modular	<i>Sustainable Financing Segmen SME</i>	10-Sep-24	LPPI
Dian Kuntiasih	SME Senior Relationship Manager	Pelatihan Modular	<i>Sustainable Financing Segmen SME</i>	10-Sep-24	LPPI
Diar Guntara	SME Relationship Manager	Pelatihan Modular	<i>Sustainable Financing Segmen SME</i>	10-Sep-24	LPPI
Eko Suprobo	SME Relationship Manager	Pelatihan Modular	<i>Sustainable Financing Segmen SME</i>	10-Sep-24	LPPI
Firdaus Ario Sukmalinata	SME Relationship Manager	Pelatihan Modular	<i>Sustainable Financing Segmen SME</i>	10-Sep-24	LPPI
Hidayat Syahrudin	SME Relationship Manager	Pelatihan Modular	<i>Sustainable Financing Segmen SME</i>	10-Sep-24	LPPI
Hidayatullah	SME Relationship Manager	Pelatihan Modular	<i>Sustainable Financing Segmen SME</i>	10-Sep-24	LPPI
Kamalodi	SME Relationship Manager	Pelatihan Modular	<i>Sustainable Financing Segmen SME</i>	10-Sep-24	LPPI

Nama	Jabatan	Jenis Pelatihan	Materi Pelatihan	Tanggal	Penyelenggara
Marwa Susilawati	SME Relationship Manager	Pelatihan Modular	Sustainable Financing Segmen SME	10-Sep-24	LPPI
Mohamad Yasin	SME Relationship Manager	Pelatihan Modular	Sustainable Financing Segmen SME	10-Sep-24	LPPI
Norman Adrian Gun Repi	SME Relationship Manager	Pelatihan Modular	Sustainable Financing Segmen SME	10-Sep-24	LPPI
Nurhayati	SME Relationship Manager	Pelatihan Modular	Sustainable Financing Segmen SME	10-Sep-24	LPPI
Nurina Ayu Ningtias	SME Relationship Manager	Pelatihan Modular	Sustainable Financing Segmen SME	10-Sep-24	LPPI
Nurita Afridiana	Strategy & Product Development Officer	Pelatihan Modular	Sustainable Financing Segmen SME	10-Sep-24	LPPI
Randi Kosim Siregar	SME Relationship Manager	Pelatihan Modular	Sustainable Financing Segmen SME	10-Sep-24	LPPI
Rani Kusuma Wijayanti	SME Ecosystem & Fintech Officer	Pelatihan Modular	Sustainable Financing Segmen SME	10-Sep-24	LPPI
Ratna Pradipta	SME Relationship Manager	Pelatihan Modular	Sustainable Financing Segmen SME	10-Sep-24	LPPI
Riyan Bahtera Mutaqodim	KUR Business Initiative Officer	Pelatihan Modular	Sustainable Financing Segmen SME	10-Sep-24	LPPI
Shofwan Muhammad Rasyid	SME Relationship Manager	Pelatihan Modular	Sustainable Financing Segmen SME	10-Sep-24	LPPI

## Manajemen Risiko atas Penerapan Keuangan Berkelanjutan [OJK E.3, FS2, IFRS S1-RISK MANAGEMENT, IFRS S2-RISK MANAGEMENT, FN-CB-550a.1, FN-CB-550a.2]

Manajemen risiko dalam penerapan keuangan berkelanjutan dilakukan sejalan dengan manajemen risiko bank. Proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko juga mencakup aspek Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (LST). Risiko yang timbul dari penerapan keuangan berkelanjutan dapat dikelola secara efektif melalui empat pilar penerapan manajemen risiko, yaitu (1) Pengawasan Aktif Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah; (2) Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit; (3) Kecukupan proses manajemen risiko; dan (4) Sistem pengendalian internal yang menyeluruh.

Pada penerapannya, Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah bertanggung jawab mengevaluasi risiko dan peluang yang timbul akibat perubahan iklim secara berkala melalui pengawasan pada penyusunan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan, laporan keberlanjutan, dan strategi keberlanjutan. Bank juga memiliki fungsi khusus yang bertanggung jawab memantau dan mengevaluasi risiko terkait LST. Pengelolaan portofolio pembiayaan dilakukan dengan memperhatikan aspek LST, salah satunya melalui pengaturan batas penyaluran pembiayaan pada sektor-sektor yang menghasilkan emisi karbon tinggi. Manajemen risiko LST ini dituangkan dalam berbagai ketentuan, diantaranya Standar Prosedur Bisnis *Portfolio Guideline*, Pentunjuk Teknis Operasional *Industry Acceptance Criteria* (IAC), dan Standar Prosedur Bisnis untuk masing-masing segmen pembiayaan.

Pengelolaan risiko terkait iklim meliputi pengelolaan risiko fisik dan risiko transisi. Risiko fisik merupakan risiko yang disebabkan oleh kejadian alam akibat dari perubahan iklim. Risiko transisi merupakan risiko yang muncul akibat perubahan arah kebijakan pemerintah serta pemangku kepentingan, kemajuan teknologi, dan dinamika sosial seiring dengan bergesernya arah perekonomian dunia menuju ekonomi rendah karbon. Oleh karenanya, perubahan tersebut menuntut BSI untuk menyesuaikan arah kebijakan yang berpotensi memberikan dampak pada bisnis, reputasi serta nilai dari asetnya.

### Climate Risk Stress Testing

BSI telah berpartisipasi dalam *Pilot Project Climate Risk Management* dan *Scenario Analysis* (CRMS) dalam mengelola risiko terkait iklim (*climate related risk*). Implementasi CRMS mengacu pada panduan yang diterbitkan OJK. Penerapan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan infrastruktur dan kepatuhan atas regulasi eksternal. Pada penerapan CRMS, BSI melakukan *Climate Risk Stress Testing* (CRST) yang merupakan proses komprehensif untuk mengevaluasi sejauh mana risiko perubahan iklim dapat mempengaruhi kinerja keuangan, strategi, tata kelola serta kerangka manajemen risiko Bank.

Pada tahun 2024, BSI menjadi salah satu Bank yang ditunjuk OJK dan BI untuk melakukan 1<sup>st</sup> *pilot project Climate Risk Stress Testing* (CSRT). CSRT dilakukan untuk menilai ketahanan Bank terhadap perubahan iklim yang terdiri atas risiko fisik dan risiko transisi. Risiko iklim berpotensi memberikan dampak langsung pada risiko keuangan diantaranya yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, dan risiko operasional. Pada fase 1<sup>st</sup> *pilot project* CSRT, BSI melakukan analisis dampak risiko iklim pada 51,63% total

portofolio pembiayaan yang terdiri atas sektor *mandatory* dari OJK dan sektor opsional yang ditetapkan Bank untuk memenuhi 50% portofolio dengan menggunakan skenario banjir dan kebakaran hutan untuk risiko fisik dan skenario iklim yang disusun oleh *Network for Greening the Financial System (NGFS)*, yang mencakup skenario *Current Policies*, *Delayed Transition*, dan *Net Zero 2050* untuk risiko transisi.

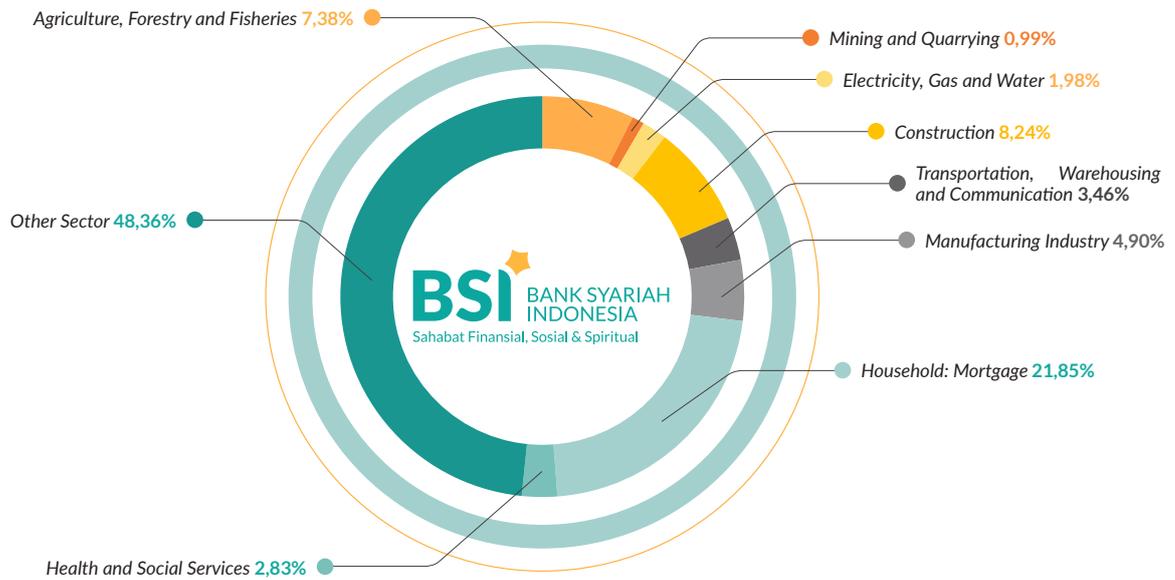


BSI telah melakukan analisis skenario iklim yang mencakup 8 (delapan) sektor yang menyumbang 51,63% dari total portofolio pembiayaan. Sektor tersebut meliputi *Agriculture, Forestry and Fisheries, Mining and Quarrying, Electricity, Gas and Water, Construction, Transportation, Warehousing and Communication, Manufacturing Industry, Household: Mortgage* serta *Health and Social Services*. Adapun rincian *share* berdasarkan sektor dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel Portofolio CRST

Sektor	Jumlah (dalam Miliar Rupiah)	%
Agriculture, Forestry and Fisheries*	17.731,40	7,38
Mining and Quarrying*	2.380,25	0,99
Electricity, Gas and Water*	4.762,72	1,98
Construction*	19.808,46	8,24
Transportation, Warehousing and Communication*	8.325,66	3,46
Manufacturing Industry*	11.769,28	4,90
Household: Mortgage*	52.517,02	21,85
Health and Social Services**	6.812,10	2,83
Other Sector***	116.209,15	48,36
<b>Total</b>	<b>240.316,04</b>	<b>100,00</b>

Keterangan:  
 \*Sektor *Mandatory* dari OJK  
 \*\*Sektor *optional* yang ditetapkan Bank untuk memenuhi 50% portofolio  
 \*\*\*Sektor yang tidak diperhitungkan pada CRST kali ini



Hasil perhitungan CSRT menunjukkan risiko iklim berdampak pada permodalan bank. Namun permodalan bank tetap memadai untuk mengantisipasi risiko yang mungkin terjadi. Hal ini tercermin dari rasio kecukupan modal berdasarkan hasil *stress test* masih berada di atas nilai minimum kecukupan modal sesuai regulator, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Selain itu, risiko iklim juga berdampak pada pengetatan likuiditas Bank, namun kondisi likuiditas Bank masih di atas batas yang ditetapkan regulator.

Pada pengukuran CRST terkait risiko kredit jangka pendek, BSI memperhitungkan dampak risiko transisi pada sektor tertentu dan risiko fisik pada sektor *agriculture* dan pembiayaan kepemilikan rumah. Pada kondisi *stress*, portofolio Bank mengalami penurunan kualitas dan penurunan CAR. Namun, rasio-rasio tersebut masih di atas batas yang ditetapkan regulator. Pada jangka pendek, BSI menggunakan neraca dinamis dengan data RBB sebagai data *baseline*.

Pada CRST jangka panjang terkait risiko kredit, BSI hanya memperhitungkan dampak risiko transisi pada sektor tertentu dengan mengasumsikan total pembiayaan Bank statis/sama dengan posisi Desember 2023. Portofolio BSI tidak terdampak pada *scenario current policies* karena pada skenario tersebut tidak terdapat risiko transisi.

Pada pengukuran CRST risiko pasar, dilakukan pada seluruh skenario, baik *short term* maupun *long term*, terdapat peningkatan beban modal risiko pasar. Pada *long term*, *capital charge* mengalami peningkatan namun stabil untuk setiap skenario dan periode. Hal tersebut karena periode data yang digunakan bersifat statis yaitu menggunakan posisi 31 Desember 2023. Perubahan nilai surat berharga FVTOCI meningkat di tahun 2040, khususnya skenario *delayed*, karena kebijakan terkait iklim baru diimplementasikan.

Pada pengukuran CSRT risiko operasional, BSI melakukan analisis dampak perubahan iklim terhadap risiko operasional. Penilaian dilakukan pada risiko fisik dan risiko transisi. Dampak risiko fisik tidak terlalu signifikan terhadap penurunan properti. Dampak risiko fisik yaitu sebesar Rp12.284,43 juta. Hal tersebut disebabkan sebagian besar kantor cabang BSI merupakan aset sewa sehingga kerugian akibat penurunan nilai menjadi risiko pemilik atau perusahaan asuransi.

Pada dampak risiko transisi, BSI mengasumsikan terdapat tambahan biaya yang ditimbulkan dari biaya *training* pegawai mengenai risiko iklim dan/atau ESG, biaya pembangunan *green building*/investasi terkait teknologi terbaru, biaya tenaga ahli terkait pengelolaan risiko iklim/ESG dan biaya lainnya. Dampak dari risiko transisi dan risiko fisik terhadap LCR adalah penurunan LCR. Namun demikian, proyeksi LCR masih berada di atas *threshold* 100%.

## Hubungan dengan Pemangku Kepentingan [OJK E.4, GRI 2-29, FS5]

Pelibatan pemangku kepentingan merupakan unsur yang tidak bisa dilepaskan untuk keberlanjutan bisnis BSI. BSI menyadari bahwa keterlibatan pemangku kepentingan dapat memberi manfaat berkelanjutan bagi masyarakat. Oleh karena itu, BSI melakukan identifikasi pemangku kepentingan berdasarkan kedekatan dan pengaruhnya pada kelangsungan usaha. BSI juga melibatkan pemangku kepentingan dalam perumusan kebijakan dan pelaksanaan program berdasarkan isu terkait keberlanjutan yang penting bagi Bank serta memperhatikan umpan balik dan kebutuhan masing-masing pemangku kepentingan. Pelibatan pemangku kepentingan juga digunakan BSI sebagai pertimbangan untuk menyusun isu-isu pada topik material. Proses identifikasi pemangku kepentingan yang dilibatkan dilakukan oleh Divisi Corporate Secretary & Communication Group (CSG) berdasarkan Standar Prosedur Operasional Corporate Secretary & Communication Group.

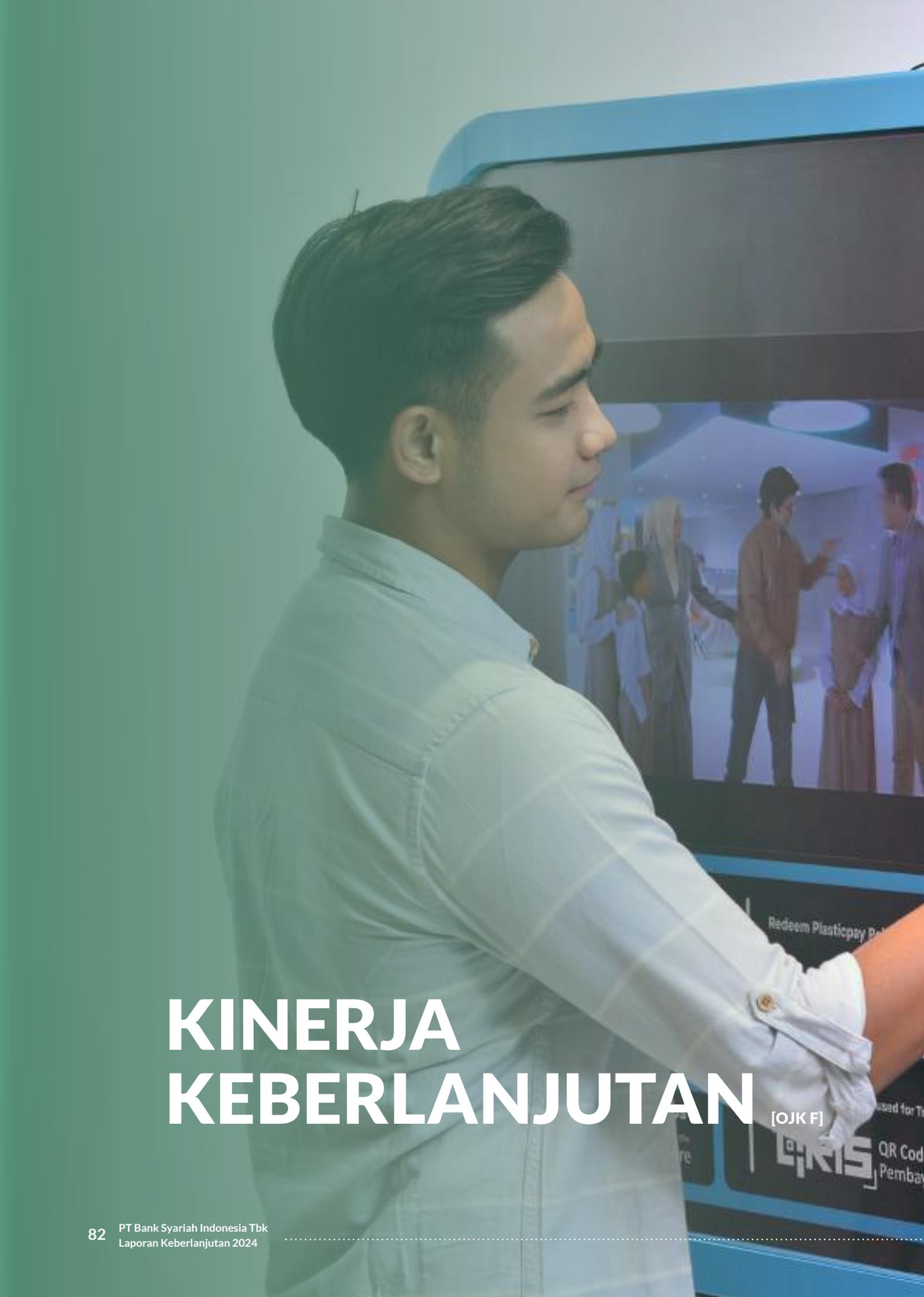
### Pelibatan Pemangku Kepentingan, Topik Utama, dan Respons Bank

Pemangku Kepentingan	Basis Identifikasi	Metode Pendekatan	Topik Utama
Pemegang saham dan investor	Tanggung jawab dan pengaruh	<ol style="list-style-type: none"> <li>Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) satu kali dalam satu tahun</li> <li>Rapat Umum Pemegang Saham Luar biasa (RUPSLB), sesuai kebutuhan</li> <li>Publikasi laporan keuangan setiap triwulan</li> <li>Laporan Tahunan, setiap tahun</li> <li>Laporan Keberlanjutan, setiap tahun</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Memperkokoh Kinerja keuangan dan keberlanjutan</li> <li>Menyelenggarakan RUPS dan RUPSLB</li> <li>Menyusun dan menyajikan laporan</li> <li>Pembagian deviden</li> <li>Publikasi dan keterbukaan informasi</li> <li>Pertemuan investor yang dilaksanakan oleh unit kerja hubungan investor</li> </ol>
Pegawai	Ketergantungan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Sarana komunikasi internal seperti <i>e-mail</i> dan memo internal</li> <li>Pelaksanaan sesuai kebutuhan</li> <li>Pengembangan diri sesuai dengan jadwal pelatihan</li> <li>Kesehatan, keamanan dan keselamatan kerja</li> <li>Kegiatan pegawai seperti olahraga dan hobi Frekuensi secara berkala</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Hubungan industrial yang kondusif</li> <li>Pemenuhan hak pekerja sesuai dengan ketentuan</li> <li>Kesetaraan dalam pengembangan diri, pelatihan, karier</li> <li>Sarana kerja dengan memperhatikan keamanan, kesehatan, dan keselamatan kerja</li> <li>Pembahasan isu keberlanjutan</li> </ol>
Pemerintah dan Regulator	Pengaruh	<ol style="list-style-type: none"> <li>Laporan kepatuhan, minimal satu kali setahun</li> <li>Menyerahkan Rencana Bisnis Bank (RBB) dan Laporan Realisasi RBB kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK)</li> <li>Menyerahkan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) ke OJK</li> <li>Menyerahkan laporan-laporan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Frekuensi sesuai regulasi</li> <li>Kerja sama penyelenggaraan acara sesuai kebutuhan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kepatuhan pada peraturan</li> <li>Menyusun dan menyampaikan RBB dan RAKB</li> <li>Menyusun dan menyerahkan laporan sesuai regulasi</li> <li>Menjalin komunikasi dengan pemerintah dan regulator</li> <li>Mematuhi hukum yang berlaku</li> <li>Pelaksanaan kebijakan antikorupsi</li> </ol>

Pemangku Kepentingan	Basis Identifikasi	Metode Pendekatan	Topik Utama
Nasabah	Ketergantungan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Aktivitas transaksi perbankan syariah di kantor atau jaringan Bank</li> <li>Kontak center, baik melalui telepon maupun sarana lain. Frekuensi setiap saat</li> <li>Produk dan layanan perbankan yang mudah, aman dan terpercaya</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Menyediakan informasi produk dan layanan</li> <li>Penyediaan sarana penyelesaian kendala/ keluhan (<i>contact center</i> 24 jam)</li> <li>Pengembangan jaringan, produk, dan layanan perbankan yang aman, nyaman, dan terpercaya</li> <li>Penerapan kebijakan anti korupsi dan antifraud</li> <li>Implementasi kebijakan keamanan data nasabah</li> <li>Melaksanakan survei kepuasan pelanggan</li> </ol>
Mitra Kerja/ Pemasok Lokal	Ketergantungan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kontrak pengadaan barang dan jasa</li> <li>Penilaian mitra kerja secara transparan</li> <li>Penandatanganan pakta integritas</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mekanisme proses pengadaan yang adil dan transparan</li> <li>Tidak ada pungutan biaya dan konflik kepentingan dalam proses pengadaan</li> <li>Menjalankan sistem manajemen anti penyuapan</li> </ol>
Industri Sejenis	Pengaruh	<ol style="list-style-type: none"> <li>Informasi perkembangan, peluang dan tantangan industri perbankan syariah</li> <li>Informasi regulasi terkait industri, khususnya perbankan syariah</li> <li>Pertemuan secara periodik dengan asosiasi industri perbankan dan perbankan syariah, serta asosiasi profesi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kemudahan <i>update</i> perkembangan industri melalui keanggotaan asosiasi industri dan profesional</li> <li>Kerja sama dalam peningkatan kapabilitas dan daya saing</li> <li>Mendukung pengembangan iklim persaingan usaha yang sehat</li> </ol>
Masyarakat dan Lingkungan	Pengaruh, Tanggung Jawab	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pengembangan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) sesuai rencana</li> <li>Dukungan dalam program peningkatan kesejahteraan</li> <li>Kemudahan akses pada layanan perbankan</li> <li>Kerja sama dengan mitra penyalur ZIS dalam kegiatan TJSL setiap tahun</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pembinaan hubungan yang harmonis dengan masyarakat</li> <li>Pengembangan dan implementasi program TJSL untuk mendukung pemberdayaan masyarakat.</li> <li>Melestarikan lingkungan</li> <li>Memberikan kesempatan kerja kepada masyarakat sesuai kebutuhan dan ketentuan Bank</li> <li>Melaksanakan program literasi keuangan</li> <li>Meningkatkan pembiayaan KKUB</li> </ol>

## Permasalahan Terhadap Penerapan Keuangan Berkelanjutan [OJK E.5]

Dalam menerapkan keuangan berkelanjutan, BSI masih menghadapi tantangan dalam mengintegrasikan aspek ESG secara menyeluruh pada aktivitas bisnis dan operasional. Dalam menghadapi tantangan tersebut, BSI telah membentuk Unit Kerja Koordinator ESG yang bertanggungjawab untuk menjadi koordinator dalam penyusunan kerangka kerja, visi, komitmen, strategi dan inisiatif dalam rangka mengintegrasikan aspek ESG termasuk implementasi keuangan berkelanjutan di seluruh aktivitas bisnis dan operasional BSI, dan Unit Kerja Kontributor ESG yang secara aktif menjalankan strategi dan inisiatif ESG pada seluruh aktivitas bisnis dan operasional sesuai cakupan masing-masing yang sejalan dengan kerangka kerja, visi dan komitmen ESG BSI yang telah ditetapkan.



# KINERJA KEBERLANJUTAN

[OJK F]

# 07»



## Kegiatan Membangun Budaya Keberlanjutan [OJK.F.1]

Untuk mendukung penerapan keuangan berkelanjutan, BSI berkomitmen membangun budaya keberlanjutan yang melibatkan seluruh insan BSI dan nasabah BSI. Untuk itu, BSI rutin melakukan serangkaian *green campaign* di kantor pusat dan cabangnya di seluruh Indonesia. *Green campaign* merupakan kegiatan Bank yang bertujuan untuk mengurangi konsumsi energi dan sumber daya alam, menghindari penggunaan kantong plastik, tas, dan botol yang sulit terurai, serta mewujudkan gaya hidup ramah lingkungan. Adapun program-program utama dalam *Green Campaign* BSI mencakup:



Selain itu, BSI juga telah memiliki kebijakan keberlanjutan yang di dalamnya telah mencakup fokus Bank untuk melakukan penghematan kertas. Hal ini dikarenakan sumber terbesar sampah di BSI berasal dari laporan, korespondensi bank dengan klien, dan transaksi perbankan. Adapun pendekatan efisiensi penggunaan kertas yang dilakukan secara konsisten dan kontinu di BSI antara lain:

1. *Double sided printing* dan penggunaan kertas bekas (*duplex printing*) yang masih kosong.
2. Digitalisasi permintaan barang cetakan yang dilakukan melalui aplikasi *online* dan proses pengadaan dilakukan secara digital melalui *Procurement Management System*.

3. Implementasi *E-DOC* BSI, yakni digitalisasi korespondensi berbasis *web* untuk pengurangan penggunaan kertas di kantor pusat.

Selanjutnya, dalam membangun budaya keberlanjutan, BSI juga telah menekankan bagi seluruh insan Bank untuk menggunakan alat makan dan minum yang tidak sekali pakai. Hal ini dilakukan sebagai salah satu langkah Bank dalam mengurangi sampah plastik yang dihasilkan dari sampah kemasan plastik dan sisa makanan dari fasilitas *pantry* pegawai.

# Kinerja Ekonomi

## Perbandingan Target dan Kinerja Produksi, Portofolio, Target Pembiayaan, atau Investasi, Pendapatan dan Laba Rugi [OJK F.2, IFRS S1-METRIC AND TARGET]

BSI telah berhasil merealisasikan pembiayaan, investasi, pendapatan margin dan bagi hasil, serta laba setelah pajak yang meningkat dibandingkan dengan tahun 2023. BSI juga berhasil meningkatkan pembiayaan pada *Retail Banking & Consumer*, *Wholesale Banking* dan Dana Pihak Ketiga yang meningkat di tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023.

Tabel Realisasi Produksi, Investasi, Pendapatan dan Laba Rugi

(Dalam Miliar Rupiah)

Uraian	2024	2024	2023	2022
	Growth YoY	Realisasi	Realisasi	Realisasi
Dana Pihak Ketiga	11,5%	327.454	293.776	261.491
Pembiayaan	15,9%	278.481	240.316	207.705
Penempatan pada BI & SB	16,0%	100.780	86.906	71.141
Pendapatan Margin dan Bagi Hasil	13,8%	25.216	22.169	19.612
Laba Setelah Pajak	22,8%	7.006	5.704	4.260
Penyaluran UMKM	15,3%	52.415	45.469	41.909

Adapun rincian dari pembiayaan pada *Retail Banking & Consumer*, sebagai berikut.

Tabel Pembiayaan pada *Retail Banking & Consumer*

(Dalam Miliar Rupiah)

Uraian	2024	2024	2023	2022
	Growth YoY	Realisasi	Realisasi	Realisasi
<i>Retail Banking &amp; Consumer</i>	16,5%	201.263	172.805	150.508
SME	11,8%	21.635	19.346	18.892
Mikro	21,1%	27.746	22.912	18.740
Bisnis Emas	78,2%	12.825	7.198	5.930
Griya	8,2%	56.834	52.517	48.070
Oto	28,7%	5.387	4.186	2.761
Mitraguna	16,8%	59.984	51.336	42.732
Pensiun	9,7%	16.051	14.626	12.837
Card	17,1%	802	684	545

Selanjutnya, pembiayaan yang disalurkan BSI pada *Wholesale Banking*, sebagai berikut.

### Tabel Pembiayaan pada *Wholesale Banking*

(Dalam Miliar Rupiah)

Uraian	2024	2024	2023	2022
	Growth YoY	Realisasi	Realisasi	Realisasi
Corporate	11,4%	58.720	52.714	46.139
Commercial	25,0%	18.498	14.797	11.058
<b>Total</b>	<b>14,4%</b>	<b>77.218</b>	<b>67.511</b>	<b>57.197</b>

\*realisasi tahun 2023 dan 2022 menyesuaikan resegmentasi yang berlaku di tahun 2024

Sedangkan, rincian dana pihak ketiga sebagai berikut.

### Tabel Dana Pihak Ketiga

(Dalam Miliar Rupiah)

Uraian	2024	2024	2023	2022
	Growth YoY	Realisasi	Realisasi	Realisasi
Giro	5,9%	56.336	53.201	44.521
Tabungan	12,7%	140.534	124.726	116.484
Tabungan Wadiah	17,6%	55.280	47.026	44.214
Tabungan Non Wadiah	9,7%	85.254	77.700	72.270
Deposito	12,7%	130.584	115.848	100.486

Rincian pembiayaan per sektor diuraikan sebagai berikut.

### Pembiayaan Berdasarkan Sektor Ekonomi

(Dalam Miliar Rupiah)

Sektor	2024	%	2023	%	2022	%
Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan	23.550	8,46	17.124	7,13	13.396	6,45
Perikanan	720	0,26	765	0,32	910	0,44
Pertambangan dan Penggalian	2.976	1,07	2.393	1,00	3.778	1,82
Industri Pengolahan	12.765	4,58	11.806	4,91	10.810	5,20
Listrik, Gas, dan Air	6.756	2,43	4.768	1,98	4.034	1,94
Konstruksi	18.843	6,77	19.833	8,25	16.468	7,93
Perdagangan Besar dan Eceran	19.747	7,09	17.484	7,28	16.924	8,15
Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	3.204	1,15	2.758	1,15	2.193	1,06
Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi	8.647	3,11	8.346	3,47	5.597	2,69
Perantara Keuangan	5.807	2,09	5.870	2,44	5.090	2,45
Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan	5.299	1,90	3.868	1,61	4.067	1,96
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Jasa Pendidikan	4.929	1,77	4.499	1,87	3.903	1,88
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9.402	3,38	6.818	2,84	5.099	2,46
Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan, dan Perorangan Lainnya	3.732	1,34	3.315	1,38	2.524	1,22
Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga	168	0,06	160	0,07	188	0,09
Kegiatan yang Belum Jelas Batasannya	-	0,00	4.499	1,87	-	0,00
Rumah Tangga	151.918	54,55	130.481	54,30	112.677	54,25
Bukan Lapangan Usaha Lainnya	19	0,01	30	0,01	44	0,02
<b>Jumlah</b>	<b>278.481</b>	<b>100</b>	<b>240.316</b>	<b>100</b>	<b>207.705</b>	<b>100</b>

## Perbandingan Target dan Kinerja Portofolio, Target Pembiayaan, atau Investasi pada Instrumen Keuangan atau Proyek yang Sejalan dengan Keuangan Berkelanjutan

[OJK F.3, FS3, FS6, FS7, FS8, FS10, FN-CB-000.A, FN-CB-000.B, FN-CB-410a.2]

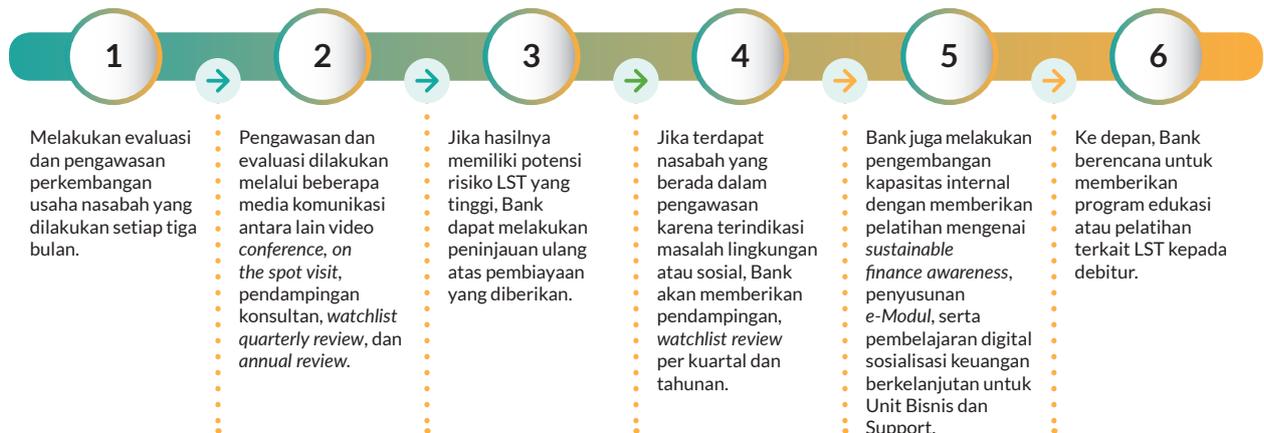
### Pembiayaan Sesuai Kriteria Kegiatan Usaha Berkelanjutan (KKUB)

BSI telah memiliki portofolio, pembiayaan dan investasi pada instrumen keuangan yang sejalan dengan keuangan berkelanjutan. Sesuai dengan RAKB yang telah ditetapkan, salah satu dari target kegiatan prioritas adalah Pengembangan Produk dan/atau Jasa yang sesuai Kriteria Kegiatan Usaha Berkelanjutan (KKUB) sesuai dengan RAKB. Kriteria KKUB yang digunakan oleh BSI mengacu pada Pedoman Teknis POJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik yang mengatur tentang pembiayaan berkelanjutan atau usaha berwawasan lingkungan BSI. Berdasarkan pedoman teknis tersebut, BSI telah mengembangkan standar prosedur operasional dalam mengimplementasikan POJK No. 51/POJK.03/2017.

Untuk memberikan pembiayaan, BSI memiliki kriteria keuangan hijau. Setiap usaha calon debitur harus memenuhi kriteria analisis dampak lingkungan berikut:



Setelah seluruh kriteria terpenuhi, selanjutnya Bank akan melaksanakan beberapa tahapan sebagai berikut:



Adapun pembiayaan dan investasi yang dilakukan oleh BSI pada kategori usaha berkelanjutan, sebagai berikut.

### Portofolio pada Proyek Berwawasan Lingkungan

(Dalam Miliar Rupiah)

Uraian	2024	2023	2022
<b>Sustainable Financing Portofolio</b>	<b>66.499</b>	<b>57.704</b>	<b>51.497</b>
Green Financing Portofolio	14.084	12.235	9.327
Social Financing Portofolio	52.415	45.469	41.824

Rincian pembiayaan pada *green financing portfolio* dan *social financing portfolio* diuraikan sebagai berikut.

### Pembiayaan Pada Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan

(Dalam Miliar Rupiah)

Uraian	2024	2023	2022
<b>Green Financing (KUBL)</b>			
a. Energi terbarukan	609	1.072	1.135
b. Efisiensi Energi	-	-	-
c. Pencegahan dan Pengendalian Polusi	-	-	-
d. Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati dan Penggunaan Lahan yang Berkelanjutan	6.865	4.806	3.095
e. Konservasi Keanekaragaman Hayati Darat dan Air	-	-	-
f. Transportasi Ramah Lingkungan	317	47	35
g. Pengelolaan Air dan Air Limbah yang Berkelanjutan	91	94	115
h. Adaptasi Perubahan Iklim	-	-	-
i. Produk yang Dapat Mengurangi Penggunaan Sumber Daya dan Menghasilkan Lebih Sedikit Polusi ( <i>Eco-Efficient</i> )	5.813	5.807	4.845
j. Bangunan Berwawasan Lingkungan yang Memenuhi Standar atau Sertifikasi yang Diakui Secara Nasional, Regional, atau Internasional	134	163	190
k. Kegiatan Usaha dan/atau Kegiatan Lain dari Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan Lainnya	256	245	259
<b>Total Green Financing (KKUB)</b>	<b>14.084</b>	<b>12.235</b>	<b>9.327</b>
<b>Social Financing (KUBS)</b>			
l. Kegiatan UMKM	52.415	45.469	41.824
<b>Total Social Financing (KUBS)</b>	<b>52.415</b>	<b>45.469</b>	<b>41.824</b>
<b>ESG Financing/Pembiayaan Berkelanjutan (KKUB)</b>	<b>66.499</b>	<b>57.704</b>	<b>51.497</b>
<b>Rasio ESG Financing (KKUB) Pembiayaan Berkelanjutan terhadap Total Pembiayaan</b>	<b>23,88%</b>	<b>24,07%</b>	<b>24,70%</b>

### Investasi Surat Berharga yang Sejalan dengan Keberlanjutan

BSI juga memiliki kebijakan untuk melakukan investasi yang bertanggungjawab (*responsible investment*) dengan melakukan investasi pada Surat Berharga Syariah, sebagai berikut.

(Dalam Miliar Rupiah)

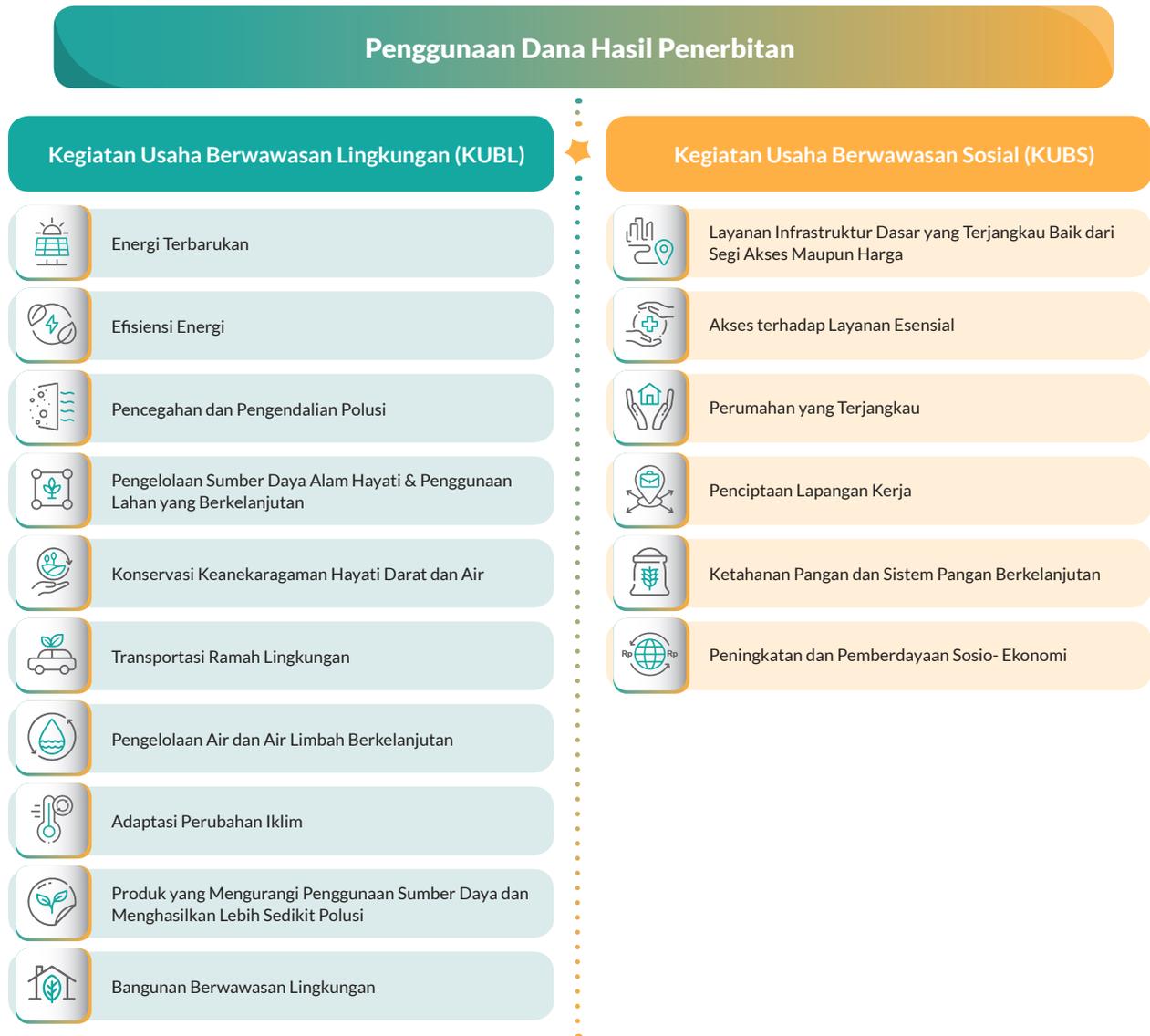
Uraian	2024	2023	2022
Investasi pada Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)	1.572,91	1.372,91	365,91
Surat Perbendaharaan Negara <i>Sharia State Treasury Certificate Syariah</i> (SPNS)	2.006,62	895	-
Sukuk Bank Indonesia	201,51	448,43	-
Reksa Dana	-	400	-
Efek Beragun Aset Syariah - <i>Sharia Asset Backed Securities</i> - Surat Partisipasi (EBAS - SP)	27,3	27,3	-

### Sustainability Sukuk

BSI berkomitmen untuk mengimplementasikan kebijakan keuangan berkelanjutan dalam kegiatan usaha sebagai upaya perbaikan kualitas hidup bagi ekosistem syariah. Sebagai wujud dari peran nyata komitmen BSI tersebut, BSI menjadi pionir dalam aktivitas keuangan berkelanjutan syariah di Indonesia dengan melakukan penerbitan Sukuk Mudharabah Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BSI Tahap I Tahun 2024 (*Sustainability Sukuk*) sebesar Rp3 triliun pada bulan Juni 2024 untuk mendukung

pendanaan pembiayaan yang akan membantu mewujudkan Indonesia yang lebih berwawasan lingkungan di masa depan. Inisiatif penerbitan *Sustainability Sukuk* ini sejalan dengan POJK No.18 Tahun 2023 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang dan Sukuk Berlandaskan Berkelanjutan yang diterbitkan pada tanggal 10 Oktober 2023.

Uraian penyaluran per segmen pembiayaan berdasarkan *underlying* Sukuk mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) per Desember 2024 diuraikan sebagai berikut:



(Dalam Miliar Rupiah)

Uraian	Per Desember 2024
<b>Kegiatan Usaha Berwawasan Sosial (KUBS)</b>	
Akses Terhadap Layanan Esensial	1.125
Penciptaan Lapangan Kerja dan Program yang Dirancang untuk Mencegah dan/atau Mengurangi Pengangguran, termasuk Pembiayaan Usaha Kecil, Menengah dan Pembiayaan Mikro	384
Ketahanan Pangan dan Sistem Pangan Berkelanjutan	173
Peningkatan dan Pemberdayaan Sosio-Ekonomi	105
<b>Total KUBS</b>	<b>1.787</b>

(Dalam Miliar Rupiah)

Uraian	Per Desember 2024
<b>Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan</b>	
Produk yang Dapat Mengurangi Penggunaan Sumber Daya dan Menghasilkan Lebih Sedikit Polusi ( <i>Eco-Efficient</i> )	764
Energi Terbarukan	442
Pengelolaan Air dan Air Limbah Berkelanjutan	27
<b>Total KUBL</b>	<b>1.213</b>

## BSI Deposito Wakaf

BSI Deposito Wakaf adalah produk investasi yang ditawarkan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI), produk ini mengkombinasikan model keuangan komersial syariah dengan konsep keuangan sosial islam. Produk ini merupakan *basic* produk Deposito yang nilai pokoknya berfungsi sebagai Wakaf Uang Sementara, di mana imbal hasil dari Deposito akan dikelola oleh Nazir ke dalam program-program sosial yang dikehendaki.

BSI Deposito Wakaf semangatnya adalah mengajak nasabah untuk berinvestasi akhirat dengan sifat hanya sementara (berwakaf tidak hilang), namun pahalanya Insya Allah selamanya. Turut berkontribusi memberikan manfaat pada pembangunan sosial dan kesejahteraan umat, sesuai dengan prinsip syariah yang mengutamakan kepentingan sosial dan keberlanjutan. Tujuan utama dari produk ini adalah untuk memfasilitasi nasabah yang ingin berwakaf sementara sambil tetap memberikan dampak positif bagi masyarakat dan keberkahan untuk dirinya sendiri, yang dalam Islam dianggap sebagai amal jariyah (amal yang pahalanya terus mengalir).



### BSI Deposito Wakaf Seri 1

Bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa/i salah satu universitas negeri yang kurang mampu



### BSI Deposito Wakaf Seri 2

Bantuan biaya pendidikan bagi putra/i pegawai BSI yang kurang mampu



BSI Deposito Wakaf merupakan salah satu inovasi produk BSI yang memiliki *uniqueness value* dan bukti peran perbankan syariah dalam penerapan keuangan berkelanjutan.

## Pembiayaan pada Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

### BSI UMKM Center

BSI memiliki UMKM Center yang tersebar di 4 kota besar yaitu Aceh, Yogyakarta, Surabaya, dan Makassar. BSI juga berencana memperluas jangkauan UMKM Center ke berbagai daerah lain di Indonesia. Di tahun 2024, jumlah UMKM yang menjadi binaan BSI UMKM Center sebanyak 4.478 UMKM dengan mayoritas jenis usaha yang dijalani yaitu pada sektor *food & beverage* dan *fashion*.

BSI juga senantiasa memperkuat dukungannya terhadap sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan meningkatkan pembiayaan dan pendampingan. Upaya strategis ini konsisten dilakukan BSI sebagai salah satu upaya mendorong ketahanan ekonomi nasional.

Hal tersebut, dapat terlihat dari penyaluran pembiayaan BSI kepada UMKM yang sebesar Rp52,42 triliun, meningkat 15,28% secara tahunan hingga Desember 2024. Pembiayaan UMKM ini disalurkan kepada >350 ribu nasabah atau meningkat 11,65%. Sedangkan Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) BSI juga naik menjadi Rp97,82 triliun atau 35,23 persen, melampaui target regulator sebesar 30 persen untuk akhir 2024.

BSI menyadari pentingnya peran UMKM dalam struktur ekonomi Indonesia. UMKM merupakan tulang punggung ekonomi Indonesia, BSI berkomitmen kuat untuk memberdayakan UMKM agar lebih tangguh dan mampu bersaing secara global. BSI juga terus berupaya meningkatkan kontribusinya dalam memperkuat ekosistem UMKM di Tanah Air. BSI terus berupaya membuka akses pasar dan pembiayaan untuk UMKM, serta memberikan pendampingan yang diperlukan agar sektor ini bisa terus berkembang dan naik kelas.

Sebagian besar pembiayaan UMKM BSI, yaitu sekitar 60 persen, disalurkan ke industri perdagangan dan eceran termasuk sektor *food & fashion*, pertanian dan jasa kemasyarakatan. BSI juga memastikan akses pembiayaan syariah dapat dijangkau melalui jaringan *outlet* yang tersebar di lebih dari 1.000 titik di seluruh Indonesia.

## Portofolio UMKM Per Sektor

(Dalam Miliar Rupiah)

Sektor	2024	%	2023	%	2022	%
Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan	11.422	21,79%	9.482	20,85%	7.684	18,33%
Perikanan	715	1,36%	757	1,67%	882	2,10%
Pertambangan dan Penggalian	261	0,50%	253	0,56%	150	0,36%
Industri Pengolahan	3.516	6,71%	3.057	6,72%	2.451	5,85%
Listrik, Gas, dan Air	592	1,13%	163	0,36%	226	0,54%
Konstruksi	1.558	2,97%	1.548	3,40%	1.824	4,35%
Perdagangan Besar dan Eceran	16.527	31,53%	14.651	32,22%	14.813	35,35%
Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	3.028	5,78%	2.452	5,39%	1.888	4,50%
Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi	1.412	2,69%	983	2,16%	1.214	2,90%
Perantara Keuangan	1.014	1,93%	1.198	2,63%	1.440	3,43%
Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan	1.752	3,34%	1.653	3,64%	1.519	3,62%
Jasa Pendidikan	3.350	6,39%	3.042	6,69%	2.775	6,62%
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3.501	6,68%	2.961	6,51%	2.450	5,85%
Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan, dan Perorangan Lainnya	3.630	6,93%	3.133	6,89%	2.426	5,79%
Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga	137	0,26%	136	0,30%	168	0,40%
<b>Jumlah</b>	<b>52.415</b>	<b>100,00%</b>	<b>45.469</b>	<b>100,00%</b>	<b>41.909</b>	<b>100,00%</b>

Uraian	Satuan	2024	2023	2022
Penyaluran UMKM	Dalam Triliun Rupiah	52,42	45,47	41,91
UMKM Binaan	UMKM	4.478	3.009	1.517
Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat	Dalam Triliun Rupiah	25,69	20,98	15,94

Tidak hanya melalui pembiayaan, BSI juga aktif dalam memberikan pendampingan dan pelatihan bagi para pelaku UMKM. Saat ini BSI memiliki UMKM Center yang tersebar di 4 (empat) kota besar yaitu Aceh, Yogyakarta, Surabaya, dan Makassar. Kedepannya, BSI berencana memperluas jangkauan UMKM Center ke berbagai daerah lain di Indonesia.

UMKM Center menjadi inkubator bagi pelaku UMKM untuk memberikan pelatihan, pembinaan, dan pendampingan bisnis serta membantu mereka memperoleh legalitas usaha dan sertifikasi halal. BSI juga mengikutsertakan UMKM-UMKM Binaan di berbagai expo/bazar yang diselenggarakan baik di dalam maupun luar negeri serta *business matching* dengan *buyers* di luar negeri untuk menembus pasar global. Kehadiran UMKM Center di berbagai daerah, merupakan bagian dari upaya BSI untuk menjaring dan melambungkan potensi-potensi UMKM baru agar dapat meningkatkan kapasitas dan kapabilitas usaha. Di tahun 2024, jumlah UMKM yang menjadi binaan BSI UMKM

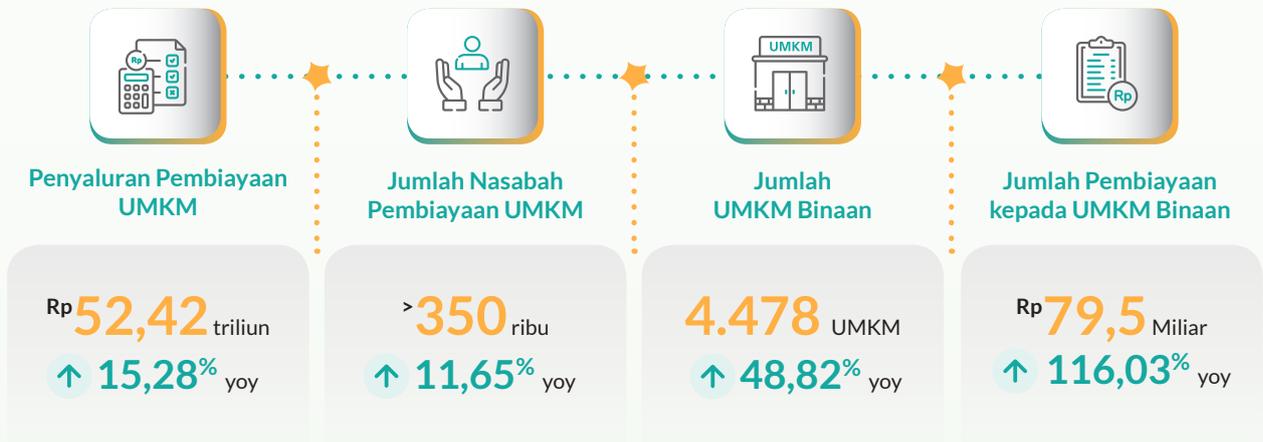
Center sebanyak 4.478 UMKM dengan mayoritas jenis usaha yang dijalani yaitu pada sektor *food & beverage dan fashion*.

Sejalan dengan upaya tersebut, hingga Desember 2024 BSI telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp79,5 miliar kepada UMKM binaan melalui BSI UMKM Center. Pembiayaan ini difokuskan pada bisnis-bisnis yang *resilient*, kuat, dan berkelanjutan, dengan tujuan agar UMKM dapat mengembangkan bisnisnya secara modern dan terdigitalisasi, bahkan mampu menembus pasar global.

Tidak hanya itu, BSI juga memanfaatkan teknologi digital untuk mendukung perkembangan UMKM. Platform seperti Portal UMKM BSI dan Portal Salam Digital menjadi alat penting dalam ekosistem ini. Portal UMKM BSI dirancang untuk membantu pelaku UMKM meningkatkan kualitas produk lokal agar dapat bersaing di pasar global, sementara Portal Salam Digital memudahkan masyarakat dalam mengajukan pembiayaan mikro secara digital.

Untuk memperluas akses pasar dan jaringan bisnis UMKM, BSI menyelenggarakan berbagai event seperti BSI UMKM Festival dan BSI International Expo. BSI juga mengembangkan program Talenta Wirausaha BSI (TWB) dan BSI Aceh Muslimpreneur (AMP) untuk meningkatkan kapasitas wirausaha muda dan Muslimpreneur di Indonesia.

Dengan berbagai program dan inisiatif yang telah diluncurkan, BSI berharap dapat terus mendorong pertumbuhan UMKM sebagai salah satu jalan mewujudkan Indonesia yang maju dan berdaya saing di kancah internasional.



## Talenta Wirausaha BSI

PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) menyelenggarakan Talenta Wirausaha BSI (TWB) yang merupakan program kompetisi, pelatihan dan pembinaan talenta wirausaha muda berbakat. Program TWB dihadirkan sebagai wujud komitmen BSI mendorong ekonomi di sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), melalui pengembangan para wirausaha muda dari seluruh Indonesia.

Fokus BSI pada pemberdayaan UMKM mencerminkan komitmen kami untuk menjadikan ekonomi syariah sebagai katalis utama pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dengan berbagai inisiatif strategis salah satunya TWB, BSI memastikan bahwa UMKM tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang secara berkelanjutan. TWB adalah program kompetisi, pelatihan, pemberian penghargaan dan bantuan modal usaha bagi generasi muda yang baru memulai usaha (*start up*) dan bagi yang ingin meningkatkan kapasitas usaha (*scale up*) untuk mencapai kebangkitan ekonomi bagi generasi muda.

Kategori wirausaha yang berhak mendaftar TWB yakni kategori pemula, rintisan, berdaya dan santri. Kategori pemula yakni wirausaha muda yang sedang merintis ide bisnis, wirausaha rintisan yakni yang sudah mencapai omzet Rp500 juta/tahun, kategori berdaya yakni wirausaha yang sudah mencapai omzet Rp500 juta/tahun dan memiliki masa usaha minimal 2 (dua) tahun serta kategori santri yakni wirausaha yang berasal dari kalangan pesantren.

Jenis usaha yang diperlombakan di antaranya makanan dan minuman, *fashion*, teknologi, ekonomi kreatif & jasa dan agribisnis. Beberapa proses dalam program ini yakni *kick off*, *onboarding*, *workshop*, *selection & judging*, *bootcamp*, *grand final* dan *awarding*.

TWB telah diselenggarakan pada 2022 dan 2023. Jumlah pendaftar TWB tahun 2024 sebanyak 9.961 Pendaftar atau meningkat dari 8.386 Pendaftar tahun 2023 dan 5.416 Pendaftar tahun 2022. Melalui program ini, BSI berharap dapat terus berkontribusi positif memperkuat ekosistem wirausaha syariah yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing global. Kami juga berharap para *entrepreneur* muda Indonesia menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah, menciptakan lapangan kerja baru, dan menginspirasi lebih banyak generasi muda untuk berkarya.

BSI secara berkelanjutan terus mendorong pemberdayaan sektor UMKM nasional, baik melalui program pembiayaan, digitalisasi layanan hingga pengembangan kewirausahaan. Hal ini sejalan dengan Asta Cita ke-3 dari pemerintahan Bapak Prabowo Subianto yakni meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.



Image: Direktur Utama BSI Hery Gunardi, Wakil Menteri UMKM RI Helvi Moraza, Deputy Bidang SDM, Teknologi dan Informasi Kementerian BUMN RI Tedi Bharata, dan Komisaris Utama BSI Muliawan D Hadad pada acara Kick Off Talenta Wirausaha BSI 2024.

## BSI Aceh Muslimpreneur

BSI Aceh Muslimpreneur (BSI AMP) adalah program yang diselenggarakan BSI untuk memberdayakan wirausaha muda Aceh dengan pendampingan dan peningkatan kapasitas berbasis syariah. Diselenggarakan sejak tahun 2023, BSI AMP mendorong pengembangan bisnis inovatif dan sesuai syariah, membantu UMKM Aceh "naik kelas" ke pasar global.

Data dari BSI Institute menunjukkan Aceh memiliki 914 ribu wirausaha muda, dengan 406 ribu di antaranya milenial berusia 15-34 tahun. Potensi ini menjadikan Aceh sebagai area strategis bagi pengembangan UMKM berbasis syariah.

BSI AMP bertujuan untuk memperoleh bibit unggul yang diharapkan bisa menciptakan perubahan signifikan untuk ekonomi daerah dan nasional serta bersaing di pasar global. Kepesertaan program ini dibagi menjadi 3 (tiga) kategori yaitu *Starter* (ide bisnis), *Scale-Up* (beromzet ≤Rp200 juta dan lama usaha di bawah 2 tahun) & *Sustainable* (beromzet >Rp200 juta dan lama usaha di atas 2 tahun) dengan proses seleksi mencakup kurasi ketat, pelatihan, dan pendampingan bisnis komprehensif.

BSI terus mendukung pertumbuhan UMKM Aceh melalui berbagai program, seperti penyaluran pembiayaan UMKM, BSI UMKM Center, dan pendampingan bisnis. Jumlah pendaftar BSI AMP

pada tahun 2024 mencapai 2.534 orang atau meningkat sebesar 13,43% dari 2.234 pendaftar tahun lalu, hal ini mencerminkan antusiasme yang tinggi dan komitmen wirausaha muda dalam mengembangkan usahanya.

BSI AMP diharapkan mampu menjadikan masa depan generasi wirausaha muda Aceh yang mandiri secara ekonomis terbuka lebar. Program ini telah membuktikan bahwa pengembangan kapasitas dan kewirausahaan dapat menciptakan dampak yang besar bagi para pengusaha UMKM Aceh.



Image: Para pemenang BSI Aceh Muslimpreneur 2024

## Pembiayaan Electric Vehicle (EV)

Sebagai salah satu portofolio yang sejalan dengan keuangan berkelanjutan, BSI memiliki pembiayaan EV. Pembiayaan EV disajikan sebagai berikut.

Jenis Kendaraan	2024		2023		2022	
	Dalam Jutaan Rupiah	NoA	Dalam Jutaan Rupiah	NoA	Dalam Jutaan Rupiah	NoA
Mobil Listrik	171.862	635	41.406	131	7.508	24
Motor Listrik	63	6	0	0	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>171.925</b>	<b>641</b>	<b>41.406</b>	<b>131</b>	<b>7.508</b>	<b>24</b>

## Meningkatkan Ekosistem Islam

Peningkatan ekosistem islam merupakan upaya BSI dalam mengembangkan ekosistem Islam di Indonesia, khususnya dalam bidang keuangan dan perbankan syariah. BSI berupaya mewujudkan visi Indonesia sebagai pusat ekonomi dan bisnis syariah dunia. Upaya BSI dalam mengembangkan ekosistem islam dilakukan dengan:

- Digitalisasi ekosistem haji dan umroh
- Pengembangan *unique* produk perbankan syariah seperti deposito wakaf
- Kerjasama berbagai *stakeholder* dalam hal kebijakan pemerintah dan literasi keuangan syariah kepada masyarakat
- Memfasilitasi sertifikasi halal gratis (*self declare*) untuk pelaku UMKM

Adapun pencapaian atas upaya BSI dalam meningkatkan ekosistem islam di tahun 2024 secara keseluruhan meningkat dibandingkan dengan tahun 2023 yang dirinci sebagai berikut.

### Pencapaian Islamic Ecosystem BSI

Uraian	Satuan	Pencapaian	
		2024	2023
Zakat Perusahaan	Dalam Miliar Rupiah	232	190
Zakat Pegawai	Dalam Miliar Rupiah	36	33
Ziswaf	Dalam Miliar Rupiah	1.709	1.523
Ziswaf Pemerintah & Non Pemerintah	Nasabah	57.195	31.630
Ekosistem Haji	Dalam Miliar Rupiah	17.656	14.638
Jumlah <i>outstanding</i> ekosistem haji dan umroh	Nasabah	4.855.450	4.495.944
Ekosistem Sekolah Islam	Dalam Miliar Rupiah	8.730	5.588
Jumlah <i>outstanding</i> ekosistem sekolah Islam	Nasabah	498.182	331.305
Ekosistem Masjid	Dalam Miliar Rupiah	6.977	4.674
Jumlah <i>outstanding</i> ekosistem masjid	Nasabah	1.034.276	550.303
Ekosistem Pesantren	Dalam Miliar Rupiah	1.437	1.122
Jumlah <i>outstanding</i> ekosistem pesantren	Nasabah	134.076	66.354
Industri Halal	Dalam Miliar Rupiah	1.565	984
Jumlah <i>outstanding</i> industri halal	Nasabah	97.393	61.269

### Nilai Ekonomi Langsung yang Dihasilkan dan Didistribusikan [GRI 201-1]

Nilai ekonomi langsung yang dihasilkan merupakan manfaat ekonomi yang terukur secara langsung melalui aktivitas maupun sumber daya yang dimiliki perusahaan. Sedangkan, untuk nilai ekonomi yang didistribusikan sendiri memiliki makna manfaat ekonomi yang dibagikan atau dialokasikan di antara berbagai pihak atau kelompok dalam suatu sistem ekonomi. Nilai ekonomi yang dihasilkan BSI berasal dari pendapatan pengelolaan dana sebagai *mudharib* dan pendapatan usaha lainnya. Nilai ekonomi yang didistribusikan berasal dari beban usaha umum dan administrasi, beban usaha gaji dan tunjangan, pembagian dividen serta investasi masyarakat atau dana CSR.

Hasil pengurangan antara nilai ekonomi yang dihasilkan dengan nilai ekonomi yang didistribusikan menghasilkan nilai ekonomi yang ditahan. Nilai ekonomi yang ditahan merupakan manfaat atau keuntungan ekonomi yang tidak langsung didistribusikan kepada Bank. Nilai ekonomi yang ditahan di tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 15,5% yaitu menjadi sebesar Rp16.021.652 juta meningkat dibandingkan tahun 2023 yang sebesar Rp13.874.209 juta.

## Tabel Nilai Ekonomi yang Dihasilkan dan Didistribusikan

(Dalam Jutaan Rupiah)

Uraian	2024	2023*	2022*
<b>Nilai Ekonomi yang Dihasilkan</b>			
Pendapatan Pengelolaan Dana Sebagai <i>Mudharib</i>	25.298.203	22.251.743	19.622.865
Pendapatan Usaha Lainnya	5.556.479	4.204.466	3.701.111
<b>Jumlah Nilai Ekonomi Dihasilkan</b>	<b>30.854.682</b>	<b>26.456.209</b>	<b>23.323.976</b>
<b>Nilai Ekonomi yang Didistribusikan</b>			
Beban Usaha Umum dan Administrasi	6.342.626	5.169.938	4.856.436
Beban Usaha Gaji dan tunjangan	5.284.136	5.035.215	4.948.942
Dividen	855.561	426.018	757.051
Beban Pajak	2.044.507	1.695.729	1.254.621
Investasi Masyarakat (TJSL)*	305.573	255.100	187.570
<b>Jumlah Nilai Ekonomi Didistribusikan</b>	<b>14.832.403</b>	<b>12.582.000</b>	<b>12.004.620</b>
<b>Nilai Ekonomi yang Ditahan</b>	<b>16.022.279</b>	<b>13.874.209</b>	<b>11.319.356</b>

Keterangan:

\*Dana investasi masyarakat adalah penyaluran dana Ziswaf dan dana kebajikan melalui Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS)

## Kewajiban Program Pensiun Manfaat Pasti dan Program Pensiun Lainnya [GRI 201-3]

BSI senantiasa memberikan jaminan hari tua bagi pegawainya sesuai Undang-Undang yang berlaku. BSI telah memiliki program Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) yang diberikan untuk pegawai tetap melalui kontribusi iuran dari pegawai dan perusahaan setiap bulannya, serta berbagai fasilitas lainnya untuk mendukung kinerja pegawai. Bank telah memberikan program pensiun yang meliputi Program Pensiun Manfaat Pasti dan Program Pensiun Iuran Pasti serta Program Jaminan Hari Tua. Program Jaminan Hari Tua (JHT) merupakan bagian dari Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.

Pada Program Pensiun Iuran Pasti, iuran kepesertaan yang dibayarkan meliputi kontribusi pegawai sebesar 5% dari gaji *netto* dan 10% dari gaji *netto* ditanggung oleh BSI. Pegawai yang mengikuti Program Jaminan Hari Tua diwajibkan membayar iuran sebesar 2% dari gaji *netto* dan 3,7% dari gaji *netto* yang ditanggung oleh Bank.

## Jumlah Pegawai yang Diikutsertakan dalam Program Pensiun

Uraian	2024	2023	2022
Program Pensiun Manfaat Pasti	16.645	17.151	17.257
Program Pensiun Iuran Pasti	17.408	17.871	17.679
Program Jaminan Hari Tua	17.271	17.855	18.637

## Bantuan Finansial dari Pemerintah [GRI 201-4]

Sepanjang tahun 2024, BSI tidak menerima bantuan dari Pemerintah, baik berupa keringanan pajak, kredit pajak, subsidi, maupun bantuan finansial lainnya.

## Praktik Pengadaan Barang dan Jasa [GRI 204-1, 414-1]

Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal, BSI senantiasa meningkatkan keterlibatan aktif pemasok dalam negeri (lokal). Dalam laporan ini, pemasok lokal merupakan pemasok yang berdomisili dan menjalankan usahanya di wilayah negara Republik Indonesia. Pelibatan pemasok dalam negeri memberikan dampak pada peningkatan roda perekonomian, terciptanya lapangan pekerjaan baru, dan berkurangnya ketergantungan pada impor. Jumlah nilai kontrak pekerjaan yang dikeluarkan sebagai berikut.

### Jumlah Nilai Kontrak Pekerjaan

Keterangan	2024	
	Nilai Kontrak Pekerjaan (dalam Jutaan Rupiah)	Persentase (%)
Pemasok Dalam Negeri	16.001.067	99,89%
Pemasok Luar Negeri	16.954	0,11%
<b>Total</b>	<b>16.018.021</b>	<b>100,00%</b>

BSI senantiasa menciptakan proses pengadaan yang adil dan transparan. Proses pengadaan pemasok menjadi tanggung jawab Unit Kerja Procurement & Fixed Asset Group, dilaksanakan sesuai dengan kebijakan pengadaan barang dan jasa nomor yaitu Standar Prosedur Operasional (SPO) Procurement Tahun 2024 dan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Procurement Pengadaan Barang dan Jasa PT Bank Syariah Indonesia Tbk. BSI menegaskan pentingnya ketaatan mitra kerja terhadap persyaratan keberlanjutan sebagai langkah bersama dalam mencapai operasional yang bertanggung jawab. Perseroan memiliki panduan dan sistem kerja sama dengan pemasok, yang menjadi pedoman dalam proses pengadaan, termasuk proses seleksi, dan penerapan prinsip-prinsip berikut:

1. **Syariah (Sharia Principle)**, Pemenuhan Prinsip Syariah menjadi fokus dalam kegiatan *procurement*.
2. **Efektif**, *Procurement* harus sesuai dengan kebutuhan/rencana yang telah ditetapkan dan memberikan manfaat optimal bagi Bank.
3. **Efisien**, Proses *procurement* dilaksanakan untuk mencapai kualitas sesuai dengan standar yang ditetapkan, dalam waktu yang telah disepakati, dan dengan tingkat harga yang terbaik
4. **Kompetitif/Terbuka dan bersaing**, Pelaksanaan *procurement* terbuka bagi Penyedia Barang dan Jasa yang memenuhi persyaratan, dengan persaingan yang sehat dan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang transparan.

5. **Transparan**, Semua ketentuan dan informasi mengenai pelaksanaan *procurement*, termasuk syarat teknis dan administrasi, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, dan penetapan calon Penyedia Barang dan Jasa, bersifat terbuka.
6. **Adil dan Wajar**, Memberikan perlakuan yang sama kepada semua calon Penyedia Barang dan Jasa tanpa kecenderungan memberikan keuntungan kepada pihak tertentu.
7. **Akuntabel**, Proses, hasil, dan pembayaran *procurement* dapat dipertanggungjawabkan.
8. **Tanggung jawab**, proses *procurement* dilaksanakan dengan hati-hati dan mematuhi ketentuan yang berlaku.
9. **Independen**, keputusan *procurement* diambil secara objektif dan bebas dari tekanan pihak manapun.

Dalam melakukan pemilihan pemasok, BSI mewajibkan pemasok untuk mematuhi kebijakan/regulasi/peraturan perundang-undangan. BSI juga melakukan penilaian melalui Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) terkait *track record* pemasok yang menunjukkan bahwa pemasok tidak terlibat pada dampak negatif terkait K3, diskriminasi, pekerja anak, kerja paksa, serta memberikan upah sesuai upah minimum regional. Selain itu, pada lokasi Gedung *Landmark* Aceh, pemilihan pemasok dilakukan dengan mempertimbangkan penggunaan material ramah lingkungan untuk pembangunan gedung tersebut.

## Survei Kepuasan Pemasok

Dalam rangka memahami persepsi terhadap proses dan implementasi *procurement* di Perseroan, BSI telah menyelenggarakan survei kepuasan pemasok. Survei tersebut menggunakan metode penilaian skala *likert* sebagai pendekatan evaluasi. Berikut adalah tabel yang merinci kriteria penilaian:

Nilai Skala Likert	Kategori
< 1,00	Tidak Memuaskan
1,01 - 2,00	Kurang Memuaskan
2,01 - 3,00	Cukup Memuaskan
3,01 - 4,00	Memuaskan
4,01 - > 5	Sangat Memuaskan

Pada tahun 2024, skor survei kepuasan pemasok terhadap proses *procurement* mencapai nilai sebagai berikut.

Indikator Penilaian	Skor	Kategori
Mekanisme Seleksi Rekanan	3,3	Memuaskan
Pelaksanaan Tahapan Proses Pengadaan	3,2	Memuaskan
Proses penyelesaian pembayaran pekerjaan	2,75	Cukup Memuaskan
Lain-lain: 1. Procurement & Fixed Asset Group (PFA) telah bertindak secara <i>fair</i> (tidak memihak salah satu <i>vendor</i> ) pada proses pengadaan barang dan jasa. 2. Pelayanan PFA dalam menyediakan fasilitas fisik kantor secara keseluruhan (penyediaan ruang tunggu, ruang rapat, <i>counter</i> informasi, kebersihan, mushola, toilet, dan lainnya). 3. Keamanan dan pelayanan secara umum di lingkungan PFA.	3,3	Memuaskan

## Anti Korupsi

### Operasi-Operasi yang Dinilai Memiliki Risiko Terkait Korupsi [GRI 205-1]

BSI menyadari adanya potensi tindakan korupsi pada seluruh aktivitas operasionalnya di seluruh unit kerja Bank. Di tahun 2024, manajemen BSI telah melakukan identifikasi atas bidang kerja yang memiliki risiko tinggi pada tindakan korupsi. Bidang kerja tersebut yaitu bidang pengadaan. Sedangkan, potensi risiko korupsi pada bidang penyaluran pembiayaan dikarenakan kemungkinan adanya skema kredit fiktif.

Namun demikian, dalam memitigasi potensi risiko korupsi, BSI memiliki program dan prosedur yang dilakukan dalam mengatasi praktik korupsi. Sesuai peraturan perundang-undangan tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yaitu Undang-Undang No. 31 tahun 1999 yang kemudian diubah oleh Undang-Undang No. 20/2002, tindakan korupsi didefinisikan sebagai penyalahgunaan wewenang untuk memperkaya diri sendiri atau orang/pihak lain melalui perbuatan melanggar hukum. Gratifikasi merupakan salah satu tindakan yang dilarang yang

dapat mengarahkan seseorang melakukan pelanggaran *fraud* dan korupsi. Untuk menghindari terjadinya peristiwa tersebut, BSI telah memiliki ketentuan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Pengendalian Gratifikasi yang terus disosialisasikan di lingkungan organisasi Bank.

Dengan implementasi pengendalian gratifikasi, maka diharapkan seluruh jajaran pegawai dapat melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Membangun nilai-nilai *Good Corporate Governance* dan menanamkan *value integrity*.
2. Tidak menerima dan/atau memberikan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.
3. Melaporkan setiap penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya kepada Unit Pengendali Gratifikasi yang berada di bawah koordinasi Unit Kerja Compliance.



Prosedur yang dilakukan dalam mengatasi praktik korupsi, balas jasa, *fraud* suap dan/atau gratifikasi, mencakup:

1. Pengendalian gratifikasi merupakan tugas dan tanggung jawab seluruh Jajaran Bank
2. Setiap jajaran Bank wajib menghindari dan menolak pemberian gratifikasi dengan sopan yang dapat dianggap sebagai pemberian suap (baik itu pemberian dari pihak eksternal ataupun internal/sesama Jajaran Bank) yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya sebagai Pejabat Bank.
3. Apabila penerimaan gratifikasi tidak dapat ditolak pada kesempatan pertama, maka penerima gratifikasi wajib melaporkan penerimaan gratifikasi tersebut dalam jangka waktu selambat-lambatnya 24 jam sejak penerimaan kepada Unit Pengendali Gratifikasi (Anti Bribery-Compliance & AML-CFT Group) disertai dengan bukti otentik pengembalian gratifikasi, antara lain berita acara serah terima pengembalian barang gratifikasi yang ditandatangani oleh penerima dan pemberi atau bukti setoran/transfer jika penerimaan dalam bentuk uang.
4. Jajaran Bank yang melakukan penolakan/penerimaan Gratifikasi, maka penerima gratifikasi wajib melaporkan hal tersebut kepada Unit Pengendali Gratifikasi melalui *e-mail* [antibribery@bankbsi.co.id](mailto:antibribery@bankbsi.co.id) dan/atau melalui whatsapp dengan nomor 08118 451 451 paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak penerimaan gratifikasi dengan tembusan kepada Kepala Unit Kerja Pelapor.
5. Unit Pengendali Gratifikasi melakukan *review* atas pelaporan penerimaan gratifikasi dan memutuskan jenis gratifikasi tersebut (menjadi kelolaan Bank atau dapat dimiliki oleh Pelapor) dan menerbitkan Surat Keputusan Penetapan Gratifikasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak laporan gratifikasi diterima lengkap berserta dokumen pendukungnya.
6. Jajaran Bank wajib mengedukasi pemberi atau pihak yang berpotensi memiliki benturan kepentingan dengan cara yang baik dan sopan mengenai larangan penerimaan gratifikasi yang dianggap suap dan/atau gratifikasi lainnya yang dilarang.
7. Apabila Jajaran Bank mengetahui adanya penerimaan gratifikasi yang dianggap suap dan tidak dilaporkan oleh penerima, maka yang bersangkutan dapat dilaporkan melalui sarana *whistleblowing system* (WBS).

## Penerapan ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)

BSI telah meraih Sertifikasi ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) sejak tahun 2021 dan melaksanakan re-Sertifikasi di tahun 2024. ISO SMAP 37001:2016 adalah standar internasional yang menetapkan persyaratan dan pedoman yang membantu organisasi dalam mencegah, mendeteksi dan menangani praktik penyuapan. Penerapan Sertifikasi ISO SMAP 37001:2016 menunjukkan komitmen BSI dalam menerapkan prinsip-prinsip anti penyuapan (*Good Coverage Governance*) pada setiap kegiatan bisnisnya. Melalui ISO SMAP 37001:2016 BSI memperkuat integritas dan transparansi dalam proses bisnisnya. Adapun fungsi dari penerapan ISO SMAP 37001:2016 adalah:

1. Mencegah Praktik Penyuapan
2. Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Regulasi
3. Meningkatkan Reputasi Perusahaan
4. Meminimalkan Risiko Hukum
5. Menciptakan Lingkungan Bisnis yang Atis
6. Meningkatkan Pengawasan dan Akuntabilitas
7. Menambah Nilai Kompetitif
8. Memberikan Kepercayaan Kepada Investor dan Pemangku Kepentingan

## Komunikasi dan Pelatihan Tentang Kebijakan dan Prosedur Anti-Korupsi [GRI 205-2]

Pelaksanaan sosialisasi Pengendalian gratifikasi bertujuan untuk meningkatkan pemahaman organisasi Bank terhadap Pengendalian Gratifikasi sehingga tercipta budaya *Awareness Anti-Fraud* yang mengacu pada Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Pengendalian Gratifikasi. BSI telah melakukan sosialisasi kepada seluruh insan BSI termasuk kepada Direksi dan Dewan Komisaris. BSI juga senantiasa melaksanakan sosialisasi *anti-fraud* kepada seluruh mitra bisnis melalui proses pengadaan barang, dan jasa, *vendor gathering*, dokumen pakta integritas, dan dokumen etika pengadaan bagi seluruh mitra di seluruh wilayah operasional BSI. Terkait kebijakan *anti fraud* juga telah dilakukan melalui *website* resmi BSI. Pada tahun 2024, program yang telah direalisasikan sebagai berikut.

1. Program *Risk Awareness* dan *Anti-Fraud Campaign* kepada seluruh pegawai melalui sosialisasi *online* dan *offline*, *e-mail blast*, *desktop* komputer, poster, info grafis, video, media sosial dan *monitoring onsite*. Rincian pelaksanaan kegiatannya adalah sosialisasi konten/poster anti gratifikasi bekerja sama dengan Corporate Secretary & Communication Group (CSG) melalui *e-mail blast*, *whatsapp blast*, media sosial dan *website* perusahaan dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Perihal	Media
1.	05 Februari 2024	Infografis: Jangan Takut untuk Menolak Gratifikasi	<i>Email Blast</i>
2.	20 Maret 2024	Surat ke RO I-X No. 04/0038-3/CPG: Himbauan Larangan Gratifikasi Ramadhan & Idul Fitri	Surat
3.	20 Maret 2024	Memo ke All Group No. 04/0371-3/CPG: Himbauan Larangan Gratifikasi Ramadhan & Idul Fitri	Memo
4.	03 April 2024	Poster: Larangan Pemberian Gratifikasi dalam Rangka Perayaan Hari Raya Idul Fitri 1445H	<i>Website</i> dan media sosial official BSI, yaitu instagram, facebook, dan twitter
5.	12 Juni 2024	Infografis: Larangan Pemberian Gratifikasi dalam Rangka Hari Raya Idul Adha	<i>Email Blast</i>
6.	12 Juni 2024	Poster: Larangan Pemberian Gratifikasi dalam Rangka Hari Raya Idul Adha	<i>Website</i> dan media sosial official BSI, yaitu instagram, facebook, dan twitter
7.	02 Agustus 2024	Reminder batas pemberian hadiah sesama pegawai di BSI kepada Seluruh Group di Kantor pusat melalui Nota Dir No. 04/124-2/DIR-CHC	Nota ke <i>All Group</i>
8.	02 Agustus 2024	Reminder batas pemberian hadiah sesama pegawai di BSI kepada Seluruh Pegawai di Kantor Jaringan melalui Surat Dir No.DIR04/1429-3/DIR-CAC	Surat ke <i>All Region</i>
9.	06 Agustus 2024	Videografis: "Easy Step Pelaporan Gratifikasi"	<i>Blast Email</i> BSI
10.		Infografis: <i>Awareness</i> terkait Maulid Nabi Muhammad SAW	<i>Email Official Blast</i>
11.	17 September 2024	Imbauan kepada pihak eksternal - Infografis <i>Awareness</i> terkait Maulid Nabi Muhammad SAW	<i>Website</i> dan media sosial official BSI, yaitu instagram, facebook, dan twitter
12.	25 Oktober 2024	Compliance & AML CFT <i>Awareness</i> terkait Perbedaan Hadiah, Gratifikasi, Suap & Pemerasan	<i>Anti Bribery</i> Bank BSI
13.	28 Oktober 2024	Poster - Semangat Sumpah Pemuda dalam mencegah Gratifikasi dan <i>Fraud</i>	<i>Email Official Blast</i>
14.	17 Desember 2024	<i>Awareness</i> - Larangan Penerimaan Gratifikasi terkait Natal dan tahun baru kepada Seluruh Group di Kantor pusat melalui Nota Dir No. 04/0207-2/DIR-CAC	Nota ke <i>All Group</i>
15.	17 Desember 2024	<i>Awareness</i> - Larangan Penerimaan Gratifikasi terkait Natal dan tahun baru kepada Seluruh Pegawai di Kantor Jaringan melalui Surat Dir No.4/02267-3/DIR-CAC	Surat ke <i>All Region</i>
16.	19 Desember 2024	Infografis Internal - Larangan Penerimaan Gratifikasi terkait Natal dan tahun baru	<i>Email Official Blast Anti Bribery</i> Bank BSI
17.	23 Desember 2024	Imbauan kepada pihak eksternal - Infografis <i>Awareness</i> Larangan Pemberian Hadiah terkait Natal dan tahun baru melalui <i>Website</i> & Media Sosial (instagram)	<i>Website</i> BSI dan Media sosial official BSI, yaitu instagram, facebook, dan twitter

2. Sosialisasi Anti Gratifikasi (Laa Risywah) kepada seluruh pegawai Bank untuk mengimplementasikan *Code of Conduct* dan komitmen *Good Corporate Governance* (GCG) dengan rincian sebagai berikut:

a. Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi melalui tatap muka baik media *Offline* dan *Online*:

Sasaran sosialisasi	Tanggal	Peserta Sosialisasi
<b>PIHAK INTERNAL</b> (Pegawai Organik dan Non Organik BSI)	1. 20 Februari 2024	Region VII Semarang
	2. 04 Maret 2024	Region IX Kalimantan
	3. 07 Maret 2024	Distribution & Strategy Group (DSG)
	4. 27 Maret 2024	DBO Group
	5. 28 Maret 2024	ASP Group
	6. 14 Mei 2024	Region VI Bandung
	7.	HCS Group
	8. 19 Juni 2024	HCP Group
	9.	HCBP 1
	10.	HCBP 2
	11. 24 Juni 2024	BSU, HCP, HCS, SORH 1, PFA, CAC
	12. 01 Juli 2024	Region III Palembang
<b>PIHAK EKSTERNAL</b> (Rekanan, <i>Vendor</i> , Mitra kerja dan Pihak ketiga lainnya)	1. 14 Mei 2024	Rekanan Notaris, Asuransi, Penjaminan, KAP, KJPP, Balai Lelang dan Kantor Hukum di bawah koordinasi RO VI Bandung
	2. 01 Juli 2024	Rekanan Notaris, Asuransi, Penjaminan, KAP, KJPP, Balai Lelang dan Kantor Hukum di bawah koordinasi RO III Palembang
	3. 10 Oktober 2024	BSI Maslahat

b. Kunjungan ke Unit kerja dalam rangka *monitoring* atas sosialisasi yang dilakukan, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Tanggal	Unit Kerja	Region
1.		Area Saharjo	
2.	19 Januari 2024	KC Saharjo	RO V Jakarta 2
3.		KCP Tebet Barat	
4.	19 Februari 2024	KCP Semarang Pandanaran	
5.		KCP Semarang MT Haryono	
6.	20 Februari 2024	KC Semarang Pandanaran	
7.		KC Semarang A Yani	RO VII Semarang
8.		KCP Tentara Pelajar	
9.		KCP Semarang Sudiarto	
10.		KCP Semarang Majapahit	
11.	21 Februari 2024	KCP Ungaran Diponegoro 1	
12.		KCP Tangerang Ciledug 1	
13.		KCP Kalideres	RO IV Jakarta 1
14.		KCP Kedoya	
15.	04 Maret 2024	KCP Banjarmasin A. Yani	
16.		KC Banjarmasin Lambung Mangkurat	
17.		KC Banjarmasin Banjar Baru	
18.	05 Maret 2024	KC Martapura	RO IX Kalimantan
19.		KCP Martapura Pasar Intan	
20.		KCP Banjarbaru A. Yani	
21.	06 Maret 2024	Area Consumer Financing (ACF) Banjarmasin	
22.		KCP Kayu Tangi	

No.	Tanggal	Unit Kerja	Region
23.		KCP Jakarta PUPR	
24.	25 Maret 2024	KCP Kementrian Kehutanan (Kementan)	RO V Jakarta 2
25.		KCP ASABRI	
26.		KCP Buah Batu 2	
27.	13 Mei 2024	KCP Rancaekek	
28.		KCP Astana Ayar	
29.		KCP Ujung Berung 1	RO VI Bandung
30.		KC Suniaraja	
31.	15 Mei 2024	KCP Bandung Setiabudi	
32.		KCP Lembang	
33.		KCP Bandung UPI	
34.	01 Juli 2024	KCP Palembang A. Rivai	
35.		KCP Palembang Veteran	
36.		KCP OPI Jakabaring	
37.		KCP Palembang Sudirman	
38.	02 Juli 2024	KCP Palembang Pasar Ilir	RO III Palembang
39.		KCP Palembang Demang	
40.		KCP Palembang Indralaya	
41.		KCP Palembang Jakabaring	
42.		KC Palembang Sudirman	
43.	03 Juli 2024	KCP Palembang Patal	
44.		KCP Palembang Kenten	

### Insiden Korupsi yang Terbukti dan Tindakan yang Diambil [GRI 205-3]

Selama tahun 2024, terdapat insiden *fraud* yang melibatkan 24 pegawai tetap dan 4 (empat) pegawai tidak tetap. Dari insiden tersebut, terdapat 8 (delapan) pegawai tetap dan 2 (dua) pegawai tidak tetap yang ditindaklanjuti melalui proses hukum. Dari kasus yang terjadi, sebagian sudah ada yang terbukti secara hukum dan masih dalam proses penyelidikan & persidangan. Atas insiden *fraud* yang terjadi, seluruh pegawai yang terlibat diberhentikan. Namun demikian, dari insiden *fraud* yang terjadi tidak terdapat kontrak mitra kerja yang diakhiri serta tidak terdapat kasus *fraud* yang diajukan oleh publik terhadap BSI maupun pegawai BSI.

Keterangan	Jumlah (Orang)	Status
Pegawai tetap	24	8 (delapan) pegawai tetap ditindaklanjuti proses hukum
Pegawai tidak tetap	4	2 (dua) pegawai tidak tetap ditindaklanjuti proses hukum

# Kinerja Lingkungan Hidup

## Aspek Umum

### Biaya Lingkungan Hidup [OJK F.4, GRI 201-2]

BSI memiliki komitmen untuk senantiasa berkontribusi terhadap lingkungan. Meskipun aktivitas operasional BSI tidak bersinggungan langsung dengan lingkungan, namun demikian BSI turut berkontribusi dalam mencegah kerusakan lingkungan melalui aktivitas penanaman pohon produktif di Desa Semoyo Yogyakarta. Selain itu, BSI juga telah menggunakan kendaraan listrik sebagai upaya pengurangan penggunaan BBM dan telah melakukan pemasangan *charging station* yang digunakan untuk pengisian energi bagi kendaraan listrik. adapun biaya yang dikeluarkan dirinci sebagai berikut.

(Dalam Rupiah Penuh)

Keterangan	Biaya
Penanaman pohon produktif di Desa Semoyo Yogyakarta	430.000.000
Biaya sewa <i>electric vehicle</i>	897.599.976
Biaya pemasangan <i>wall charging</i>	214.233.500
<b>Total</b>	<b>1.541.833.476</b>

## Aspek Material

### Penggunaan Material yang Ramah Lingkungan [OJK F.5]

Dalam melakukan aktivitas operasionalnya, BSI senantiasa memanfaatkan perkembangan teknologi digital. Hal ini dilakukan untuk mengurangi penggunaan kertas yang kemudian digantikannya menjadi *e-document*. Selain itu, dalam menunjang kegiatan bisnisnya, BSI telah menggunakan berbagai material ramah lingkungan seperti:

- Menggunakan *recycled plastic* pada *top table* meja kantor di BSI Tower
- Papan MDF pada furniture *custom*
- Kaca yang dapat mereduksi panas di Gedung *Landmark Aceh*
- Menggunakan *refrigerant* dengan ODP 0 seperti R134A dan APAR berbahan CO<sub>2</sub> di BSI Tower

- Menggunakan material yang merupakan hasil daur ulang seperti besi baja tulangan
- Menggunakan material modular atau *prefab* yang bertujuan untuk mengurangi sampah pada masa konstruksi, seperti material kaca *facade* dengan *system unitize*
- Menggunakan material *sintered stone*, yang merupakan campuran bahan mineral alam yang dipadatkan dan dibakar pada suhu tinggi yang digunakan untuk lantai maupun dinding
- Penggunaan *marmoleum* untuk material lantai BSI Tower, *marmoleum* merupakan lantai alami yang terbuat dari bahan-bahan yang alami

## Aspek Energi

### Jumlah dan Intensitas Energi yang Digunakan [OJK F.6, GRI 302-1, 302-2, 302-3]

Dalam menjalankan aktivitas operasionalnya, BSI hanya menggunakan 2 (dua) sumber energi yaitu energi listrik dan BBM. Energi listrik untuk menunjang operasional kantor dan BBM untuk menunjang kendaraan operasionalnya. Oleh karena BSI merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang perbankan, maka BSI tidak mengonsumsi dan menjual pemanas, pendingin dan uap, serta BSI belum melakukan pengukuran energi yang berasal dari luar perusahaan. Di samping itu, BSI juga tidak menjual energi listrik. Metode yang digunakan BSI untuk mengukur penggunaan energi yaitu mengumpulkan penggunaan energi listrik dan BBM dari seluruh wilayah operasional BSI kemudian dikonversikan ke dalam gigajoule. BSI juga telah menggunakan sumber energi terbarukan yang berasal dari Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di beberapa lokasi operasional BSI meliputi Kantor Cabang Mataram, Kantor Cabang Surabaya, Kantor Cabang Mayestik, *Landmark Aceh* dan sport center BSI Pejompongan.

Penggunaan energi di tahun 2024 bersumber dari pemakaian listrik dan BBM di seluruh wilayah operasional BSI. Adapun besarnya penggunaan energi sebagai berikut.

Tabel Intensitas Pemakaian Energi tahun 2024

Energi	Satuan	2024*
Listrik	kWh	80.779.932
	Gigajoule	290.807,76
BBM	Liter	7.112.582
	Gigajoule	243.250,30
Total	Gigajoule	534.058,06
Total Produksi	Dalam Miliar Rupiah	278.481
Total Pendapatan	Dalam Miliar Rupiah	25.298
Total Pegawai	Orang	17.234
Intensitas Pemakaian Energi	Pembiayaan: Gigajoule/Triliun Rupiah	1,92
	Pendapatan: Gigajoule/Triliun Rupiah	21,11
	Pegawai: Gigajoule/Orang	30,99

Keterangan:

\*Pengukuran penggunaan energi dengan menggunakan *digital carbon tracking*

Convert kWh ke Gigajoule: [convertunits.com](https://convertunits.com)

Convert Liter ke Gigajoule: <https://hextobinary.com/unit/energy/from/gasoline/to/gigajoule>

Penggunaan energi di tahun 2023 dan 2022 merupakan data yang berasal hanya dari kantor pusat The Tower. Adapun besarnya penggunaan energi sebagai berikut.

Tabel Intensitas Pemakaian Energi tahun 2023 dan 2022

Energi	Satuan	2023	2022
Listrik	kWh	2.117.285,90	5.155.191
	Gigajoule	7.616,14	18.558,69
BBM	Liter	157.329,41	97.672
	Gigajoule	6.027,41	3.517,41
Total	Gigajoule	13.643,55	22.076,10
Total Produksi	Dalam Miliar Rupiah	240.316	207.705
Total Pendapatan	Dalam Miliar Rupiah	22.250	19.620
Total Pegawai	Orang	17.909	18.581
Intensitas Pemakaian Energi	Pembiayaan: Gigajoule/Triliun Rupiah	0,06	0,11
	Pendapatan: Gigajoule/Triliun Rupiah	0,61	1,13
	Pegawai: Gigajoule/Orang	0,76	1,19

Keterangan:

Convert kWh ke Gigajoule: [convertunits.com](https://convertunits.com)

Convert Liter ke Gigajoule: <https://hextobinary.com/unit/energy/from/gasoline/to/gigajoule>

Tabel Pemakaian Energi yang Terbarukan

Energi	Satuan	2024	2023	2022
Penggunaan Solar Panel di Landmark Aceh	kWp	37,4	-	-

## Upaya dan Pencapaian Efisiensi Energi dan Penggunaan Energi Terbarukan [OJK F.7, GRI 302-4, 302-5]

Guna mendukung penerapan keuangan berkelanjutan, melalui aktivitas operasionalnya BSI berkomitmen untuk terus melakukan efisiensi energi sebagaimana tertuang dalam dalam ESG Guiding Principle BSI. Hal ini dilakukan dengan tujuan Bank untuk berperan aktif dalam implementasi *Sustainable Operations*. Upaya BSI dalam melakukan efisiensi energi telah diwujudkan dengan:

1. Pembangunan Gedung *Landmark Aceh* dengan konsep *green building*.
2. Penggunaan solar panel di Gedung BSI antara lain di Kantor Cabang Mayestik, Lapangan Olahraga Pejompongan, dan Kantor Cabang Mataram.
3. Penerapan *water treatment* di gedung/kantor BSI.
4. Menggunakan 100% lampu LED yang memiliki efisiensi energi yang lebih baik.
5. Menggunakan teknologi *inverter* dan *refrigerant* volume pada pendingin ruangan.
6. Menggunakan 115 *electric vehicle* yang terdiri dari 113 motor dan 2 mobil.

7. Sistem pendingin ruangan di kantor-kantor BSI telah menggunakan teknologi *inverter* dan *refrigerant* volume yang mampu menghemat listrik hingga 50%. Selain itu, pengaturan suhu ruangan di kantor pusat dan kantor cabang BSI juga telah mempertimbangkan optimalisasi efisiensi energi.
8. Penggunaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di beberapa lokasi operasional BSI meliputi Kantor Cabang Mataram, Kantor Cabang Surabaya, Kantor Cabang Mayestik, Landmark Aceh dan sport center BSI Pejompongan.

Upaya pengurangan energi di atas belum bisa diukur penurunannya karena pengukuran penggunaan energi di tahun 2023 belum menggunakan *Digital Carbon Tracking* seperti yang sudah dilakukan di tahun 2024.

Di tahun 2024, BSI menetapkan *baseline* dalam pengukuran energi maupun emisi yaitu di tahun 2024. Hal ini dikarenakan adanya pengembangan *Digital Carbon Tracking* untuk pencatatan dan perhitungan energi dan emisi di seluruh jaringan BSI. Oleh karenanya, data penggunaan energi di tahun 2024 terlihat mengalami peningkatan yang disebabkan oleh data yang berasal dari seluruh jaringan BSI, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya.



## Aspek Air

### Penggunaan Air [OJK F.8]

Dalam menunjang aktivitas operasionalnya, BSI menggunakan air yang berasal dari pihak ketiga (PDAM) yang digunakan untuk kebutuhan domestik di kantor-kantor cabang dan *data center* BSI seperti untuk penggunaan toilet, dapur, wudhu dan lainnya. BSI senantiasa berkomitmen untuk menggunakan air secara bijak. Hal ini dikarenakan BSI menyadari bahwa air merupakan salah satu sumber daya alam terpenting bagi keberlanjutan kehidupan. Bank senantiasa berkomitmen untuk memastikan keberlanjutan *water balance* melalui pendekatan pengelolaan air yang berkelanjutan. Pengelolaan air berkelanjutan dilakukan melalui penggunaan *water treatment* di gedung kantor BSI, serta mendaur ulang air bekas pakai gedung untuk air *flush toilet* pada gedung baru. Proses daur ulang menggunakan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) yang dikoordinir langsung oleh pihak gedung. Pengelolaan air yang dilakukan oleh Bank bertujuan untuk:



1. Mengurangi pengambilan air baku dari badan air umum, dan sebisa mungkin tidak menggunakan air tanah secara berlebihan.
2. Meningkatkan resirkulasi air melalui proses daur ulang air dan memastikan setiap fasilitas operasional BSI memiliki *Water Treatment Plant* sehingga air yang telah melalui proses

*treatment* dapat digunakan kembali, antara lain untuk *flush toilet* dan menyiram tanaman

3. Memastikan kualitas air limbah yang dialirkan ke Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) memenuhi baku mutu sesuai dengan regulasi yang berlaku

BSI juga berupaya untuk melakukan efisiensi penggunaan air yang dilaksanakan melalui kampanye penghematan air di area operasional Bank antara lain melalui poster-poster himbauan yang ditempatkan di area toilet, wudhu, dan tempat cuci tangan untuk menggunakan air secara tidak berlebihan. Inisiatif efisiensi air juga diterapkan di Masjid BSI Cipali, air bekas wudhu dimanfaatkan untuk menyiram tanaman di sekitar area Masjid.

BSI belum mengukur penggunaan air daur ulang dan limbah cair yang dibuang. Pengukuran penggunaan air diasumsikan atas biaya tagihan air berdasarkan dengan kategori IV B yaitu gedung bertingkat tinggi dengan tarif dasar Rp12.550 per m<sup>3</sup>. Penggunaan air di tahun 2024 merupakan penggunaan air yang berasal dari Kantor Pusat The Tower, Wisma Mandiri, Graha Mandiri dan Dana Reksa, sedangkan untuk tahun 2023 dan 2022 hanya berasal dari Kantor Pusat BSI yang berasal dari The Tower. Hal ini dikarenakan di tahun 2023 dan 2022 belum memungkinkan untuk menghitung penggunaan air di Kantor Pusat Wisma Mandiri, Graha Mandiri dan Dana Reksa. Adapun penggunaan air selama 3 (tiga) tahun, sebagai berikut.

Tabel Konsumsi Air

Sumber	Pemakaian Air (m <sup>3</sup> )		
	2024 <sup>*</sup>	2023 <sup>**</sup>	2022 <sup>**</sup>
Air dari Pihak Ketiga	48.401	1.824	1.905
Jumlah	48.401	1.824	1.905

**Keterangan:**

<sup>\*</sup> Penggunaan air di tahun 2024 mencakup penggunaan air yang berasal dari The Tower, Wisma Mandiri, Graha Mandiri dan Dana Reksa

<sup>\*\*</sup> Penggunaan air di tahun 2023 dan 2022 hanya mencakup penggunaan air yang berasal dari Kantor Pusat The Tower

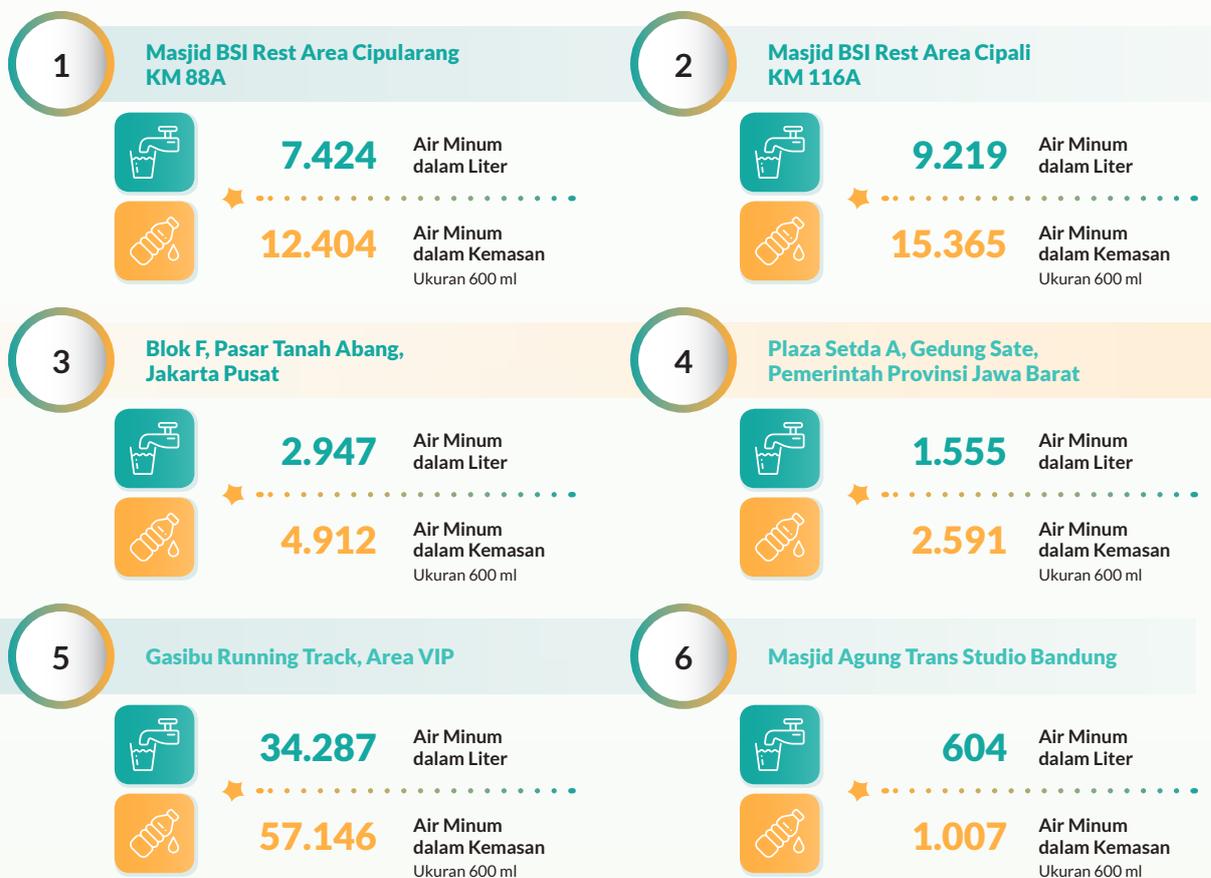
## Water Station Bank Syariah Indonesia (BSI)

Water station Bank Syariah Indonesia (BSI) adalah fasilitas yang menyediakan air layak minum kepada masyarakat. BSI memasang water station di Lapangan Gasibu, Bandung, Jawa Barat. Manfaat water station BSI Mendukung ketersediaan air bersih layak minum, Mengurangi sampah botol plastik, Mengurangi emisi karbon, Mendukung pembangunan berkelanjutan (SDGs) nomor 6 dan 11.

Cara kerja water station BSI:

1. Mesin water station dapat mengolah air tanah maupun PDAM menjadi air layak minum.
2. Air tanah diolah dengan teknologi filterisasi untuk membuang zat berbahaya.
3. Setiap lokasi water station dilakukan uji laboratorium dan sertifikasi layak minum.
4. Mesin water station dilengkapi sistem IOT yang memungkinkan monitoring kondisi air.

### Penggunaan Fasilitas Air Minum Gratis



### Total Konversi

**56.063**  
Air Minum dalam Liter

**93.438**  
Air Minum dalam Kemasan



Total 6 (enam) Fasilitas Air Minum Gratis yang telah dihadirkan BSI dan BSI Maslahat sampai dengan Januari 2025 telah berkontribusi mengurangi sampah air minum kemasan sebanyak 93.438 botol plastik.

## Aspek Keanekaragaman Hayati

### Dampak dari Wilayah Operasional yang Dekat atau Berada di Daerah Konservasi atau Memiliki Keanekaragaman Hayati dan Usaha Konservasi Keanekaragaman Hayati

[OJK F.9, F.10]

Sampai dengan akhir Desember 2024, tidak terdapat wilayah operasi BSI yang berdekatan dengan wilayah konservasi atau memiliki keanekaragaman hayati. Namun demikian, BSI tetap senantiasa melakukan usaha konservasi berupa melakukan penanaman pohon produktif sebanyak 10.671 di Desa Semoyo Yogyakarta. Selain itu, BSI juga melakukan Program Sedekah Pohon untuk Negeri Bersama BYOND by BSI yang ditujukan untuk penanaman pohon endemik di Taman Nasional Way Kambas,

Lampung sebagai upaya penyelamatan habitat Gajah Sumatera dan Satwa Endemik Lainnya. Penanaman pohon selama tahun 2024 yang telah dilaksanakan oleh BSI yaitu sebanyak 50.000 pohon.



## Aspek Emisi

Digital Carbon Tracking Initiative

“The First Sharia Bank in Indonesia Implemented Digital Carbon Tracking”

### DIGITAL CARBON TRACKING INITIATIVE

#### Regulatory Compliance

- 1 SEOJK No.16/SEOJK.04/2021 Pedoman Teknis Penyusunan Laporan Keberlanjutan

**BAB III F-11 & 12: Isi Laporan Keberlanjutan Kinerja Lingkungan Hidup Aspek Emisi**  
Jumlah dan intensitas emisi yang dihasilkan berdasarkan jenisnya dan upaya pencapaian pengurangan emisi yang dilakukan

- 2 RAKB BSI 2024

Digital Carbon Tracking termasuk dalam aktivitas utama RAKB BSI 2024

#### Value Creation

- 1 Unggul sebagai Bank Syariah Pertama yang mengembangkan Digital Carbon Tracking
- 2 Unik sejalan dengan nilai syariah
- 3 Inovatif: perhitungan carbon tracking dilakukan otomatis & diakses oleh internal & eksternal

### Regulatory Compliance

#### Digital Carbon Tracking

Yaitu sistem aplikasi/platform pencatatan, perhitungan emisi karbon BSI secara *bankwide* dalam satuan Ton CO<sub>2</sub>-eq dan menjadi *baseline* dalam pembuatan *Roadmap* menuju *Target Net Zero Emission*

(Saat ini dihitung emisi Scope 1 & 2)

Digital Carbon Tracking menggunakan Standar Perhitungan Emisi Karbon:



#### Past

1. Perhitungan Data hanya Kantor Pusat oleh PFA
2. Pencatatan dilakukan manual



#### Now

1. Perhitungan Data menyeluruh seluruh jaringan BSI
2. Dilakukan by system
3. Dilakukan oleh Pihak Independen



Wilayah	Emisi GRK Cakupan 1 dan 2 (Ton CO <sub>2</sub> -eq)
Kantor Pusat	5.873,57
Region I Aceh	10.901,80
Region II Medan	6.759,52
Region III Palembang	7.017,84
Region IV Jakarta 1	9.233,33
Region V Jakarta 2	7.878,98
Region VI Bandung	5.989,43
Region VII Semarang	7.099,16
Region VIII Surabaya	10.451,18
Region IX Kalimantan	7.747,22
Region X Makassar	4.452,62
<b>Total</b>	<b>83.404,57</b>

### Jumlah dan Intensitas Emisi yang Dihasilkan Berdasarkan Jenisnya

[OJK F.11, GRI 305-1, 305-2, 305-3, 305-4, FN-CB-410b.1, FN-CB-410b.2, FN-CB-410b.3, FN-CB-410b.4]

Penggunaan energi sebagai penunjang aktivitas operasional BSI tentunya akan menghasilkan emisi gas rumah kaca (GRK). BSI telah menggunakan aplikasi/platform *Digital Carbon Tracking* yang digunakan untuk pencatatan, perhitungan emisi karbon BSI

secara *bankwide* dalam satuan Ton CO<sub>2</sub>-eq dan menjadi *baseline* dalam pembuatan *Roadmap* menuju Target *Net Zero Emission* di tahun 2060.

Saat ini, *platform* tersebut baru mengukur emisi GRK Cakupan 1 dan Cakupan 2 dari seluruh wilayah operasional BSI. Emisi GRK Cakupan 1 merupakan emisi yang bersumber dari penggunaan listrik di seluruh wilayah operasional BSI dan emisi GRK Cakupan 2 merupakan emisi yang bersumber dari penggunaan BBM di seluruh wilayah operasional BSI. Pengukuran emisi GRK diukur dengan Global Warming Potential (GWP) yang mengacu pada Green House Gas Protocol, Partnership for Carbon Accounting Financials dan *Climate Risk Management & Scenario Analysis* Perbankan 2024. Ruang lingkup dari aplikasi *Digital Carbon Tracking* yaitu mencakup seluruh wilayah operasional BSI. Namun demikian, BSI belum melakukan pengukuran emisi yang dihasilkan pada perusahaan debitur BSI.

Untuk emisi GRK cakupan 3 merupakan emisi yang dihasilkan dari perjalanan dinas yang dilakukan oleh seluruh karyawan BSI. Metode pengukuran yang digunakan yaitu dihitung dengan kalkulator emisi karbon yang dikeluarkan oleh Organisasi Penerbangan Sipil International (International Civil Aviation Organization/ICAO). Emisi dihitung berdasarkan kelas ekonomi dan jarak perjalanan antara bandara keberangkatan dan tujuan. Perjalanan dinas yang dilaporkan merupakan perjalanan dengan menggunakan pesawat terbang yang dilakukan oleh seluruh pegawai BSI, sebagai berikut.

Tabel Intensitas Emisi GRK Cakupan 1 dan Cakupan 2 tahun 2024

Keterangan	Satuan	2024*
Emisi GRK Cakupan 1	Ton CO <sub>2</sub> -eq	17.685,43
Emisi GRK Cakupan 2	Ton CO <sub>2</sub> -eq	65.719,13
Total Emisi GRK Cakupan 1 dan 2	Ton CO <sub>2</sub> -eq	83.404,56
Jumlah Pembiayaan	Dalam Miliar Rupiah	278.481
Jumlah Pendapatan Pengelolaan Dana Sebagai Mudharib	Dalam Miliar Rupiah	25.298
Total Pegawai	Orang	17.234
Intensitas Emisi GRK	Ton CO <sub>2</sub> -eq/Miliar rupiah	0,29
	Ton CO <sub>2</sub> -eq/Miliar rupiah	3,24
	Ton CO <sub>2</sub> -eq/Orang	4,84

Keterangan: Pengukuran emisi GRK diukur dengan Global Warming Potential (GWP) yang mengacu pada Green House Gas Protocol, Partnership for Carbon Accounting Financials dan Climate Risk Management & Scenario Analysis Perbankan 2024. Ruang lingkup dari aplikasi Digital Carbon Tracking yaitu mencakup seluruh wilayah operasional BSI.

Tabel Intensitas Emisi GRK Cakupan 1 dan Cakupan 2 tahun 2023 dan 2022

Keterangan	Satuan	2023	2022
Emisi GRK Cakupan 1	Ton CO <sub>2</sub> -eq	144,94	261,5
Emisi GRK Cakupan 2	Ton CO <sub>2</sub> -eq	1.577,07	4.124,15
Total Emisi GRK Cakupan 1 dan 2	Ton CO <sub>2</sub> -eq	1.722,01	4.385,65
Jumlah Pembiayaan	Dalam Miliar Rupiah	240.316	207.705
Jumlah Pendapatan Pengelolaan Dana Sebagai Mudharib	Dalam Miliar Rupiah	22.250	19.620
Total Pegawai	Orang	17.909	18.581
Intensitas Emisi GRK	Ton CO <sub>2</sub> -eq/Miliar rupiah	0,01	0,02
	Ton CO <sub>2</sub> -eq/Miliar rupiah	0,10	0,25
	Ton CO <sub>2</sub> -eq/Orang	0,096	0,24

Keterangan: Di tahun 2023 dan 2022 emisi GRK diukur atas penggunaan energi untuk kantor pusat The Tower.

Tabel Intensitas Emisi GRK Cakupan 1, Cakupan 2 dan Cakupan 3 tahun 2024

Keterangan	Satuan	2024
Emisi GRK Cakupan 1	Ton CO <sub>2</sub> -eq	17.685
Emisi GRK Cakupan 2	Ton CO <sub>2</sub> -eq	65.719
Emisi GRK Cakupan 3	Ton CO <sub>2</sub> -eq	583,55
Total Emisi GRK	Ton CO <sub>2</sub> -eq	83.988,11
Jumlah Pembiayaan	Dalam Miliar Rupiah	278.481
Jumlah Pendapatan Pengelolaan Dana Sebagai Mudharib	Dalam Miliar Rupiah	25.298
Total Pegawai	Orang	17.234
Intensitas Emisi GRK	Pembiayaan: Ton CO <sub>2</sub> -eq/Miliar Rupiah	0,30
	Pendapatan Pengelolaan Dana Sebagai Mudharib: Ton CO <sub>2</sub> -eq/Miliar Rupiah	3,32
	Pegawai: Ton CO <sub>2</sub> -eq/Orang	4,87

Keterangan: Pengukuran emisi GRK diukur dengan Global Warming Potential (GWP) yang mengacu pada Green House Gas Protocol, Partnership for Carbon Accounting Financials dan Climate Risk Management & Scenario Analysis Perbankan 2024. Ruang lingkup dari aplikasi Digital Carbon Tracking yaitu mencakup seluruh wilayah operasional BSI.

**Tabel Intensitas Emisi GRK Cakupan 1, Cakupan 2 dan Cakupan 3 tahun 2023 dan 2022**

Keterangan	Satuan	2023	2022
Emisi GRK Cakupan 1	Ton CO <sub>2</sub> -eq	144,94	261,5
Emisi GRK Cakupan 2	Ton CO <sub>2</sub> -eq	1.577,07	4.124,15
Emisi GRK Cakupan 3	Ton CO <sub>2</sub> -eq	597,62	478,13
Total Emisi GRK	Ton CO <sub>2</sub> -eq	2.320	4.864
Jumlah Pembiayaan	Dalam Miliar Rupiah	240.316	207.705
Jumlah Pendapatan Pengelolaan Dana Sebagai Mudharib	Dalam Miliar Rupiah	22.250	19.620
<b>Total Pegawai</b>	<b>Orang</b>	<b>17.909</b>	<b>18.581</b>
<b>Intensitas Emisi GRK</b>	<b>Pembiayaan:</b> Ton CO <sub>2</sub> -eq/Miliar Rupiah	<b>0,01</b>	<b>0,02</b>
	<b>Pendapatan Pengelolaan Dana Sebagai Mudharib:</b> Ton CO <sub>2</sub> -eq/Miliar Rupiah	<b>0,10</b>	<b>0,25</b>
	<b>Pegawai:</b> Ton CO <sub>2</sub> -eq/Orang	<b>0,13</b>	<b>0,26</b>

Keterangan: Di tahun 2023 dan 2022 emisi GRK diukur atas penggunaan energi untuk kantor pusat The Tower.

### Upaya dan Pencapaian Pengurangan Emisi yang Dilakukan [OJK F.12, GRI 305-5]

BSI menyadari bahwa penggunaan energi yang digunakan dalam menunjang aktivitas operasionalnya akan menghasilkan emisi GRK. Namun demikian, BSI telah memiliki upaya pengurangan emisi yang dilakukan oleh BSI di antaranya melalui penggunaan solar panel, penggunaan lampu LED yang merupakan lampu yang lebih ramah lingkungan, menggunakan 115 *electric vehicle* serta upaya lain sebagaimana disampaikan dalam Aspek Energi di dalam Laporan Keberlanjutan ini.

Seperti yang telah disampaikan sebelumnya bahwa di tahun 2024, BSI telah menetapkan *baseline* dalam pengukuran maupun emisi yaitu di tahun 2024. Hal ini dikarenakan adanya pengembangan *Digital Carbon Tracking* untuk pencatatan dan perhitungan energi dan emisi di seluruh jaringan BSI untuk pengukuran emisi GRK cakupan 1 dan cakupan 2. Oleh karenanya, data emisi GRK cakupan 1 dan cakupan 2 yang dihasilkan di tahun 2024 terlihat mengalami peningkatan yang disebabkan oleh data yang berasal dari seluruh jaringan BSI, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Namun demikian, di tahun 2024, BSI berhasil telah menurunkan emisi GRK cakupan 3 yang dihasilkan dari perjalanan dinas yang dilakukan menjadi sebesar 583,55 Ton CO<sub>2</sub>-eq menurun dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar 597,62 Ton CO<sub>2</sub>-eq.

### GRAFIK EMISI GRK CAKUPAN 3



## Pengendalian Emisi GRK dan Non GRK

[GRI 305-6, 305-7]

Sampai dengan Desember 2024, BSI tidak memproduksi, mengimpor dan mengekspor *Ozone Depleting Substance* (ODS). Untuk penunjang mesin pendingin Air Conditioner, BSI telah menggunakan refrigerant R232. Refrigerant R32 merupakan refrigerant yang dikategorikan sebagai *refrigerant* ramah lingkungan karena memiliki nilai ODS 0 (nol) dengan dengan indeks dingin mencapai hampir 2 (dua) kali lebih baik dibandingkan *refrigerant* lainnya. Refrigerant R32 ini digunakan di seluruh sistem pendingin ruangan di kantor-kantor BSI.

Di samping itu, sepanjang tahun 2024, BSI belum melakukan pengukuran emisi non GRK di seluruh wilayah operasionalnya.

## Aspek Limbah dan Efluen

### Jumlah Limbah dan Efluen yang Dihasilkan

Berdasarkan Jenis [OJK F.13, GRI 306-1, 306-3]

BSI menyadari bahwa aktivitas operasionalnya senantiasa menghasilkan sampah baik B3 maupun non B3. Sampah Non B3 berasal dari kertas yang digunakan dalam kegiatan penyusunan laporan, korespondensi bank dengan nasabah, dan proses kegiatan transaksi perbankan, serta sampah plastik yang berasal dari kemasan plastik dan sisa makanan dari fasilitas *pantry* pegawai seperti *sachet* bumbu, dan alat makan plastik. Kategori sampah lain yang dihasilkan dari operasional BSI adalah B3 dalam bentuk limbah elektronik, kemasan tinta printer bekas, baterai bekas, dan lampu TL bekas, botol bekas pengharum ruangan. Sepanjang tahun 2024, limbah yang dihasilkan dari aktivitas operasional tidak memberikan dampak negatif pada lingkungan dan masyarakat. Namun demikian, BSI belum melakukan pengukuran limbah yang dihasilkan dari aktivitas operasionalnya.

## Mekanisme Pengelolaan Limbah dan Efluen

[OJK F.14, OJK F.15, GRI 306-2, 306-4, 306-5]

BSI memiliki komitmen untuk menjalankan aktivitas operasionalnya dengan berpedoman pada prinsip *maqashid syariah* (tujuan syariah) yang salah satu prinsipnya yaitu *Hifdz Al-Bi'ah* (memelihara lingkungan), maka BSI menjaga aktivitas operasionalnya agar tidak mencemari lingkungan. Limbah atau sampah utama yang dihasilkan dari kegiatan usaha Bank dapat digolongkan menjadi limbah Non B3 berasal dari kertas yang digunakan dalam kegiatan penyusunan laporan, korespondensi bank dengan nasabah, dan proses kegiatan transaksi perbankan, serta sampah plastik yang berasal dari kemasan plastik dan sisa makanan dari fasilitas *pantry* pegawai seperti *sachet* bumbu, dan alat makan plastik. Kategori sampah lain yang dihasilkan dari operasional BSI adalah B3 dalam bentuk limbah elektronik, kemasan tinta printer bekas, baterai bekas, dan lampu TL bekas, botol bekas pengharum ruangan. Seluruh limbah yang dihasilkan dari aktivitas operasional BSI langsung diserahkan ke pihak ketiga.

Oleh karenanya, tidak terdapat limbah yang didaur ulang, limbah dengan proses pembakaran, penimbunan maupun operasi pembuangan lainnya. Khusus terkait dengan limbah cair yang berasal dari penggunaan air, secara keseluruhan BSI berkoordinasi dengan pihak gedung untuk proses daur ulang menggunakan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL). Air yang didaur ulang kemudian digunakan kembali untuk untuk air *flush* toilet.

Sepanjang tahun 2024, tidak terdapat tumpahan bahan kimia, minyak, dan bahan bakar, di antara zat-zat lainnya yang dapat berpotensi memengaruhi tanah, air, udara, keragaman hayati, dan kesehatan manusia yang dihasilkan dari aktivitas operasional Bank.

### Reverse Vending Machine (RVM)

Khusus untuk sampah plastik, BSI telah berkolaborasi dengan PlasticPay untuk menempatkan mesin daur ulang sampah plastik di area-area publik yang dimulai di lokasi kantor-kantor BSI sejak tahun 2021. Pada implementasi tahap pertama, mesin daur ulang sampah *Reverse Vending Machine* (RVM) telah di tempatkan di Gedung BSI Wisma Mandiri 1 dan di sejumlah area di Jabodetabek.

Secara garis besar, program kolaborasi ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat agar semakin peduli dan mengambil langkah aktif dalam pengelolaan sampah plastik. Melalui RVM, masyarakat didorong untuk mulai memilah dan mengolah sampah plastik dengan baik, sehingga dapat diolah menjadi barang yang bernilai ekonomi tinggi, tidak membebani TPA, serta tidak mencemari lingkungan. Adapun jenis sampah plastik yang dapat dibawa dan ditukarkan melalui mesin RVM dan *platform* digital PlasticPay adalah jenis sampah botol plastik bekas minuman. Melalui *platform* digital dari PlasticPay, BSI memastikan program ini dapat terukur dan dimonitor dengan baik. langkah mudah dalam mengurangi sampah plastik yaitu dengan:

- 01 Bawa sampah botol plastik minuman bekas ke PlasticPay Collection Point terdekat,
- 02 Masukkan ke mesin RVM lalu scan barcode,
- 03 Kumpulkan poin yang kemudian dapat ditukarkan dengan merchandise dari BSI dan Plasticpay Indonesia, di mana 1 poin senilai sama dengan Rp1. Untuk 1 botol ukuran 600 ml setara dengan 56 poin atau Rp56, untuk 1 kg setara 2.968 poin atau senilai Rp3.000.

Pada tahun 2024, kolaborasi BSI dengan PlasticPay telah berhasil menempatkan Reverse Vending Machine (RVM) & PlasticPay Collection Point terdapat 70 unit di 70 titik lokasi, berhasil mereduksi 235 Ton CO<sub>2</sub>-eq jejak karbon. Jumlah botol plastik terkumpul yaitu sebesar 44.398 kg dan sebanyak 22.502 total masyarakat yang turut berpartisipasi mengumpulkan botol plastik. Adapun barang yang dihasilkan dari pengelolaan botol plastik sebagai berikut.



Pada tahun 2024, kolaborasi BSI dengan PlasticPay telah berhasil menempatkan Reverse Vending Machine (RVM) & PlasticPay Collection Point di:



## Aspek Pengaduan Terkait Lingkungan Hidup

### Jumlah dan Materi Pengaduan Lingkungan Hidup yang Diterima dan Diselesaikan [OJK F.16]

Sepanjang tahun 2024, tidak terdapat pengaduan terkait lingkungan hidup yang diterima oleh BSI.

## Kinerja Sosial

### Komitmen untuk Memberikan Layanan atas Produk dan/atau Jasa yang Setara Kepada Konsumen [OJK F.17, GRI 416-1, FS13, FS14, FS15, FS16, FN-CB-240a.4]

BSI senantiasa memastikan produk dan layanan perbankan syariah BSI dapat diperoleh dan dinikmati oleh seluruh nasabah, tanpa membedakan latar belakang baik gender, ras, suku, fisik dan keyakinan. Semua nasabah memiliki hak yang sama dalam memanfaatkan produk dan layanan yang disediakan melalui prosedur sesuai kebijakan dan peraturan yang berlaku. BSI berkomitmen mematuhi peraturan dan regulasi yang mengatur kesetaraan hak nasabah di antaranya Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3821 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, Peraturan Bank Indonesia No.3 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen Bank Indonesia dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur No.20 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pelindungan Konsumen Bank Indonesia.

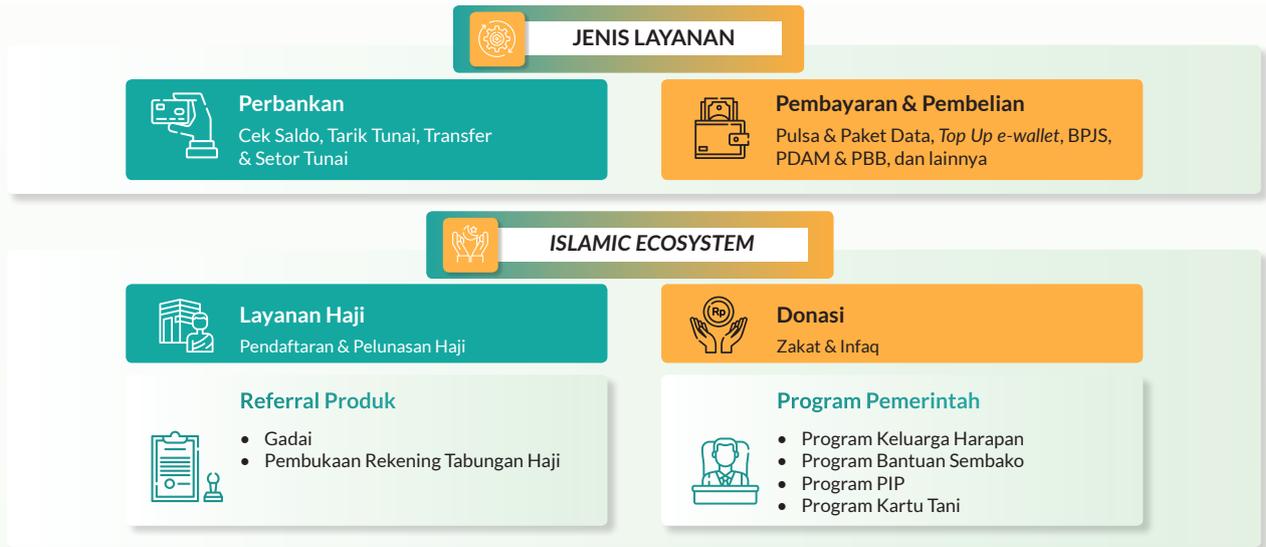
BSI telah memiliki SPO Pelindungan dan Pengaduan Nasabah yang terbit pada 22 Oktober 2024 sebagai pedoman dalam pelaksanaan prinsip pelindungan konsumen untuk memastikan pemenuhan kepatuhan berdasarkan siklus produk dan layanan mulai dari desain, penyediaan, penyampaian, pemasaran, penyusunan perjanjian, pemberian layanan serta penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa atas produk dan layanan.

Dalam implementasinya BSI telah melakukan pemenuhan kepatuhan pelindungan konsumen diantaranya pemberian kesetaraan akses kepada setiap konsumen, layanan khusus terkait konsumen penyandang disabilitas dan lanjut usia, pelindungan aset konsumen, pelindungan data dan informasi konsumen dan secara berkala melakukan *monitoring* terhadap implementasinya melalui penilaian sendiri (*Self Assesment*) yang kemudian dilaporkan baik kepada Manajemen maupun Regulator.

BSI senantiasa berusaha untuk menciptakan produk dan layanan yang memenuhi berbagai kebutuhan nasabah dengan melakukan inovasi pengembangan produk dan layanan digital yang memberikan kemudahan mengakses layanan keuangan kapan saja dan di mana saja. Selain itu, BSI telah menyediakan sarana pengaduan nasabah dan berkomitmen untuk menyelesaikan pengaduan yang lebih cepat dari *Service Level Agreement* (SLA) yang telah ditetapkan oleh regulator. Dalam menyampaikan pengaduan, nasabah dapat menyampaikan pengaduan via BSI Call 14040, BYOND by BSI, BSI Mobile, *E-mail* [contactus@bankbsi.co.id](mailto:contactus@bankbsi.co.id), Kantor Cabang dan Kantor Pusat. Pembahasan terkait pengaduan nasabah yang diterima oleh BSI telah disampaikan pada bagian Pengaduan Masyarakat pada Laporan Keberlanjutan ini.

### BSI Agen

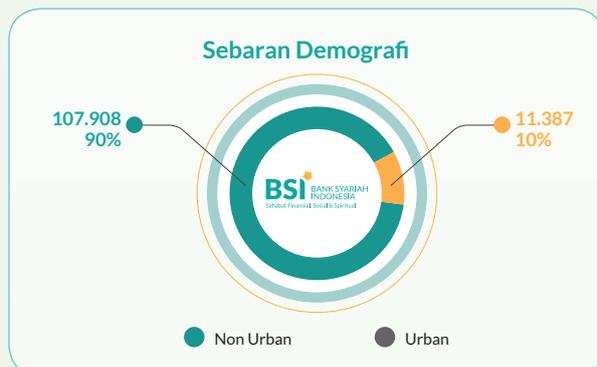
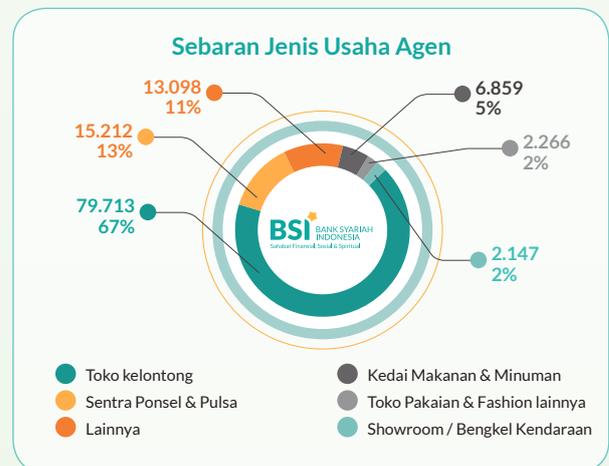
Dalam menjangkau masyarakat yang berada di daerah yang belum dilayani (*blankspot*) oleh kantor cabang BSI, BSI telah menyediakan titik akses melalui BSI Agen. BSI Agen merupakan agen Laku Pandai atau Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif.



BSI Agen saat ini berjumlah 119.295 Agen yang tersebar di seluruh daerah Indonesia. Jumlah BSI Agen meningkat 38% dibandingkan dengan tahun 2023 yang jumlahnya sebanyak 86.200 agen.

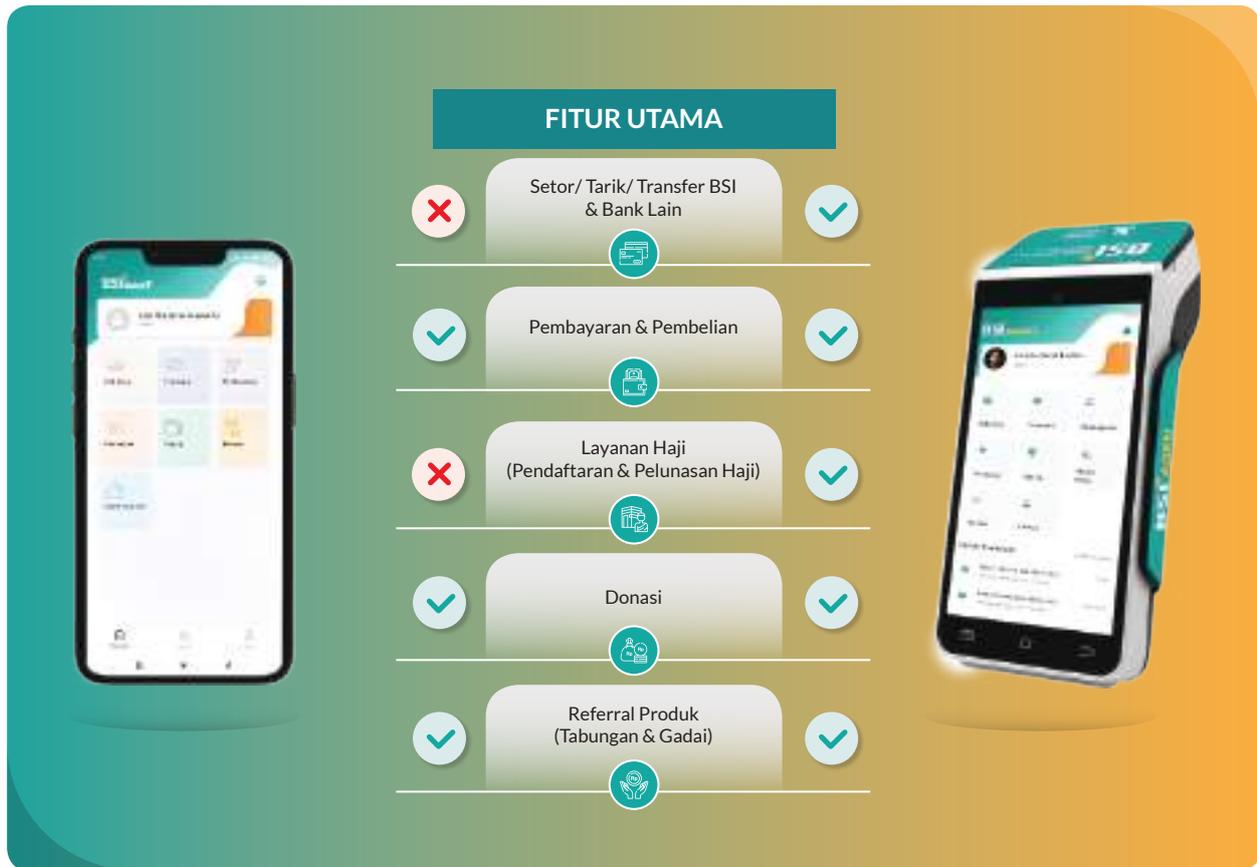
**Tabel Jumlah BSI Agen**

Keterangan	Satuan	2024	2023	2022
Jumlah Agen	Agen	119.295	86.200	57.973
Jumlah Agen Aktif	Agen	40.884	86.200	57.973
Jumlah Transaksi	Juta kali	26,9	19,6	15,54
Nilai Transaksi	Dalam triliun rupiah	59,02	43,80	38,04



### Lainnya (Top 6)

Toko ATK & Buku/Fotokopi/ Percetakan	1,40%
Kios Tani/Sawit	1,26%
Showroom/Bengkel Kendaraan	1,15%
Laundry/Taylor/Konveksi	0,92%
Mebel/Material/Elektronik	0,84%
Toko Kosmetik/Parfum/Salon	0,78%



Terdapat 119 Kabupaten daerah *blankspot* yang sudah dilayani oleh 3.040 BSI Agen.

**Tabel Jumlah Agen pada Daerah Blankspot**

No.	Provinsi	Jumlah Kabupaten	Jumlah Agen
1.	Bali	3	18
2.	Bengkulu	5	493
3.	Gorontalo	4	35
4.	Jambi	2	57
5.	Kalimantan Barat	4	86
6.	Kalimantan Selatan	1	10
7.	Kalimantan Tengah	10	555
8.	Kalimantan Timur	1	1
9.	Kalimantan Utara	2	4
10.	Kepulauan Bangka Belitung	5	45
11.	Kepulauan Riau	2	84
12.	Lampung	3	252
13.	Maluku	2	39
14.	Maluku Utara	4	40
15.	Nusa Tenggara Barat	1	6
16.	Nusa Tenggara Timur	7	10
17.	Papua	9	21

No.	Provinsi	Jumlah Kabupaten	Jumlah Agen
18.	Papua Barat	4	20
19.	Sulawesi Barat	2	7
20.	Sulawesi Selatan	5	240
21.	Sulawesi Tengah	8	301
22.	Sulawesi Tenggara	14	222
23.	Sulawesi Utara	9	175
24.	Sumatera Barat	4	155
25.	Sumatera Selatan	4	121
26.	Sumatera Utara	4	43
<b>TOTAL</b>		<b>119</b>	<b>3.040</b>

Pada layanan BSI Agen, produk yang diberikan kepada nasabah yang sebelumnya tidak memiliki rekening bank atau tidak mempunyai rekening bank adalah *Basic Saving Account* (BSA) atau tabungan dasar yang disediakan oleh bank penyelenggara Layanan Keuangan Tanpa Kantor (Laku Pandai). BSA merupakan bagian dari program Laku Pandai yang bertujuan untuk mendukung keuangan inklusif. Dalam Tahun 2024 jumlah nasabah BSA yang dibuka melalui BSI Agen adalah 2.541 nasabah meningkat 13% dari tahun 2023, dengan saldo Rp428 juta meningkat sebesar 103% dari tahun 2023. BSI Agen belum melayani pembukaan rekening giro ritel tanpa biaya administrasi.

## Inklusi dan Literasi Keuangan

Terkait dengan penyediaan layanan yang ramah penyandang disabilitas, BSI senantiasa berupaya untuk meningkatkan akses layanan kepada nasabah penyandang disabilitas di seluruh wilayah operasional. BSI telah menyediakan area parkir nasabah difabel, jalur landai, nomor antrian nasabah difabel, fasilitas kursi roda, toilet difabel, serta area tunggu nasabah difabel. Selain itu, pegawai BSI juga dibekali pelatihan layanan nasabah difabel sehingga mampu memberikan layanan terbaik. Dalam menjangkau nasabah penyandang disabilitas, BSI telah menyelenggarakan berbagai program UMKM dan literasi keuangan syariah yang meliputi:

1. UMKM DifaMart dan Peternakan Mithik adalah program binaan BSI bersama BSI Maslahat yang berhasil memberdayakan penyandang disabilitas untuk berwirausaha, untuk mendukung penyandang disabilitas untuk bisa *level up* sehingga mendapatkan akses layanan keuangan.

2. Program Mudik Bersama BUMN dengan total 144 orang pemudik disabilitas yang mendapatkan pengenalan produk-produk keuangan syariah.
3. BSI Bersama BSI Maslahat juga mengadakan peringatan Hari Internasional Penyandang Disabilitas di Masjid BSI Cipularang yang bekerjasama dengan Masjidpreneur serta komunitas tunanetra mengadakan pelatihan untuk para tunanetra yang tergabung dalam Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni) kabupaten purwakarta. Tujuannya untuk meningkatkan *engagement* masyarakat terhadap kelompok disabilitas dan penguatan literasi terhadap produk-produk keuangan syariah.

Selain itu, BSI senantiasa berupaya untuk meningkatkan akses layanan keuangan bagi masyarakat kurang beruntung dan keluarga rentan, dengan membantu penyaluran program pemerintah. Pada tahun 2024, BSI telah melakukan penyaluran program pemerintah kepada 1,9 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan total penyaluran sebesar 2,45 triliun.

No.	Jenis Bantuan Program Pemerintah	Penyaluran Bantuan Pemerintah	
		Σ KPM	Nilai Bantuan (Rp)
1.	PKH	302.610	637.101.748.907
2.	Sembako	493.021	1.119.312.800.000
3.	Atensi YAPI	9.521	16.089.800.000
4.	RST	62	1.240.000.000
5.	Kartu Tani Digital	358.087	Dalam Bentuk Kuota (Kg)
6.	PIP Reguler	600.700	428.209.575.000
7.	PIP Madrasah	132.665	85.558.650.000
8.	PIP Pesantren	15.361	13.767.550.000
9.	BOS Madrasah	710	113.339.681.853
10.	BOS Pesantren	108	22.941.824.000
11.	BOP RA	314	8.639.700.000
12.	KIP Kuliah	1.194	13.490.400.000
13.	Beasiswa Unggulan	10	126.750.000
<b>Total</b>		<b>1.914.363</b>	<b>2.459.818.479.760</b>

Selanjutnya, dalam rangka meningkatkan literasi dan inklusi keuangan, BSI telah menyelenggarakan Sosialisasi & *Gathering* kepada BSI Agen dan Calon BSI Agen selama tahun 2024.

Nama Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Tujuan
Sosialisasi BSI Agen	Mar-24	Mengenalkan BSI Agen kepada Kelompok Koperasi Binaan PKK Melati Jaya Pondok Pinang Jakarta
<i>Gathering</i> BSI Agen di Wilayah Makassar & Kalimantan	Apr-24	<i>Update</i> fitur & Program BSI Agen untuk meningkatkan layanan & kinerja BSI Agen
Sosialisasi BSI Agen kepada Sekolah, Pondok Pesantren & BUMDes di Tasikmalaya	May-24	Mengenalkan BSI Agen sebagai solusi untuk akses keuangan masyarakat
Sosialisasi BSI Agen kepada Pengurus Pesantren se-Kabupaten Karawang	May-24	Mengenalkan BSI Agen sebagai solusi untuk akses keuangan di <i>Islamic Ecosystem</i>

Nama Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Tujuan
Sosialisasi BSI Agen kepada Mitra Usaha LPDB Kabupaten Tangerang	Mei-24	Mengenalkan BSI Agen sebagai solusi akses keuangan
Sosialisasi BSI Agen kepada UMKM KPP Setiabudi 3	Jun-24	Mengenalkan BSI Agen sebagai solusi akses keuangan
Sosialisasi BSI Agen kepada UMKM Kecamatan Cimanggis	Jun-24	Mengenalkan BSI Agen sebagai solusi akses keuangan
Sosialisasi dan Pendaftaran BSI Agen Anggota KOPABIN	Jul-24	Mengenalkan BSI Agen kepada Anggota KOPABIN
Sosialisasi BSI Agen kepada Mitra Usaha BPJS Tenaga Kerja	Ags-24	Mengenalkan BSI Agen kepada Mitra Usaha BPJS Tenaga Kerja
Sosialisasi Agen - Kopkar	Ags-24	Mengenalkan BSI Agen kepada Kopersasi Nasabah BSI
Sosialisasi BSI Agen kepada Mitra Usaha UMKM Genpro	Ags-24	Mengenalkan BSI Agen kepada Mitra Usaha UMKM Genpro
Sosialisasi Agen KJS MUI Bandung	Sep-24	Mengenalkan BSI Agen kepada KJMS MUI Bandung
Sosialisasi BSI Agen kepada Mitra Puskopar	Sep-24	Mengenalkan BSI Agen kepada Anggota Puskopar Jakarta Timur
Sosialisasi BSI Agen kepada Mitra SRC Ciomas	Sep-24	Mengenalkan BSI Agen kepada Anggota Mitra SRC Ciomas
Sosialisasi BSI Agen kepada Mitra SRC Sukaraja	Okt-24	Mengenalkan BSI Agen kepada Anggota Mitra SRC Sukaraja
Gathering BSI Agen di Wilayah Pekanbaru, NTB dan Aceh	Okt-24	Update fitur & Program BSI Agen untuk meningkatkan layanan & kinerja BSI Agen
Sosialisasi BSI Agen kepada Anggota PKK Kecamatan Cipulir	Nov-24	Mengenalkan BSI Agen kepada Anggota PKK Kecamatan Cipulir
Gathering BSI Agen di Wilayah Medan	Nov-24	Update fitur & Program BSI Agen untuk meningkatkan layanan & kinerja BSI Agen
Sosialisasi BSI Agen kepada Anggota PKK Kecamatan Tebet	Des-24	Mengenalkan BSI Agen kepada Anggota PKK Kecamatan Tebet

## Aspek Ketenagakerjaan

### Kesetaraan Kesempatan Bekerja [OJK F.18, GRI 405-1, 202-2]

Dalam mengelola sumber daya manusianya, BSI senantiasa menghormati dan menjunjung tinggi keberagaman dan kesetaraan. BSI selalu mendukung seluruh pegawai agar terus berkembang dan berinovasi tanpa membedakan keberagaman dari segi gender, golongan, suku, agama, ras, kondisi fisik, dan sebagainya. BSI senantiasa berkomitmen untuk memberikan kesetaraan dalam kesempatan bekerja, mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengembangkan kompetensi, mendapatkan kesempatan yang sama untuk kenaikan jenjang karir, remunerasi, dan lainnya termasuk memberikan kesempatan pada wanita untuk menduduki posisi manajerial. Di samping itu, BSI juga memberikan kesempatan bagi masyarakat lokal untuk dapat berkarir di BSI. Sebanyak 66 *Branch Manager* dari 153 Kantor Cabang (43%) berasal dari masyarakat lokal berdasarkan dari *homebased* pegawai. BSI memberikan kesempatan bekerja yang sama kepada seluruh calon pegawai telah diatur dalam PTO Rekrutmen dan Seleksi BSI. BSI juga telah memiliki kebijakan terkait pendidikan dan pelatihan untuk seluruh pegawai yang telah tertuang pada SPO Human Capital BSI dan PTO Pengelolaan Pembelajaran BSI serta kebijakan terkait pengembangan karir pegawai yang telah tertuang pada PTO Penempatan dan Penugasan BSI serta PTO Promosi BSI. Seluruh PTO dan SPO telah memuat kebijakan tentang untuk memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh karyawan dan calon karyawan. Pelaksanaan SPO dan PTO, khususnya terkait kesempatan kerja yang sama berada di bawah tanggung jawab Unit Kerja Human Capital Policy.

### Keberagaman Manajemen dan Pegawai 2024 [GRI 405-1]

(Dalam Orang)

Level Jabatan	Jenis Kelamin					Kelompok Usia						
	Pria	%	Wanita	%	Total	<30	%	30-50	%	>51	%	Total
<b>Manajemen</b>												
Dewan Komisaris	9	0,05%	1	0,01%	10	0	0,00%	0	0,00%	10	0,06%	10
Dewan Pengawas Syariah	4	0,02%	0	0,00%	4	0	0,00%	0	0,00%	4	0,02%	4
Direktur	9	0,05%	1	0,01%	10	0	0,00%	3	0,02%	7	0,04%	10

Level Jabatan	Jenis Kelamin					Kelompok Usia						
	Pria	%	Wanita	%	Total	<30	%	30-50	%	>51	%	Total
Executive Manager (PE)	5	0,03%	1	0,01%	6	0	0,00%	1	0,01%	5	0,03%	6
<b>Sub Total</b>	<b>27</b>	<b>0,16%</b>	<b>3</b>	<b>0,02%</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>4</b>	<b>0,02%</b>	<b>26</b>	<b>0,15%</b>	<b>30</b>
<b>Pegawai</b>												
Senior Manager	69	0,40%	26	0,15%	95	0	0,00%	62	0,36%	33	0,19%	95
Middle Manager	371	2,15%	112	0,65%	483	0	0,00%	402	2,33%	81	0,47%	483
Manager	1.785	10,34%	578	3,35%	2.363	41	0,24%	2.119	12,27%	203	1,18%	2.363
Officer	3.587	20,78%	2.189	12,68%	5.776	675	3,91%	4.957	28,71%	144	0,83%	5.776
Staff	4.356	25,23%	4.161	24,10%	8.517	2.103	12,18%	6.397	37,05%	17	0,10%	8.517
<b>Sub Total</b>	<b>10.168</b>	<b>58,90%</b>	<b>7.066</b>	<b>40,93%</b>	<b>17.234</b>	<b>2.819</b>	<b>16,33%</b>	<b>13.937</b>	<b>80,73%</b>	<b>478</b>	<b>2,77%</b>	<b>17.234</b>
<b>Grand Total</b>	<b>10.195</b>	<b>59,05%</b>	<b>7.069</b>	<b>40,95%</b>	<b>17.264</b>	<b>2.819</b>	<b>16,33%</b>	<b>13.941</b>	<b>80,75%</b>	<b>504</b>	<b>2,92%</b>	<b>17.264</b>

Bank membuka peluang kepada penyandang disabilitas untuk berkarya sesuai dengan kemampuannya bersama BSI. Komitmen ini selaras dengan yang tercantum pada Undang-Undang No.8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Proses rekrutmen penyandang disabilitas diselenggarakan dengan prinsip kesetaraan dan kebersamaan melalui metode program bibit, yaitu program pendampingan (tutor) untuk setiap pegawai, sehingga para kandidat dengan disabilitas dapat mengikuti proses rekrutmen dan berkarya dengan optimal. Proses rekrutmen lainnya untuk penyandang disabilitas yakni melalui program magang di *Change & Culture Academy*. Pada tahun 2024, BSI memiliki 13 orang pegawai disabilitas yang terdiri dari 7 (tujuh) pria dan 6 (enam) wanita yang ditempatkan pada posisi *back office*.

### Komposisi Pegawai Penyandang Disabilitas [GRI 405-1]

(Dalam Orang)

Tahun	Jenis Kelamin					Kelompok Usia						
	Pria	%	Wanita	%	Total	<30	%	30-50	%	>51	%	Total
2024	7	54%	6	46%	13	13	100	-	-	-	-	13
2023	7	54%	6	46%	13	13	100	-	-	-	-	13
2022	2	33%	4	67%	6	6	100	-	-	-	-	6

### Rekrutmen dan Perputaran Pegawai [GRI 401-1]

Dalam rangka memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang terbaik dan berkualitas, Bank telah melakukan rekrutmen dengan menjunjung tinggi prinsip kesetaraan, keadilan, transparansi, tanpa membedakan gender, usia, ras, agama, kondisi fisik, dan perbedaan latar belakang lainnya. Pelaksanaan rekrutmen BSI mengacu pada PTO Rekrutmen dan Seleksi BSI. SDM yang unggul akan mampu memberikan kontribusi secara maksimal bagi aktivitas bisnis dan kinerja operasional perusahaan. Untuk memperoleh calon pegawai yang memiliki kompetensi dan kualitas terbaik, BSI telah melakukan kerja sama dengan berbagai pihak eksternal, seperti media, pusat karier di sejumlah perguruan tinggi, dan juga melalui jasa pencari bakat (*head hunter*). Pada tahun 2024, BSI telah merekrut 609 pegawai baru yang meningkat 334 orang atau sebesar 121,45% dibandingkan dengan tahun 2023 yang jumlahnya sebanyak 275 pegawai baru.

### Komposisi Rekrutmen Pegawai Baru Berdasarkan Kelompok Usia

(Dalam Orang)

Kelompok Usia	2024	2023	2022
21-30 tahun	512	229	112
31-40 tahun	49	24	51
41-50 tahun	15	17	15
>50 tahun	33	5	6
<b>Total</b>	<b>609</b>	<b>275</b>	<b>184</b>

## Komposisi Rekrutmen Pegawai Baru Berdasarkan Jenis Kelamin

(Dalam Orang)

Uraian	2024	2023	2022
Pria	369	147	126
Wanita	240	128	58
<b>Total</b>	<b>609</b>	<b>275</b>	<b>184</b>

## Komposisi Rekrutmen Pegawai Baru Berdasarkan Wilayah Kerja

(Dalam Orang)

Wilayah	2024	2023	2022
Jawa	586	266	86
Luar Jawa	23	9	98
<b>Total</b>	<b>609</b>	<b>275</b>	<b>184</b>

Proses rekrutmen juga dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pegawai yang timbul akibat pegawai yang berhenti bekerja, guna menjaga kelancaran operasional Bank. Sepanjang tahun 2024, terdapat 566 orang pegawai yang berhenti bekerja. Jumlah tersebut menurun sebesar 122 orang pegawai atau 17,73% dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 688 orang pegawai.

## Komposisi Pegawai Berhenti Bekerja Berdasarkan Kelompok Usia

(Dalam Orang)

Kelompok Usia	2024	2023	2022
21-30 tahun	176	212	358
31-40 tahun	268	323	322
41-50 tahun	68	96	106
>50 tahun	54	57	63
<b>Total</b>	<b>566</b>	<b>688</b>	<b>849</b>

## Komposisi Pegawai Berhenti Bekerja Berdasarkan Jenis Kelamin

(Dalam Orang)

Uraian	2024	2023	2022
Pria	280	373	460
Wanita	286	315	389
<b>Total</b>	<b>566</b>	<b>688</b>	<b>849</b>

## Komposisi Pegawai Berhenti Bekerja Berdasarkan Wilayah Kerja

(Dalam Orang)

Wilayah	2024	2023	2022
Jawa	337	464	558
Luar Jawa	229	224	291
<b>Total</b>	<b>566</b>	<b>688</b>	<b>849</b>

Perputaran pegawai terjadi karena beberapa sebab, mulai dari pegawai yang telah mencapai usia pensiun, berakhir masa kontrak, diberhentikan, mengundurkan diri, hingga alasan kesehatan dan yang lainnya. Karyawan yang akan mengajukan pengunduran diri harus menyampaikan informasi tersebut kepada atasan minimal 1 (satu) bulan sebelumnya. Hal ini mengacu pada Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 dan telah tercantum dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang berlaku.

## Tingkat Perputaran Pegawai

(Dalam Orang)

Uraian	2024	2023	2022
Pegawai Baru (Rekrutmen)	609	275	184
Mengundurkan Diri	477	606	762
Pensiun	72	61	61
Meninggal Dunia	17	21	26
Tingkat Perputaran ( <i>Turnover</i> ) Pegawai	3,21%	3,77%	4,57%

## Tabel *Turnover* Pegawai Berdasarkan Usia

Uraian	2024	2023	2022
21-30 tahun	176	212	358
31-40 tahun	268	323	322
41-50 tahun	68	96	106
>50 tahun	54	57	63

## Tabel *Turnover* Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Uraian	2024	2023	2022
Pria	280	373	460
Wanita	286	315	389

## Tabel *Turnover* Pegawai Berdasarkan Wilayah Kerja

Uraian	2024	2023	2022
Jawa	586	266	86
Luar Jawa	23	9	98

## Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi [OJK F.22, GRI 404-1, 404-2, 404-3]

BSI berkomitmen untuk mendorong setiap pegawai agar dapat mengoptimalkan potensi diri melalui berbagai program pengembangan kompetensi kepemimpinan yang terstruktur, menyeluruh, dan berjenjang. Dalam implementasinya, program pengembangan pegawai di BSI difokuskan pada kompetensi dasar, manajerial, dan kepemimpinan, dengan berbagai metode pengembangan yang beragam, seperti pelatihan, *mentoring*, rotasi, pengembangan karir, pembinaan kepemimpinan, serta sesi umpan balik.

Berdasarkan SPO Human Capital Bab V Pelatihan dan Pengembangan, metode pengembangan kompetensi dan pembelajaran pegawai mengacu kepada pendekatan *experience*, *engagement*, dan *education*. Komposisi pengembangan disesuaikan dengan level dan kebutuhan jabatan saat ini (*current*) maupun jabatan proyeksi (*future*).

### a) *Experience*

Pengembangan kompetensi dan pembelajaran pegawai yang dilakukan melalui pengalaman kerja nyata atau penugasan lain yang dapat berbentuk antara lain: penempatan dan penugasan (*rotasi/mutasi*), penugasan sementara (*detasering*), penugasan ke dalam *project* strategis Bank, *attachment* (*magang*) ke perusahaan induk atau perusahaan lain di dalam *group*, *on the job training* dan *role play*.

### b) *Engagement*

Pengembangan kompetensi dan pembelajaran pegawai dilakukan melalui interaksi individu antara pegawai dengan pihak lain yang ditunjuk oleh Bank, yang dapat berbentuk namun tidak terbatas kepada *coaching*, *counselling*, dan *mentoring*.

### c) *Education*

Program pengembangan kompetensi dan pembelajaran pegawai secara sistematis yang dapat dilakukan secara mandiri maupun di dalam kelas sesuai jenis-jenis layanan pembelajaran.

Program pelatihan dan pengembangan kompetensi diselenggarakan dalam berbagai bentuk, seperti seminar, *workshop*, *sharing knowledge*, *sharing session*, dan pelatihan. BSI senantiasa melakukan penilaian kerja melalui *Training Needs Analysis* untuk memastikan seluruh program pengembangan dan pelatihan pegawai BSI berjalan tepat sasaran. Penilaian kerja melalui *Training Needs Analysis* mencakup mekanisme *performance planning*, *review*, dan *evaluation*. Proses ini bertujuan agar program peningkatan kompetensi setiap pegawai direncanakan dengan matang berdasarkan kinerja dan evaluasi pencapaian KPI, sehingga mampu mendukung *personal development* juga *career path projection* para pegawai.

Tabel Jumlah Peserta Pelatihan Berdasarkan Jenjang Jabatan

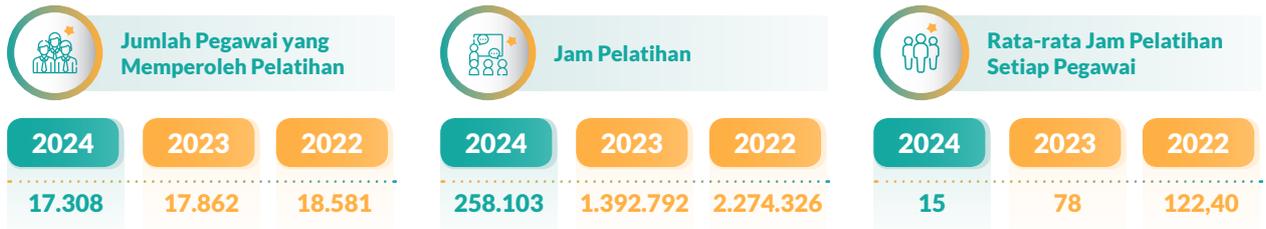
Jenjang Jabatan	Jumlah Peserta (dalam orang)		
	2024	2023	2022
Senior Manager	1.534	2.369	2.956
Middle Manager	7.866	13.381	15.477
Manager	73.023	71.757	89.096
Officer	120.222	178.424	224.873
Staff	167.341	255.105	300.651
<b>Total</b>	<b>369.986</b>	<b>521.036</b>	<b>633.053</b>

Tabel Statistik Pelatihan dan Pengembangan Pegawai BSI

Uraian	Satuan	2024	2023	2022
Program Pelatihan	Jenis	688	1.118	744
Jumlah Kepesertaan Pelatihan	Orang	369.986	521.036	633.053
Rata-Rata Durasi Jam Pelatihan Per Pegawai	Jam/Pegawai	15	78	122,40
Biaya Pelatihan	Dalam Miliar Rupiah	141,59	90,64	97,22

Tabel Rata-Rata Jam Pelatihan Pegawai Tahun 2024 [OJK F.22]

Uraian	Jumlah Pegawai yang Memperoleh Pelatihan			Jam Pelatihan			Rata-rata Jam Pelatihan Setiap Pegawai		
	2024	2023	2022	2024	2023	2022	2024	2023	2022
<b>Keseluruhan</b>	<b>17.308</b>	<b>17.862</b>	<b>18.581</b>	<b>258.103</b>	<b>1.392.792</b>	<b>2.274.326</b>	<b>15</b>	<b>78</b>	<b>122,40</b>
<b>Berdasarkan Jenis Kelamin</b>									
Pria	10.228	10.543	11.008	141.623	594.990	1.023.628	13,8	56	93
Wanita	7.080	7.367	7.573	116.480	797.802	1.250.698	16,4	108	165
<b>Berdasarkan Kategori Jabatan</b>									
Senior Manager	91	95	88	233	14.938	19.810	3	157,24	225,11
Middle Manager	483	446	429	1.939	53.475	96.763	4	119,90	225,55
Manager	2.343	2.235	2.218	12.771	246.884	381.751	5	110,46	172,11
Officer	5.760	5.798	6.088	202.423	496.120	776.315	35	85,57	127,52
Staff	8.631	9.288	9.758	40.737	581.375	999.688	5	62,59	102,45
<b>Total</b>	<b>17.308</b>	<b>17.862</b>	<b>18.581</b>	<b>258.103</b>	<b>1.392.792</b>	<b>2.274.326</b>	<b>15</b>	<b>78</b>	<b>122,40</b>



Penurunan jam pelatihan disebabkan beberapa hal antara lain:

1. Pada tahun 2024, kegiatan seperti Taujih/PHBI/*podcast culture* tidak dicatat sebagai pelatihan.
2. Jam belajar yang tercantum pada tahun 2024 hanya pelatihan masuk dalam kategori jenis layanan pembelajaran yang tercantum pada PTO Pembelajaran.
3. Jumlah Pegawai pada 2024 lebih sedikit daripada tahun sebelumnya.
4. Fokus strategi *training* yaitu pada bidang IT, Operation dan Sales, pelatihan dilakukan secara *offline* dan memiliki *cost* pelatihan yang cukup besar.
5. Pelatihan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah (SPPUR) untuk pegawai jaringan telah selesai dilakukan pada 2021 sampai dengan 2023, pelatihan ini memiliki populasi peserta yang besar.

Selain itu, Bank juga memberikan program pelatihan atau pembekalan untuk pegawai yang akan memasuki masa purnabakti. Bank telah menyusun kebijakan atas pelatihan tersebut agar pelatihan dapat dilaksanakan secara terstruktur dengan kriteria peserta dan waktu yang jelas dan lebih terencana. Pelaksanaan pelatihan tersebut diikuti pula oleh pasangan pegawai. Pada tahun 2024, Bank mengadakan program Pelatihan Persiapan Masa Pensiun yang diikuti oleh 216 pegawai BSI yang akan memasuki masa purnabakti. Pelatihan tersebut ditujukan untuk memberikan pembekalan kepada pegawai agar lebih siap untuk menghadapi masa purnabakti.

#### Jumlah Peserta Pelatihan Persiapan Masa Pensiun

Pelatihan	Jumlah Peserta (dalam orang)		
	2024	2023	2022
Pelatihan Persiapan Masa Pensiun	216	90	-

BSI telah menerapkan kebijakan sistem penilaian kinerja pegawai prinsip transparansi dan akuntabilitas, bertujuan untuk mendukung pencapaian tujuan Bank melalui kinerja pegawai, mengembangkan budaya kerja yang positif dan berfokus pada produktivitas, serta meningkatkan *engagement* pegawai. Pelaksanaan penilaian kinerja pegawai mengacu pada Kebijakan terkait Sistem Penilaian Kinerja Karyawan. Pengelolaan kinerja dilakukan secara berkelanjutan dengan memastikan adanya keselarasan, mulai dari penetapan *Corporate Goals* yang diterjemahkan menjadi target dan sasaran unit kerja hingga ke level individu. Dengan demikian, keselarasan strategi dari korporat ke individu terjaga serta ada keterkaitan antara kinerja individu terhadap kinerja Bank.

Siklus pengelolaan kinerja tahunan terbagi menjadi 3 (tiga) tahap, dimulai dengan perencanaan kinerja (*performance planning*) untuk menetapkan KPI (*key performance indicator*) individu pegawai, kemudian dilanjutkan dengan evaluasi pertengahan tahun (*mid-year review*) untuk mengevaluasi kemajuan pencapaian KPI selama periode tersebut. Tahap terakhir adalah evaluasi akhir tahun (*performance evaluation*) yang digunakan untuk menilai kinerja pegawai dari awal hingga akhir tahun.

Dalam pengelolaan kinerja pegawai, Bank mengutamakan komunikasi dua arah antara pegawai dan manajer untuk membangun hubungan yang harmonis, dengan manajer memberikan saran perbaikan atau umpan balik guna meningkatkan kinerja pegawai. Seluruh proses pengelolaan kinerja dilakukan secara *online* melalui sistem kepegawaian (Sistem Informasi Pegawai/SIP), yang memudahkan pegawai dalam mengakses dan menyimpan informasi terkait kinerja pegawai. Umpan balik dari penilaian kinerja akhir tahun akan menjadi dasar dalam merencanakan pengembangan pegawai pada tahun berikutnya. Pada tahun 2024, 17.234 orang pegawai telah menerima *performance and career development review* yang terdiri dari 10.168 pegawai pria dan 7.066 pegawai wanita. Atas penilaian kinerja yang telah dilakukan, terdapat 5.150 pegawai yang menerima promosi dan 5.699 pegawai yang menerima mutasi atau rotasi.

Tabel Tinjauan Rutin Pegawai dan Jenjang Karir

Tahun	Jumlah Pegawai yang Mendapatkan Peninjauan	Hasil Penilaian dan Relevansi Pengembangan Karir		
		Promosi	Mutasi/Rotasi	Demosi
2024	100% (17.234 orang pegawai)	5.150	5.699	0
2023	100% (17.909 orang pegawai)	2.435	4.869	0
2022	100% (18.581 orang pegawai)	1.144	5.690	0

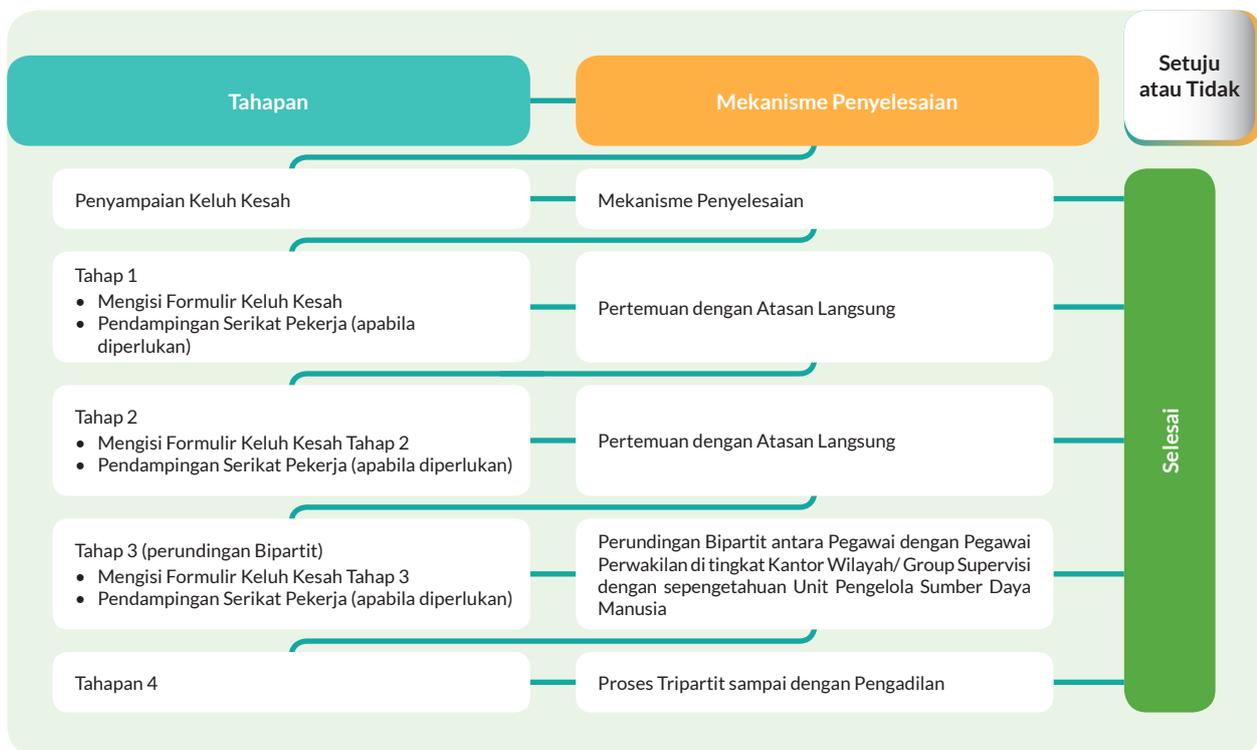
**Kebebasan Berserikat [GRI 2-30, 402-1]**

BSI senantiasa berupaya untuk menciptakan hubungan yang harmonis dan memberikan berbagai manfaat bagi seluruh pihak yang bekerja di lingkup operasionalnya. Dalam menciptakan hubungan yang harmonis, BSI telah membuka pintu komunikasi kepada seluruh pegawai untuk menyampaikan berbagai aspirasi dan pendapat kepada perusahaan. Hal ini merupakan wujud komitmen Bank dalam menghargai dan memenuhi hak pegawai dan keadilan sosial. Selain itu, BSI juga memberikan kebebasan untuk berserikat, berkumpul, serta mengutarakan pendapat sesuai koridor hukum dan peraturan yang berlaku. Bank telah membentuk Serikat Pekerja Bank Syariah Indonesia. Di akhir periode pelaporan, jumlah anggota Serikat Pekerja sebesar 9.374 atau 54% dari total pegawai.

**Jumlah Peserta Serikat Pekerja**

Serikat Pekerja	Jumlah Pegawai Per Desember 2024	Jumlah Anggota SP	Persentase
Anggota Serikat Pekerja BSI	17.234	9.374	54%

Dalam rangka menciptakan lingkungan kerja yang berhasanah bagi seluruh pegawai, BSI telah memiliki aturan mengenai Keluh Kesah melalui Pasal 55 Peraturan Perusahaan PT Bank Syariah Indonesia Tbk, yang menjadi acuan bagi pegawai untuk penyampaian, penyelesaian keluh kesah, dan/atau mencari solusi dari perselisihan hubungan industrial secara musyawarah. Hal ini sejalan dengan semangat BSI untuk membangun hubungan baik yang konstruktif, termasuk dalam hal penanganan keluh kesah pegawai. Berikut adalah mekanisme penanganan keluh kesah pegawai.



Dalam membangun hubungan yang harmonis, BSI telah menetapkan pemberitahuan perubahan jam operasional telah diatur dalam SPO Cabang PT. Bank Syariah Indonesia minimal 10 hari kerja kepada kantor pusat 10 (sepuluh) hari sebelum implementasi dan kepada karyawan minimal 3 (tiga) hari kerja.

### Tenaga Kerja Anak dan Tenaga Kerja Paksa [OJK F.19]

BSI senantiasa berkomitmen untuk menentang mempekerjakan pekerja anak dan melakukan praktik kerja paksa. Hal ini telah tertuang dalam kebijakan rekrutmen, kontrak kerja dan peraturan perusahaan yang telah disosialisasikan kepada seluruh insan BSI dan juga para mitra kerja dan pemasok. Dalam kebijakan rekrutmen, BSI telah mengatur usia minimal calon pegawai yaitu 24 tahun. Selain itu, BSI juga telah menetapkan jam kerja yang telah dituangkan dalam Peraturan Perusahaan yaitu selama 8 (delapan) jam kerja dalam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja. Selain itu, dalam pemilihan pemasok, BSI memastikan seluruh pemasok mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di antaranya adalah dalam proses pengadaan, rekanan menyerahkan dokumen teknis yang di dalamnya menyatakan bahwa pemasok tidak memiliki tenaga kerja anak di bawah umur serta tidak melakukan kerja paksa. Sehingga, sampai dengan akhir periode pelaporan, tidak terdapat operasi dan pemasok yang dianggap memiliki risiko signifikan terhadap insiden pekerja anak dan kerja paksa serta tidak terdapat isu dampak sosial negatif.

### Cuti Melahirkan [GRI 401-3]

Kebijakan cuti melahirkan BSI terdapat dalam PTO Cuti dan Ijin BSI, yang di-review secara berkala oleh Bank agar senantiasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan (UU KIA). BSI memberikan cuti melahirkan kepada pegawai wanita selama 3 (tiga) bulan kalender dan dapat diperpanjang mengacu pada Undang-undang Kesejahteraan Ibu dan Anak. BSI juga memberikan cuti bagi pria untuk menemani istri melahirkan kepada pegawai pria selama 3 (tiga) hari bagi pegawai yang berada di *homebase* dan 5 (lima) hari kalender untuk pegawai di luar *homebase*. Sepanjang tahun 2024, jumlah pegawai wanita yang mengambil hak cuti melahirkan sebanyak 391 orang dan pegawai pria yang mengajukan cuti mendampingi istri melahirkan sebanyak 343 orang.

Uraian	2024		2023		2022	
	Wanita	Pria	Wanita	Pria	Wanita	Pria
Jumlah pegawai yang berhak cuti	5.719	9.206	5.816	9.438	5.736	9.613
Jumlah pegawai yang mengambil hak cuti	391	343	372	398	534	592
Jumlah pegawai yang kembali setelah cuti	388	343	368	398	522	592
Jumlah pegawai yang tetap bekerja hingga 12 bulan setelah mengambil cuti	373	343	343	398	492	592
Return to work rate	99,23%	100,00%	98,92%	100,00%	97,75%	100,00%
Retention rate	96,13%	100,00%	93,21%	100,00%	94,25%	100,00%

### Sistem Remunerasi Pegawai dan Upah Minimum Regional [OJK F.20, GRI 202-1, 401-2, 405-2]

BSI senantiasa berupaya untuk memenuhi hak-hak pegawai, termasuk memberikan remunerasi. BSI telah menerapkan pengelolaan sistem remunerasi (*reward*) yang memberikan remunerasi kepada pegawai yang dapat bersifat finansial maupun non-finansial yang kompetitif, namun tetap sesuai dengan kemampuan Bank. Kebijakan sistem imbalan Bank Syariah Indonesia adalah menyelaraskan posisi remunerasi pegawai agar dapat lebih kompetitif terhadap *market*. Dalam memberikan remunerasi, BSI senantiasa mematuhi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku yang terkait dengan Upah Minimum Regional. Sampai dengan akhir periode pelaporan, BSI telah memberikan remunerasi telah disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dan berada di atas standar upah minimum yang berlaku di seluruh wilayah operasional Perusahaan. Dalam memberikan upah, BSI tidak membedakan berdasarkan jenis kelamin di setiap level pegawai. Adapun besaran upah minimum regional yang diberikan BSI sebagai berikut.

Tabel Rasio Standar Upah Terendah Pegawai Tetap Dibandingkan dengan Upah Minimum Provinsi (UMP)

Provinsi	UMP 2024 (Rp)	Imbal Jasa Pegawai Tingkat Terendah (Rp)	Presentase
Bali	2.813.672	3.800.000	135%
Banten	2.727.813	3.800.000	139%
Bengkulu	2.507.080	3.800.000	152%
Daerah Istimewa Yogyakarta	2.125.898	3.800.000	179%
Daerah Khusus Ibukota Jakarta	5.067.381	5.067.381	100%
DI Yogyakarta	2.125.898	3.800.000	179%
Gorontalo	3.025.100	3.800.000	126%
Jambi	3.037.122	3.800.000	125%
Jawa Barat	2.057.495	3.800.000	185%
Jawa Tengah	2.036.947	3.800.000	187%
Jawa Timur	2.165.245	3.800.000	175%
Kalimantan Barat	2.702.616	3.800.000	141%
Kalimantan Selatan	3.282.813	3.800.000	116%
Kalimantan Tengah	3.261.616	3.800.000	117%
Kalimantan Timur	3.360.858	3.800.000	113%
Kalimantan Utara	3.361.653	3.800.000	113%
Kepulauan Bangka Belitung	3.640.000	3.800.000	104%
Kepulauan Riau	3.402.492	3.800.000	112%
Lampung	2.716.497	3.800.000	140%
Maluku	2.949.953	3.800.000	129%
Maluku Utara	3.200.000	3.800.000	119%
Nanggroe Aceh Darussalam	3.460.672	3.800.000	110%
Nusa Tenggara Barat	2.444.067	3.800.000	155%
Nusa Tenggara Timur	2.186.826	3.800.000	174%
Papua	4.024.270	4.024.270	100%
Papua Barat	3.393.000	3.800.000	112%
Riau	3.294.626	3.800.000	115%
Sulawesi Barat	2.914.959	3.800.000	130%
Sulawesi Selatan	3.434.298	3.800.000	111%
Sulawesi Tengah	2.736.698	3.800.000	139%
Sulawesi Tenggara	2.885.965	3.800.000	132%
Sulawesi Utara	3.545.000	3.800.000	107%
Sumatera Barat	2.811.450	3.800.000	135%
Sumatera Selatan	3.456.874	3.800.000	110%
Sumatera Utara	2.809.915	3.800.000	135%

BSI juga memberikan *reward* dengan mengedepankan prinsip *competitiveness* dan *fairness* yang berbasis kinerja dan risiko dengan mempertimbangkan pelaksanaan *best practice* dalam industri perbankan. Untuk dapat mempertahankan *market competitiveness*, secara reguler, Bank berpartisipasi dalam Survei Gaji Tahunan (*Annual Salary Survey*) di industri perbankan di Indonesia yang dilaksanakan oleh lembaga survei independen yang kompeten. Dalam penentuan remunerasi, setiap pegawai memiliki hak yang sama tanpa perbedaan atas latar belakang, seperti gender, ras, agama, suku, dan kondisi fisik tertentu. Kebijakan remunerasi BSI sendiri dilakukan dengan mempertimbangkan prestasi, masa kerja, capaian *key performance indicator* (KPI), dan ketentuan standar upah dari pemerintah yang selalu ditelaah setiap tahun.



### Sistem Penetapan Remunerasi 3P

*Pay for Position* pegawai diberikan kompensasi sesuai dengan posisi/jabatannya.

*Pay for Person* pegawai diberikan kompensasi sesuai dengan keahlian individunya.

*Pay for Performance* pegawai diberikan kompensasi sesuai dengan kinerjanya

Remunerasi diberikan oleh Bank untuk memotivasi pegawai agar semakin optimal memberikan kinerja yang terbaik, baik untuk pengembangan diri maupun Perusahaan, dapat mempertahankan posisi kompetitif di pasar, dan meretensi (*retention*) para pegawai talenta. Selain itu, pemberian *reward* tersebut sebagai upaya menarik (*attracting*) talenta terbaik di industri yang dibutuhkan Bank untuk mencapai tujuan bisnis dan menjaga kesinambungan usaha. Tak hanya gaji dan tunjangan pegawai, BSI juga memberikan program Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) yang diberikan untuk pegawai tetap melalui kontribusi iuran dari pegawai dan perusahaan setiap bulannya, serta berbagai fasilitas lainnya untuk mendukung kinerja pegawai.

Bank memberikan *reward* yang bersifat finansial dan non-finansial. Contoh *reward* yang bersifat finansial, yakni berupa bonus tahunan, fasilitas kesehatan, hari cuti, pembiayaan pegawai, dan penyediaan fasilitas lainnya yang diberikan berdasarkan kinerja Bank, unit kerja, dan kinerja tiap-tiap pegawai. Adapun contoh *reward* yang bersifat non-finansial, seperti pemberian apresiasi Umrah bagi pegawai terbaik BSI dengan memberangkatkan 814 pegawai pada *Quartal 1* (Q1) tahun 2023. Pemberian apresiasi Umrah tersebut merupakan *Unique Value Proposition* (UVP) dari BSI di *market* sebagai salah satu Bank Syariah terbesar di

Indonesia dengan menumbuhkan nilai-nilai spiritual islami bagi pegawai penerima apresiasi Umrah. Bank juga memberikan fasilitas *benefit* dalam bentuk fasilitas antara lain suka cita dan duka cita, serta bantuan untuk pegawai yang mengalami musibah bencana alam dan kerusuhan.

Apresiasi lain yang berbentuk non-finansial juga diberikan dalam bentuk *recognition* kepada unit kerja dan individu berdasarkan inovasi terbaik yang berdampak kepada kinerja Bank. Termasuk di dalamnya, pencapaian khusus unit atau individu yang memberikan dampak signifikan terhadap bisnis, kinerja maupun reputasi BSI. Sebagai bentuk apresiasi dan komitmen akan kesejahteraan pegawai, manajemen melakukan *annual increment*, melanjutkan pemberian token bonus di tengah tahun, serta meluncurkan produk Fasilitas Pembiayaan Pegawai (FPP) gelombang 2 untuk memberikan kemudahan pegawai dalam memenuhi kebutuhan akan rumah dan kendaraan.

Adapun *reward* yang diberikan kepada pegawai tetap namun tidak berikan pegawai kontrak adalah kesempatan memiliki saham. BSI memiliki program *Employee Stock Option Program* (ESOP) yang merupakan program pemberian saham Bank kepada pegawai terpilih sebagai salah satu bentuk apresiasi serta program retensi kepada pegawai.

Bentuk Manfaat	Pegawai Tetap	Pegawai Kontrak
Gaji pokok	✓	✓
Asuransi Jiwa/BPJS Kesehatan	✓	✓
Tunjangan Kesehatan, termasuk tunjangan kelahiran	✓	✓
Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Disabilitas - Termasuk dalam fasilitas BP Jamsostek	✓	✓
Jaminan Pensiun (JP) - Termasuk dalam fasilitas BP Jamsostek	✓	✓
Kesempatan Memiliki Saham	✓	-
Tunjangan Hari Raya	✓	✓
Tunjangan Cuti	✓	✓

### Lingkungan Bekerja yang Layak dan Aman [OJK F.21]

BSI senantiasa berkomitmen untuk menciptakan lingkungan kerja ideal yang mendukung terciptanya rasa aman serta nyaman bagi para pegawai. Untuk itu, BSI berkomitmen untuk menjalankan aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sebagai bagian dari upaya menciptakan kegiatan bisnis yang berkelanjutan dan mencapai *zero accident* di seluruh wilayah area operasional BSI. Program K3 tidak hanya berfokus pada aspek fisik, tapi juga aspek psikis dan *mental health* pegawai. Selain itu, Bank juga memberikan fasilitas asuransi kesehatan kepada seluruh pegawai maupun keluarga pegawai, mengikutsertakan pegawai ke dalam program BPJS Kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan.

Selain menerapkan K3, dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan harmonis, diperlukan pedoman perusahaan serta dukungan dari semua pihak untuk berperilaku sopan dan menghindari perilaku tidak hormat, termasuk pelecehan dan kekerasan. BSI telah memiliki Kebijakan *Respectful Workplace Policy* (RWP) yang harus diterapkan oleh Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, pegawai, dan pihak-pihak yang berhubungan dengan perusahaan di seluruh lingkungan kerja BSI. Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan semua pihak dapat bekerja sama untuk menciptakan lingkungan kerja yang positif dan produktif.

### Kesehatan dan Keselamatan Kerja

[GRI 403-1, 403-2, 403-7, 403-8]

Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) BSI mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Landasan UU No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, serta Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Pelaksanaan K3 yang dijalankan BSI meliputi keselamatan dan kesehatan karyawan, pelanggan, pemasok, dan pemangku kepentingan lainnya. Hal ini telah tercantum dalam Standar Prosedur Operasional Human Capital dan Peraturan Perusahaan Bank Syariah Indonesia yang selalu diperbarui sesuai ketentuan perundang-undangan. Penerapan K3 wajib dipatuhi oleh seluruh pegawai, pelanggan, pemasok dan pemangku kepentingan lainnya.

BSI telah memiliki program *Risk and Threat Assessment* (RTA) yang berfungsi untuk mengidentifikasi jenis ancaman/bencana yang relevan dan memiliki tingkat risiko (dampak) yang harus diperhatikan untuk setiap lokasi unit kerja atau pengelola gedung/kantor karena tiap lokasi memiliki profil risiko yang berbeda. Aktivitas *Risk and Threat Assessment* penting untuk dilakukan sebagai upaya dalam melakukan pencegahan atau mitigasi risiko yang mungkin terjadi pada Bank. Program RTA dilakukan secara rutin setiap tahun ke seluruh Kantor BSI baik di outlet jaringan maupun di Lokasi Kantor Pusat. Program dimulai dari proses *assessment*, validasi, *monitoring*, pemetaan risiko, dan kesiapan menghadapi *disaster* serta *monitoring* terhadap tindak lanjut temuan perbaikan-perbaikan terhadap fasilitas seluruh kantor BSI agar dapat memenuhi standar K3 sesuai Standar Prosedur Operasional. Ruang lingkup RTA meliputi tata cara dalam melaksanakan identifikasi risiko dan ancaman untuk mendukung kesiapan fasilitas secara umum, bangunan, pegawai dan pihak ketiga *data center* serta peralatan digital dalam menghadapi suatu gangguan/bencana oleh unit kerja dan/atau pengelola gedung/kantor/kantor di seluruh wilayah Indonesia yang mencakup:

1. Mengidentifikasi jenis ancaman yang relevan di setiap unit kerja dan/atau pengelola gedung/kantor terkait sesuai dengan profil risiko di setiap lokasi operasional Bank dan evaluasi strategi mitigasi risiko.
2. Kesiapan fasilitas secara umum, bangunan, pegawai dan pihak ketiga, *data center* serta peralatan digital unit kerja dalam menghadapi suatu gangguan/bencana.

	Faktor Lingkungan & Prosedur	Faktor Manusia & Komunikasi
Keselamatan	<p>Program RTA memastikan fasilitas seluruh kantor BSI memenuhi standar K3 sesuai Standar Prosedur Operasional Human Capital, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Alat Pemadam Api Ringan (APAR).</li> <li>• <i>Fire hydrant</i> dan <i>fire pump</i>.</li> <li>• Sistem pengendali asap.</li> <li>• Sistem alarm.</li> <li>• <i>Water sprinkle</i>.</li> <li>• Petunjuk jalur evakuasi.</li> <li>• Pembuatan ERP (<i>Emergency Response Plan</i>).</li> <li>• Penyediaan SOP (Standar Operasional Prosedur) tanggap darurat.</li> <li>• Memastikan Sistem proteksi gedung berfungsi secara Otomatis dan Terintegrasi saat <i>General Alarm/Fire Drill</i>.</li> <li>• Memastikan Sarana evakuasi sudah dilengkapi dengan tanda penunjukan dan sudah memenuhi standar operasional Gedung saat terjadi Gempa bumi, Kebakaran dan Ancaman BOM.</li> </ul>	<p>Secara rutin melaksanakan komunikasi, kampanye program keselamatan, dan sosialisasi K3 rutin untuk seluruh pegawai BSI terkait prosedur K3 dan prosedur evakuasi jika terjadi kondisi kedaruratan, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Fire drill</i>.</li> <li>• Meningkatkan pemahaman penggunaan APAR dan APAB dan <i>first response</i> saat terjadi kebakaran.</li> <li>• Penanganan gempa bumi.</li> <li>• Penanganan kondisi ancaman terorisme.</li> <li>• Penunjukan <i>Captain Floor</i> per lantai.</li> <li>• Pembentukan ERT (<i>Emergency Response Team</i>).</li> <li>• Pembuatan <i>WhatsApp Group</i> untuk sarana komunikasi.</li> <li>• Mengadakan <i>training</i> tanggap darurat.</li> <li>• Mengadakan <i>training</i> penggunaan APAR.</li> <li>• Melakukan simulasi keadaan darurat.</li> </ul>

	Faktor Lingkungan & Prosedur	Faktor Manusia & Komunikasi
Kesehatan	<p>Memastikan kondisi seluruh kantor BSI nyaman dan sehat bagi pegawai dan seluruh pengunjung dan memastikan Standar Prosedur Operasional untuk <i>maintenance</i> lingkungan kerja yang sehat dimiliki oleh kantor-kantor BSI yang mencakup, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Fogging</i> berkala</li> <li>• Memasang UV-C Filter udara</li> <li>• Memastikan Sirkulasi Tata Udara Berfungsi dengan baik, termasuk SAG dan RAG</li> </ul> <p>Program <i>Employee Wellbeing</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Psychological Wellbeing Program</i></li> <li>• <i>Financial Wellbeing Program</i></li> <li>• <i>Physical Wellbeing Program</i></li> <li>• <i>Workplace Wellbeing Program</i></li> </ul> <p>Untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia terbaik, BSI secara continue melaksanakan berbagai program untuk menciptakan pengalaman pegawai yang bermakna di BSI seperti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Psychological wellbeing</i> (contohnya: konseling kesehatan mental dengan psikolog, klub-klub pegawai yang ingin menyalurkan hobi, Forum LKS Bipartit)</li> <li>• <i>Physical wellbeing</i> (contohnya: klinik kesehatan, wellness atau program edukasi kesehatan, dan layanan <i>medical check up in house</i>)</li> <li>• <i>Financial Wellbeing</i> (contohnya: program edukasi perencanaan keuangan, dan paket remunerasi dan <i>benefit</i> yang layak dan kompetitif bagi pegawai)</li> <li>• <i>Workplace Wellbeing</i> (contohnya: tersedianya fasilitas ruang laktasi, <i>day care</i>, serta <i>fitness center</i>)</li> </ul>	<p>Melaksanakan berbagai kampanye kesehatan dan <i>medical check up</i> rutin bagi seluruh pegawai BSI, antara lain yang berfokus pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kesehatan paru-paru dan saluran pernapasan</li> <li>• Mencegah penyakit jantung dan hipertensi</li> <li>• Kesehatan gigi</li> <li>• Masalah pencernaan, seperti GERD, <i>maag</i>, batu empedu dan diare</li> <li>• Mencegah komplikasi diabetes gaya hidup sehat</li> <li>• Kesehatan mata</li> <li>• <i>Low back pain</i></li> <li>• Menjaga kesehatan di bulan Ramadan</li> </ul> <p>Menyelenggarakan sosialisasi dan komunikasi kesehatan seperti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Healthy Talk</i></li> <li>• <i>Let's Walk &amp; Be Health</i></li> <li>• <i>News Letter dan Infosehat</i></li> </ul>

### Pelibatan Pegawai dalam K3 [GRI 403-4, 403-5]

Penerapan sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di BSI terus dikembangkan dan dievaluasi kinerjanya secara berkala dalam rapat-rapat manajemen untuk memastikan efektivitas dan kesesuaian dengan standar keselamatan dan kesehatan kerja yang berlaku. BSI juga memberikan kesempatan kepada Pegawai BSI untuk memberikan pendapat dan masukan mengenai peningkatan sistem K3 melalui berbagai saluran, seperti *employee care*, *logic*, dan media sosial internal. Melalui saluran ini memungkinkan pegawai untuk berpartisipasi aktif dalam mengembangkan dan meningkatkan sistem K3 di perusahaan. Dalam meningkatkan pelibatan pegawai pada penerapan sistem K3, BSI telah menunjuk pegawai sebagai *floor warden* yang bertugas untuk memastikan keselamatan seluruh insan BSI di setiap lantai, dengan melakukan pengawasan dan memastikan prosedur keselamatan dilaksanakan dengan baik di area tersebut. *Floor warden* telah dilatih untuk melakukan *emergency response* untuk penyelamatan kondisi darurat, seperti kebakaran, gempa bumi, atau situasi lainnya yang memerlukan respon cepat.

### Program Kesehatan [GRI 403-3, 403-6]

BSI memberikan Fasilitas Asuransi Kesehatan untuk pegawai beserta keluarga yaitu pasangan dan 3 (tiga) orang anak. Dalam rangka meningkatkan kualitas kesehatan pegawai, Bank memiliki *Wellness Program* yaitu program kesehatan yang disusun untuk penerapan gaya hidup sehat melalui berbagai edukasi, layanan kesehatan, *coaching*, dan kompetisi untuk mendukung produktivitas pegawai.

*Wellness Program* terdiri dari beberapa program dengan penjelasan dari masing-masing program sebagai berikut:

#### 1. Wellness Fair

*Wellness Fair* merupakan kegiatan-kegiatan berupa bazar yang telah dilaksanakan di *Region Office* dan Kantor Pusat. Kegiatan *Wellness Fair* antara lain:

- Sosialisasi Asuransi Kesehatan
- Tenant Pemeriksaan Kesehatan
  - Mini MCU
  - Fisioterapi
  - Pemeriksaan Refraksi Mata
  - Quantum Resonance Analyzer*
  - Konsultasi Gizi
- Tenant Bazar Makanan dan Minuman Kesehatan
- Dokter Corner
- Olahraga Zumba/Aerobik

#### 2. MCU In House

Bank memberikan kesempatan kepada pegawai untuk memeriksa kesehatan melalui *Medical Check Up* (MCU) yang bekerja sama dengan Rumah Sakit Provider di lokasi kantor baik di Kantor Pusat maupun Jaringan untuk memudahkan pegawai dalam melaksanakan pemeriksaan kesehatan.

#### 3. Let's Walk & Be Healthy

*Let's Walk & Be Healthy* adalah program kompetisi *virtual walk* yang memiliki tujuan membiasakan pegawai hidup sehat dengan berolahraga berjalan kaki untuk dapat meningkatkan kebugasan fisik dan produktivitas.

#### 4. Health Talk

Sebuah edukasi yang membahas terkait topik kesehatan dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan pegawai tentang kesehatan. Bank telah

melakukan kegiatan *Health Talk* secara *Hybrid* dengan dokter ahli dibidangnya. Tema-tema *health talk* diantaranya:

- a. Menjaga Kesehatan di Bulan Ramadhan
- b. *Every Step Counts for a Healthier and Productive Life*
- c. *Healthier & Glowmax Skin*
- d. Tips Menjaga kesehatan Tubuh di Musim Pancaroba

#### 5. News Letter dan Infosehat

*E-publikasi* yang memberikan informasi tips kesehatan, konsultasi dokter, informasi provider baru, tanya jawab bersama *Customer Relation Officer (CRO)*, sampai dengan informasi kegiatan *Wellness* yang berjalan.

BSI juga telah menyediakan BSI Medical Unit yang terletak di Lantai 10 Gedung The Tower dan diperuntukan bagi pegawai BSI. BSI Medical Unit menawarkan layanan dokter dan perawatan untuk menangani kasus-kasus umum pada tingkat rawat jalan pertama. Kepedulian Bank dalam hal kesehatan tidak hanya bersifat *preventif* tetapi juga bersifat kuratif karena Bank meyakini bahwa dengan memberikan dukungan penuh terhadap kemudahan akses pelayanan kesehatan dapat menciptakan ketenangan dan kepercayaan dari pegawai sehingga dapat memberikan kontribusi yang optimal kepada Bank.

Selain itu, BSI memiliki BSI Club yang secara rutin mengadakan kegiatan berbagai olahraga. Klub ini berfungsi sebagai sarana untuk mempromosikan budaya hidup sehat di kalangan pegawai

sekaligus menjadi wadah bagi pegawai untuk berbagi ide demi meningkatkan kinerja Bank.

#### Pelatihan K3

Dalam rangka mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, BSI telah melakukan berbagai pelatihan terkait K3 di antaranya.

1. Pembekalan dan sertifikasi *Business Continuity Management Contingency Plan (BCMCP)*
2. *Wellness Program*
3. Sertifikasi *Disaster Leadership Management*
4. Pelatihan Petugas Keamanan yang meliputi:
  - a. Penanganan *Conflict*
  - b. Cara Pengamanan Kantor
  - c. Bencana gempa Bumi
  - d. Penggunaan APAR
  - e. Penanganan Aksi

#### Kinerja K3 [GRI 403-9, 403-10]

Atas berbagai upaya yang telah dilakukan oleh BSI untuk mewujudkan lingkungan bekerja yang layak dan aman, selama tahun 2024, tidak terdapat insiden K3 (*zero accident* dan *zero fatality*) yang terjadi pada pegawai dan bukan pegawai (kontraktor, subkontraktor dan mitra kerja). Pada tahun 2024, tidak terdapat penyakit akibat kerja yang dilaporkan kepada Perusahaan dan tidak terdapat kasus kematian akibat kerja, baik pada pegawai, kontraktor, subkontraktor, dan mitra kerja.

Tabel Kinerja K3 Tahun 2022-2024

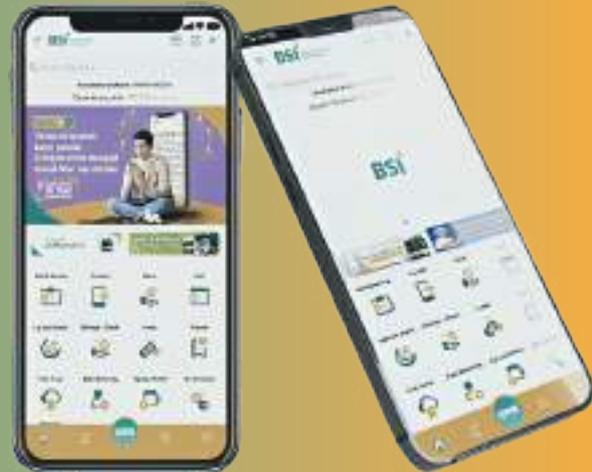
Tahun	Tingkat Kecelakaan Kerja			
	Ringan	Sedang	Berat	Fatal/Kematian
2024	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
2023	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
2022	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

Creating Purpose for the Employee - BSI is more than just Financial Institution but *also has spiritual and social values*

**B** BANK  
*BSI Sahabat Finansial*

**S** SYARIAH  
*BSI Sahabat Spiritual*

**I** INDONESIA  
*BSI Sahabat Sosial,  
berkontribusi untuk Indonesia*



**Good Working Environment Line**  
Digilab – for Digital incubation





## Aspek Masyarakat

### Dampak Operasi Terhadap Masyarakat Sekitar [OJK F.23, GRI 203-1, 413-1, 413-2, 411-1]

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, BSI senantiasa berupaya untuk memberikan dampak positif kepada masyarakat sekitar wilayah operasional. Berbagai upaya yang telah diwujudkan dalam penyediaan lapangan kerja, terlaksananya program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang mencakup program pengembangan masyarakat lokal. Kegiatan tersebut diharapkan memberikan dampak pada perekonomian dan peningkatan kualitas SDM masyarakat, sehingga kesejahteraan masyarakat sekitar meningkat. Pada tahun 2024, BSI telah melakukan berbagai program pengembangan masyarakat diantaranya Program Desa BSI dan Sentra UMKM BSI.

Atas komitmen Bank untuk senantiasa memberikan dampak positif dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, sampai dengan akhir tahun 2024, tidak terdapat kegiatan operasional BSI yang memberikan dampak negatif kepada masyarakat sekitar serta tidak terdapat konflik dan insiden dengan masyarakat adat setempat.

### Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan [OJK F.25, GRI 203-2, 413-1, 413-2]

Sebagai bentuk komitmen BSI dalam mendukung tercapainya tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs), BSI melaksanakan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang tujuan utamanya adalah untuk menebar manfaat bagi lingkungan operasional BSI masyarakat yang dilayani, dan para pemangku kepentingan. Sebagai entitas syariah, penyusunan dan pelaksanaan program TJSL BSI senantiasa menjunjung tinggi prinsip *Maqashid Syariah*.

#### Dasar Hukum Pelaksanaan Program TJSL

- UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- UU No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
- UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
- Standar Prosedur Operasional (SPO) dan Petunjuk Teknis Operasional (PTO)
- 123/DSN-MUI/XI/2018 Penggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui sebagai Pendapatan bagi Lembaga Keuangan Syariah, Lembaga Bisnis Syariah, dan Lembaga Perekonomian Syariah

### Tujuan Pelaksanaan Program TJSL

- Mewujudkan hubungan yang harmonis antara perusahaan dan masyarakat,
- Mendukung implementasi praktik bisnis yang transparan dan bertanggung jawab,
- Membangun citra positif dan menggali dukungan masyarakat,
- Menggali dan memberdayakan potensi UMKM melalui penyaluran dana kemitraan,
- Berpartisipasi pada program pelestarian lingkungan hidup, peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, kehidupan beragama, dan perbaikan sarana umum lainnya.

Penerapan program sosial kemasyarakatan BSI dilaksanakan oleh Yayasan Bangun Sejahtera Indonesia Maslahat atau biasa disebut BSI Maslahat. Yayasan ini berdiri pada tanggal 21 November 2001 dengan nama Yayasan Bangun Sejahtera Mitra Umat (Yayasan BSMU) yang berganti nama dan logo sejak tahun 2022 menjadi Bangun Sejahtera Indonesia Maslahat (BSI Maslahat). Pembentukan BSI Maslahat diharapkan bisa memperkuat hubungan dengan berbagai mitra strategis dalam mengelola dana ZISWAF (Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf) serta donasi sosial dan CSR dengan sasaran *muzakki* (donatur) perorangan maupun perusahaan.

BSI Maslahat menjalankan programnya untuk menyantuni dan memberdayakan potensi para mustahik (penerima manfaat), sehingga mustahik memiliki peluang dan mampu bersaing mengangkat derajat kehidupan yang lebih baik lagi. Penerima manfaat program BSI Maslahat berdasarkan asnaf mencakup fakir, miskin, muaf, hamba sahaya, *gharimin*, *fisabilillah*, dan *ibnu sabil*.

Dalam penyaluran zakat, BSI Maslahat bekerja sama dengan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia (BAZNAS RI) yang merupakan lembaga resmi pemerintah terkait pengelolaan zakat secara nasional sebagaimana diatur dalam UU No. 23 tahun 2011. Kemudian, BAZNAS membentuk Unit Pengumpul Zakat Badan Amil Zakat Nasional PT Bank Syariah Indonesia Tbk (UPZ BAZNAS BSI) pada tanggal 20 Mei 2021 melalui Surat Keputusan (SK) Ketua BAZNAS nomor 19 tahun 2021 tentang Pembentukan UPZ BAZNAS BSI. Tugas UPZ BAZNAS yaitu untuk membantu BAZNAS mengumpulkan zakat di lingkungan BSI, membantu pendistribusian, dan mendayagunakan zakat berdasarkan kewenangan dari BAZNAS RI.

Segala upaya ini merupakan komitmen nyata Bank dalam memastikan dana TJSL dan zakat yang disalurkan dikelola secara profesional dan transparan, sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal dan tepat sasaran bagi masyarakat yang menerima manfaat dari program ini.

**Tabel Realisasi Penyaluran Dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) 2022-2024**

Uraian	2024	2023	2022
Penyaluran Dana TJSL	305.573.338.730	255.095.983.797	187.568.570.310

**Tabel Realisasi Penyaluran Dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)**

Sumber Dana	Zakat	Infaq	Sosial	Upzbsi	Wakaf	Total
Pendidikan	2.076.590.959	10.810.047.742	296.700.000	56.750.027.762	171.560.934	70.104.927.397
Kesehatan	531.534.100	2.162.541.603	1.032.500.000	4.313.131.568	-	8.039.707.271
Kemanusiaan	3.521.136.525	43.282.311.591	26.377.286.485	30.375.046.430	340.200.000	103.895.981.031
Ekonomi	6.292.534.030	3.429.015.940	145.000.000	58.873.700.861	121.461.177	68.861.712.008
Dakwah Advokasi	144.098.000	8.157.368.525	5.503.136.000	3.529.745.806	-	17.334.348.331
Amil	2.548.779.205	12.635.391.696	2.413.393.192	19.739.098.598	-	37.336.662.691
<b>Total</b>	<b>15.114.672.819</b>	<b>80.476.677.097</b>	<b>35.768.015.677</b>	<b>173.580.751.025</b>	<b>633.222.111</b>	<b>305.573.338.730</b>

Tabel Kegiatan TJSJ dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan [GRI 413-1]

Jenis Kegiatan TJSJ	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Penjelasan Kegiatan	Capaian
<b>PILAR EKONOMI</b>			
Desa BSI		<p>Desa BSI merupakan program pemberdayaan wilayah binaan yang difokuskan pada pengembangan ekonomi desa dengan mengoptimalkan sumber daya lokal, seperti pertanian, peternakan, dan perkebunan. Kemudian penguatan aspek kelembagaan dan pemasaran, serta penerapan teknologi tepat guna. Program Desa BSI bertujuan untuk memberikan kontribusi terhadap pemberdayaan masyarakat dan pembangunan sosial di desa-desa di Indonesia, di antaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Adanya pengembangan ekonomi desa melalui penguatan sumber daya lokal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.</li> <li>Peningkatan pendapatan masyarakat (mustahik) dengan mengoptimalkan sumber daya ekonomi lokal melalui penerapan teknologi yang tepat guna.</li> </ol> <p>Melalui program Desa BSI, BSI dan BSI Maslahat bercita-cita untuk lebih banyak membangun desa-desa di Indonesia yang memiliki potensi sumber daya ekonomi, sehingga nantinya mampu menjadi desa yang berkembang, baik dari sisi ekonomi, sosial, dan spiritual. Dalam membantu desa binaan, BSI menerapkan strategi mulai dari aspek hulu hingga hilir. Mulai dari mengelola dan mendayagunakan dana ZIS kepada para mustahik penerima manfaat program, program pembinaan pengembangan kluster usaha, hingga akses pembiayaan dan kemudahan akses ke pasar. Melalui program ini, BSI ingin memfasilitasi mustahik (penerima manfaat) melalui penguatan dan pengembangan sumber daya ekonomi lokal, sehingga dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan.</p>	<p>BSI telah berkontribusi dengan mengintervensi 2.083 KK/7.370 jiwa kategori miskin melalui program Desa BSI sebanyak 23 Desa dari Periode 2018-2024 (Mengintervensi 318 KK yang berhasil keluar dari garis kemiskinan):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>3 (tiga) Desa Exit (Tahun 2018-2021 (jumlah 200 KK/728 Jiwa)</li> <li>17 desa eksisting tahun 2021-2023 (Jumlah 1503 KK / 5.329 Jiwa)</li> <li>3 (tiga) Desa baru ditahun 2024 (Jumlah 380 KK/1.313 Jiwa)</li> </ul>
SENTRA UMKM BSI		<p>Program ini bertujuan untuk membangun ketahanan terhadap bencana lingkungan, ekonomi dan sosial melalui peningkatan pendapatan sehingga lebih tahan banting saat ada krisis dengan pemanfaatan sumber daya lokal.</p>	<p>BSI telah berkontribusi dengan mengintervensi 1.679 KK dalam program UMKM di tahun 2022 - 2024 dan mampu memberikan dampak dengan penerima manfaat keluar dari garis kemiskinan sebanyak 335 KK dari 54 Program UMKM.</p>
<b>PILAR PENDIDIKAN</b>			
PESANTREN BERDAYA BSI		<p>Program Pesantren Berdaya bertujuan untuk meningkatkan kemandirian pesantren melalui pengembangan sumber daya ekonomi dan kewirausahaan. Usaha yang dikembangkan disesuaikan dengan potensi masing-masing pesantren, seperti usaha <i>laundry</i> dan lainnya.</p>	<p>BSI telah mengintervensi 2.639 penerima manfaat santri Dhuafa yang berada di 19 Kabupaten, 8 Provinsi dengan 35 Pesantren dari tahun 2022-2023.</p>
SAHABAT PELAJAR INDONESIA		<p>Sahabat Pelajar Indonesia (SPI) merupakan salah satu program beasiswa yang diberikan kepada siswa yang tidak mampu di tingkat SMP dan SMA. Pemberian beasiswa yang disiapkan Laznas BSM ditujukan untuk membentuk generasi yang baik secara akademik dan spiritual, berakhlak islami, serta mandiri.</p> <p>Program ini bertujuan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua.</li> <li>Akses yang sama ke pendidikan teknis, kejuruan dan pendidikan tinggi.</li> <li>Mempeluas beasiswa pendidikan tinggi untuk negara negara berkembang.</li> </ol> <p>Adapun bentuk bantuan tersebut berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bantuan uang Pendidikan Rp300.000/bulan</li> <li>Pembinaan aqidah dan akhlak</li> <li>Program tahsin dan tahfidz</li> <li>Pendampingan mentor, <i>try out</i>, dan bimbingan belajar untuk kelas 12</li> <li>Pelatihan bela negara dan pengembangan diri</li> <li>Pelatihan ilmu <i>parenting</i> untuk orang tua peserta</li> </ul>	<p>BSI telah memberikan beasiswa pendidikan kepada 5.178 pelajar di 124 Sekolah (SMP, SMA, SMK) di seluruh Indonesia.</p>

Jenis Kegiatan TJSL	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Penjelasan Kegiatan	Capaian
BSI SCHOLARSHIP		<p>BSI Scholarship merupakan program beasiswa tingkat sarjana (S1) bertujuan untuk membentuk pemimpin masa depan umat yang berkarakter, amanah, dan bisa menjadi teladan dalam membangun keumatan, khususnya di bidang industri ekonomi syariah. Program ini terdiri dari BSI Inspirasi yang menggunakan dana zakat dan BSI Prestasi yang menggunakan dana infaq. Selain bantuan uang kuliah, program BSI <i>Scholarship</i> juga memiliki program pembinaan, seperti <i>mentorship</i>, literasi ekonomi syariah, pembinaan karakter, keislaman, dan kepemimpinan.</p> <p>Program ini bertujuan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua.</li> <li>2. Akses yang sama ke pendidikan teknis, kejuruan dan pendidikan tinggi.</li> <li>3. Mempeluas beasiswa pendidikan tinggi untuk negara negara berkembang.</li> </ol> <p>Program beasiswa BSI <i>Scholarship</i> ini terdiri dari dua jenis yaitu program BSI <i>Scholarship</i> Prestasi dan program BSI <i>Scholarship</i> Inspirasi. Program BSI <i>Scholarship</i> Prestasi merupakan program beasiswa yang ditujukan untuk mahasiswa berprestasi dari berbagai kampus dan jurusan yang telah ditetapkan. Sedangkan untuk Program BSI <i>Scholarship</i> Inspirasi adalah beasiswa yang ditujukan untuk pemerataan pendidikan bagi mahasiswa prasejahtera.</p>	<p>BSI telah memberikan beasiswa pendidikan kepada 2.835 mahasiswa selama 2022-2024 di seluruh Indonesia yang tersebar di seluruh Indonesia yang terdiri dari 90 PTN.</p>
RUMAH TAHFIDZ BSI		<p>Rumah Tahfidz BSI Maslahat merupakan program beasiswa untuk pelajar lulusan SLTP sederajat dengan dua jurusan, yaitu Qur'an dan <i>Entrepreneur</i>.</p> <p>Program ini bertujuan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan taraf pendidikan mustahik.</li> <li>2. Melahirkan lulusan Penghafal Qur'an dengan standar hafalan sesuai dengan kurikulum Rumah Qur'an BSI.</li> <li>3. Melahirkan lulusan Rumah Qur'an yang memiliki wawasan dan kemampuan <i>entrepreneur</i> sebagai bekal peningkatan peluang kerja dan pendapatan.</li> </ol>	<p>BSI telah memberikan pengajaran kepada 43 Santri akhwat dan ikhwan dari tahun 2023-2024 untuk belajar Quran dan belajar pengetahuan terkait wawasan berbasis <i>entrepreneur</i>.</p>
<b>PILAR KESEHATAN</b>			
CARE AND RESCUE		<p>Program CARE AND RESCUE adalah inisiatif TJSL BSI yang bertujuan untuk memberikan bantuan kemanusiaan dan penanggulangan bencana.</p> <p>Program ini bertujuan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memenuhi kebutuhan darurat pada saat terjadi bencana.</li> <li>2. Membentuk kesiapsiagaan terhadap adanya potensi bahaya.</li> <li>3. Membantu pemulihan masyarakat dan wilayah pasca bencana.</li> </ol>	<p>BSI telah berkontribusi dengan memberikan bantuan kepada 147 ribu penerima manfaat dan 443 lembaga di seluruh Indonesia</p>
<b>PILAR KEMANUSIAAN</b>			
BANTUAN LANGSUNG		<p>Program pemberian bantuan langsung merupakan bukti komitmen perusahaan dalam membangun ekonomi syariah yang bermanfaat bagi masyarakat, baik secara sosial maupun ekonomi. Program ini bertujuan untuk memberikan fasilitas pelayanan kesehatan dalam bentuk advokasi, pemeriksaan dan pengobatan kepada masyarakat dalam bentuk bantuan langsung.</p>	<p>BSI telah memberikan manfaat kepada 1.498.240 jiwa peneriman manfaat selama tahun 2024 baik berupa Program Respons Bencana, Pelayanan Kesehatan Kemanusiaan seperti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bantuan Air Minum Gratis di Mesjid BSI.</li> <li>2. Bantuan Dispenser Gratis untuk 45 Masjid.</li> <li>3. Bantuan pembangunan sumber air pipa HDPE di Kabupaten Cianjur Kampung Barulega, Kecamatan Cugenang.</li> <li>4. Serta bantuan Palestina dan lainnya.</li> </ol>

Jenis Kegiatan TJSL	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Penjelasan Kegiatan	Capaian
<b>PILAR DAKWAH DAN ADVOKASI</b>			
PEMBERDAYAAN MASJID		<p>Program Pemberdayaan Masjid bertujuan untuk menumbuhkan pemberdayaan ekonomi berbasis masjid agar berdaya dan mandiri dengan potensi yang dimiliki di sekitar masjid. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua.</p>	<p>BSI telah mengintervensi 183 KK dalam 6 Masjid Binaan yang tersebar di wilayah Indonesia melalui program Masjid BSI <i>Empowerment</i> (pemberdayaan ekonomi berbasis masjid).</p>

## Inspiration Story

### Muhammad Iqram Aswan - BSI Scholarship Mahasiswa

Muhammad Iqram Aswan dari Fakultas Teknik, Prodi Teknik Mesin Universitas Indonesia. Dari kecil saya hidup menumpang di nenek saya dan bersekolah di kampung halaman nenek saya di Gowa, Sulawesi Selatan. Ketika nenek saya pensiun sebagai guru, saya tidak punya harapan bisa berkuliah. Ekonomi saya tidak begitu bagus, *ya because I come from a broken family*. Sejak kecil saya tidak pernah mengenal ayah, dia meninggalkan saya masih di dalam kandungan. Lantas apakah dengan hal itu saya menjadi putus asa? Oh tentu tidak, pastinya saya lebih termotivasi untuk mengangkat derajat keluarga saya. Alhamdulillah saya mendapatkan BSI Scholarship ketika saya Sekolah di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Gowa.

Selama di sekolah bisa dibilang cukup aktif, baik dalam bidang akademik maupun ekstrakurikuler. Saya pernah mengikuti beberapa lomba KSM, OSN, dan juga lomba-lomba kepramukaan. Saya lolos SNBP dan diterima di UI itu benar-benar di luar dugaan saya. Saya dan nenek saya waktu itu langsung menangis, karena apa? Ya, karena kami dari pedesaan dan dari keluarga yang bisa dibilang tidak punya apa-apa bisa lolos ke salah satu PTN terbaik di Indonesia, dan menjadi orang kedua dari sekolah saya yang lolos ke UI. Mendengar berita tersebut, saya, ibu, nenek, dan juga guru-guru saya bangga dengan pencapaian saya. Namun permasalahan muncul terkait biaya kuliah dan biaya hidup saya selama kuliah, alhamdulillah BSI Scholarship juga hadir memberikan bantuan saya kuliah hingga lulus sehingga saya bisa fokus untuk menggapai prestasi selama kuliah.

Iqram adalah salah satu dari ribuan penerima bantuan BSI Scholarship yang diberikan hingga tuntas kuliah. BSI Scholarship memberikan peluang yang besar dengan *benefit* beasiswa yang sangat besar. Alhamdulillah sekarang Iqram bisa berkuliah tanpa harus memikirkan tentang biaya kuliah itu sendiri. Iqram merupakan salah satu siswa dengan mimpi yang besar untuk meraih ketidaktunggalan dalam hidupnya, dan mampu menyebarkan banyak maslahat untuk sekitar.

## Perkumpulan Petani (PP) Gapsera – Kelompok Penerima Manfaat Desa BSI <sup>[413-1]</sup>

Salah satu program yang dijalankan oleh BSI Maslahat yaitu Program Desa Berdaya Sejahtera Indonesia atau “Desa BSI”. Program ini dijalankan dengan pendekatan pemberdayaan kepada Masyarakat, salah satunya di Desa Rejo Asri yang dikelola oleh PP Gapsera. PP Gapsera memiliki sasaran sebanyak 100 KK keluarga miskin dengan rincian 93 orang KK laki-laki dan 7 (tujuh) orang KK perempuan. Anggota penerima manfaat juga dapat mengakses kepada bank sehingga diperoleh 152 NOA, dan asset yang dimiliki berkembang menjadi 4,2 Miliar.

Selain itu, program ini mampu melahirkan nilai dan jiwa sosial dari para penerima manfaat, yaitu dengan menjadi pembayar Zakat, Infak dan Sedekah melalui BSI Maslahat, dan ada sebagian disalurkan kepada masyarakat sekitar. Total zakat yang ditunaikan oleh penerima manfaat adalah 89 juta atau 20,2 ton.

Dari program Desa BSI, mampu meraih beberapa penghargaan seperti: Kalpataru untuk pertanian organik dan ramah lingkungan Tahun 2019, Duta Petani Millennial dan Duta Petani Andalan Pembangunan dari Kementan Tahun 2021, CSR Award untuk Program CSR dan Leadership, Top CSR Award Tahun 2021, dan yang terbaru adalah Indonesian SDGs Awards (ISDA) yang diselenggarakan oleh Corporate Forum for CSR Development (CFCD) meraih kategori terbaik.



## Kepatuhan Terhadap Hukum dan Peraturan [GRI 2-27, FN-CB-510a.1]

Dalam menjalankan aktivitas bisnisnya, BSI senantiasa berkomitmen untuk mematuhi regulasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sepanjang tahun 2024, BSI mendapatkan 2 (dua) pengenaan sanksi moneter yang dikenakan oleh Regulator kepada BSI yang diakibatkan oleh kesalahan pelaporan serta 3 (tiga) pengenaan sanksi moneter yang dikenakan oleh Regulator kepada BSI yang diakibatkan oleh keterlambatan penyampaian pelaporan. Selain itu, BSI juga

mendapatkan 1 (satu) sanksi administratif peringatan tertulis. Sanksi moneter yang dikenakan mengakibatkan kewajiban membayar yang harus dipenuhi oleh BSI. BSI telah melakukan tindak lanjut dengan membayar kepada Regulator sesuai dengan ketentuan. Namun demikian, sanksi moneter maupun administrasi yang dikenakan kepada BSI bukan merupakan kasus ketidakpatuhan yang signifikan.

Tabel Sanksi Moneter yang Dikenakan BSI Tahun 2024

(Dalam Rupiah Penuh)

No.	Nama Sanksi	Instansi	Jumlah Denda
1.	Kesalahan Pelaporan - Jabatan di Laporan SDM SMT	Otoritas Jasa Keuangan	600.000
2.	Kesalahan Pelaporan - Data SLIK	Otoritas Jasa Keuangan	5.500.000
3.	Keterlambatan Pelaporan - Realisasi Implementasi Produk	Otoritas Jasa Keuangan	50.000.000
4.	Keterlambatan Pelaporan - Sanksi Laporan Bank Umum Terintegrasi (LBUT)	Bank Indonesia	300.000
5.	Keterlambatan Pelaporan - Keterlambatan Pelaporan Transaksi Efek	Otoritas Jasa Keuangan	24.000.000
<b>Total</b>			<b>80.400.000</b>

Total sanksi moneter tahun 2024 mengalami penurunan signifikan dibandingkan tahun 2023 yang sebesar Rp2.169.090.000 atau menurun sebesar 96,29%.

## Pengaduan Masyarakat [OJK F.24, GRI 2-16, GRI 2-26, FN-CB-510a.2]

BSI telah menyediakan sarana pengaduan pelanggaran (*Whistleblowing System/WBS*) bagi para pemangku kepentingan untuk melaporkan adanya dugaan tindakan yang bertentangan dengan etika, integritas, dan norma-norma dan dugaan pelanggaran peraturan yang terjadi di Bank. Bank berkomitmen untuk memberikan perlindungan kepada pelapor dengan memberikan jaminan atas kerahasiaan identitas pribadi. Setiap pelaporan bersifat rahasia, dan semua laporan akan diselidiki secara menyeluruh sambil menghormati privasi dan hak semua individu yang terlibat. Dalam melaporkan dugaan tindakan penyimpangan, pelapor wajib menyampaikan informasi sesuai fakta, beritikad baik, kooperatif, serta bertanggung jawab atas laporan yang tidak sesuai fakta atau bersifat fitnah. Mekanisme pelaporan WBS telah disampaikan secara rinci pada Laporan Tahunan bagian Tata Kelola Perusahaan.

Bank menyediakan beberapa saluran pelaporan penyimpangan yaitu melalui Whatsapp/telepon/SMS: 08119146146; *E-mail* [pengaduan@bankbsi.co.id](mailto:pengaduan@bankbsi.co.id) & [antibribery@bankbsi.co.id](mailto:antibribery@bankbsi.co.id); serta melalui aplikasi GRC Kompas. Lingkup tindakan penyimpangan yang dilaporkan dalam *Whistleblowing System* telah disampaikan secara rinci dalam Laporan Tahunan bagian Tata Kelola

Perusahaan. Selama tahun 2024, BSI telah menerima sebanyak 60 pengaduan *whistleblowing system*. Atas jumlah pengaduan tersebut, 20 pengaduan sudah ditindaklanjuti, 3 (tiga) sedang ditindaklanjuti, 3 (tiga) pengaduan belum ditindaklanjuti serta 34 pengaduan tidak layak ditindaklanjuti.

Selain itu, sebagai bentuk perlindungan konsumen, Bank juga menyediakan sarana untuk nasabah menyampaikan pengaduan. Saat ini, pengaduan nasabah yang diterima Bank dikelola oleh Customer Care Group. Bank terus berkomitmen untuk memberikan respons yang cepat atas pengaduan nasabah. Selanjutnya, terkait SLA Penyelesaian Pengaduan, BSI berhasil menyelesaikan 84,69% pengaduan maksimal 4 (empat) hari kerja lebih cepat dari pada SLA Regulasi 10 hari kerja. Adapun *channel* pengaduan yang dapat digunakan nasabah untuk menyampaikan pengaduan adalah sebagai berikut:

1. BSI Call 14040.
2. BYOND by BSI
3. BSI *Mobile*
4. *E-mail* [contactus@bankbsi.co.id](mailto:contactus@bankbsi.co.id)
5. Kantor Cabang
6. Kantor Pusat

Mekanisme pengaduan mengacu yang tersedia pada *website* [bankbsi.co.id](http://bankbsi.co.id) dan *Annual Report* adalah sebagai berikut.

## Penanganan Pengaduan Nasabah Bank Syariah Indonesia



1



Nasabah menyampaikan pengaduan secara lisan melalui BSI Call 14040 dan menerima nomor pengaduan. Untuk pengaduan secara tertulis disampaikan melalui seluruh kantor cabang Bank Syariah Indonesia, Kantor Pusat, BSI Mobile, BYOND by BSI dan Email: [contactus@bankbsi.co.id](mailto:contactus@bankbsi.co.id)

2



Pengaduan nasabah akan diproses oleh unit kerja pengaduan Bank Syariah Indonesia

3



Nasabah akan menerima informasi penyelesaian pengaduan maksimal 10 hari kerja dan dapat diperpanjang selama 10 hari kerja berikutnya

### Syarat Penyampaian Pengaduan

Jenis Pengaduan	Nasabah	Perwakilan Nasabah
<p><b>Lisan</b> (BSI Call 14040)</p>	<p><b>Dokumen Pengaduan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Identitas Nasabah yang masih berlaku</li> <li>• Dokumen lainnya terkait pengaduan</li> </ul>	<p>Belum Diperkenankan</p>
<p><b>Tertulis</b> kantor cabang Bank Syariah Indonesia, Kantor Pusat, BSI Mobile, BYOND by BSI dan Email: <a href="mailto:contactus@bankbsi.co.id">contactus@bankbsi.co.id</a></p>		<p><b>Dokumen Pengaduan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Asli dan fotokopi bukti identitas perwakilan nasabah yang berlaku</li> <li>• Surat kuasa bermaterai yang menyatakan bahwa nasabah memberikan kewenangan kepada perseorangan, lembaga, atau badan hukum yang mewakilinya bertindak untuk dan atas nama nasabah</li> <li>• Dokumen lainnya terkait dengan pengaduan nasabah.</li> </ul>

"Penanganan pengaduan juga dapat disampaikan oleh Nasabah melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS), layanan mediasi Bank Indonesia ataupun Otoritas Jasa Keuangan dengan kondisi pengaduan tersebut telah terlebih dahulu diupayakan penyelesaiannya oleh Bank Syariah Indonesia."

Sepanjang tahun 2024, terdapat 359.280 pengaduan nasabah yang diterima oleh BSI dan seluruh pengaduan telah selesai ditindaklanjuti.

Tabel Pengaduan Nasabah Berdasarkan Jenis Pengaduan

Jenis Pengaduan	2024		2023		2022	
	Jumlah	Status Penyelesaian	Jumlah	Status Penyelesaian	Jumlah	Status Penyelesaian
Kejahatan Eksternal	8.390	Selesai	5.150	Selesai	5.988	Selesai
Layanan	-	-	1.118	Selesai	847	Selesai
Produk	12.357	Selesai	28.461	Selesai	3.862	Selesai
Proses/Transaksi dan Fasilitas	338.533	Selesai	435.122	Selesai	324.993	Selesai
<b>Total</b>	<b>359.280</b>	<b>Selesai</b>	<b>469.851</b>	<b>Selesai</b>	<b>335.690</b>	<b>Selesai</b>

## Privasi dan Keamanan Data Nasabah

[GRI 418-1, FN-CB-230a.1, FN-CB-230a.2]

BSI menyadari bahwa era digitalisasi semakin memberikan kemudahan untuk mengakses informasi. Kemudahan akses juga dapat meningkatkan potensi risiko kebocoran atau penyalahgunaan data. Keamanan data nasabah menjadi aspek yang sangat penting untuk dikelola dengan baik sehingga dapat meningkatkan kepercayaan nasabah.

Sebagai bentuk komitmen BSI untuk melindungi data pribadi nasabah, BSI telah memiliki Kebijakan Privasi Kebijakan Privasi PT Bank Syariah Indonesia Tbk yang mengatur ketentuan terkait pemerolehan dan pengumpulan, pengolahan dan penganalisisan, penyimpanan, perbaikan dan pembaruan, penampilan, pengumuman, transfer, penyebarluasan, pengungkapan, penghapusan atau pemusnahan data nasabah termasuk didalamnya data pribadi nasabah oleh BSI. Kebijakan Privasi ini mengacu pada Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah beserta perubahannya, dan peraturan

perundang-undangan lainnya di bidang pelindungan data pribadi dan jasa keuangan, serta regulasi yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Bank Indonesia. Komitmen BSI dalam pengelolaan data nasabah juga tercermin dari telah dimilikinya ISO/IEC 27001:2022 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi.

Sebagai upaya untuk melindungi Data Pribadi Nasabah, BSI telah menerapkan standarisasi pengamanan data untuk menjamin keutuhan dan keakuratan Data Pribadi serta memastikan bahwa data tersebut tidak akan dicegat, diakses, diungkapkan, diubah, atau dihancurkan oleh pihak lain yang tidak berwenang, termasuk melakukan mitigasi risiko keamanan akan kemungkinan faktor-faktor di luar kendali BSI. BSI juga telah memiliki tim khusus yaitu Data Protection Group yang bertanggung jawab atas privasi data nasabah. BSI membangun program yang efektif dengan 5 (lima) komponen dasar kerangka kerja Pelindungan Data dan Privasi yang kuat. BSI senantiasa meningkatkan strategi dengan pendekatan multi-segi termasuk tata kelola privasi data, siklus pemrosesan data, dan proses pelindungan data (menilai, melindungi, merespons, dan mempertahankan).



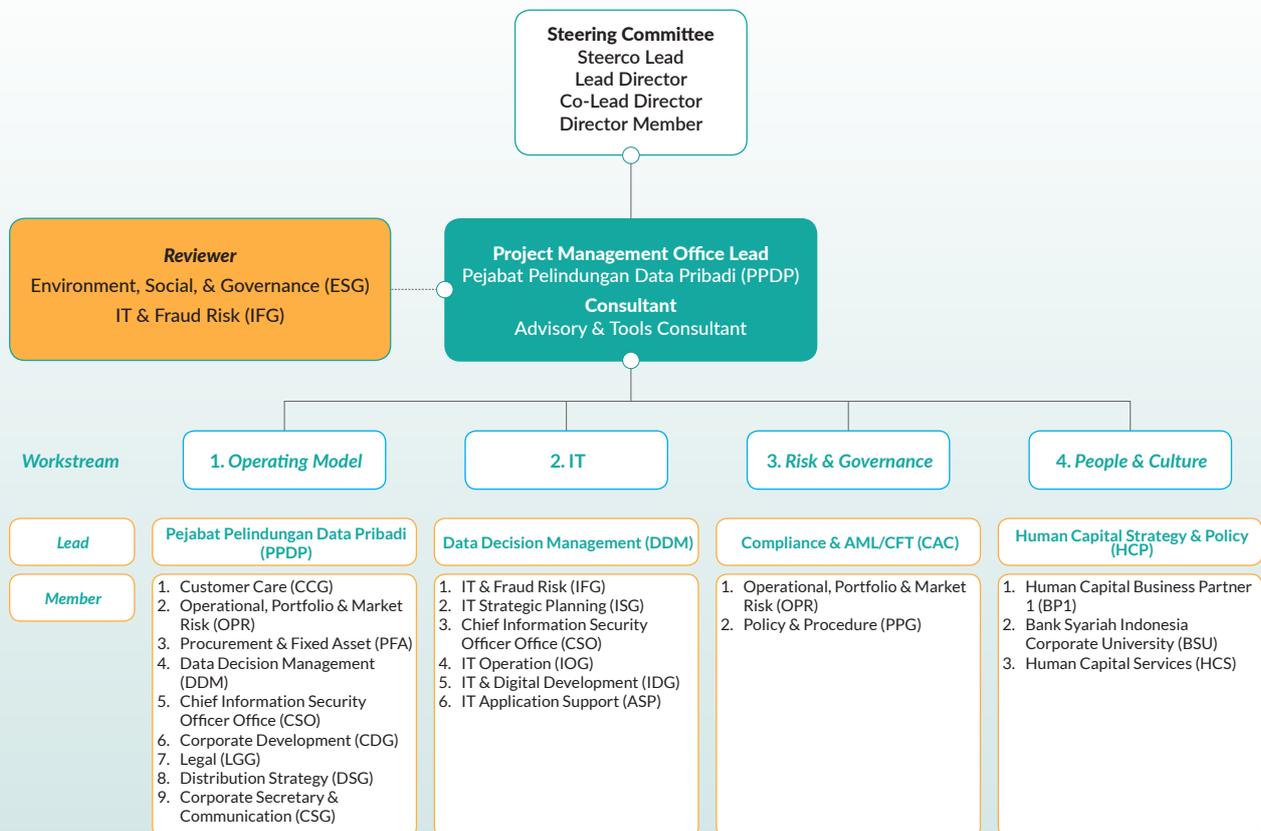
Atas komitmen tersebut, selama tahun 2024, tidak terdapat pengaduan terkait kehilangan data nasabah yang berdampak material serta tidak ada pelanggaran terhadap privasi nasabah. Bila terdapat pengaduan dari nasabah yang terkait dengan *cybersecurity*, BSI akan memvalidasi laporan tersebut untuk dilakukan eskalasi ke Kementerian Komunikasi dan Informatika (KOMINFO). Selain itu, Bank juga bekerja sama dengan pihak ketiga untuk memonitor privasi nasabah dan akan dilaporkan secara berkala ke KOMINFO.

Sesuai dengan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), BSI sebagai pengendali dan pemroses data pribadi memiliki kewajiban hukum antara lain:

1. Memiliki dasar pemrosesan Data Pribadi.
2. Melakukan perekaman seluruh kegiatan pemrosesan Data Pribadi.
3. Melindungi dan memastikan keamanan serta menjaga kerahasiaan Data Pribadi.
4. Menunjuk Pejabat atau Petugas Pelindungan Data Pribadi.
5. Melakukan penilaian dampak Pelindungan Data Pribadi yang memiliki potensi risiko tinggi.
6. Melakukan pemrosesan Data Pribadi secara terbatas dan spesifik, sah secara hukum & transparan, serta sesuai dengan tujuan pemrosesan.
7. Menunjukkan bukti persetujuan Subjek Data Pribadi.

BSI berkomitmen untuk dapat memenuhi kewajiban hukum tersebut dengan melakukan *gap assessment* secara berkala untuk mengukur kepatuhan terhadap UU PDP. Sebagai tindak lanjut atas pemenuhan kepatuhan terhadap UU PDP, BSI telah membentuk Project Management Office (PMO) pada bulan Februari 2024. Kemudian untuk melakukan penguatan tata kelola dan struktur organisasi, maka Direksi membentuk Pejabat Pelindungan Data Pribadi (PPDP). Penunjukkan PPDP telah tercantum dalam Surat Keputusan Direksi 03/219-KEP/DIR tanggal 6 Juni 2024 tentang Pembentukan ESG Group di bawah supervisi Wakil Direktur Utama & Penunjukkan Pejabat Pelindungan Data Pribadi (PPDP) di bawah supervisi Direktur Kepatuhan & SDM. Dan, pada bulan September 2024, Direksi melalui Surat Keputusan Direksi No.04/425-KEP/DIR tanggal 17 September 2024 tentang Struktur Organisasi PT Bank Syariah Indonesia Tbk. memutuskan membentuk Unit Kerja Data Protection (DPR) yang merupakan perubahan nama dari Pejabat Perlindungan Data Pribadi (PPDP). Sejalan dengan hal tersebut, BSI juga telah melakukan penguatan tata kelola Teknologi Informasi dan manajemen risiko yang ditujukan agar pemenuhan atas kewajiban hukum yang telah diatur dalam UU PDP bisa tercapai di tahun 2025.

### Struktur Tata Kelola PMO



# Tanggung Jawab Pengembangan Produk dan/atau Jasa Keberlanjutan

## Inovasi dan Pengembangan Produk/Jasa Keuangan Berkelanjutan [OJK F.26]

Pada tahun 2024, BSI telah menerbitkan instrumen ESG sukuk pertama di Indonesia berupa *Sustainability Sukuk* BSI atau Sukuk Mudharabah Keberlanjutan. Penerbitan instrumen ESG merupakan wujud komitmen BSI untuk terlibat aksi mitigasi perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan melalui program dan pembiayaan *sustainable financing*. Bank siap mendorong transisi menuju *green economy* melalui implementasi instrumen keuangan syariah yang fokus terhadap ESG. Efek syariah dengan aset (kegiatan usaha) yang menjadi dasar (*underlying* sukuk) ini adalah pembiayaan dengan kategori Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan (KUBL) dan Kegiatan Usaha Berwawasan Sosial (KUBS). Instrumen ini akan memberikan *values* berbeda bagi investor yakni memberikan manfaat besar dari sisi ekonomi, sosial maupun lingkungan. *Sustainability Sukuk* menggabungkan kegiatan usaha ramah lingkungan dan berwawasan sosial sehingga mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan sekaligus dapat mendorong pencapaian target kontribusi pembiayaan berkelanjutan yang ditentukan secara nasional.

Selain itu, pada tahun 2024 BSI juga meluncurkan SuperApps BYOND by BSI. Aplikasi BYOND by BSI merupakan aplikasi terbaru yang menawarkan kemudahan transaksi finansial, sosial, dan spiritual bagi para penggunanya. BYOND by BSI didukung oleh teknologi dan infrastruktur IT yang sangat kuat. Dengan fokus pada pengembangan teknologi baru, peningkatan keamanan siber, dan infrastruktur yang terintegrasi, BYOND dapat memberikan layanan yang lebih baik dan lebih aman untuk penggunanya. Hal ini mencakup upaya untuk menjaga sistem tetap mutakhir, memastikan data pengguna terlindungi dengan baik, dan memanfaatkan teknologi terbaru untuk mendukung performa dan keandalan *platform*. Keamanan siber menjadi aspek krusial dalam menjaga integritas data dan transaksi yang dilakukan di *platform* tersebut. Oleh karenanya, BSI terus melakukan inovasi dan transformasi IT untuk meningkatkan keamanan data nasabah.

## Produk/Jasa yang Sudah Dievaluasi Keamanannya Bagi Pelanggan [OJK F.27. GRI 417-1, 417-2, 417-3]

BSI senantiasa melakukan evaluasi keamanan pada seluruh produk dan layanan yang ditawarkan kepada nasabah. Seluruh produk dan layanan BSI telah memenuhi persyaratan dan telah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sehingga

telah teruji keamanannya bagi nasabah. Sesuai Standar Prosedur Operasional Produk dan/atau Aktivitas Baru (SPO PAB), BSI memberikan informasi yang jelas terhadap produk dan layanan yang ditawarkan, seperti informasi produk simpanan, pinjaman, dan jasa perbankan. Informasi tersebut disampaikan melalui beberapa media komunikasi seperti *website*, media sosial, brosur, dan sebagainya serta melalui *customer service* dan agen-agen perbankan BSI. Selain itu, Group Marketing Communication juga mengembangkan strategi dan program komunikasi pemasaran yang mengacu pada etika periklanan. Unit kerja ini turut memantau isu di media terkait produk dan layanan Bank untuk memitigasi risiko komunikasi produk dan layanan.

Sepanjang tahun 2024, tidak terdapat insiden ketidakpatuhan terhadap peraturan yang menyangkut pelabelan dan informasi produk dan jasa Perusahaan yang menghasilkan denda/hukuman dan peringatan. Tidak terdapat juga insiden ketidakpatuhan terhadap peraturan yang menyangkut komunikasi pemasaran, termasuk periklanan, promosi, dan pensponsoran.

## Dampak Produk/Jasa [OJK F.28]

BSI senantiasa mempertimbangkan dampak dan risiko yang mungkin timbul dari produk dan jasa yang diluncurkan guna menjaga kualitas produk dan layanan. Salah satu dampak positif dari produk dan layanan Bank adalah penyaluran pembiayaan berkelanjutan atau usaha berwawasan lingkungan. Dalam hal ini, penyaluran pembiayaan kepada sektor-sektor usaha yang memenuhi prinsip Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan (KKUB). Dengan penyaluran pembiayaan ini, BSI secara tidak langsung turut berperan dalam pelestarian lingkungan dan penanganan perubahan iklim. Selain itu, produk dan layanan Bank juga memberikan dampak positif bagi pelaku usaha dalam memberdayakan masyarakat, sehingga dapat mendukung peningkatan perekonomian masyarakat.

Meskipun demikian, BSI telah mengidentifikasi adanya potensi dampak negatif dari produk dan layanan yang diluncurkan. Salah satu potensi dampak negatif yang diidentifikasi adalah kesalahan maupun kelalaian BSI dalam pemrosesan data pribadi nasabah. Untuk mengantisipasi hal tersebut, BSI telah menetapkan Kebijakan Privasi guna melindungi setiap data nasabah, termasuk Data Pribadi yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, baik secara tersendiri maupun yang dikombinasikan dengan informasi lainnya, baik melalui sistem elektronik maupun non-elektronik. Selain itu, BSI juga telah menyediakan informasi yang jelas dan lengkap mengenai setiap produk dan layanan yang ditawarkan, yang disampaikan secara transparan kepada calon nasabah.

## Jumlah Produk yang Ditarik Kembali

[OJK F.29]

BSI terus berkomitmen untuk memberikan produk dan layanan yang berkualitas kepada nasabah. Produk dan layanan BSI telah memberikan kinerja yang baik sehingga tidak terdapat produk yang ditarik kembali di sepanjang tahun 2024.

## Survei Kepuasan Pelanggan Terhadap Produk dan/atau Jasa

[OJK F.30]

BSI secara berkala melakukan survei kepuasan nasabah yang bertujuan untuk mengetahui tingkat kepuasan, kesetiaan dan keterlibatan pelanggannya dalam periode tahun tersebut. BSI senantiasa berupaya untuk meningkatkan kualitas layanan dan memperkuat hubungan dengan pelanggan, yang akan berdampak positif pada kinerja dan pertumbuhan bisnis secara keseluruhan. Pada tahun 2024, indeks *Satisfaction, Loyalty, and Engagement* (SLE) tahun 2024 menunjukkan nilai 64,91% dengan kategori “*Engaged*”, meningkat dibandingkan dengan tahun 2023 menunjukkan nilai 60,60% dengan kategori “*Rationally Royal*”.

Tabel Survei Kepuasan Pelanggan

Keterangan	Kepuasan Nasabah (Dalam Persen)					
	2024		2023		2022	
	Skor	Keterangan	Skor	Keterangan	Skor	Keterangan
<i>Satisfaction, Loyalty, and Engagement (SLE) Index</i>	64,91%	<i>Engaged</i>	60,60%	<i>Rationally Royal</i>	52,50%	<i>Rationally Royal</i>

## Verifikasi Tertulis dari

Pihak Independen [OJK G.1, GRI 2-5]

BSI senantiasa terus meningkatkan kualitas laporan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.51/POJK.03/2017, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 16/SEOJK.04/2021, dan Consolidated Set of GRI Standard 2021. Laporan Keberlanjutan ini telah di verifikasi oleh pihak independen yang kompeten

dalam bidangnya. BSI telah menunjuk PT BSI Group Indonesia untuk melakukan verifikasi Laporan Keberlanjutan ini. Proses verifikasi ini menggunakan AA1000 Assurance Standard v3 Type 2 Moderate level of Assurance. BSI senantiasa memastikan bahwa tidak terdapat benturan kepentingan dalam proses verifikasi laporan ini.

# Lembar Umpan Balik [OJK G.2 GRI 2-26]

PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) menerbitkan Laporan Keberlanjutan Tahun Buku 2024 untuk memberikan gambaran atas kinerja keberlanjutan dan penerapan keuangan berkelanjutan kepada pemangku kepentingan. Kami mengharapkan masukan, kritik dan saran dari Bapak/Ibu/Saudara setelah membaca Laporan Keberlanjutan ini dengan mengirim *e-mail* atau mengirim formulir ini melalui pos.

**1. Mohon beri tanda ceklis (✓) pada kolom setuju atau tidak setuju**

Pertanyaan	Setuju	Tidak Setuju
Laporan ini telah memberikan informasi yang bermanfaat mengenai kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan Perusahaan.		
Data dan informasi yang diungkapkan mudah dipahami, lengkap, transparan, dan berimbang.		
Data dan informasi yang disajikan berguna dalam pengambilan keputusan.		
Laporan ini menarik dan mudah dibaca.		

**2. Mohon berikan nilai mengenai topik material yang terdapat dalam laporan Keberlanjutan ini (nilai 1 = paling penting, 2 = penting, 3 = tidak penting, 4 = sangat tidak penting).**

Kinerja Ekonomi

Portofolio Produk dan Jasa

Privasi Nasabah

**3. Mohon berikan komentar/saran/usulan bagi laporan ini.**

.....  
 .....  
 .....

**Identitas Pemangku Kepentingan**

Nama : .....  
 Pekerjaan : .....  
 Institusi/Perusahaan : .....  
 Kontak (telepon, *e-mail*) : .....

**Kategori Pemangku Kepentingan**

Pemegang Saham dan investor

Media

Pelanggan

Mitra Usaha

Karyawan

Masyarakat dan Komunitas

Pemerintah

Lainnya, mohon sebutkan:  
 .....

Saran dan tanggapan yang Anda berikan atas informasi yang disajikan dalam laporan ini mohon dikirimkan kepada:

**Rima Dwi Permatasari**  
**Senior Vice President**  
**Environmental Social & Governance Group**  
**PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI)**

**Head Office**  
 Gedung The Tower  
 Jl. Gatot Subroto No. 27 Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan  
 Setiabudi, Jakarta Selatan 12930  
 Telepon : +62 21 30405999  
 Fax : +62 21 30421888  
 Email : esg.group@bankbsi.co.id

# Tanggapan Terhadap Umpan Balik

## Laporan Keberlanjutan Tahun 2023 [OJK G.3]

Sepanjang tahun 2024, BSI tidak menerima tanggapan atau masukan terhadap isi Laporan Keberlanjutan periode sebelumnya. Oleh karenanya, tidak terdapat pula informasi tindak lanjut atas tanggapan tersebut.

# Daftar Pengungkapan Sesuai Peraturan

## Otoritas Jasa Keuangan

### Nomor 51/POJK.03/2017 [OJK G.4]

No Indeks	Nama Indeks	Halaman
<b>A</b>	<b>STRATEGI KEBERLANJUTAN</b>	
A.1	Penjelasan Strategi Keberlanjutan	14
<b>B</b>	<b>IKHTISAR KINERJA ASPEK KEBERLANJUTAN</b>	
B.1	Aspek Ekonomi	32
B.2	Aspek Lingkungan Hidup	34
B.3	Aspek Sosial	36
<b>C</b>	<b>PROFIL PERUSAHAAN</b>	
C.1	Visi, Misi, dan Nilai Keberlanjutan	40
C.2	Alamat Perusahaan	44
C.3	Skala Usaha	46, 50
C.4	Produk, Layanan dan Kegiatan Usaha yang Dijalankan	51
C.5	Keanggotaan Asosiasi	52
C.6	Perubahan Emiten dan Perusahaan Publik yang Bersifat Signifikan	53
<b>D</b>	<b>PENJELASAN DIREKSI</b>	
D.1	Penjelasan Direksi	54
<b>E</b>	<b>TATA KELOLA KEBERLANJUTAN</b>	
E.1	Penanggung Jawab Penerapan Keuangan Berkelanjutan	68
E.2	Pengembangan Kompetensi terkait Keuangan Berkelanjutan	71
E.3	Penilaian Risiko atas Penerapan Keuangan Berkelanjutan	77
E.4	Hubungan dengan Pemangku Kepentingan	80
E.5	Permasalahan terhadap Penerapan Keuangan Berkelanjutan	81
<b>F</b>	<b>KINERJA KEBERLANJUTAN</b>	
F.1	Kegiatan Membangun Budaya Keberlanjutan	84
	<b>KINERJA EKONOMI</b>	
F.2	Perbandingan Target dan Kinerja Produksi, Portofolio, Target Pembiayaan, atau Investasi, Pendapatan dan Laba Rugi	85
F.3	Perbandingan Target dan Kinerja Portofolio, Target Pembiayaan, atau Investasi pada Instrumen Keuangan atau Proyek yang Sejalan dengan Keuangan Berkelanjutan	87

No Indeks	Nama Indeks	Halaman
	<b>KINERJA LINGKUNGAN HIDUP</b>	
	<b>Aspek Umum</b>	
F.4	Biaya Lingkungan Hidup	103
	<b>Aspek Material</b>	
F.5	Penggunaan Material yang Ramah Lingkungan	103
	<b>Aspek Energi</b>	
F.6	Jumlah dan Intensitas Energi yang Digunakan	103
F.7	Upaya dan Pencapaian Efisiensi Energi dan Penggunaan Energi Terbarukan	105
	<b>Aspek Air</b>	
F.8	Penggunaan Air	106
	<b>Aspek Keanekaragaman Hayati</b>	
F.9	Dampak dari Wilayah Operasional yang Dekat atau Berada di Daerah Konservasi atau Memiliki Keanekaragaman Hayati	108
F.10	Usaha Konservasi Keanekaragaman Hayati	108
	<b>Aspek Emisi</b>	
F.11	Jumlah dan Intensitas Emisi yang Dihasilkan Berdasarkan Jenisnya	109
F.12	Upaya dan Pencapaian Pengurangan Emisi yang Dilakukan	111
	<b>Aspek Limbah dan Efluen</b>	
F.13	Jumlah Limbah dan Efluen yang Dihasilkan Berdasarkan Jenis	112
F.14	Mekanisme Pengelolaan Limbah dan Efluen	112
F.15	Tumpahan yang Terjadi (jika ada)	112
	<b>Aspek Pengaduan Terkait Lingkungan Hidup</b>	
F.16	Jumlah dan Materi Pengaduan Lingkungan Hidup yang Diterima dan Diselesaikan	114
	<b>KINERJA SOSIAL</b>	
F.17	Komitmen untuk Memberikan Layanan atas Produk dan/atau Jasa yang Setara kepada Konsumen	114
	<b>Aspek Ketenagakerjaan</b>	
F.18	Kesetaraan Kesempatan Bekerja	118
F.19	Tenaga Kerja Anak dan Tenaga Kerja Paksa	125
F.20	Upah Minimum Regional	125
F.21	Lingkungan Bekerja yang Layak dan Aman	127
F.22	Pelatihan dan Pengembangan Kemampuan Pegawai	121
	<b>Aspek Masyarakat</b>	
F.23	Dampak Operasi Terhadap Masyarakat Sekitar	132
F.24	Pengaduan Masyarakat	
F.25	Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL)	132
	<b>TANGGUNG JAWAB PENGEMBANGAN PRODUK/JASA BERKELANJUTAN</b>	
F.26	Inovasi dan Pengembangan Produk/Jasa Keuangan Berkelanjutan	142
F.27	Produk/Jasa yang Sudah Dievaluasi Keamanannya bagi Pelanggan	142
F.28	Dampak Produk/Jasa	142
F.29	Jumlah Produk yang Ditarik Kembali	143
F.30	Survei Kepuasan Pelanggan Terhadap Produk dan/atau Jasa Keuangan Berkelanjutan	143
G	<b>LAIN-LAIN:</b>	
G.1	Verifikasi Tertulis dari Pihak Independen (jika ada)	143
G.2	Lembar Umpan Balik	144
G.3	Tanggapan Terhadap Umpan Balik Laporan Keberlanjutan Tahun Sebelumnya	145
G.4	Daftar Pengungkapan Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik.	145

# Indeks Isi

## Consolidated Set of GRI Standard

Indeks Isi Standar GRI	Pengungkapan	Hal	yang Tidak Dicantumkan			No. Rujukan Standar Sektor GRI
			Persyaratan yang Tidak Dicantumkan	Alasan	Penjelasan	
<b>Pernyataan Penggunaan</b>	PT Bank Syariah Indonesia Tbk telah melaporkan informasi yang dikutip dalam indeks konten GRI untuk periode 1 Januari 2024 hingga 31 Desember 2024 sesuai dengan ("in accordance") pada Consolidated Set of GRI Standard					
<b>GRI</b>	<b>GRI 1: LANDASAN 2021</b>					
<b>Standar Sektor GRI yang berlaku</b>	<b>G4 Suplemen Sektor Keuangan</b>					
<b>GRI 2: PENGUNGKAPAN UMUM 2021</b>	<b>Organisasi dan Praktik Pelaporan</b>					
	GRI 2-1	Detail organisasi	44, 50			
	GRI 2-2	Entitas yang termasuk dalam pelaporan keberlanjutan	8			
	GRI 2-3	Periode pelaporan, frekuensi dan titik kontak	8			
	GRI 2-4	Informasi tentang penyajian kembali	8			
	GRI 2-5	Jaminan Eksternal	143			
	<b>Aktivitas dan Pekerja</b>					
	GRI 2-6	Aktivitas, rantai pasok, dan relasi bisnis lainnya	44, 51, 52			
	GRI 2-7	Karyawan	46			
	GRI 2-8	Pekerja yang bukan karyawan	46, 50			
	<b>Tata Kelola</b>					
	GRI 2-9	Struktur dan komposisi tata kelola	64, 68			
	GRI 2-10	Nominasi dan pemilihan badan tata kelola tertinggi	66			
	GRI 2-11	Ketua badan tata kelola tertinggi	64			
	GRI 2-12	Peran badan tata kelola tertinggi dalam mengawasi pengelolaan dampak	68			
	GRI 2-13	Pendelegasian tanggung jawab untuk mengelola dampak	68			
	GRI 2-14	Peran badan tata kelola tertinggi dalam pelaporan keberlanjutan	60			
	GRI 2-15	Benturan kepentingan	65			
	GRI 2-16	Komunikasi hal-hal penting	138			
	GRI 2-17	Pengetahuan kolektif dari badan tata kelola tertinggi	71			
	GRI 2-18	Evaluasi kinerja badan tata kelola tertinggi	66			
	GRI 2-19	Kebijakan remunerasi	67			
	GRI 2-20	Proses untuk menentukan remunerasi	67			
	GRI 2-21	Rasio kompensasi total tahunan	67			

Indeks Isi Standar GRI	Pengungkapan	Hal	yang Tidak Dicantumkan			No. Rujukan Standar Sektor GRI
			Persyaratan yang Tidak Dicantumkan	Alasan	Penjelasan	
<b>Strategi, Kebijakan, dan Praktik</b>						
GRI 2-22	Pernyataan tentang strategi pembangunan berkelanjutan	54				
GRI 2-23	Komitmen kebijakan	25				
GRI 2-24	Menanamkan komitmen kebijakan	25				
GRI 2-25	Proses untuk memulihkan dampak negatif	28				
GRI 2-26	Mekanisme pemberian umpan balik/saran dan menyampaikan kekhawatiran	53, 138, 144				
GRI 2-27	Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan	138				
GRI 2-28	Keanggotaan asosiasi	52				
<b>Keterlibatan Pemangku Kepentingan</b>						
GRI 2-29	Pendekatan keterlibatan pemangku kepentingan	80				
GRI 2-30	Perjanjian kerja bersama	124				
GRI 3: TOPIK MATERIAL 2021	GRI 3-1	Proses menentukan topik material	9			
	GRI 3-2	Daftar topik material	9			
	GRI 3-3	Manajemen topik material	9			
<b>TOPIK EKONOMI</b>						
<b>KINERJA EKONOMI</b>						
GRI 201: Kinerja Ekonomi 2016	GRI 201-1	Nilai ekonomi langsung yang dihasilkan dan didistribusikan	95			
	GRI 201-2	Implikasi finansial serta risiko dan peluang lain akibat perubahan iklim	19, 103			
	GRI 201-3	Kewajiban program pensiun manfaat pasti dan program pensiun lainnya	96			
	GRI 201-4	Bantuan finansial yang diberikan dari pemerintah	96			
<b>KEBERADAAN PASAR</b>						
GRI 202: Keberadaan Pasar 2016	GRI 202-1	Rasio standar upah karyawan pemula berdasarkan jenis kelamin terhadap upah minimum regional	125			
	GRI 202-2	Proporsi manajemen senior yang berasal dari masyarakat setempat	118			
<b>DAMPAK EKONOMI TIDAK LANGSUNG</b>						
GRI 203: Dampak Ekonomi Tidak Langsung 2016	GRI 203-1	Investasi infrastruktur dan dukungan layanan	132			
	GRI 203-2	Dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan	132			

Indeks Isi Standar GRI	Pengungkapan	Hal	yang Tidak Dicantumkan			No. Rujukan Standar Sektor GRI
			Persyaratan yang Tidak Dicantumkan	Alasan	Penjelasan	
<b>PRAKTIK PENGADAAN</b>						
GRI 204: Praktik Pengadaan 2016	GRI 204-1	Proporsi pengeluaran untuk pemasok lokal	97			
<b>ANTI KORUPSI</b>						
GRI 205: Anti Korupsi 2016	GRI 205-1	Operasi-operasi yang dinilai memiliki risiko terkait korupsi	98			
	GRI 205-2	Komunikasi dan pelatihan tentang kebijakan dan prosedur anti korupsi	100			
	GRI 205-3	Insiden korupsi yang terbukti dan tindakan yang diambil	102			
<b>TOPIK LINGKUNGAN</b>						
<b>ENERGI</b>						
GRI 302: Energi 2016	GRI 302-1	Konsumsi energi di dalam organisasi	103			
	GRI 302-2	Konsumsi energi di luar organisasi	103			
	GRI 302-3	Intensitas energi	103			
	GRI 302-4	Reduksi konsumsi energi	105			
	GRI 302-5	Pengurangan kebutuhan energi dari produk dan jasa	105			
<b>EMISI</b>						
GRI 305: Emisi 2016	GRI 305-1	Emisi GRK Langsung (Cakupan 1)	109			
	GRI 305-2	Energi tidak langsung (Cakupan 2) Emisi GRK	109			
	GRI 305-3	Emisi GRK (Cakupan 3) tidak langsung lainnya	109			
	GRI 305-4	Intensitas Emisi GRK	109			
	GRI 305-5	Pengurangan emisi GRK	111			
	GRI 305-6	Emisi zat perusak ozon (BPO)	112			
	GRI 305-7	Nitrogen oksida (NOx), sulfur oksida (SOx), dan emisi udara signifikan lainnya	112			
<b>LIMBAH</b>						
GRI 306: Limbah 2020	GRI 306-1	Timbulan limbah dan dampak signifikan terkait limbah	112			
	GRI 306-2	Pengelolaan dampak signifikan terkait limbah	112			
	GRI 306-3	Limbah yang dihasilkan	112			
	GRI 306-4	Limbah dialihkan dari pembuangan	112			
	GRI 306-5	Limbah diarahkan ke pembuangan	112			

Indeks Isi Standar GRI	Pengungkapan	Hal	yang Tidak Dicantumkan			No. Rujukan Standar Sektor GRI
			Persyaratan yang Tidak Dicantumkan	Alasan	Penjelasan	
<b>TOPIK SOSIAL</b>						
<b>KEPEGAWAIAN</b>						
GRI 401: Kepegawaian 2016	GRI 401-1	Perekrutan karyawan baru dan perputaran karyawan	119			
	GRI 401-2	Tunjangan yang diberikan kepada karyawan tetap yang tidak diberikan kepada karyawan sementara atau paruh waktu	125			
	GRI 401-3	Cuti Melahirkan	125			
<b>HUBUNGAN TENAGA KERJA/MANAJEMEN</b>						
GRI 402: Hubungan Tenaga Kerja/Manajemen 2016	GRI 402-1	Periode pemberitahuan minimum terkait perubahan operasional	124			
<b>KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA</b>						
GRI 403: Kesehatan dan Keselamatan Kerja 2018	GRI 403-1	Sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja	128			
	GRI 403-2	Identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan investigasi insiden	128			
	GRI 403-3	Layanan kesehatan kerja	129			
	GRI 403-4	Partisipasi pekerja, konsultasi, dan komunikasi tentang kesehatan dan keselamatan kerja	129			
	GRI 403-5	Pelatihan pekerja tentang kesehatan dan keselamatan kerja	130			
	GRI 403-6	Peningkatan kualitas kesehatan kerja	129			
	GRI 403-7	Pencegahan dan mitigasi dampak-dampak keselamatan dan kesehatan kerja yang secara langsung terkait dengan hubungan bisnis	128			
	GRI 403-8	Pekerja yang tercakup dalam sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja	128			
	GRI 403-9	Kecelakaan kerja	130			
	GRI 403-10	Penyakit akibat kerja	130			
<b>PELATIHAN DAN PENDIDIKAN</b>						
GRI 404: Pelatihan dan Pendidikan 2016	GRI 404-1	Rata-rata jam pelatihan per tahun per karyawan	97, 121			
	GRI 404-2	Program untuk meningkatkan keterampilan karyawan dan program bantuan peralihan	121			
	GRI 404-3	Persentase karyawan yang menerima tinjauan rutin terhadap kinerja dan pengembangan karir	121			

Indeks Isi Standar GRI	Pungkapan	Hal	yang Tidak Dicantumkan			No. Rujukan Standar Sektor GRI
			Persyaratan yang Tidak Dicantumkan	Alasan	Penjelasan	
<b>KEBERAGAMAN DAN KESETARAAN KESEMPATAN</b>						
GRI 405: Keberagaman dan Kesetaraan Kesempatan 2016	GRI 405-1	Keberagaman badan tata kelola dan karyawan	118, 119			
	GRI 405-2	Rasio gaji pokok dan remunerasi perempuan terhadap laki-laki	118, 125			
<b>HAK MASYARAKAT ADAT</b>						
GRI 411: Hak Masyarakat Adat 2016	GRI 411-1	Insiden pelanggaran yang melibatkan hak-hak masyarakat adat	132			
<b>MASYARAKAT LOKAL</b>						
GRI 413: Masyarakat Lokal 2016	GRI 413-1	Operasi dengan keterlibatan masyarakat lokal, penilaian dampak, dan program pengembangan	132, 137			
	GRI 413-2	Operasi yang secara aktual dan yang berpotensi memiliki dampak negatif signifikan terhadap masyarakat setempat	132			
<b>KESEHATAN DAN KESELAMATAN PELANGGAN</b>						
GRI 416: Kesehatan dan Keselamatan Pelanggan 2016	GRI 416-1	Penilaian dampak kesehatan dan keselamatan dari berbagai kategori produk dan jasa	114			
<b>PEMASARAN DAN PELABELAN</b>						
GRI 417: Pemasaran dan Pelabelan 2016	GRI 417-1	Persyaratan untuk pelabelan dan informasi produk dan jasa	142			
	GRI 417-2	Insiden ketidakpatuhan sehubungan dengan dampak kesehatan dan keselamatan dari produk dan jasa	142			
	GRI 417-3	Insiden ketidakpatuhan terkait komunikasi pemasaran	142			
<b>PRIVASI PELANGGAN</b>						
GRI 418: Privasi Pelanggan 2016	GRI 418-1	Pengaduan yang berdasar mengenai pelanggaran terhadap privasi pelanggan dan hilangnya data pelanggan	28, 140			

Indeks Isi Standar GRI	Pengungkapan	Hal	yang Tidak Dicantumkan			No. Rujukan Standar Sektor GRI
			Persyaratan yang Tidak Dicantumkan	Alasan	Penjelasan	
<b>G4 SUPLEMEN SEKTOR KEUANGAN</b>						
G4 Suplemen Sektor Keuangan	FS1	Kebijakan dengan komponen lingkungan dan sosial yang spesifik yang diaplikasikan pada lini bisnis.	14			
	FS2	Prosedur untuk memeriksa dan menyaring risiko lingkungan dan sosial pada lini bisnis.	77			
	FS3	Proses untuk memonitor implementasi dan kepatuhan klien terhadap persyaratan lingkungan dan sosial, termasuk dalam perjanjian atau transaksi	87			
	FS4	Proses untuk meningkatkan kompetensi staf untuk menerapkan kebijakan dan prosedur lingkungan dan sosial sebagaimana diterapkan pada lini bisnis.	71			
	FS5	Interaksi dengan klien/penanam modal/mitra bisnis terkait risiko serta kesempatan terkait lingkungan dan sosial.	80			
	FS6	Persentase dari portofolio untuk lini bisnis menurut wilayah, menurut ukuran (contoh: mikro/SME/besar), dan menurut sektor.	87			
	FS7	Nilai moneter dari produk dan layanan yang dirancang untuk memberikan keuntungan sosial yang spesifik untuk setiap lini bisnis.	87			
	FS8	Nilai moneter dari produk dan layanan yang dirancang untuk memberikan keuntungan lingkungan yang spesifik untuk setiap lini bisnis.	87			
	FS9	Cakupan dan frekuensi audit serta prosedur penilaian risiko	25			
	FS10	Persentase dan jumlah perusahaan yang dimiliki dalam portofolio institusi yang telah berinteraksi dengan organisasi yang melaporkan tentang isu lingkungan atau sosial	87			
	FS13	Titik akses di daerah berpenduduk rendah atau kurang beruntung secara ekonomi berdasarkan jenis.	114			
	FS14	Inisiatif untuk meningkatkan akses ke layanan keuangan bagi orang-orang yang kurang beruntung.	114			
	FS15	Kebijakan untuk rancangan dan penjualan produk dan layanan yang adil.	114			
	FS16	Inisiatif untuk meningkatkan literasi keuangan berdasarkan jenis atau penerima manfaat.	114			

# Sustainability Accounting Standard Board (SASB) Standards Commercial Bank

TOPIC	METRIC	INDEX	HALAMAN
<b>SUSTAINABILITY DISCLOSURE TOPICS &amp; METRICS</b>			
Data Security	(1) Number of data breaches, (2) percentage that are personal data breaches, (3) number of account holders affected	FN-CB-230a.1	140
	Description of approach to identifying and addressing data security risks	FN-CB-230a.2	140
Financial Inclusion & Capacity Building	Number of participants in financial literacy initiatives for unbanked, underbanked, or underserved customers	FN-CB-240a.4	114
Incorporation of Environmental, Social, and Governance Factors in Credit Analysis	Description of approach to incorporation of environmental, social and governance (ESG) factors in credit analysis	FN-CB-410a.2	87
Financed Emissions	Absolute gross financed emissions, disaggregated by (1) Scope 1, (2) Scope 2 and (3) Scope 3	FN-CB-410b.1	109
	Gross exposure for each industry by asset class	FN-CB-410b.2	109
	Percentage of gross exposure included in the financed emissions calculation	FN-CB-410b.3	109
	Description of the methodology used to calculate financed emissions	FN-CB-410b.4	109
Business Ethics	Total amount of monetary losses as a result of legal proceedings associated with fraud, insider trading, antitrust, anticompetitive behaviour, market manipulation, malpractice, or other related financial industry laws or regulations	FN-CB-510a.1	138
	Description of whistleblower policies and procedures	FN-CB-510a.2	138
Systemic Risk Management	Global Systemically Important Bank (GSIB) score, by category	FN-CB-550a.1	77
	Description of approach to integrate results of mandatory and voluntary stress tests into capital adequacy planning, longterm corporate strategy, and other business activities	FN-CB-550a.2	77
<b>ACTIVITY METRIC</b>			
	(1) Number and (2) value of checking and savings accounts by segment: (a) personal and (b) small business	FN-CB-000.A	87
	(1) Number and (2) value of loans by segment: (a) personal, (b) small business, and (c) corporate	FN-CB-000.B	87

## Tautan Standar GRI dengan TPB

PT Bank Syariah Indonesia Tbk berkomitmen untuk berkontribusi dalam pencapaian TPB/SDGs di Indonesia. Dukungan disampaikan melalui tautan antara program/kegiatan yang dilakukan BSI dengan GRI *Standard* dan SDGs, sesuai panduan *SDG Compass* yang diterbitkan oleh GRI, *United Nations Global Compact*, dan *World Business Council for Sustainable Development (WBCSD)*, sebagaimana tabel di bawah ini:

Logo	Tujuan	Relevansi GRI Standard	Disclosure	Judul Indikator	
 <p>1 TANPA KEMISKINAN</p>	<p>Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di mana pun.</p>	GRI 413: Masyarakat Lokal 2016	413-2	Operasi yang secara aktual dan yang berpotensi memiliki dampak negatif signifikan terhadap masyarakat setempat	
		GRI 202: Keberadaan Pasar 2016	202-1	Rasio standar upah karyawan pemula berdasarkan jenis kelamin terhadap upah minimum regional	
		GRI 203: Dampak Ekonomi Tidak Langsung	203-1	Investasi infrastruktur dan dukungan layanan	
			203-2	Dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan	
		G4 Suplemen Sektor Keuangan	FS6	Persentase dari portofolio untuk lini bisnis menurut wilayah, menurut ukuran (contoh: mikro/SME/besar), dan menurut sektor.	
			FS7	Nilai moneter dari produk dan layanan yang dirancang untuk memberikan keuntungan sosial yang spesifik untuk setiap lini bisnis.	
			FS13	Titik akses di daerah berpenduduk rendah atau kurang beruntung secara ekonomi berdasarkan jenis.	
			FS14	Inisiatif untuk meningkatkan akses ke layanan keuangan bagi orang-orang yang kurang beruntung.	
 <p>2 TANPA KELAPARAN</p>	<p>Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, memperbaiki nutrisi dan mempromosikan pertanian yang berkelanjutan.</p>	GRI 411: Hak Masyarakat Adat	411-1	Insiden pelanggaran yang melibatkan hak-hak masyarakat adat	
		GRI 413: Masyarakat Lokal 2016	413-2	Operasi yang secara aktual dan yang berpotensi memiliki dampak negatif signifikan terhadap masyarakat setempat	
 <p>3 KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA</p>	<p>Menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segala usia.</p>	GRI 305: Emisi 2016	305-1	Emisi GRK Langsung (Cakupan 1)	
			305-2	Energi tidak langsung (Cakupan 2) Emisi GRK	
			305-3	Emisi GRK (Cakupan 3) tidak langsung lainnya	
			305-6	Emisi zat perusak ozon (BPO)	
			305-7	Nitrogen oksida (NOx), sulfur oksida (SOx), dan emisi udara signifikan lainnya	
			GRI 203: Dampak Ekonomi Tidak Langsung	203-2	Dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan
				GRI 306: Limbah 2020	306-1
		306-2	Pengelolaan dampak signifikan terkait limbah		
		306-3	Limbah yang dihasilkan		
		306-4	Limbah dialihkan dari pembuangan		
		306-5	Limbah diarahkan ke pembuangan		
		GRI 401: Kepegawaian 2016	401-2	Tunjangan yang diberikan kepada karyawan tetap yang tidak diberikan kepada karyawan sementara atau paruh waktu	
		GRI 403: Kesehatan dan Keselamatan Kerja 2018	403-6	Peningkatan kualitas kesehatan kerja	
403-9	Kecelakaan kerja				
403-10	Penyakit akibat kerja				

Logo	Tujuan	Relevansi GRI Standard	Disclosure	Judul Indikator
<p><b>4 PENDIDIKAN BERKUALITAS</b></p>	Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua pada tahun 2030.	GRI 404: Pelatihan dan Pendidikan 2016	404-1	Rata-rata jam pelatihan per tahun per karyawan
		GRI 2: Pengungkapan Umum 2021	2-9 2-10	Struktur dan komposisi tata kelola Nominasi dan pemilihan badan tata kelola tertinggi
<p><b>5 KESETARAAN GENDER</b></p>	Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan.	GRI 202: Keberadaan Pasar 2016	202-1	Rasio standar upah karyawan pemula berdasarkan jenis kelamin terhadap upah minimum regional
		GRI 203: Dampak Ekonomi Tidak Langsung	203-1	Investasi infrastruktur dan dukungan layanan
		GRI 401: Kepegawaian 2016	401-1	Perekrutan karyawan baru dan perputaran karyawan
			401-2	Tunjangan yang diberikan kepada karyawan tetap yang tidak diberikan kepada karyawan sementara atau paruh waktu
			401-3	Cuti Melahirkan
		GRI 404: Pelatihan dan Pendidikan 2016	404-1	Rata-rata jam pelatihan per tahun per karyawan
			404-3	Persentase karyawan yang menerima tinjauan rutin terhadap kinerja dan pengembangan karir
GRI 405: Keberagaman dan Kesetaraan Kesempatan 2016	405-1	Keberagaman badan tata kelola dan karyawan		
	405-2	Rasio gaji pokok dan remunerasi perempuan terhadap laki-laki		
<p><b>6 AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK</b></p>	Memastikan masyarakat mencapai akses universal air bersih dan sanitasi.	GRI 306: Limbah 2020	306-1	Timbulan limbah dan dampak signifikan terkait limbah
		306-2	Pengelolaan dampak signifikan terkait limbah	
<p><b>7 ENERGI BERSIH DAN TERJANGKAU</b></p>	Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua lapisan masyarakat.	GRI 302: Energi 2016	302-1	Konsumsi energi di dalam organisasi
			302-2	Konsumsi energi di luar organisasi
			302-3	Intensitas energi
			302-4	Reduksi konsumsi energi
			302-5	Pengurangan kebutuhan energi dari produk dan jasa
<p><b>8 PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI</b></p>	Berusaha meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh serta pekerjaan yang layak untuk semua.	GRI 2: Pengungkapan Umum 2021	2-7	Karyawan
			2-8	Pekerja yang bukan karyawan
			2-30	Perjanjian kerja bersama
		GRI 201: Kinerja Ekonomi 2016	201-1	Nilai ekonomi langsung yang dihasilkan dan didistribusikan
		GRI 202: Keberadaan Pasar 2016	202-1	Rasio standar upah karyawan pemula berdasarkan jenis kelamin terhadap upah minimum regional
			202-2	Proporsi manajemen senior yang berasal dari masyarakat setempat
		GRI 203: Dampak Ekonomi Tidak Langsung 2016	203-2	Dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan
		GRI 204: Praktik Pengadaan 2016	204-1	Proporsi pengeluaran untuk pemasok lokal
		GRI 302: Energi 2016	302-1	Konsumsi energi di dalam organisasi
			302-2	Konsumsi energi di luar organisasi
			302-3	Intensitas energi
			302-4	Reduksi konsumsi energi
			302-5	Pengurangan kebutuhan energi dari produk dan jasa
		GRI 401: Kepegawaian 2016	401-1	Perekrutan karyawan baru dan perputaran karyawan
			401-2	Tunjangan yang diberikan kepada karyawan tetap yang tidak diberikan kepada karyawan sementara atau paruh waktu
401-3	Cuti Melahirkan			

Logo	Tujuan	Relevansi GRI Standard	Disclosure	Judul Indikator
		GRI 402: Hubungan Tenaga Kerja/Manajemen 2016	402-1	Periode pemberitahuan minimum terkait perubahan operasional
		GRI 403: Kesehatan dan Keselamatan Kerja 2018	403-1	Sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja
			403-2	Identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan investigasi insiden
			403-3	Layanan kesehatan kerja
			403-4	Partisipasi pekerja, konsultasi, dan komunikasi tentang kesehatan dan keselamatan kerja
			403-5	Pelatihan pekerja tentang kesehatan dan keselamatan kerja
			403-7	Pencegahan dan mitigasi dampak-dampak keselamatan dan kesehatan kerja yang secara langsung terkait dengan hubungan bisnis
			403-8	Pekerja yang tercakup dalam sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja
			403-9	Kecelakaan kerja
			403-10	Penyakit akibat kerja
			GRI 404: Pelatihan dan Pendidikan 2016	404-1
		404-2		Program untuk meningkatkan keterampilan karyawan dan program bantuan peralihan
		404-3		Persentase karyawan yang menerima tinjauan rutin terhadap kinerja dan pengembangan karir
		GRI 405: Keberagaman dan Kesetaraan Kesempatan 2016	405-1	Keberagaman badan tata kelola dan karyawan
			405-2	Rasio gaji pokok dan remunerasi perempuan terhadap laki-laki
		G4 Suplemen Sektor Keuangan	FS6	Persentase dari portofolio untuk lini bisnis menurut wilayah, ukuran, dan sektor
			FS7	Nilai moneter dari produk dan layanan yang dirancang untuk memberikan keuntungan sosial yang spesifik untuk setiap lini bisnis.
			FS13	Titik akses di daerah berpenduduk rendah atau kurang beruntung secara ekonomi berdasarkan jenis.
			FS14	Inisiatif untuk meningkatkan akses ke layanan keuangan bagi orang-orang yang kurang beruntung.
			FS16	Inisiatif untuk meningkatkan literasi keuangan berdasarkan jenis atau penerima manfaat.
	Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi.	GRI 201: Kinerja Ekonomi 2016	201-1	Nilai ekonomi langsung yang dihasilkan dan didistribusikan
		GRI 203: Dampak Ekonomi Tidak Langsung	203-1	Investasi infrastruktur dan dukungan layanan
		G4 Suplemen Sektor Keuangan	FS6	Persentase dari portofolio untuk lini bisnis menurut wilayah, ukuran, dan sektor
			FS7	Nilai moneter dari produk dan layanan yang dirancang untuk memberikan keuntungan sosial yang spesifik untuk setiap lini bisnis.

Logo	Tujuan	Relevansi GRI Standard	Disclosure	Judul Indikator
	Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antar Negara	GRI 2: Pengungkapan Umum 2021	2-7	Karyawan
		GRI 401: Kepegawaian 2016	401-1	Perekrutan karyawan baru dan perputaran karyawan
		GRI 404: Pelatihan dan Pendidikan 2016	404-1	Rata-rata jam pelatihan per tahun per karyawan
			404-3	Persentase karyawan yang menerima tinjauan rutin terhadap kinerja dan pengembangan karir
		GRI 405: Keberagaman dan Kesetaraan Kesempatan 2016	405-2	Rasio gaji pokok dan remunerasi perempuan terhadap laki-laki
		G4 Suplemen Sektor Keuangan	FS1	Kebijakan dengan komponen lingkungan dan sosial yang spesifik yang diaplikasikan pada lini bisnis.
			FS2	Prosedur untuk memeriksa dan menyaring risiko lingkungan dan sosial pada lini bisnis.
			FS3	Proses untuk memonitor implementasi dan kepatuhan klien terhadap persyaratan lingkungan dan sosial, termasuk dalam perjanjian atau transaksi
			FS4	Proses untuk meningkatkan kompetensi staf untuk menerapkan kebijakan dan prosedur lingkungan dan sosial sebagaimana diterapkan pada lini bisnis.
			FS5	Interaksi dengan klien/penanam modal/mitra bisnis terkait risiko serta kesempatan terkait lingkungan dan sosial.
			FS7	Nilai moneter dari produk dan layanan yang dirancang untuk memberikan keuntungan sosial yang spesifik untuk setiap lini bisnis.
			FS9	Cakupan dan frekuensi audit serta prosedur penilaian risiko
			FS10	Persentase dan jumlah perusahaan yang dimiliki dalam portofolio institusi yang telah berinteraksi dengan organisasi yang melaporkan tentang isu lingkungan atau sosial
			FS13	Titik akses di daerah berpenduduk rendah atau kurang beruntung secara ekonomi berdasarkan jenis.
			FS14	Inisiatif untuk meningkatkan akses ke layanan keuangan bagi orang-orang yang kurang beruntung.
FS15	Kebijakan untuk produk dan layanan keuangan yang adil			
FS16	Inisiatif untuk meningkatkan literasi keuangan berdasarkan jenis atau penerima manfaat.			
	Menjadikan kota dan pemukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan	GRI 203: Dampak Ekonomi Tidak Langsung	203-1	Investasi infrastruktur dan dukungan layanan
			GRI 306: Limbah 2020	306-1
		306-2		Pengelolaan dampak signifikan terkait limbah
		306-3		Limbah yang dihasilkan
		306-4		Limbah dialihkan dari pembuangan
		306-5		Limbah diarahkan ke pembuangan
		GRI 203: Dampak Ekonomi Tidak Langsung	203-1	Investasi infrastruktur dan dukungan layanan
		G4 Suplemen Sektor Keuangan	FS7	Nilai moneter dari produk dan layanan yang dirancang untuk memberikan keuntungan sosial yang spesifik untuk setiap lini bisnis.

Logo	Tujuan	Relevansi GRI Standard	Disclosure	Judul Indikator			
 <p>12 KONSUMSI DAN PRODUKSI YANG BERTANGGUNGJAWAB</p>	Menjamin pola produksi dan konsumsi yang bertanggungjawab	GRI 302: Energi 2016	302-1	Konsumsi energi di dalam organisasi			
			302-2	Konsumsi energi di luar organisasi			
			302-3	Intensitas energi			
			302-4	Reduksi konsumsi energi			
			302-5	Pengurangan kebutuhan energi dari produk dan jasa			
		GRI 305: Emisi 2016	305-1	Emisi GRK Langsung (Cakupan 1)			
			305-2	Energi tidak langsung (Cakupan 2) Emisi GRK			
			305-3	Emisi GRK (Cakupan 3) tidak langsung lainnya			
			305-6	Emisi zat perusak ozon (BPO)			
			305-7	Nitrogen oksida (NOx), sulfur oksida (SOx), dan emisi udara signifikan lainnya			
			GRI 306: Limbah 2020	306-1	Timbulan limbah dan dampak signifikan terkait limbah		
				306-2	Pengelolaan dampak signifikan terkait limbah		
		306-3		Limbah yang dihasilkan			
		306-4		Limbah dialihkan dari pembuangan			
306-5	Limbah diarahkan ke pembuangan						
GRI 417: Pemasaran dan Pelabelan 2016	417-1	Persyaratan untuk pelabelan dan informasi produk dan jasa					
 <p>13 PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM</p>	Mengambil aksi segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya karena perubahan iklim adalah tantangan global yang memengaruhi setiap orang.	GRI 201: Kinerja Ekonomi 2016	201-2	Implikasi finansial serta risiko dan peluang lain akibat perubahan iklim			
			GRI 302: Energi 2016	302-1	Konsumsi energi di dalam organisasi		
		302-2		Konsumsi energi di luar organisasi			
		302-3		Intensitas energi			
		302-4		Reduksi konsumsi energi			
		302-5		Pengurangan kebutuhan energi dari produk dan jasa			
		GRI 305: Emisi 2016	305-1	Emisi GRK Langsung (Cakupan 1)			
			305-2	Energi tidak langsung (Cakupan 2) Emisi GRK			
			305-3	Emisi GRK (Cakupan 3) tidak langsung lainnya			
			305-6	Emisi zat perusak ozon (BPO)			
			305-7	Nitrogen oksida (NOx), sulfur oksida (SOx), dan emisi udara signifikan lainnya			
			GRI 305: Emisi 2016	305-1	Emisi GRK Langsung (Cakupan 1)		
				305-2	Energi tidak langsung (Cakupan 2) Emisi GRK		
		305-3		Emisi GRK (Cakupan 3) tidak langsung lainnya			
305-6	Emisi zat perusak ozon (BPO)						
305-7	Nitrogen oksida (NOx), sulfur oksida (SOx), dan emisi udara signifikan lainnya						
GRI 305: Emisi 2016	305-1	Emisi GRK Langsung (Cakupan 1)					
	305-2	Energi tidak langsung (Cakupan 2) Emisi GRK					
	305-3	Emisi GRK (Cakupan 3) tidak langsung lainnya					
	305-6	Emisi zat perusak ozon (BPO)					
	305-7	Nitrogen oksida (NOx), sulfur oksida (SOx), dan emisi udara signifikan lainnya					
	 <p>14 EKOSISTEM LAUTAN</p>	Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan	GRI 305: Emisi 2016	305-1	Emisi GRK Langsung (Cakupan 1)		
				305-2	Energi tidak langsung (Cakupan 2) Emisi GRK		
305-3				Emisi GRK (Cakupan 3) tidak langsung lainnya			
305-6				Emisi zat perusak ozon (BPO)			
305-7				Nitrogen oksida (NOx), sulfur oksida (SOx), dan emisi udara signifikan lainnya			
 <p>15 EKOSISTEM DARATAN</p>				Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan Secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati	GRI 305: Emisi 2016	305-1	Emisi GRK Langsung (Cakupan 1)
						305-2	Energi tidak langsung (Cakupan 2) Emisi GRK
	305-3	Emisi GRK (Cakupan 3) tidak langsung lainnya					
	305-6	Emisi zat perusak ozon (BPO)					
	305-7	Nitrogen oksida (NOx), sulfur oksida (SOx), dan emisi udara signifikan lainnya					

Logo	Tujuan	Relevansi GRI Standard	Disclosure	Judul Indikator	
<p>16 PERDAMAIAN, KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH</p>	<p>Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan</p>	<p>GRI 2: Pengungkapan Umum 2021</p>	2-9	Struktur dan komposisi tata kelola	
			2-10	Nominasi dan pemilihan badan tata kelola tertinggi	
			2-11	Ketua badan tata kelola tertinggi	
			2-12	Peran badan tata kelola tertinggi dalam mengawasi pengelolaan dampak	
			2-15	Benturan kepentingan	
			2-16	Komunikasi hal-hal penting	
			2-23	Komitmen kebijakan	
			2-25	Proses untuk memulihkan dampak negatif	
			2-26	Mekanisme pemberian umpan balik/saran dan menyampaikan kekhawatiran	
		2-29	Pendekatan keterlibatan pemangku kepentingan		
		<p>GRI 205: Anti Korupsi 2016</p>	<p>GRI 403: Kesehatan dan Keselamatan Kerja 2018</p>	205-1	Operasi-operasi yang dinilai memiliki risiko terkait korupsi
				205-2	Komunikasi dan pelatihan tentang kebijakan dan prosedur anti korupsi
				205-3	Insiden korupsi yang terbukti dan tindakan yang diambil
<p>GRI 416: Kesehatan dan Keselamatan Pelanggan</p>	<p>GRI 417: Pemasaran dan Pelabelan 2016</p>	403-4	Partisipasi pekerja, konsultasi, dan komunikasi tentang kesehatan dan keselamatan kerja		
		403-9	Kecelakaan kerja		
		403-10	Penyakit akibat kerja		
<p>GRI 418: Privasi Pelanggan 2016</p>	<p>GRI 417: Pemasaran dan Pelabelan 2016</p>	416-1	Penilaian dampak kesehatan dan keselamatan dari berbagai kategori produk dan jasa		
		417-2	Insiden ketidakpatuhan sehubungan dengan dampak kesehatan dan keselamatan dari produk dan jasa		
<p>GRI 417: Pemasaran dan Pelabelan 2016</p>	<p>GRI 417: Pemasaran dan Pelabelan 2016</p>	417-3	Insiden ketidakpatuhan terkait komunikasi pemasaran		
		418-1	Pengaduan yang berdasar mengenai pelanggaran terhadap privasi pelanggan dan hilangnya data pelanggan		
<p>17 KEMITRAAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN</p>	<p>Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan</p>				

Halaman ini sengaja dikosongkan



Your partner  
in progress

Statement No.: **SRA - ID 824356**

## **INDEPENDENT ASSURANCE OPINION STATEMENT**

### **PT Bank Syariah Indonesia Tbk Sustainability Report 2024**

The British Standards Institution is independent to PT Bank Syariah Indonesia Tbk and has no financial interest in the operation of PT Bank Syariah Indonesia Tbk other than for the assessment and verification of the sustainability statements contained in this report.

This Independent assurance opinion statement has been prepared for the stakeholders of PT Bank Syariah Indonesia Tbk only for the purposes of verifying its statements relating to its environmental, social and governance (ESG), more particularly described in the Scope, below. It was not prepared for any other purpose. The British Standards Institution will not, in providing this independent assurance opinion statement, accept or assume responsibility (legal or otherwise) or accept liability for or in connection with any other purpose for which it may be used, or to any person by whom the independent assurance opinion statement may be read.

This Independent assurance opinion statement is prepared based on review by the British Standards Institution of information presented to it by of PT Bank Syariah Indonesia Tbk. The review does not extend beyond such information and is solely based on it. In performing such review, the British Standards Institution has assumed that all such information is complete and accurate.

Any queries that may arise by virtue of this independent assurance opinion statement or matters relating to it should be addressed to of PT Bank Syariah Indonesia Tbk only.

#### **Scope**

The scope of engagement agreed upon with of PT Bank Syariah Indonesia Tbk includes the following:

- 1) The assurance covers the whole report and focuses on systems and activities during the 2024 calendar year at of PT Bank Syariah Indonesia Tbk focus for 1 Head Office in Jakarta, 10 Regional Offices, 153 Branch Offices, 1 Overseas Branch Offices, 886 Sub-Branch Offices, 60 KCP Mobile, 91 Functional Offices, 23 Priority Service Counters, 754 Pawn Service Counters and 5,425 Automatic Teller Machines (ATMs)
- 2) The Evaluation of the nature and extent of the PT Bank Syariah Indonesia Tbk adherence to all four AA1000 AccountAbility Principles and the reliability of specified sustainability performance information in this report as conducted in accordance with type 2 moderate level of AA1000AS v3 sustainability assurance engagement.

PT BSI Group Indonesia  
Talavera Office Suite 20<sup>th</sup> Floor  
Jl. TB Simatupang Kav 22-26  
Cilandak, South Jakarta, Indonesia 12430  
[bsigroup.com/en-ID](https://bsigroup.com/en-ID)

+62 21 80649 600  
[info.indonesia@bsigroup.com](mailto:info.indonesia@bsigroup.com)

Registered address  
The British Standards Institution  
Incorporated by Royal Charter  
Companies House number: ZC000202  
Registered address: 389 Chiswick High Road, London, W4 4AL, United Kingdom





## Opinion Statement

We conclude that the Sustainability Report Review provide a fair view of PT Bank Syariah Indonesia Tbk programmes and performances during 2024. We believe that the PT Bank Syariah Indonesia Tbk economic, environment and social performance indicators are fairly represented.

Our work was carried out by a team of sustainability report assurors in accordance with the AA1000 Assurance Standard v3. We planned and performed this part of our work to obtain the necessary information and explanations we considered to provide sufficient evidence that PT Bank Syariah Indonesia Tbk's description of their approach to AA1000 Assurance Standard and their self-declaration of compliance with the GRI 2021 standard were fairly stated.

## Methodology

Our work was designed to gather evidence on which to base our conclusion. We undertook the following activities:

- a top-level review of issues raised by external parties that could be relevant to PT Bank Syariah Indonesia Tbk 's policies to provide a check on the appropriateness of statements made in the report.
- discussion with managers and staffs on PT Bank Syariah Indonesia Tbk's approach to stakeholder engagement. However, we had no direct contact with external stakeholders.
- Interviews with staffs involved in sustainability management, report preparation and provision of report information were carried out.
- Review of key organizational developments.
- Review of the findings of internal audits.
- Review of supporting evidence for claims made in the reports.
- An assessment of the company's reporting and management processes concerning this reporting against the principles of Inclusivity, Materiality, Responsiveness, and Impact as described in the AA1000 AccountAbility Principles Standard (2018).

## Conclusions

A detailed review against the AA1000 AccountAbility Principles of Inclusivity, Materiality, Responsiveness and Impact and the GRI 2021 Standard is set out below:

### Inclusivity

This report has reflected a fact that PT Bank Syariah Indonesia Tbk is seeking the engagement of its key stakeholders. The participation of stakeholders has been initiated in developing and achieving an accountable and strategic response to sustainability. The reporting systems are being developed to deliver the required information. There are fair reporting and disclosures for economic, social, and environmental information in this report, so that appropriate planning and target-setting can be supported. In our professional opinion the report covers PT Bank Syariah Indonesia Tbk's inclusivity issues.



## **Materiality**

PT Bank Syariah Indonesia Tbk publishes sustainability information that enables its stakeholders to make informed judgments about the company's management and performance. In our professional opinion the report covers the PT Bank Syariah Indonesia Tbk 's material issues.

## **Responsiveness**

PT Bank Syariah Indonesia Tbk has implemented the practice to respond to the expectations and perceptions of its stakeholders. An Ethical Policy for PT Bank Syariah Indonesia Tbk is developed and provides the opportunity to further enhance PT Bank Syariah Indonesia Tbk's responsiveness to stakeholder concerns. In our professional opinion the report covers the PT Bank Syariah Indonesia Tbk 's responsiveness issues.

## **Impact**

PT Bank Syariah Indonesia Tbk has demonstrated a process on identifying impacts that encompass a range of environmental, social and governance topics, and fairly represented the impacts in the report. In our professional opinion the report covers the PT Bank Syariah Indonesia Tbk 's impacts issues.

## **GRI-reporting**

PT Bank Syariah Indonesia Tbk provided us with their self-declaration of compliance within GRI 2021 Standards (in accordance). Based on our review, we confirm that social responsibility and sustainable development indicators with reference to the GRI Index are reported, partially reported or omitted. In our professional opinion the self-declaration covers the PT Bank Syariah Indonesia Tbk's social responsibility and sustainability issues.

## **Assurance level**

The Type 2 Moderate level assurance provided is in accordance with AA1000 Assurance Standard v3 in our review, as defined by the scope and methodology described in this statement.

## **Responsibility**

This Sustainability report is the responsibility of the PT Bank Syariah Indonesia Tbk's CEO as declared in his responsibility letter. Our responsibility is to provide an independent assurance opinion statement to stakeholders giving our professional opinion based on the scope and methodology described.

## **Competency and Independence**

The assurance team was composed of Lead Auditors and GHG Verifiers experienced in industrial sector, and trained in a range of sustainability, environmental and social standards including AA1000 AS, ISO9001, ISO14001, ISO45001, ISO14064-1, ISO 14068-1, ISO26001, BSI is a leading global standards and assessment body founded in 1901.



For and on behalf of BSI:

Nolia Natalia, Country Manager, BSI Indonesia



**AA1000**  
Licensed Report  
000-4/V3-S31XK

Statement No.: **SRA - ID 824356**  
13-03-2025

# LAPORAN SUSTAINABILITY SUKUK JANUARI 2025





# Daftar Isi

	<b>Pendahuluan</b>	<b>2</b>
	<b>Ringkasan Kerangka Kerja dan Penerbitan Sustainability Sukuk BSI</b>	<b>3</b>
	<b>Laporan Alokasi</b>	<b>7</b>
	<b>Laporan Dampak</b>	<b>9</b>
	<b>Kesimpulan</b>	<b>11</b>



# Pendahuluan

PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) sebagai bank syariah terbesar di Indonesia terus berupaya dalam pengembangan usaha sektor berkelanjutan. Hal tersebut dilakukan melalui implementasi aktivitas bisnis ramah lingkungan yang diantaranya meliputi (1) penyediaan program pembiayaan ramah lingkungan, (2) kegiatan operasional bank ramah lingkungan, dan (3) penerapan ekonomi hijau berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pada aktivitas bisnis sosial, sejak didirikan pada tahun 2021, BSI telah memiliki perhatian pada pengembangan pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah syariah.

BSI mengimplementasikan program untuk mencapai sasaran kegiatan usaha berkelanjutan sejalan dengan dokumen Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) yang dimiliki oleh bank. Program tersebut termasuk upaya penyediaan produk dan layanan keuangan berkelanjutan syariah yang dirancang sesuai dengan kebutuhan pasar di Indonesia. BSI berkomitmen untuk menjadi salah satu dari 5 (lima) *top bank* penyedia produk dan layanan keuangan berkelanjutan disertai pula oleh pengembangan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) secara berkesinambungan. Diharapkan upaya tersebut

dapat memberikan manfaat kepada masyarakat secara inklusif sekaligus memberikan edukasi bagi setiap pegawai untuk mengedepankan prinsip keuangan berkelanjutan pada kegiatan operasional perbankan.

BSI berkomitmen untuk mengimplementasikan kebijakan keuangan berkelanjutan dalam kegiatan usaha sebagai upaya perbaikan kualitas hidup bagi ekosistem syariah. Sebagai wujud dari peran nyata komitmen BSI tersebut, BSI menjadi pionir dalam aktivitas keuangan berkelanjutan syariah di Indonesia dengan melakukan penerbitan Sukuk Mudharabah Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BSI Tahap I Tahun 2024 (Sustainability Sukuk) sebesar Rp3 triliun pada bulan Juni 2024 untuk mendukung pendanaan pembiayaan yang akan membantu mewujudkan Indonesia yang lebih berwawasan lingkungan di masa depan.

Adapun inisiatif penerbitan Sustainability Sukuk ini sejalan dengan POJK Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang dan Sukuk Berlandaskan Berkelanjutan yang diterbitkan pada tanggal 10 Oktober 2023.

# Ringkasan Kerangka Kerja Penerbitan Sustainability Sukuk BSI

## A. Kerangka Kerja Sustainability Sukuk BSI

Sebelum Penerbitan Sustainability Sukuk pada bulan Juni 2024, BSI telah mengembangkan Kerangka Kerja Sustainability Sukuk yang telah memperoleh opini “Ramah Lingkungan/Berkelanjutan” dari SDGs Hub Universitas Indonesia. Proses penyesuaian kerangka Sustainability

Sukuk tersebut telah mengacu pada ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Indonesia (POJK) Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang dan Sukuk Berlandaskan Berkelanjutan.

Berikut merupakan ringkasan Kerangka Kerja Sustainability Sukuk:

### Penggunaan Dana Hasil Penerbitan

#### Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan (KUBL)



Energi Terbarukan



Transportasi Ramah Lingkungan



Efisiensi Energi



Pengelolaan Air dan Air Limbah berkelanjutan



Pencegahan dan Pengendalian Polusi



Adaptasi Perubahan Iklim



Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati & Penggunaan Lahan yang Berkelanjutan



Produk yang Dapat Mengurangi Penggunaan Sumber Daya dan Menghasilkan Lebih Sedikit Polusi



Konservasi Keanekaragaman Hayati Darat dan Air



Bangunan Berwawasan Lingkungan

#### Kegiatan Usaha Berwawasan Sosial (KUBS)



Layanan Infrastruktur Dasar yang Terjangkau Baik dari Segi Akses Maupun Harga



Penciptaan Lapangan Kerja



Akses terhadap Layanan Esensial



Ketahanan Pangan dan Sistem Pangan Berkelanjutan



Perumahan yang Terjangkau



Peningkatan dan Pemberdayaan Sosio-Ekonomi



## Proses Evaluasi dan Seleksi Proyek Sustainability Sukuk BSI

Proses seleksi dilakukan dengan pendekatan *Two Step Approach* sebagai berikut:



## B. Manajemen Dana yang Diperoleh dari Hasil Penerbitan Sustainability Sukuk BSI

Pengelolaan dana hasil penerbitan Sustainability Sukuk BSI dikelola oleh 3 (tiga) unit kerja diantaranya dengan uraian sebagai berikut:



## C. Pelaporan Sustainability Sukuk BSI

### Laporan Alokasi

BSI akan menerbitkan laporan Sustainability Sukuk setiap tahun, dimulai selambat-lambatnya pada tanggal yang jatuh satu tahun setelah dana dari hasil penerbitan pertama diperoleh oleh BSI, untuk memberikan transparansi kepada investor dan regulator sehubungan dengan penerapan Kerangka Kerja.

### Laporan Dampak

BSI akan menerbitkan laporan dampak lingkungan dan/atau sosial dari aset yang memenuhi syarat yang dibiayai dari Sustainability Sukuk yang diterbitkan. Adapun dampak positif kuantitatif dalam laporan Sustainability Sukuk BSI meliputi indikator-indikator sebagai berikut:

### Kategori Hijau

Jenis KUBL	Indikator
Energi Terbarukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Estimasi pembangkitan energi terbarukan per tahun dalam MWh/GWh (listrik).</li> <li>2. Estimasi emisi Gas Rumah Kaca per tahun yang dikurangi/dihindari dalam ton ekuivalen CO<sub>2</sub>.</li> <li>3. Kapasitas energi terbarukan yang dipasang dalam MW.</li> </ol>
Efisiensi Energi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Estimasi penghematan energi per tahun dalam MWh/GWh (listrik) dan GJ/TJ (energi lainnya).</li> <li>2. Estimasi emisi Gas Rumah Kaca per tahun yang dikurangi/dihindari dalam ton ekuivalen CO<sub>2</sub>.</li> </ol>
Pencegahan dan Pengendalian Polusi	Jumlah ton atau m <sup>3</sup> limbah yang dicegah, dikurangi, didaur ulang, dan digunakan kembali.
Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati dan Penggunaan Lahan yang Berkelanjutan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Estimasi jumlah 14 asyara yang dilindungi dan/atau disertifikasi.</li> <li>2. Estimasi jumlah pohon yang ditanam dalam proyek reboisasi bersertifikasi FSC/PEFC.</li> </ol>
Konservasi Keanekaragaman Hayati Darat dan Air	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Estimasi jumlah mil laut yang dilindungi dan/atau disertifikasi.</li> <li>2. Estimasi jumlah hektare yang dibeli/dilindungi dan disertifikasi.</li> </ol>
Transportasi Ramah Lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Estimasi emisi Gas Rumah Kaca per tahun yang dikurangi/dihindari dalam ton ekuivalen CO<sub>2</sub>.</li> <li>2. Jumlah kendaraan ramah lingkungan yang diluncurkan.</li> <li>3. Estimasi kilometer dari jalur kereta/jalur khusus Bus, BRT, koridor LRT, dan jalur sepeda baru atau yang disempurnakan.</li> </ol>
Pengelolaan Air dan Air Limbah yang Berkelanjutan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengurangan konsumsi air dalam aktivitas ekonomi.</li> <li>2. Air limbah yang diolah menurut standar yang tepat, persentase total limbah yang dicegah, diminimalkan, digunakan kembali, atau didaur ulang.</li> <li>3. Jumlah absolut penggunaan air per tahun sebelum dan sesudah proyek dilaksanakan.</li> <li>4. Jumlah populasi dengan akses air minum bersih.</li> </ol>
Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah fasilitas, sistem, dan peralatan baru yang digunakan untuk mendukung ketahanan iklim.
Produk yang Dapat Mengurangi Penggunaan Sumber Daya dan Menghasilkan Lebih Sedikit Polusi (Eco-efficient)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah limbah yang didaur ulang.</li> <li>2. Estimasi emisi Gas Rumah Kaca per tahun yang dikurangi/dihindari dalam ton ekuivalen CO<sub>2</sub>.</li> <li>3. Jumlah bangunan berwawasan lingkungan yang memiliki sertifikasi bangunan hijau.</li> </ol>
Bangunan Berwawasan Lingkungan yang Memenuhi Standar atau Sertifikasi yang Diakui Secara Nasional, Regional, atau Internasional	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Estimasi emisi Gas Rumah Kaca per tahun yang dihindari/dikurangi dalam ton ekuivalen CO<sub>2</sub>.</li> <li>2. Persentase penggunaan energi yang dikurangi/dihindari.</li> </ol>



## Kategori Sosial

KUBS	Indikator
Layanan Infrastruktur Dasar yang Terjangkau Baik dari Segi Akses maupun Harga	Jumlah rumah tangga yang memiliki akses jaringan jalan, listrik, air, dan layanan sanitasi.
Akses terhadap Layanan Esensial	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah fasilitas layanan masyarakat yang diberikan pembiayaan.</li> <li>2. Jumlah penduduk yang memiliki akses terhadap layanan kesehatan dengan harga terjangkau.</li> <li>3. Jumlah fasilitas masyarakat yang dibiayai.</li> <li>4. Jumlah siswa yang dibantu.</li> </ol>
Perumahan yang Terjangkau	Jumlah kelompok masyarakat berpenghasilan rendah yang memperoleh bantuan finansial untuk pembiayaan rumah yang terjangkau.
Penciptaan Lapangan Kerja, dan Program yang Dirancang untuk Mencegah dan/atau Mengurangi Pengangguran, Termasuk Pembiayaan Usaha Kecil, Menengah, dan Pembiayaan Mikro	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah UMKM yang diberikan pembiayaan.</li> <li>2. Jumlah pekerja dari UMKM yang diberikan pembiayaan.</li> <li>3. Portofolio pembiayaan UMKM berdasarkan distribusi sektor.</li> </ol>
Ketahanan Pangan dan Sistem Pangan Berkelanjutan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah area lahan dalam km<sup>2</sup> dan persentase pertumbuhan lahan atau wilayah yang digunakan bagi pertanian atau kegiatan pemenuhan pangan ramah lingkungan.</li> <li>2. Jumlah UMKM sektor pengolahan sistem dan pengelolaan pangan berkelanjutan dan/atau ramah lingkungan.</li> </ol>
Peningkatan dan Pemberdayaan Sosio-Ekonomi	Jumlah UMKM atau individu yang dibiayai melalui program KUR.
Kegiatan Usaha dan/atau Kegiatan Lain yang Berwawasan Sosial Lainnya	Memberikan dampak positif secara sosial mengacu pada parameter POJK atau ketentuan yang relevan lainnya.

## D. Penerbitan Sustainability Sukuk BSI

PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) telah melakukan penerbitan Sukuk Mudharabah Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BSI Tahap I Tahun 2024 (Sustainability Sukuk) pada tanggal 14 Juni 2024 dengan jumlah nominal pokok sebesar Rp3.000.000.000.000,- (tiga triliun rupiah) yang terdiri atas 3 (tiga) seri jangka waktu: Seri A untuk tenor 370 hari, Seri B untuk tenor 2 tahun, dan seri C untuk tenor 3 tahun.

Penerbitan Sustainability Sukuk tersebut memberikan beberapa *milestone* bagi BSI, antara lain sebagai berikut:

- Penerbitan Sustainability Sukuk yang pertama yang dilakukan oleh Bank di Indonesia.
- Sustainability Sukuk BSI diminati oleh investor pada saat *bookbuilding*, hal tersebut dibuktikan dengan perolehan *oversubscribe* sebesar 3 (tiga) kali.

### Struktur Sustainability Sukuk BSI

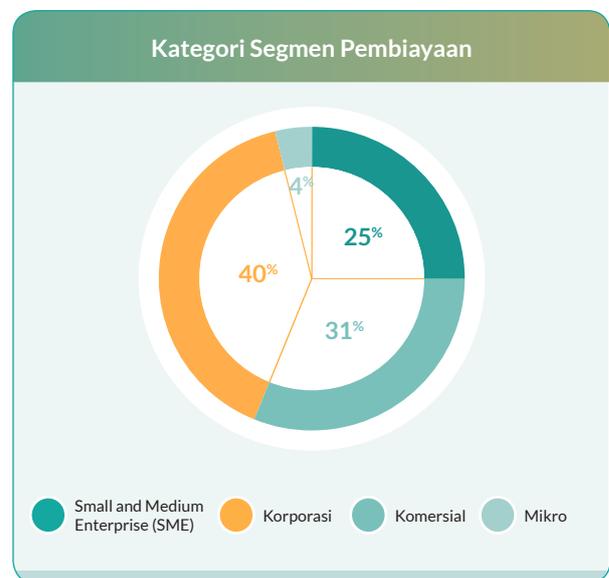
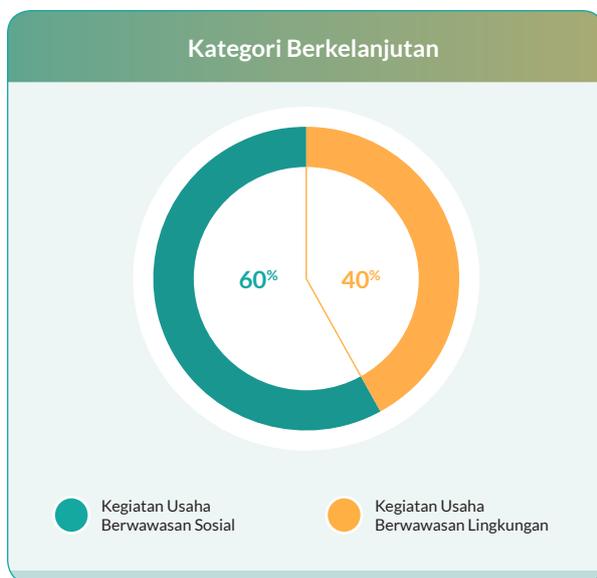
Nama Instrumen	:	Sukuk Mudharabah Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BSI Tahap I Tahun 2024
Struktur Akad	:	Mudharabah
Mata Uang	:	Diterbitkan dalam mata uang rupiah
Total Penerbitan	:	Rp3.000.000.000.000,- (tiga triliun rupiah) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Seri A: Tenor 370 hari sebesar Rp1.700.000.000.000,- ekuivalen 6,65% pa.</li> <li>• Seri B: Tenor 2 tahun sebesar Rp220.000.000.000,- ekuivalen 6,70% pa.</li> <li>• Seri C: Tenor 3 tahun sebesar Rp1.080.000.000.000,- ekuivalen 6,80% pa.</li> </ul>
Tanggal Jatuh tempo	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Seri A: 24 Juni 2025</li> <li>• Seri B: 14 Juni 2026</li> <li>• Seri C: 14 Juni 2027</li> </ul>
Rating	:	idAAA <sub>(sy)</sub> Pefindo Final Rating
Tujuan Penggunaan	:	Penyaluran dana pembiayaan kategori Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan (KUBL) dan Kegiatan Usaha Berwawasan Sosial (KUBS)
Listing	:	PT Bursa Efek Indonesia

# Laporan Alokasi

Padaposisi akhir bulan Desember 2024, BSI telah mengalokasikan seluruhnya (100%) dana hasil alokasi penerbitan Sustainability Sukuk. Total dana hasil penerbitan Sustainability Sukuk telah disalurkan pada 3 (tiga) dari 10 (sepuluh) kategori Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan (KUBL) dan 4 (empat) dari 6 (enam) kategori Kegiatan Usaha Berwawasan Sosial (KUBS) berdasarkan Kerangka Kerja penerbitan Sustainability Sukuk

BSI yang mengacu pada ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang dan Sukuk Berlandaskan Berkelanjutan yang diterbitkan pada tanggal 10 Oktober 2023.

Berikut adalah detail alokasi penggunaan dana hasil penerbitan Sustainability Sukuk dapat disampaikan sebagai berikut



Uraian penyaluran per segmen pembiayaan berdasarkan *underlying* Sukuk mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) periode 2024 diuraikan sebagai berikut:

Dalam Rupiah	
<b>A. Kegiatan Usaha Berwawasan Sosial (KUBS)</b>	
1. Akses terhadap Layanan Esensial	1.124.845.667.482
2. Penciptaan Lapangan Kerja dan Program yang Dirancang untuk Mencegah dan/atau Mengurangi Pengangguran, termasuk pembiayaan usaha kecil, menengah, dan pembiayaan Mikro	383.961.326.807
3. Ketahanan Pangan dan Sistem Pangan Berkelanjutan	173.054.629.439
4. Peningkatan dan Pemberdayaan Sosio-Ekonomi	105.372.586.056
<b>Total KUBS</b>	<b>1.787.234.209.784</b>
<b>B. Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan</b>	
1. Produk yang Dapat Mengurangi Penggunaan Sumber Daya dan Menghasilkan Lebih Sedikit Polusi (Eco-Efficient)	763.967.438.036
2. Energi Terbarukan	422.335.787.085
3. Pengelolaan Air dan Air Limbah Berkelanjutan	26.462.565.095
<b>Total KUBL</b>	<b>1.212.765.790.216</b>



Uraian keterangan penyaluran pembiayaan mengacu pada *Sustainable Development Goals* (SDGs) dan BSI Sukuk Sustainability Framework diuraikan sebagai berikut:

Kunci <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs)	Kategori Pembiayaan Eligible yang Telah Dibiayai oleh Bank
 	<p><b>Produk yang Dapat Mengurangi Penggunaan Sumber Daya dan Menghasilkan Lebih Sedikit Polusi (<i>Eco-Efficient</i>)</b>                      Berupa penyaluran pembiayaan pada segmen Korporasi dengan akad Musyarakah pada industri yang telah menghasilkan lebih sedikit polusi (<i>eco-efficient</i>) melalui pengenalan produk ramah lingkungan dengan <i>eco-label</i> atau sertifikasi lingkungan serta kemasan dan distribusi hemat sumber daya. Nasabah pembiayaan penerima dana diantaranya perusahaan pengolahan kertas dan perusahaan industri pupuk.</p>
 	<p><b>Energi Terbarukan</b>                      Berupa penyaluran pembiayaan pada segmen Korporasi dengan akad Musyarakah pada industri pembangkit listrik energi terbarukan. Nasabah pembiayaan penerima dana berupa perusahaan pembangkit listrik tenaga minihidro.</p>
 	<p><b>Pengelolaan Air dan Air Limbah Berkelanjutan</b>                      Berupa penyaluran pembiayaan pada segmen Korporasi dengan akad Musyarakah pada industri pengelolaan air dan air limbah yang berkelanjutan. Nasabah pembiayaan penerima dana berupa perusahaan pengolahan dan penyedia air minum.</p>
  	<p><b>Akses Terhadap Layanan Esensial</b>                      Berupa penyaluran pembiayaan pada segmen Komersial dan <i>Small and Medium Enterprise</i> (SME) dengan akad musyarakah yang bertujuan pada kesetaraan akses kesehatan, perawatan kesehatan, dan aktivitas usaha berkaitan dengan pendidikan. Nasabah pembiayaan penerima dana diantaranya rumah sakit, yayasan yang bergerak pada bidang kesehatan, perusahaan farmasi dan alat kesehatan, universitas, yayasan pemberdayaan masyarakat, pesantren, dan lembaga pendidikan.</p>
   	<p><b>Penciptaan Lapangan Kerja dan Program yang Dirancang Untuk Mencegah dan/atau Mengurangi Pengangguran, Termasuk Pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah</b>                      Berupa penyaluran pembiayaan pada segmen Komersial, Konsumer, dan <i>Small and Medium Enterprise</i> (SME) dengan akad Musyarakah yang bertujuan untuk penciptaan lapangan kerja dan mengurangi pengangguran.</p>
 	<p><b>Ketahanan Pangan dan Sistem Pangan Berkelanjutan</b>                      Berupa penyaluran pembiayaan pada segmen Komersial dan <i>Small and Medium Enterprise</i> (SME) dengan akad Musyarakah yang bertujuan dalam upaya ketahanan pangan dan sistem pangan berkelanjutan. Nasabah pembiayaan penerima dana, diantaranya perusahaan pengolahan makanan dan perusahaan tata niaga makanan.</p>
   	<p><b>Peningkatan dan Pemberdayaan Sosio-Ekonomi</b>                      Berupa penyaluran pembiayaan pada segmen Komersial, <i>Small and Medium Enterprise</i> (SME), dan Mikro dengan akad Musyarakah yang bertujuan pada kesetaraan akses dan penguasaan atas aset, layanan, sumber daya dan kesempatan serta kesetaraan partisipasi dan integrasi pada pasar dan masyarakat. Penyaluran dana khususnya bertujuan bagi kebutuhan usaha mikro, kecil, dan menengah.</p>

# Laporan Dampak

Estimasi dampak lingkungan dan sosial dari pembiayaan eligible yang diantaranya dibiayai dari dana hasil penerbitan Sustainability Sukuk diuraikan sebagai berikut:

No	Kategori Pembiayaan	% Komposisi Underlying Sukuk	Segmen Pembiayaan	Deskripsi & Indikator Dampak
1.	Akses Terhadap Layanan Esensial	37.49%	Pembiayaan pada segmen Komersial dan <i>Small and Medium Enterprise</i> (SME) dengan akad Musyarakah	<p>Penyaluran pembiayaan segmen Komersial dan <i>Small and Medium Enterprise</i> (SME) dengan akad Musyarakah khususnya pada kegiatan usaha penyediaan (1) akses kesehatan dan (2) pendidikan.</p> <p>Hasil dari penyaluran dana dapat diinformasikan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Jumlah instansi yang telah memperoleh fasilitas sebanyak 152 instansi yang terdiri atas 74 instansi pendidikan diantaranya dari tingkat TK, SD, MTS, SMP, SMA, Perguruan Tinggi dan bentuk fasilitas pendidikan lainnya dan 78 instansi kesehatan, diantaranya rumah sakit, klinik, dan bentuk fasilitas kesehatan lainnya.</li> <li>Jumlah penduduk yang memiliki layanan akses layanan kesehatan diperkirakan sebanyak 168.032 orang/bulan.</li> <li>Jumlah siswa atau penerima fasilitas pendidikan per Desember 2024 diperkirakan sebanyak 80.222 siswa.</li> </ol>
2.	Penciptaan Lapangan Kerja dan Program yang Dirancang Untuk Mencegah dan/atau Mengurangi Pengangguran termasuk Pembiayaan Usaha Kecil, Menengah, dan Pembiayaan Mikro	12,80%	Pembiayaan pada segmen Komersial, dan <i>Small and Medium Enterprise</i> (SME), dengan akad Musyarakah	<p>Penyaluran pembiayaan pada sektor Komersial dan <i>Small and Medium Enterprise</i> (SME) dengan akad Musyarakah pada kegiatan usaha dengan penyediaan lapangan kerja baik pada sektor pertanian, pengolahan, perdagangan dan penyediaan layanan jasa dengan keterangan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Penyaluran dana diantaranya disalurkan kepada 77 UMKM.</li> <li>Prognosa jumlah pegawai yang dipekerjakan dari hasil penyaluran pembiayaan per Desember 2024 diperkirakan sebanyak 1.914 orang.</li> <li>Portfolio pembiayaan yang disalurkan pada penciptaan lapangan kerja dan program untuk mencegah dan/atau mengurangi pengangguran sebesar <b>Rp.383.961.326.807,-</b> yang terdiri atas sektor Komersial dan <i>Small and Medium Enterprise</i> (SME) masing-masing sebesar Rp 81.752.687.673,- dan Rp 302.208.639.134,-.</li> </ol>
3.	Ketahanan Pangan dan Sistem Pangan Berkelanjutan	5,77%	Pembiayaan pada segmen Small and Medium Enterprise (SME) dengan akad Musyarakah	<p>Penyaluran pembiayaan segmen Small and Medium Enterprise (SME) dengan akad Musyarakah khususnya pada nasabah pembiayaan yang bergerak dalam bidang penyediaan dan pengolahan pangan.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Jumlah lahan peternakan, perikanan, dan industri pengolahan makanan serta kapasitas produksi per Desember 2024 dapat diuraikan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>Lahan tambak udang dengan luas lahan +/- 10 hektar atau setara dengan 0,1 km2 berlokasi di provinsi Aceh. Kapasitas produksi diperkirakan sebesar 4,6 juta ton udang/tahun.</li> <li>Lahan usaha ayam petelur dengan luas lahan +/- 7 hektar atau setara dengan 0,07 km2 berlokasi di provinsi Sumatera Barat. Kapasitas produksi diperkirakan sebesar 1,2 ton per bulan.</li> <li>Lahan usaha pengolahan minyak goreng dengan luas lahan +/- 10 hektar atau setara dengan 0,1 km2 berlokasi di provinsi Jawa Timur. Kapasitas produksi diperkirakan sebesar 72.000 liter minyak goreng.</li> </ol> </li> <li>Jumlah UMKM diperkirakan lebih dari 100 UMKM yang bergerak dalam bidang perikanan, ayam petelur, dan tatakelola minyak goreng.</li> </ol>
4.	Peningkatan dan Pemberdayaan Sosio-Ekonomi	3,51%	Pembiayaan pada segmen Mikro dengan akad Musyarakah	<ol style="list-style-type: none"> <li>Penyaluran pembiayaan segmen Mikro pada pembiayaan BSI Usaha Mikro (BUM) dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan akad Musyarakah.</li> <li>Penyaluran kepada 557 penerima yang terdiri atas 209 NOA BSI Usaha Mikro (BUM) dan 348 NOA Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR).</li> </ol>



No	Kategori Pembiayaan	% Komposisi Underlying Sukuk	Segmen Pembiayaan	Deskripsi & Indikator Dampak
5.	Energi Terbarukan	14,08%	Pembiayaan pada segmen Korporasi dengan akad Musyarakah	<p>Penyaluran pembiayaan pada 1 (satu) perusahaan Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTMH) dan 1 (satu) perusahaan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dengan uraian sebagai berikut:</p> <p>a. Estimasi pembangkit energi terbarukan per tahun dalam MWh/ GWh (listrik) dengan uraian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTMH) berlokasi di provinsi Bengkulu dengan perkiraan energi listrik yang dihasilkan per tahun 63.955 Mwh.</li> <li>2) Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) berlokasi di provinsi Bengkulu dengan perkiraan energi listrik yang dihasilkan per tahun 84.519 Mwh.</li> </ol> <p>b. Estimasi emisi Gas Rumah Kaca per tahun yang dikurangi/dihindari dalam ton ekuivalen CO<sub>2</sub> dengan uraian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTMH) berlokasi di provinsi Bengkulu dengan perkiraan pengurangan emisi gas rumah kaca tahunan dari pembangkit listrik 56.920 Ton CO<sub>2</sub>/MWh - eq per tahun.</li> <li>2) Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) berlokasi di provinsi Bengkulu dengan perkiraan pengurangan emisi gas rumah kaca tahunan dari pembangkit listrik 75.222 Ton CO<sub>2</sub>/MWh - eq per tahun.</li> </ol> <p>c. Kapasitas energi terbarukan yang dipasang dalam MW, dengan uraian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTMH) berlokasi di provinsi Bengkulu dengan Instalasi kapasitas terpasang 3 x 3,33 MW.</li> <li>2) Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) berlokasi di provinsi Bengkulu dengan Instalasi kapasitas terpasang 4 x 4 MW.</li> </ol>
6.	Pengelolaan Air dan Air Limbah Berkelanjutan	0.88%	Pembiayaan pada segmen Korporasi dengan akad Musyarakah	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penyaluran pembiayaan pada 2 (dua) perusahaan dengan aktivitas usaha sistem penyediaan air minum.</li> <li>b. Jumlah air yang disalurkan diperkirakan sebesar 13.564 meter kubik/hari atau 157 liter/detik.</li> <li>c. Jumlah rumah yang terlayani atas instalasi penyediaan air minum diperkirakan sebesar 28.210 rumah. Dengan asumsi tersebut maka diperkirakan instalasi dapat memenuhi kebutuhan 84.630 masyarakat.</li> </ol>
7.	Produk yang Dapat Mengurangi Penggunaan Sumber Daya dan Menghasilkan Lebih Sedikit Polusi (Eco-Efficient)	25.47%	Pembiayaan pada segmen Korporasi dengan akad Musyarakah	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penyaluran pembiayaan segmen Korporasi dengan akad Musyarakah bagi nasabah di mana dalam proses usahanya telah memiliki sumber daya dan teknologi untuk menghasilkan lebih sedikit polusi (eco-efficient). Penyaluran pada 2 (dua) nasabah yang masing-masing bergerak pada bidang industri pengolahan kertas di provinsi Sumatera Selatan dan industri pupuk di provinsi Aceh.</li> <li>b. Jenis energi terbarukan yang digunakan oleh nasabah yang bergerak dalam bidang pengelolaan kertas berasal dari Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).</li> <li>c. Estimasi penurunan timbunan limbah berbahaya dari proses operasional pabrik pupuk sebesar 37,65 ton/tahun.</li> <li>d. Estimasi emisi Gas Rumah Kaca per tahun yang dapat dihindari adalah sebanyak 45.149.820.294 tonCO<sub>2</sub> eq yang terdiri dari nasabah yang bergerak dalam bidang pengolahan kertas sebesar 12.541.621 tonCO<sub>2</sub> eq dan nasabah yang bergerak dalam bidang industri pupuk sebesar 19.814 tonCO<sub>2</sub> eq.</li> <li>e. Pada saat ini kedua nasabah belum memiliki bangunan yang memiliki sertifikasi bangunan hijau.</li> </ol>

# Kesimpulan

PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) menyadari pentingnya mengintegrasikan nilai-nilai keberlanjutan ke dalam visi dan misi Bank. Dengan menerapkan nilai-nilai Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola pada kegiatan usaha, BSI bercita-cita berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Sebagai salah satu penggerak keuangan berkelanjutan utama dalam industri keuangan syariah di Indonesia, BSI senantiasa terus berkembang untuk mempromosikan praktik keuangan syariah berkelanjutan, termasuk upaya untuk membantu mencapai perekonomian rendah karbon. Komitmen tersebut ditunjukkan melalui dukungan BSI terhadap nasabah yang bergerak pada bidang sektor padat karbon dengan memberikan solusi keuangan yang mendorong nasabah untuk melakukan

dekarbonisasi dan mengubah operasi nasabah menjadi bisnis yang lebih bertanggung jawab, ramah lingkungan, dan lebih sedikit memiliki jejak karbon.

Sebagai bagian dari komitmen kami untuk berkontribusi lebih banyak terhadap pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan menyediakan pertanggungjawaban atas Sustainability Sukuk yang diterbitkan, BSI akan terus melakukan pemantauan untuk memastikan transparansi penggunaan dana dan kredibilitas laporan tahunan. Terakhir, untuk menjamin kredibilitas Laporan Sustainability Sukuk, BSI menunjuk SDGs Hub Universitas Indonesia untuk memberikan tinjauan eksternal yang independen.

# Lampiran

## Lampiran 1. Key Asumsi Penghitungan

Kategori KUBL/KUBS	Tipe Proyek	Asumsi Data
Energi Terbarukan	Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTMH) dan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)	Perhitungan emisi Gas Rumah Kaca minimum yang dapat dihindari menggunakan asumsi dari sumber yang tersedia untuk umum di bawah ini: a. Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTMH) berlokasi di provinsi Bengkulu dengan Faktor Emisi Kelistrikan ESDM 2019 adalah 0,89 dan jumlah energi yang dihasilkan sebesar 63.955 Mwh sehingga estimasi emisi Gas Rumah Kaca yang dikurangi/dihindari sebesar 56.920 tonCO <sub>2</sub> eq per tahun. b. Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) berlokasi di provinsi Bengkulu faktor emisi Kelistrikan ESDM 2019 adalah 0,89 dan jumlah energi yang dihasilkan sebesar 84.519 Mwh sehingga estimasi emisi Gas Rumah Kaca yang dikurangi/dihindari sebesar 75.222 tonCO <sub>2</sub> eq yang dihindari.
Pengelolaan Air dan Air Limbah Berkelanjutan	Pengelolaan air Minum	Jumlah populasi dengan akses air minum bersih sesuai dengan data jumlah pelanggan yang tercatat di perusahaan.
Produk yang Dapat Mengurangi Penggunaan Sumber Daya dan Menghasilkan Lebih Sedikit Polusi ( <i>Eco-Efficient</i> )	Pengurangan Polusi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pada nasabah yang bergerak dalam bidang Pengolahan Kertas yang beroperasi di provinsi Sumatera Selatan adalah 0,86 dan jumlah energi yang dihasilkan sebesar 52.499.768 gigajoule atau setara dengan 14.583.278 watt-hour, sehingga estimasi jumlah emisi Gas Rumah Kaca yang dikurangi/dihindari sebesar 12.541.621 tonCO<sub>2</sub> eq.</li> <li>Pada nasabah yang bergerak dalam industri pupuk yang beroperasi di provinsi Aceh jenis pupuk yang dihasilkan adalah Pupuk Urea (CH<sub>4</sub>N<sub>2</sub>O) dan NPK. Estimasi jumlah emisi Gas Rumah Kaca diperhitungkan dengan mengurangi jumlah emisi <i>business as usual</i> pada industri sejenis dengan realisasi emisi di pabrik pupuk tersebut (perhitungan tersebut dilakukan oleh Biro Klasifikasi Indonesia).</li> </ul> <p>Hasil perhitungan sebagai berikut:            = 839.651 tonCO<sub>2</sub> eq – 819.837 tonCO<sub>2</sub> eq            = 19.814 tonCO<sub>2</sub> eq.</p>

# Tim Penyusun



**Kemal  
Aditya**



**Aldi  
Rahardhika**



**Windy  
Noermala**



**Noviar  
Yulianti**



**Azelia  
Sarah Yusufa**



**Abdul  
Hamim**



**Ricky  
Chandrawan H**



**Novreyna  
Ludmilla Alda**



**Muh Akram  
Baharuddin**



**Rizky  
Nugraha**



**Saputra  
Aditya**



**Nia Ayu  
Anggraeni**



**Winda Mega  
Permata**



**Erri  
Fitrawan**



**Nanda  
Putra**



**Nana  
Suryana**



**Adriann  
Wiryana**



**Zulkarnain**



**Greget  
Kalla Buana**

# MENUJU AKSI KEBERLANJUTAN YANG UNGGUL



## Kantor Pusat

Gedung The Tower  
Jl. Gatot Subroto No. 27  
Kelurahan Karet Semanggi,  
Kecamatan Setiabudi,  
Jakarta Selatan 12930



## Kontak

BSI Call - 14040  
Telp. 62081584114040  
[contactus@bankbsi.co.id](mailto:contactus@bankbsi.co.id)



Bank Syariah Indonesia



@banksyariahindonesia



Bank Syariah Indonesia



bankbsi\_id